



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

RISALAH

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI GROBOGAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2025**



Disusun oleh :
Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026

2026



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 03 Telp. (0292) 421145 Purwodadi

RISALAH RAPAT

Tahun Sidang : 2026
Masa Persidangan : 1
Rapat Ke- : 8
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2026
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I
Ketua Rapat : Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M.
(Ketua DPRD Kab. Grobogan)
Acara : Penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir
TA. 2025 – Pembentukan Panitia Khusus
III Tahun 2026 (Dilanjutkan Halal Bi Halal
Idul Fitri 1447 H).

Sekretaris Rapat : Drs. Daru Wisakti, M.Si (Sekwan).
Hadir :
A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:
42 dari 50 orang Anggota DPRD
Kab. Grobogan dengan rincian :

Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan
(4 dari 4 orang Pimpinan) :
1. Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M.
2. Ir. H. Mukhlisin, M.M., M.Si.
3. Supardi, S.M.
4. Setiawan Djoko Purwanto, S.H.

Fraksi PDI-Perjuangan
(13 dari 16 orang Anggota) :
5. Agus Siswanto, S.Sos., MAP.
6. Heru Santosa, S.H., M.M.
7. H. Eko Budi Santoso

8. Musapak, S.H.
9. Moch Sutarno, S.H.
10. Rimbawanto, S.H.
11. Rizky Bintang Fauzi, S.T.
12. Tonny Hidayanto
13. Dewi Megawati
14. Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi.
15. Magdalena Selvi
16. Triana Handayani, S.T.
17. Erin Vincia Dora, S.Pd.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(6 dari 7 orang Anggota) :

18. H. Sukanto, S.H., M.H.
19. Hj. Sri Murdiati, S.H.
20. Arief Dwi Agustianto, S.H.
21. Ahmad Habibi, S.Ag.
22. Harnomo, S.H.
23. Suprojo

Fraksi Gerindra

(5 dari 7 orang Anggota) :

24. Mustofa Budi Santosa, S.IP., M.Si.
25. dr. H. Miftahuddin Alif Sugeng, MARS
26. Beni Susanto, S.T.
27. Achmad Taufik, S.IP.
28. Harsono, S.Pd., M.H.

Fraksi Hati Nurani Rakyat

(3 dari 3 orang Anggota) :

29. Sumarli, S.E.
30. Sofiatul Mudhakiroh, S.E.
31. M. Qanniexna BMA, S.H.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(4 dari 4 orang Anggota) :

32. H. Muhamad Misbah, S.Ag., M.Si.
33. Budi Prihdiyono

34. Drs. Sriyanto

35. MA Amin Rois Abdul Ghoni, S.E.

Fraksi Karya Demokrat

(4 dari 5 orang Anggota) :

36. Muhammad Sidiq, A.Md.

37. Drs. Karsono, M.Pd

38. H. Bukhori, S.H.

39. H. Arif Miftakhul Huda

Fraksi Keadilan Nasional

(3 dari 4 orang anggota) :

40. Ahmad Sidik, M.Pd.

41. Ahmad Syarif, S.T.

42. H. Sholikin

Menyanyikan Bersama lagu **“Indonesia Raya”**

I. PEMBUKAAN RAPAT

Ketua Rapat : (Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M. –
Ketua Dewan)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian dan Selamat Pagi, Shallom, Om
Swastiastu, Namo Buddaya, Salam kebajikan, Rahayu.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Grobogan, dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekda Kabupaten
Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati;

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;

Yth. Para Camat se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD se Kabupaten Grobogan;

Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, Saudara
Sekwan, rekan-rekan PERS, pendengar Radio Purwodadi FM di
manapun anda berada, serta.....

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Saat sekarang menunjukkan pukul 10.28 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan – menurut laporan Sdr. Sekwan – dari 50 orang Anggota, 42 orang diantaranya telah membubuhkan tanda tangannya.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinilah kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Kamis, tanggal 26 Maret 2026 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan :

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” (XXX)

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Mengawali Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul kembali, dalam keadaan sehat wal ‘afiat, guna menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-8 untuk Tahun Sidang 2026 Masa Sidang ke-1. Semoga petunjuk dan bimbingan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai perjalanan persidangan kita pada pagi hari ini.

Selanjutnya kami sampaikan juga ucapan terima kasih atas keikutsertaan Saudara sekalian pada Rapat Paripurna dengan acara :

“Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan, sekaligus Pembentukan Pansus III Tahun 2026 “

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum kita memulai agenda persidangan hari ini, dalam suasana Syawal yang masih kental dengan nuansa fitrah, izinkan saya selaku

Ketua DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan mengucapkan :

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.”

Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum.

Roda pemerintahan terus berputar, namun hari ini kita berkumpul dengan semangat yang lebih segar setelah menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan.

Momentum Idul Fitri tahun 2026 ini hendaknya kita jadikan sebagai sarana memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh sinergi antara legislatif dan eksekutif. Mari kita buka lembaran baru dengan hati yang bersih, untuk bersama-sama mencurahkan energi terbaik demi kesejahteraan masyarakat yang kita wakili.

Gema takbir telah berlalu, namun semangat kemenangan harus tetap menderu. Di hari yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak menanggalkan sekat-sekat perbedaan pandangan politik. Mari kita rayakan Idul Fitri 1447 H dengan semangat persatuan. Atas nama lembaga DPRD, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada laku yang tak berkenan dan kata yang menoreh luka dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional. Semoga hari kemenangan ini membawa keberkahan bagi Grobogan kita tercinta.

Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan dalam interaksi kedewanan selama ini.

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya, memasuki materi persidangan hari ini, sebagaimana ketentuan pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian LKPJ akhir Tahun Anggaran 2025, bertujuan untuk mengetahui hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan penyelenggaraan tugas pembantuan Pada Tahun Anggaran 2025. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, meliputi : capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya setelah penyampaian LKPJ oleh Bupati Grobogan, Paling lambat 30 (tiga puluh) hari DPRD harus melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi atas LKPJ tersebut, sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau kebijakan strategis daerah lainnya.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebagaimana surat Bupati Grobogan Nomor : B/100.1.7/I8/2026 tanggal 11 Pebruari 2026 perihal Permohonan penjadwalan penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Maret 2026 serta surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.1.7/123/SETWAN/2026 tanggal 24 Maret 2026 perihal Undangan Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Grobogan, maka pada kesempatan hari ini mulai dilakukan pembahasan atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.

Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan, LKPJ dimaksud akan dibahas secara internal oleh Dewan untuk menghasilkan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan dan atau koreksi sebagai pedoman perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan.

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Untuk memperlancar jalannya Rapat Paripurna perlu kiranya kita susun bersama acara pada hari ini.

Apabila Saudara sependapat, urutan acara kami rencanakan sebagai berikut :

1. Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan;
2. Pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026;
3. Rapat Baru kita tutup.

Ketua rapat : Demikian apakah susunan acara rapat tersebut dapat kita setuju ..??

Rapat : Dapaaat

Ketua Rapat : Terima kasih (**X**)

II. PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR TA. 2025

Langsung saja, untuk mengetahui perjalanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2025, marilah kita ikuti bersama penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 oleh Sdr. Bupati Grobogan.

Untuk itu kepada Sdr. H. Setyohadi kami persilahkan !!

Bupati Grob : -- **Penyampaian LKPJ TA. 2025** --
--- (H. Setyohadi) ---

Ketua Rapat : Kepada Sdr. Bupati kami sampaikan terima kasih atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya.

III. PEMBENTUKAN PANSUS YANG DITUNJUK UNTUK MEMBAHAS LKPJ

Hadirin sidang Dewan yang kami hormati,

Demikian tadi telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan kepada DPRD, selanjutnya kewajiban kita sekalian para Anggota Dewan untuk menyikapinya. Oleh karena itu, Badan Musyawarah telah merekomendasikan Alat Kelengkapan Dewan yang ditunjuk untuk membahas LKPJ tersebut yaitu Panitia Khusus III Tahun 2026.

Namun demikian, karena keputusan tertinggi adalah pada Anggota Dewan Yang Terhormat dalam forum Rapat Paripurna Dewan hari ini, untuk itu kami minta kesepakatannya :

Ketua Rapat : “ Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan, kita serahkan kepada Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kab. Grobogan, Apakah dapat disetujui ...??? ”

Rapat : Dapaaaat!!!!

Ketua Rapat : Terima kasih (**X**)

Selanjutnya untuk menentukan keanggotaan Panitia Khusus tersebut, rapat akan kami skors kurang lebih 10 menit guna memberikan waktu kepada masing-masing fraksi untuk mengadakan rapat intern dalam menentukan nama-nama anggota dari masing-masing fraksi yang akan duduk dalam Panitia Khusus III Tahun 2026 tersebut.

Untuk itu rapat kami nyatakan diskors (**X**)

SUASANA SKORSING : Masing-masing fraksi rapat intern di ruang fraksi masing-masing guna menentukan anggota yang akan duduk dlm Panitia Khusus.

Ketua Rapat : Skors kami cabut dan rapat kami nyatakan dibuka kembali (**X**)

Setelah diadakan rapat intern fraksi, berikut akan kami bacakan nama masing-masing anggota fraksi yang akan duduk di keanggotaan Panitia Khusus III Tahun 2026, sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Sdri. Triana Handayani, S.T. | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 2. Sdr. Rizky Bintang Fauzi, S.T. | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 3. Sdri. Erin Vincia Dora, S.Pd. | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 4. Sdr. Moch Sutarno, S.H. | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 5. Sdr. Heru Santosa, S.H., M.M. | dari Fraksi PDI Perjuangan |
| 6. Sdri. Mansata Indah Maratona, M.S.I. | dari Fraksi PKB |
| 7. Sdr. Ahmad Habibi, S.Ag. | dari Fraksi PKB |
| 8. Sdr. Mustofa Budi S., S.IP., M.Si. | dari Fraksi Gerindra |

9. Sdr. dr. H. Miftahuddin Alif S., MARS dari Fraksi Gerindra
10. Sdr. M. Qanniexna BMA, S.H. dari Fraksi Hanura
11. Sdr. Amin Rois A.G., S.E. dari Fraksi PPP
12. Sdr. H. Bukhori, S.H., dari Fraksi Karya Demokrat
13. Sdr. H. Sholikin dari Fraksi Keadilan Nasional

Dengan terbentuknya keanggotaan Panitia Khusus III Tahun 2026 tersebut, maka selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus yang bersangkutan, untuk itu rapat akan kami skors secukupnya untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus III Tahun 2026.

Untuk itu rapat kami nyatakan diskors (**X**)

***SUASANA SKORSING : Semua Anggota Panitia Khusus mengadakan
rapat intern guna menentukan susunan Pimpinan Panitia
Khusus***

Ketua Rapat : Skors kami cabut dan rapat kami nyatakan dibuka kembali (**X**).

Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Setelah dilakukan rapat intern oleh Anggota Panitia Khusus, didapat susunan Pimpinan Panitia Khusus III Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Sdri. Triana Handayani, S.T. Ketua/Merangkap Anggota
2. Sdri. Mansata Indah M., M.S.I. Wk.Ketua/Merangkap Anggota

Dengan anggota Pansus sebagaimana kami bacakan sebelumnya. Untuk itu, kepada Panitia Khusus III Tahun 2026 kami ucapkan selamat bekerja dan kami minta untuk dapat menggunakan waktu yang terbatas ini secara optimal dalam pembahasannya.

IV. PENUTUP

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan telah terbentuknya Panitia Khusus III Tahun 2026, maka sampai di sini selesailah sudah rangkaian acara dalam Rapat Paripurna hari ini yang berlangsung dengan tertib dan lancar sejak awal hingga akhir.

Untuk itu, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya acara ini, sekaligus kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya.

Sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan setelah ini akan dilanjutkan dengan Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 Hijriah yang akan dipandu oleh protokol.

Akhirnya kami tawarkan apakah sampai disini Rapat dapat DITUTUP ?

R a p a t : Dapaaaaat....!!!

Ketua Rapat : Terima kasih ... (X).

Untuk itu, dengan mengucap syukur Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pukul 11.06 WIB, Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2026, Kamis, 26 Maret 2026, kami nyatakan :

“ DITUTUP “ (XXX)

Sekian, Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

KETUA DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Ketua Rapat,



Hj. LUSIA INDAH ARTANI, S.E., M.M.

SEKRETARIS DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Sekretaris Rapat,



Drs. DARU WISAKTI, M.Si.

NIP. 19690511 199001 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon : (0292) 421145, Faksimile : (0292) 422932,
Laman : <https://dprd.grobogan.go.id>, Pos-el : dprd@grobogan.go.id

Grobogan, 24 Maret 2026

Nomor : 100.1.7/123/SETWAN/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 lembar
Hal : Undangan Rapat
Paripurna ke-8 DPRD
Kabupaten Grobogan

Yth. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara dalam Rapat Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, yang akan diselenggarakan besok pada :

Hari : **KAMIS**
Tanggal : 26 Maret 2026
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan
Acara : Penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir TA. 2025 – Pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026 (dilanjutkan Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 H)
Pakaian : P S H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara, disampaikan terima kasih.



Ketua DPRD Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
2. Arsip.

LAMPIRAN
Undangan Rapat Paripurna ke-8
DPRD Kabupaten Grobogan
Nomor : 100.1.7/123/SETWAN/2026
Tanggal : 24 Maret 2026

DAFTAR UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA KE-8 DPRD KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI GROBOGAN AKHIR TA. 2025 –
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026

NO	UNDANGAN
1.	BUPATI GROBOGAN
2.	WAKIL BUPATI GROBOGAN
3.	KOMANDAN KODIM 0717 GROBOGAN
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI
7.	KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
8.	SEMUA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GROBOGAN
9.	SEKRETARIS DAERAH
10.	SEKRETARIS DPRD
11.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
12.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
13.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
14.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
15.	STAF AHLI BUPATI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN SDM
16.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
17.	KEPALA DINAS KESEHATAN
18.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
19.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN (DISPERAKIM)
20.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
21.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

22.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
23.	KEPALA DINAS SOSIAL (DINSOS)
24.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)
25.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA (DP3AKB)
26.	KEPALA DINAS PANGAN
27.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
28.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)
29.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMASDES)
30.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)
31.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
32.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINKOPUKM)
33.	Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
34.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISPORABUDPAR)
35.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH (DINARPUKDA)
36.	Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN (DISPERTAN)
37.	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISNAKKAN)
38.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG)
39.	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH
40.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
41.	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
42.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
43.	KABAG. PEMERINTAHAN SETDA
44.	KABAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
45.	KABAG. HUKUM SETDA
46.	KABAG. PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA
47.	KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
48.	KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
49.	KABAG. UMUM SETDA
50.	KABAG. ORGANISASI SETDA

51.	KABAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
52.	KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA
53.	CAMAT KEDUNGJATI
54.	CAMAT KARANGRAYUNG
55.	CAMAT PENAWANGAN
56.	CAMAT TOROH
57.	CAMAT GEYER
58.	CAMAT PULOKULON
59.	CAMAT KRADENAN
60.	CAMAT GABUS
61.	CAMAT NGARINGAN
62.	CAMAT WIROSARI
63.	CAMAT TAWANGHARJO
64.	CAMAT GROBOGAN
65.	CAMAT PURWODADI
66.	Plt. CAMAT BRATI
67.	CAMAT KLAMBU
68.	CAMAT GODONG
69.	CAMAT GUBUG
70.	Plt. CAMAT TEGOWANU
71.	CAMAT TANGGUNGHARJO
72.	DIREKTUR PDAM
73.	DIREKTUR BANK JATENG
74.	DIREKTUR BPR BKK
75.	DIREKTUR PURWA ARTHA
76.	DIREKTUR PURWA AKSARA
77.	DIREKTUR JAMKRIDA
78.	PARA TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN GROBOGAN



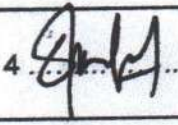
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

Hari : KAMIS
Tanggal : 26 Maret 2026
Pukul : 10.00 WIB
Jenis Rapat : Paripurna
TS / MS : 2026
Acara : Penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir TA. 2025 -
Pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SETYO HADI	BUPATI GROBOGAN	1 
2	H. SUGENG PRASETYO, SE. MM	WK. BUPATI GROBOGAN	2
3		KAPOLRES GROBOGAN	3
4	EKA TRAYU S	DANDIM 0717	4 
5		KA. KEJAKSAAN NEGERI	5
6		KA. PENGADILAN NEGERI	6
7		KA. PENGADILAN AGAMA	7

Purwodadi, 26 MARET 2026

KETUA RAPAT.


(.....)

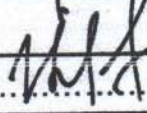
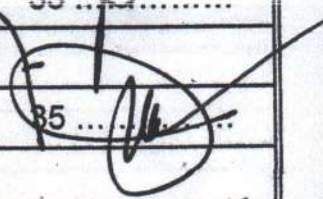
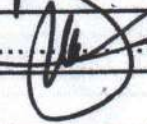
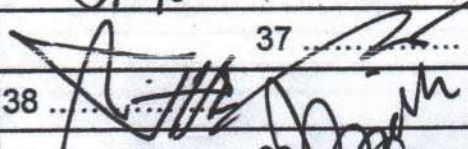
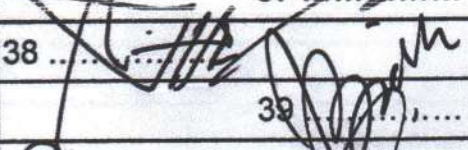
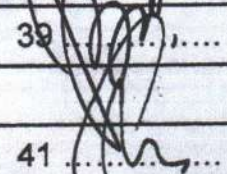
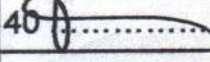
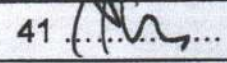
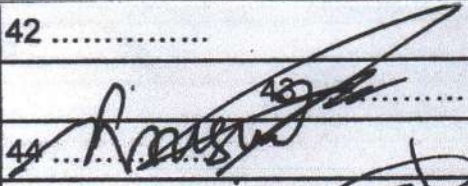
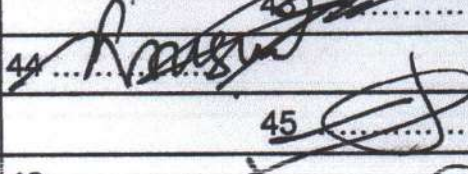
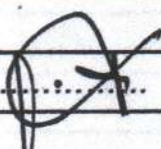


PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
ANGGOTA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Hari : KAMIS
Tanggal : 26 Maret 2026
Pukul : 10.00 WIB
Jenis rapat : Paripurna
TS / MS : 2026
Acara : Penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir TA. 2025 -
Pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		3	4
1	Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE. MM	KETUA	1.....
2	Ir. H. MUKHLISIN, M.M., M.Si.	WAKIL KETUA	2.....
3	SUPARDI, S.M	WAKIL KETUA	3.....
4	SETIAWAN DJOKO P. S.H.	WAKIL KETUA	4.....
5	AGUS SISWANTO, S.Sos.,MAP	ANGGOTA	5.....
6	HERU SANTOSA, SH. MM	ANGGOTA	6.....
7	H. EKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	7.....
8	MUSAPAK, SH	ANGGOTA	8.....
9	MOCH SUTARNO, S.H	ANGGOTA	9.....
10	GUNAWAN	ANGGOTA	10.....
11	RIO ARDIAN	ANGGOTA	11.....
12	SUBANDRIYO	ANGGOTA	12.....
13	RIMBAWANTO, SH	ANGGOTA	13.....
14	RIZKY BINTANG FAUZI, ST	ANGGOTA	14.....
15	TONNY HIDAYANTO	ANGGOTA	15.....
16	DEWI MEGAWATI	ANGGOTA	16.....
17	NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi.	ANGGOTA	17.....
18	MAGDALENA SELVI	ANGGOTA	18.....
19	TRIANA HANDAYANI, S.T.	ANGGOTA	19.....
20	ERIN VINCIA DORA, S.Pd.	ANGGOTA	20.....

2	3	4
21 H. SUKANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA	21 
22 Hj. SRI MURDIATI, SH	ANGGOTA	22 
23 ARIEF DWI AGUSTIANTO, S.H.	ANGGOTA	23 
24 AHMAD HABIBI, S.Ag.	ANGGOTA	24 
25 HARNOMO, S.H	ANGGOTA	25 
26 SUPROJO	ANGGOTA	26 
27 MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	ANGGOTA	27
28 Ir. KARIYOSO	ANGGOTA	28
29 MUSTOFA BUDI S. S.IP, M.Si	ANGGOTA	29 
30 dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF S. MARS	ANGGOTA	30 
31 FARIDA RISTIANI, S.H.	ANGGOTA	31
32 BENI SUSANTO, S.T	ANGGOTA	32 
33 ACHMAD TAUFIK, S.IP.	ANGGOTA	33 
34 HARSONO, S.Pd. M.H	ANGGOTA	34 
35 SUMARLI, S.E.	ANGGOTA	35 
36 SOFIATUL MUDHAKIROH, S.E.	ANGGOTA	36 
37 M. QANNIEXNA B.M.A, S.H.	ANGGOTA	37 
38 H. MUHAMAD MISBAH, S.Ag., M.Si.	ANGGOTA	38 
39 BUDI PRIHDIYONO	ANGGOTA	39 
40 Drs. H. SRIYANTO	ANGGOTA	40 
41 MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, S.E.	ANGGOTA	41 
42 drh. WAHONO ENDRO P	ANGGOTA	42
43 MUHAMMAD SIDIQ, A. Md	ANGGOTA	43 
44 Drs. KARSONO. M. Pd	ANGGOTA	44 
45 AHMAD SIDIQ, M. Pd	ANGGOTA	45 
46 SURANTO, S. Pd, M.Psi	ANGGOTA	46
47 AHMAD SYARIF, ST	ANGGOTA	47 
48 H. BUKHORI, SH	ANGGOTA	48 
49 H. ARIF MIFTAKHUL HUDA	ANGGOTA	49 
50 H. SHOLIKIN	ANGGOTA	50 

Purwodadi, 26 MARET 2026
KETUA RAPAT



(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR

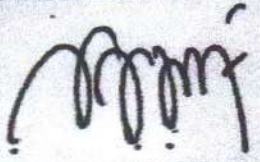
Hari : KAMIS
Tanggal : 26 Maret 2026
Pukul : 10.00 WIB
Jenis rapat : Paripurna
TS / MS : 2026
Acara : Penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir TA. 2025 - Pembentukan
Panitia Khusus III Tahun 2026

NO	NAMA	SKPD	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ANANG A	SEKDA KAB. GROBOGAN	1
2	KURNIA SANNIA	ASS. PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA	2
3	Yen Wi C	ASS. PEREKON. PEMBANGUNAN SEKDA	3
4	CANUR S.	ASS. ADMINISTRASI UMUM SEKDA	4
5		SA. BUP. BID. PEM. HUKUM DAN POLITIK	5
6		SA. BUP. BID. SOS. KEMASY DAN SDM.	6
7	M. Kromat	SA. BUP. BID. PEMB. EKO. DAN KU.	7
8	M. Muha'im	KABAG PEMERINTAHAN SEKDA	8
9	Rio Dya P	KABAG. HUKUM SEKDA	9
10	ABUS D	KABAG. PROTOKOL DAN KOM. PIMPINAN	10
11	ABUS BUDI K	KABAG. PEREKONOMIAN DAN SDM	11
12	Bydi Setiawan	KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12
13	Ali anwar	KABAG. KESRA SEKDA	13
14	Muhyidin	KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	14
15	Sulha Rifah	KABAG. UMUM SEKDA	15
16	Um Indu. N	KABAG. ORGANISASI SEKDA	16
17	Turana	KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	17
18	Kusnandar	INSPEKTORAT	18
19		BAPPEDA	19
20	Suwardi	BPPKAD	20
21	Pachma S.	BKPPD	21
22	Um...	BAKESBANGPOL	22
23	M. Wiharti	BPBD	23
24	E. Projo D.S	DINAS PENDIDIKAN	24
25	Wahono	DINAS. PEM. OR. KEBUD. DAN PRWSTA	25

Indriyati	DINAS SOSIAL	26	
Indriyati	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS.	27	
Indriyati	DINAS PERHUBUNGAN	28	
Indriyati	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	
Indriyati	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	30	
Indriyati	DINAS KOPERASI, UKM	31	
Indriyati	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAG.	32	
Indriyati	DINAS PERTANIAN	33	
Indriyati	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	34	
Indriyati	DINAS PERUM. RKYT DAN KAW. PEMUK.	35	
Indriyati	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	36	
Indriyati	DINAS KESEHATAN	37	
Indriyati	DINAS KETAHANAN PANGAN	38	
Indriyati	DINAS PEMBERDY. MASY. DAN DESA	39	
Indriyati	DINAS PEMBERDY. PEREM. PA. DAN KB.	40	
Indriyati	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41	
Indriyati	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSDA	42	
Indriyati	DIN. PENANAMN MOD. & PEL. SATU PINTU	43	
Indriyati	SATPOL PP	44	
Indriyati	DIREKTUR JAMKRIDA JATENG	45	
Indriyati	DIREKTUR PURWA ARTHA	46	
Indriyati	DIREKTUR PURWA AKSARA	47	
Indriyati	DIREKTUR PDAM	48	
Indriyati	DIREKTUR BKK	49	
Indriyati	DIREKTUR BANK JATENG	50	
Indriyati	Dir. RSUD	51	
Indriyati	KECAMATAN PURWODADI	52	
Indriyati	KECAMATAN TOROH	53	
Indriyati	KECAMATAN GEYER	54	
Indriyati	KECAMATAN GROBOGAN	55	
Indriyati	KECAMATAN BRATI	56	
Indriyati	KECAMATAN KLAMBU	57	
Indriyati	KECAMATAN WIROSARI	58	
Indriyati	KECAMATAN TAWANGHARJO	59	
Indriyati	KECAMATAN NGARINGAN	60	
Indriyati	KECAMATAN PULOKULON	61	
Indriyati	KECAMATAN KRADENAN	62	
Indriyati	KECAMATAN GABUS	63	
Indriyati	KECAMATAN KARANGRAYUNG	64	

Wswk 151	KECAMATAN PENAWANGAN	66
Bender 5	KECAMATAN GUBUG	67
AR: Nurchar	KECAMATAN TEGOWANU	68
Kuspryati	KECAMATAN KEDUNGJATI	69
As. L.H.	KECAMATAN TANGGUNGHARJO	70
Andi S	Proboling	71
Fikra	Sekeloa	72
Bondan	Sekeloa	73
Adi		74
Yuni purosanti	Humas	75
Syafalawati M.	Humas	76
Padri Noviana.	Humas	77
M. Jalmik	TA Keadilan Wapran	78
Hadi Purnomo	TA F. Karyo Demolrad	79
Ferry S	Humas	80
Riski	- " -	81
Astori	Satpol PP	82
M. Kurniati	- " -	83
Brach	Wapran	84
Fitri	Humas	85
M. Nur Aji	BRDP	86
Kerri	Humas	87
Faizal	Sekeloa	88
Siti Nur A	Sekeloa	89
Bima	PKD	90
Juliano	- " -	91
Yum	- " -	92
Ulin	- " -	93
M. Irfan	Disdik	94
		95

Purwodadi, 26 MARET 2020
KETUA RAPAT.

()



BUPATI GROBOGAN

**PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI GROBOGAN**

KEPADA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

- ❖ Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
- ❖ Yang Saya Hormati Wakil Bupati Grobogan;
- ❖ Yang Saya Hormati Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi atau yang Mewakili;
- ❖ Yang Saya Hormati Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Eksekutif, Ketua dan Sekretaris KPUD, Para Direktur BUMD, Rekan-Rekan Pers, Hadirin, serta warga masyarakat pendengar Radio Purwodadi FM dimanapun Saudara berada.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD yang saya hormati,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk dapat hadir pada acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025. Shalawat serta Salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang selalu menjadi suri tauladan yang sempurna bagi segenap umatnya hingga akhir zaman.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang Saya Hormati,

Saat ini kita masih berada di Bulan Syawal, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya beserta Wakil Bupati Grobogan atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Grobogan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada segenap kaum Muslimin dan Muslimat warga Masyarakat Kabupaten Grobogan. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga Idul Fitri tahun ini dapat meningkatkan semangat kita untuk bersama-sama membangun Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang Saya Hormati,

LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan saya menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara makro sebagai informasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2025.

Secara khusus, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan atas dukungan dan kerjasamanya terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Demikian pula saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua *stakeholder* yang telah

memberikan dukungan dan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan keberhasilan berbagai agenda pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Visi Kabupaten Grobogan Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang Saya Hormati,

Mengawali penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025 ini, berikut penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

- 1. Pendapatan Daerah**, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar **Rp3.005.749.682.541,00**

(tiga triliun, lima miliar, tujuh ratus empat puluh sembilan juta, enam ratus delapan puluh dua ribu, lima ratus empat puluh satu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar **Rp3.058.608.240.105,00 (tiga triliun, lima puluh delapan miliar, enam ratus delapan juta, dua ratus empat puluh ribu, seratus lima rupiah) atau tercapai sebesar **101,75%** (seratus satu koma tujuh lima persen).**

- 2. Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung. Belanja Daerah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp3.116.483.113.255,00** (tiga triliun, seratus enam belas miliar, empat ratus delapan puluh tiga juta, seratus tiga belas ribu, dua ratus lima puluh lima rupiah) dan direalisasikan sebesar **Rp2.976.476.442.558,00** (dua triliun, sembilan ratus tujuh puluh enam miliar,**

empat ratus tujuh puluh enam juta, empat ratus empat puluh dua ribu, lima ratus lima puluh delapan rupiah) atau mencapai 95,50% (sembilan puluh lima koma lima nol persen).

- 3. Pembiayaan Daerah,** terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan Pembiayaan Neto sebesar **Rp110.669.287.899,00 (seratus sepuluh miliar, enam ratus enam puluh sembilan juta, dua ratus delapan puluh tujuh ribu, delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau mencapai 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari target sebesar Rp110.733.430.714,00. (seratus sepuluh miliar, tujuh ratus tiga puluh tiga juta, empat ratus tiga puluh ribu, tujuh ratus empat belas rupiah).**

Pimpinan dan Anggota DPRD yang Saya Hormati,

Dalam **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**, selama Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan, dengan anggaran sebesar **Rp3.116.483.113.255,00 (tiga triliun, seratus enam belas miliar, empat ratus delapan puluh tiga juta, seratus tiga belas ribu, dua ratus lima puluh lima rupiah)** terealisasi sebesar **95,50% (sembilan puluh lima koma lima nol persen)**.

Secara keseluruhan, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama Tahun 2025, meliputi program, kegiatan dan realisasinya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap

LKPJ Bupati Grobogan tahun sebelumnya, tertuang dalam buku II LKPJ.

Selanjutnya dalam **Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan total anggaran sebesar **Rp25.725.680.000,00 (dua puluh lima miliar, tujuh ratus dua puluh lima juta, enam ratus delapan puluh ribu rupiah)** terserap sebesar **90% (sembilan puluh persen)**. Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Seluruh program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan berupa Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan Alat Mesin Pertanian, dan Fasilitas Pupuk dan Pestisida.

**Bapak/Ibu Peserta Sidang Paripurna DPRD
yang Saya Hormati,**

Berbagai penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu saya sampaikan kepada kita semua sebagai bentuk syukur, bahwa selama Tahun 2025 kita telah berhasil meraih prestasi dan penghargaan, baik tingkat Nasional maupun Regional Jawa Tengah, diantaranya:

1. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari BPK RI;

2. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2025;
3. Penghargaan Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan Kategori Baik dari Badan Pangan Nasional;
4. Penghargaan Ketahanan Pangan, telah mencapai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Klasifikasi Baik dan di atas skor PPH Nasional Tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional;
5. Penghargaan Madya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. Penghargaan Anubhawa Sasana Jagadhita atas pengembangan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tematik yang Mendukung Kemudahan Berusaha, Perluasan Lapangan Kerja, dan Sektor Pariwisata dari Kementerian Hukum.
8. Penghargaan Keberhasilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Warga Melalui Metode Non-litigasi (musyawarah) serta Menjaga Harmoni Sosial dari Kementerian Hukum.
9. Penghargaan 10 (sepuluh) Besar Tingkat Nasional Peluang Investasi Daerah Tahun 2025 (Proyek Pengolahan Sampah Menjadi RDF) dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Kategori "Sangat Inovatif" dengan skor 74,76 dari Kementerian Dalam Negeri.

11. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2025 diberikan kepada SMA Negeri 1 Kradenan, SMA Negeri 1 Pulokulon, SMP Negeri 2 Pulokulon, MTS Negeri 2 Grobogan, SMP Negeri 2 Toroh dan SMP Negeri 3 Purwodadi atas Komitmen Sekolah Dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang Peduli, Berbudaya, dan Sadar Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
12. Bhumandala Award Kanaka Penghargaan Tertinggi dari Badan Informasi Geospasial yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial.
13. Penghargaan Anugerah Pertanian Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Kabupaten dengan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terbaik;

14. Penghargaan Terbaik Ke 2 (dua) Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Tingkat Provinsi dengan Indeks 75,64.
15. Penghargaan dengan Pelaporan Terbaik ke 5 (lima) Tahun 2025 sebagai Pusat Pengendalian Operasional Penanganan Bencana (PUSDALOPS BP) Tingkat Provinsi.

Serta beberapa penghargaan lainnya baik pada tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Semua penghargaan yang saya sebutkan di atas hanya akan dapat terwujud melalui kerja ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh. Sehingga patutlah saya sebutkan bahwa, semua ini adalah penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Grobogan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang Saya Hormati,

Demikian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025 ini saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan peran sertanya dalam membangun Kabupaten Grobogan. Semoga seluruh upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi amal ibadah dan diridhoi oleh Allah SWT.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwodadi, 26 Maret 2026.

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

LKPJ 2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GROBOGAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dengan tepat waktu. Sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan LKPJ menggunakan format dan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Oleh karenanya, format, sistematika, serta substansi penyusunan LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

Melalui LKPJ Bupati Grobogan Tahun Anggaran 2025, diharapkan DPRD Kabupaten Grobogan dapat memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Bupati Grobogan pada Tahun Anggaran 2025, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan strategis tahun selanjutnya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Selain itu LKPJ Bupati Grobogan Tahun Anggaran 2025, juga dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur keberhasilan kinerja Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa ruang

lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiamaju, sp urusan termasuk tndak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024. Kami menyadari bahwa meskipun telah banyak target kinerja yang tercapai, namun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Grobogan Tahun 2025 sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Bupati Grobogan Tahun 2025, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju Kabupaten Grobogan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwodadi, 26 Maret 2026
BUPATI GROBOGAN


SETYO HADI

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. DASAR HUKUM.....	I-1
B. VISI DAN MISI.....	I-2
1. Visi.....	I-3
2. Misi.....	I-5
C. DATA UMUM DAERAH.....	I-10
1. Data Geografis Wilayah.....	I-10
a. Letak Geografis.....	I-10
b. Luas Wilayah.....	I-11
2. Jumlah Penduduk	I-11
a. Jumlah Penduduk dan Sex Rasio.....	I-12
b. Kepadatan Penduduk.....	I-13
c. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk.....	I-13
3. Pertumbuhan Penduduk.....	I-14
4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).....	I-15
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	I-18
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I-18
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	I-19
BAB II PENJABARAN APBD	II-1
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	II-1
1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	II-1
2. Target dan Realisasi Pendapatan.....	II-6
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	II-9
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	II-9
2. Target dan Realisasi Belanja.....	II-18
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	II-22
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III-1
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	III-2
1. Pendidikan.....	III-2
1.1 Dinas Pendidikan.....	III-2
2. Kesehatan.....	III-11
2.1 RSUD dr. R. Soedjati.....	III-11
2.2 Dinas Kesehatan.....	III-12
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-25
3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-25
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	III-33
4.1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	III-33
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-40
5.1 Satpol PP.....	III-40
5.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	III-45
5.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	III-52
6. Sosial.....	III-57

6.1 Dinas Sosial.....	III-57
B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	III-65
1. Tenaga Kerja.....	III-65
1.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	III-65
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-72
2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB.....	III-72
3. Pangan.....	III-80
3.1 Dinas Ketahanan Pangan Daerah.....	III-80
4. Pertanahan.....	III-87
5. Lingkungan Hidup.....	III-88
5.1 Dinas Lingkungan Hidup.....	III-88
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	III-97
6.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	III-97
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III-101
7.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III-101
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III-108
8.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB.....	III-108
9. Perhubungan.....	III-116
9.1 Dinas Perhubungan.....	III-116
10. Komunikasi dan Informatika.....	III-121
10.1 Dinas Komunikasi dan Informatika.....	III-121
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III-126
11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III-126
12. Penanaman Modal.....	III-133
12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	III-133
13. Kepemudaan dan Olah Raga.....	III-139
13.1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	III-139
14. Statistik.....	III-146
14.1 Dinas Komunikasi dan Informatika.....	III-146
15. Persandian.....	III-147
15.1 Dinas Komunikasi dan Informatika.....	III-147
16. Kebudayaan.....	III-149
16.1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	III-149
17. Perpustakaan.....	III-151
17.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.....	III-151
18. Kearsipan.....	III-157
18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.....	III-157
C. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.....	III-161
1. Kelautan dan Perikanan.....	III-161
1.1 Dinas Peternakan dan Perikanan.....	III-161
2. Pariwisata.....	III-163
2.1 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	III-163
3. Pertanian.....	III-165
3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan.....	III-165
3.2 Dinas Pertanian.....	III-174
4. Perindustrian.....	III-184
4.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	III-184
5. Perdagangan.....	III-189
5.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	III-189
6. Transmigrasi.....	III-192

6.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	III-192
D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	III-194
1. Perencanaan.....	III-194
1.1 BAPPERIDA.....	III-194
2. Keuangan.....	III-208
2.1 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.....	III-208
3. Kepegawaian.....	III-222
3.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.....	III-222
4. Pengawasan.....	III-230
4.1 Inspektorat.....	III-230
5. Administrasi Pemerintahan.....	III-237
5.1 Sekretariat Daerah.....	III-237
5.1.a Bagian Pemerintahan Setda.....	III-237
5.1.b Bagian Hukum Setda.....	III-238
5.1.c Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.....	III-239
5.1.d Bagian Perekonomian dan SDA Setda.....	III-239
5.1.e Bagian Administrasi Pembangunan Setda.....	III-241
5.1.f Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.....	III-241
5.1.g Bagian Umum Setda.....	III-243
5.1.h Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda.....	III-247
5.1.i Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda.....	III-249
5.1.j Bagian Organisasi Setda.....	III-250
5.2 Sekretariat DPRD.....	III-251
5.3 Kecamatan.....	III-262
5.3.a Kecamatan Purwodadi.....	III-262
5.3.b Kecamatan Toroh.....	III-273
5.3.c Kecamatan Geyer.....	III-281
5.3.d Kecamatan Grobogan.....	III-288
5.3.e Kecamatan Brati.....	III-295
5.3.f Kecamatan Klambu.....	III-301
5.3.g Kecamatan Tawangharjo.....	III-307
5.3.h Kecamatan Wirosari.....	III-313
5.3.i Kecamatan Ngaringan.....	III-319
5.3.j Kecamatan Pulokulon.....	III-327
5.3.k Kecamatan Kradenan.....	III-333
5.3.l Kecamatan Gabus.....	III-340
5.3.m Kecamatan Penawangan.....	III-346
5.3.n Kecamatan Godong.....	III-352
5.3.o Kecamatan Karangrayung.....	III-361
5.3.p Kecamatan Gubug.....	III-368
5.3.q Kecamatan Kedungjati.....	III-376
5.3.r Kecamatan Tanggungharjo.....	III-382
5.3.s Kecamatan Tegowanu.....	III-390
E. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	III-399
1. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-399
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III-399
3. Perhubungan.....	III-401
4. Kepegawaian.....	III-403
5. Perpustakaan dan Arsip.....	III-406
6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	III-407

7. Komunikasi dan Informatika.....	III-412
8. Kelautan dan Perikanan.....	III-413
9. Pertanian.....	III-416
F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Bupati Grobogan.....	III-422
1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	III-422
a. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-422
b. Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-431
c. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	III-434
2. Pendidikan.....	III-437
3. Kesehatan.....	III-441
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-445
5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	III-445
6. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-449
7. Sosial.....	III-454
8. Tenaga Kerja.....	III-461
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-467
10. Pangan.....	III-470
11. Pertanahan.....	III-470
12. Lingkungan Hidup.....	III-474
13. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	III-479
14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III-481
15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III-484
16. Perhubungan.....	III-486
17. Komunikasi dan Informatika.....	III-494
18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III-497
19. Penanaman Modal.....	III-500
20. Kepemudaan dan Olahraga.....	III-500
21. Statistik.....	III-504
22. Persandian.....	III-509
23. Kebudayaan.....	III-509
24. Perpustakaan.....	III-511
25. Kearsipan.....	III-514
26. Kelautan dan Perikanan.....	III-518
27. Pariwisata.....	III-518
28. Pertanian.....	III-520
29. Perdagangan.....	III-523
30. Perindustrian.....	III-524
31. Transmigrasi.....	III-526
32. Fungsi Penunjang Perencanaan.....	III-528
33. Fungsi Penunjang Keuangan.....	III-529
34. Fungsi Penunjang Kepegawaian.....	III-533
35. Fungsi Penunjang Pengawasan.....	III-534
36. Fungsi Pendukung Administrasi Pemerintahan.....	III-535
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV-1
A. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUANKAN.....	IV-1
1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat.....	IV-1
2. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Provinsi.....	IV-9
B. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	

PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	IV-12
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Keterkaitan Visi RPJMD 2025-2029 dengan Visi RPJPD 2025 2045.....	I-4
Tabel I.2 Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045.....	I-6
Tabel I.3 Tabel I.3 Keterkaitan Misi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025- 2029.....	I-7 I-8
Tabel I.4 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah.....	I-11
Tabel I.5 Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Per Kecamatan Tahun 2025...	I-12
Tabel I.6 Kepadatan Penduduk Tahun 2025.....	I-13
Tabel I.7 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	I-14
Tabel I.8 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 – 2025.....	I-14
Tabel I.9 Jumlah ASN Pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	I-15
Tabel I.10 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2025.....	I-18
Tabel I.11 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025..	I-18
Tabel I.12 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	I-19
Tabel I.13 Realisasi Surplus/Defisit Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	I-20
Tabel II.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.....	II-7
Tabel II.2 Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.....	II-19 II-22
Tabel II.3 Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025	II-22
Tabel IV.1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2025.....	IV-1
Tabel IV.2 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025.....	IV-8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Grobogan.....	I-10
Gambar 2.2 Komposisi ASN Tahun 2025.....	I-15
Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	I-18
Gambar II.2 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	II-8
Gambar II.3 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025.....	II-9
Gambar II.4 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2025.....	II-20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa dasar hukum yang disampaikan dalam Pendahuluan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah dasar hukum yang berkaitan dengan pembentukan daerah.

Dasar hukum yang berkaitan dengan pembentukan serta batas wilayah Kabupaten Grobogan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Grobogan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Hari Jadi Kabupaten Grobogan.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa Jabatan 2025-2029 yaitu **“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Adapun penjelasan dari masing-masing kata pembentuk visi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Maju.

Maju sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti berjalan (bergerak) ke depan atau menjadi lebih baik. Maju dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dimaknai sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang cukup tinggi di kancah regional, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, dan inovatif dalam pelayanan pembangunan daerah. dan penanganan permasalahan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan peningkatan produktivitas aktivitas ekonomi masyarakat yang ditandai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita. Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didukung pertumbuhan sektor-sektor utama penunjang perekonomian daerah, dan dari sisi pengeluaran terutama didukung peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan konsumsi masyarakat. Ekonomi yang berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah,

ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Daya saing ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian daerah. Modern dimaknai sebagai daerah dengan tingkat peradaban yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, dan memiliki infrastruktur yang didukung dengan teknologi terbaru. Inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Implementasi modern yaitu masyarakat memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Inovatif mengarahkan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Implementasi inovatif akan mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar regional, nasional maupun internasional.

2. **Sejahtera**

Sejahtera sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sejahtera dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat tersebut mencakup pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Masyarakat diharapkan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sejahtera juga ditunjukkan dengan semakin meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat, meratanya pendapatan masyarakat, dan masyarakat merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu masyarakat yang sejahtera juga ditunjukkan dengan masyarakat yang berbudaya yaitu masyarakat yang memiliki karakter, kearifan lokal sebagai warisan leluhur masyarakat Jawa yang adiluhung berupa etika, moral dan berbudi luhur ke dalam pola pikir dan perilaku masyarakat.

3. **Berkelanjutan**

Berkelanjutan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Berkelanjutan dalam

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Implementasi berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup termasuk tangguh bencana, sosial, serta ekonomi ke dalam strategi pembangunan, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Keberlanjutan juga merupakan bentuk semangat dan komitmen dalam melanjutkan upaya pembangunan RPJMD periode sebelumnya, dengan terus meningkatkan hasil pembangunan yang sudah baik, memperbaiki serta menyempurnakan yang belum optimal, serta melaksanakan upaya pembaruan, dalam menangani permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian visi jangka Panjang Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan telah selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Grobogan. Keselarasan tersebut khususnya terletak pada unsur visi Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 diharapkan akan mampu mendorong pencapaian cita-cita pembangunan jangka panjang Kabupaten Grobogan tahun 2025-2045.

Tabel 1.1
Keterkaitan Visi RPJMD 2025-2029
dengan Visi RPJPD 2025 2045

Visi RPJMD: Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Visi RPJPD: Grobogan Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan
Maju	Maju
Sejahtera	Sejahtera
	Berbudaya
Berkelanjutan	Berkelanjutan

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan 2025-2029

Visi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 juga mendukung pencapaian visi RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Unsur visi yang sama yaitu Maju.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut

1. Memperkuat pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.

Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai meningkatkan kualitas investasi (penanaman klaster-klaster modal), industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Grobogan. Melalui misi ini kemiskinan

di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat menurun secara bertahap dengan berbagai strategi yang mengarah pada pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan penyediaan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan dan hunian yang layak; peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil dan koperasi, dan penyediaan akses pekerjaan yang layak; serta perlindungan sosial bagi penduduk miskin.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, kuantitas dan kualitas penduduk yang terkendali, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk SDM yang sehat, cerdas, terampil, berbudaya, dan mampu berdaya saing di era global.

4. Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi akan menjadi payung dalam upaya meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Pengembangan wilayah akan diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas baik, baik jalan, sarana permukiman, sanitasi, air bersih, maupun sarana perhubungan. Pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah juga dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan, sehingga risiko bencana semakin menurun.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.

Misi ini menjadi payung dalam upaya pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi yang didukung peningkatan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara, dan peningkatan transparansi melalui penggunaan teknologi informatika.

Tabel 1.2
Keterkaitan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan
RPJPD Tahun 2025-2045

NO MISI	MISI RPJM	NO MISI	MISI RPJPD
1	Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan	2	Transformasi Ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inovatif, Produktif, Integratif, Inklusif dan Berkelanjutan
2	Mengurangi kemiskinan dan pengangguran		
3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	1	Transformasi Sosial guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkesetaraan Gender
		5	Memperkuat Ketahanan Budaya dan Kondusifitas Wilayah Guna Mewujudkan Kebudayaan Maju dan Keamanan Daerah yang Tangguh
4	Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas	4	Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi	3	Transformasi Tata Kelola Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas, Adaptif, Modern, Kolaboratif, dan Berkesinambungan.

Tabel 1.3

**Keterkaitan Misi RPJMD dengan
RPJMN Tahun 2025-2029**

NO MISI	MISI RPJMD	NO MISI	Misi RPJMN (Asta Cita)
1	Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
		5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2	Mengurangi kemiskinan dan pengangguran	6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan muda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

NO MISI	MISI RPJMD	NO MISI	Misi RPJMN (Asta Cita)
		8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4	Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas	3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi	1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
		7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

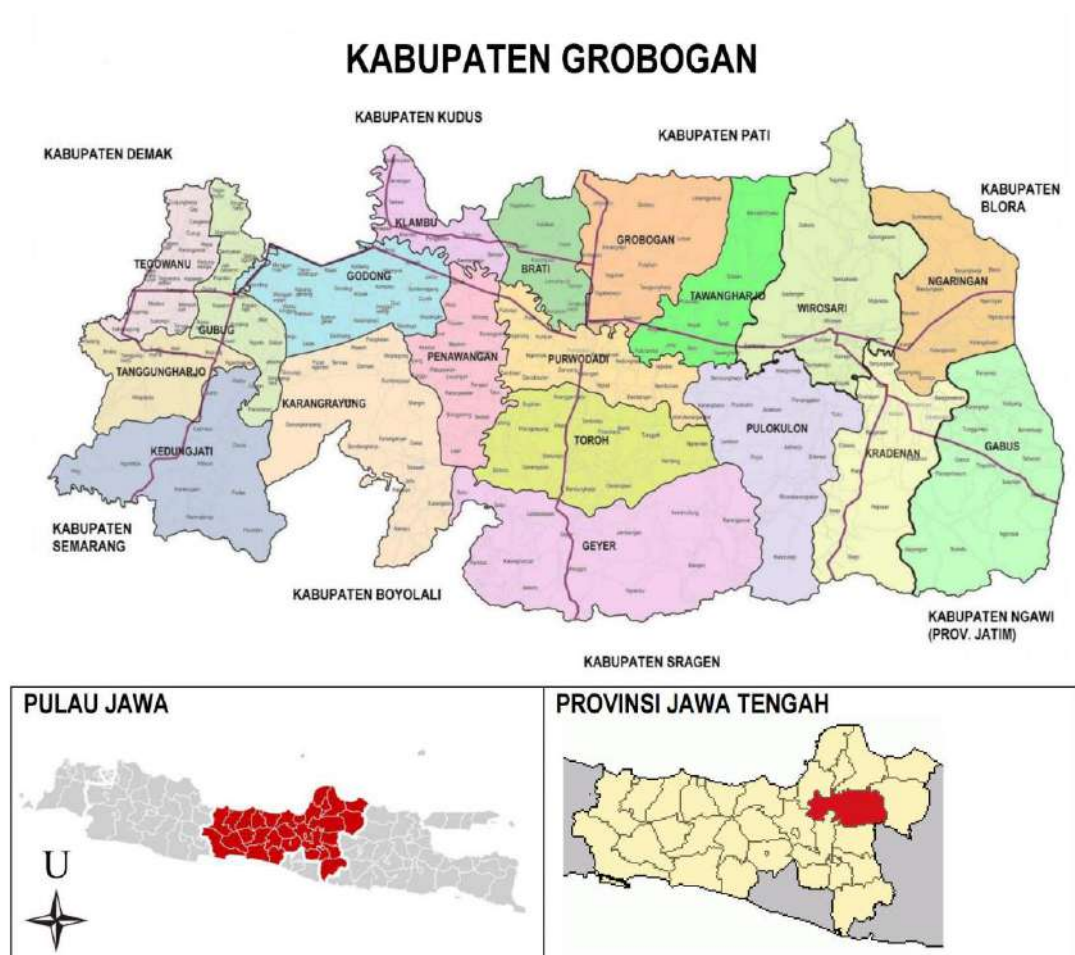
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan 2025-2029

1.3. DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

a. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Grobogan berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah: Sebelah Barat dengan Kabupaten Semarang dan Demak; Sebelah Utara dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora; Sebelah Timur dengan Kabupaten Blora; Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar I.1
Peta Wilayah Kabupaten Grobogan

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Grobogan kurang lebih 2.023,849 Km². Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan, sebagaimana dalam Tabel I.4 berikut:

Tabel I.4
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS WILAYAH

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH DUSUN/ LINGKUNGAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	KEDUNGJATI	12	62	145,288
2	KARANGRAYUNG	19	99	144,272
3	PENAWANGAN	20	74	75,230
4	TOROH	16	120	126,716
5	GEYER	13	102	205,141
6	PULOKULON	13	115	136,948
7	KRADENAN	14	77	111,663
8	GABUS	14	93	163,930
9	NGARINGAN	12	86	119,154
10	WIROSARI	14	93	151,026
11	TAWANGHARJO	10	59	93,066
12	GROBOGAN	12	52	101,490
13	PURWODADI	17	108	78,177
14	BRATI	9	53	56,561
15	KLAMBU	9	45	52,349
16	GODONG	28	87	92,934
17	GUBUG	21	57	65,518
18	TEGOWANU	18	50	54,260
19	TANGGUNGHARJO	9	31	50,126
JUMLAH		280	1.463	2.023,849

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

2. Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 1.525.214 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 767.149 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 758.065 jiwa, sehingga sex ratio penduduk sebesar 101,20%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101,20 jiwa penduduk laki-laki.

Rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan Tahun 2025, terlihat pada tabel I.5 berikut:

Tabel I.5
JUMLAH PENDUDUK DAN SEX RASIO
PER KECAMATAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN		
1	KEDUNGJATI	22 839	22 776	45 615	100,28
2	KARANGRAYUNG	53 670	52 525	106 195	102,18
3	PENAWANGAN	34 353	33 771	68 124	101,72
4	TOROH	60 840	60 923	121 763	99,86
5	GEYER	34 400	34 179	68 579	100,65
6	PULOKULON	57 799	56 786	114 585	101,78
7	KRADENAN	43 575	43 149	86 724	100,99
8	GABUS	38 393	38 059	76 452	100,88
9	NGARINGAN	36 783	35 632	72 415	103,23
10	WIROSARI	49 215	48 579	97 794	101,31
11	TAWANGHARJO	31 062	30 202	61 264	102,85
12	GROBOGAN	41 730	40 869	82 599	102,11
13	PURWODADI	72 266	72 568	144 834	99,58
14	BRATI	26 905	26 304	53 209	102,28
15	KLAMBU	20 326	19 915	40 241	102,06
16	GODONG	45 390	45 061	90 451	100,73
17	GUBUG	44 583	44 307	88 890	100,62
18	TEGOWANU	30 652	30 371	61 023	100,93
19	TANGGUNGHARJO	22 368	22 089	44 457	101,26
JUMLAH		767 149	758 065	1 525 214	101,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan.

a. **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025 tercatat sebesar 753,62 jiwa/km², dengan wilayah terpadat di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.852,63 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 313,96 jiwa/km².

Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 144.834 jiwa, sedangkan wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 40,241 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat dalam Tabel I.6 di bawah ini :

Tabel I.6
KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2025

N O	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
1	KEDUNGJATI	145.288	45 615	313,96
2	KARANGRAYUNG	144.272	106 195	736,08
3	PENAWANGAN	75.230	68 124	905,54
4	TOROH	126.716	121 763	960,91
5	GEYER	205.141	68 579	334,30
6	PULOKULON	136.948	114 585	836,70
7	KRADENAN	111.663	86 724	776,66
8	GABUS	163.930	76 452	466,37
9	NGARINGAN	119.154	72 415	607,74
10	WIROSARI	151.026	97 794	647,53
11	TAWANGHARJO	93.066	61 264	658,29
12	GROBOGAN	101.490	82 599	813,87
13	PURWODADI	78.177	144 834	1852,63
14	BRATI	56.561	53 209	940,74
15	KLAMBU	52.349	40 241	768,71
16	GODONG	92.934	90 451	973,28
17	GUBUG	65.518	88 890	1356,73
18	TEGOWANU	54.260	61 023	1124,64
19	TANGGUNGHARJO	50.126	44 457	886,91
JUMLAH		2.023.849	1 525 214	753,62

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan

b. Struktur Usia dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) atau disebut juga kelompok umur bekerja, yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur non produktif (0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) atau disebut juga usia beban ketergantungan.

Struktur usia penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel I.7 sebagai berikut:

Tabel I.7
STRUKTUR USIA PENDUDUK
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0-4	49 263	46 386	95 649
2	5-9	59 758	56 168	115 926
3	10-14	60 139	56 754	116 893
4	15-19	59 464	55 877	115 341
5	20-24	56 878	54 225	111 103
6	25-29	61 583	58 176	119 759
7	30-34	58 630	54 985	113 615
8	35-39	57 473	54 956	112 429
9	40-44	56 155	55 227	111 382
10	45-49	51 755	51 891	103 646
11	50-54	46 589	48 123	94 712
12	55-59	43 158	46 475	89 633
13	60-64	38 383	41 896	80 279
14	65-69	30 823	31 450	62 273
15	70-74	18 044	18 105	36 149
16	75+	19 054	27 371	46 425
Jumlah		767 149	758 065	1.525.214

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.051.899 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 473.315 jiwa, sehingga Angka Rasio Ketergantungan adalah 31,03 %, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 31 orang yang non produktif.

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebesar 0,28% atau bertambah 4.240 jiwa dibandingkan dengan Tahun 2024. Data

pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel I.8 berikut:

Tabel I.8
PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2020 – 2025

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERUBAHAN	PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	2020	745.244	738.142	1.483.386	23.606	0,68%
2	2021	748.531	740.416	1.488.947	5.561	0,37%
3	2022	754.396	746.749	1.501.145	12.198	0,74%
4	2023	761.591	752.710	1.514.301	13.156	0,88%
5	2024	765.275	755.699	1.520.974	6.673	0,44%
6	2025	767.149	758.065	1.525.214	4.240	0,28%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Tahun 2025, yaitu sebesar 0,28% atau bertambah 4.240 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2023 sebesar 0,88% atau bertambah 13.156 jiwa dari tahun sebelumnya.

4, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 dengan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12.541 yang terdiri dari 147 CPNS, 5.854 PNS, DAN 6.540 PPPK serta 11.031 fungsional. Secara rinci jumlah ASN pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel I.9 berikut:

Tabel I.9
JUMLAH ASN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			FUNGSIONAL
			CPNS	PNS	PPPK	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	3	3072	4657	7562

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			FUNGSI ONAL
			CPNS	PNS	PPPK	
1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	33	1243	1313	2401
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2	107	26	42
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	20	11	18
5	Dinas Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	4	14	5	10
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2	20	5	3
7	Satpol PP	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	26	36	30
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Urusan Wajib	3	22	9	21
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Wajib	4	41	16	35
10	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Wajib	2	32	10	18
11	Dinas Koperasi dan UKM	Urusan Wajib	1	15	9	13
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Wajib	4	22	2	11
13	Dinas Pangan	Urusan Wajib	2	21	8	14
14	Dinas Perhubungan	Urusan Wajib	7	35	8	10
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Wajib	4	23	3	14
16	Dinas Peternakan dan Perikanan	Urusan Wajib	2	38	31	41
17	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Wajib	3	25	4	10
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Urusan Wajib	3	23	6	17
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Wajib	3	31	7	13
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Wajib	3	20	5	12
21	Dinas Pertanian	Urusan Pilihan	2	45	82	111
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Urusan Pilihan	4	42	13	20

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			FUNGSI ONAL
			CPNS	PNS	PPPK	
1	2	3	4	5	6	7
23	Sekretariat Daerah	Urusan Fungsi Penunjang	10	98	13	46
24	Sekretariat DPRD	Urusan Fungsi Penunjang	1	25	7	9
25	Inspektorat	Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan	9	41	2	37
26	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Urusan Fungsi Penunjang	5	25	7	18
27	Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Urusan Fungsi Penunjang	6	54	9	18
28	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Urusan Fungsi Penunjang	1	38	6	17
29	Badan Kesbang dan Politik	Urusan Pemerintahan Umum	2	19	3	8
30	RSUD Dr.R Soedjati Soemodiardjo	Urusan Wajib	14	309	191	438
31	Kecamatan Purwodadi	Urusan Fungsi Penunjang	-	41	2	1
32	Kecamatan Toroh	Urusan Fungsi Penunjang	-	14	2	1
33	Kecamatan Geyer	Urusan Fungsi Penunjang	-	17	2	1
34	Kecamatan Grobogan	Urusan Fungsi Penunjang	-	17	2	1
35	Kecamatan Brati	Urusan Fungsi Penunjang	-	12	2	1
36	Kecamatan Klambu	Urusan Fungsi Penunjang	-	15	2	1
37	Kecamatan Tawangharjo	Urusan Fungsi Penunjang	-	16	2	1
38	Kecamatan Wirosari	Urusan Fungsi Penunjang	1	27	1	-
39	Kecamatan Ngaringan	Urusan Fungsi Penunjang	-	11	2	1
40	Kecamatan Gabus	Urusan Fungsi Penunjang	-	11	2	1
41	Kecamatan Kradenan	Urusan Fungsi Penunjang	-	12	2	1
42	Kecamatan Pulokulon	Urusan Fungsi Penunjang	-	10	2	1
43	Kecamatan Penawangan	Urusan Fungsi Penunjang	-	14	2	1
44	Kecamatan Godong	Urusan Fungsi Penunjang	-	16	2	1
45	Kecamatan Karangrayung	Urusan Fungsi Penunjang	-	14	2	-
46	Kecamatan Gubug	Urusan Fungsi Penunjang	-	15	2	1

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			FUNGSI ONAL
			CPNS	PNS	PPPK	
1	2	3	4	5	6	7
47	Kecamatan Kedungjati	Urusan Fungsi Penunjang	-	15	2	-
48	Kecamatan Tanggungharjo	Urusan Fungsi Penunjang	-	12	1	-
49	Kecamatan Tegowanu	Urusan Fungsi Penunjang	-	19	2	1
Jumlah			147	5.854	6.540	11.031

Sumber: BKPSDM Kabupaten Grobogan.

5, Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, bahwa Realisasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp3.058.608.240.105,00 atau 101,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.005.749.682.541,00. Pelampauan pendapatan terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar 107,80% dan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 100,17%.

Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.10 sebagai berikut:

Tabel 1.10
REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	623.224.234.468,00	671.880.253.719,00	107,80
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.382.525.448.073,00	2.386.727.986.386,00	100,17
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		3.005.749.682.541,00	3.058.608.240.105,00	101,75

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.976.476.442.558,00 atau 95,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.116.483.113.255,00.

Secara lebih rinci, Realisasi Belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.11 sebagai berikut:

Tabel I.11
REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	2.223.876.661.965,00	2.125.292.419.819,00	96,56
2	BELANJA MODAL	412.312.584.275,00	381.337.289.973,00	92,48
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.201.148.015,00	5.411.184.766,00	44,34
4	BELANJA TRANSFER	468.092.719.000,00	464.435.548.000,00	99,21
	JUMLAH	3.116.483.113.255,00	2.976.476.442.558,00	95,50

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD terdiri dari 2 jenis, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp115.619.278.899,00 atau 99,94% dari target penerimaan sebesar Rp115.683.430.714,00. Demikian juga realisasi Pengeluaran Pembiayaan mencapai Rp4.950.000.000,00 atau 100,00% dari target pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp4.950.000.000,00.

Realisasi Pembiayaan menurut jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.12 sebagai berikut:

Tabel I.12
REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.683.430.714,00	115.619.287.899,00	99,94

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	110.733.430.714,00	110.669.287.899,00	99,94

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

Berdasarkan perhitungan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2025 terdapat Surplus sebesar Rp82.131.797.547,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp110.669.287.899,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp192.801.085.446,00.

Perhitungan Surplus/Defisit, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.13 sebagai berikut:

Tabel 1.13
REALISASI SURPLUS/DEFISIT, PEMBIAYAAN NETTO
DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN	3.005.749.682.541,00	3.058.608.240.105,00	101,75
2	BELANJA	3.116.483.113.255,00	2.976.476.442.558,00	95,50
3	SURPLUS / DEFISIT	(110.733.430.714,00)	82.131.797.547,00	(74,17)
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.683.430.714,00	115.619.287.899,00	99,94
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	110.733.430.714,00	110.669.287.899,00	99,94
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	192.801.085.446,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025 didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lebih rinci, kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja dapat disajikan sebagai berikut:

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebaran informasi pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA;
4. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah;
5. Meningkatkan pendapatan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat;
6. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
7. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam

- dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak;
8. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan Pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 9. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat reimburse sebagai alternatif pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat/lembaga donor;
 10. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.

Pengalokasian pendapatan asli daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten/kota, sebesar 70% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
4. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Unit Kerja yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.
5. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
6. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
7. Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025.
8. Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif

Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3) peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 4) melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA;
 - 5) penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - 6) revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat;
 - 7) optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 - 8) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD

penghasil.

- b. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui:
 - 1) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - 2) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, untuk besaran Dana transfer seperti DAK.
- c. Strategi peningkatan lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
 - 1) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
 - 2) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
 - 3) Mendorong pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat baik melalui CSR maupun hibah lainnya.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 sebesar Rp3.005.749.682.541,00 terealisasi Rp3.058.608.240.105,00 atau 101,75%. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp133.720.983.352,00 atau 4,57% jika dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.924.887.252.753,00.

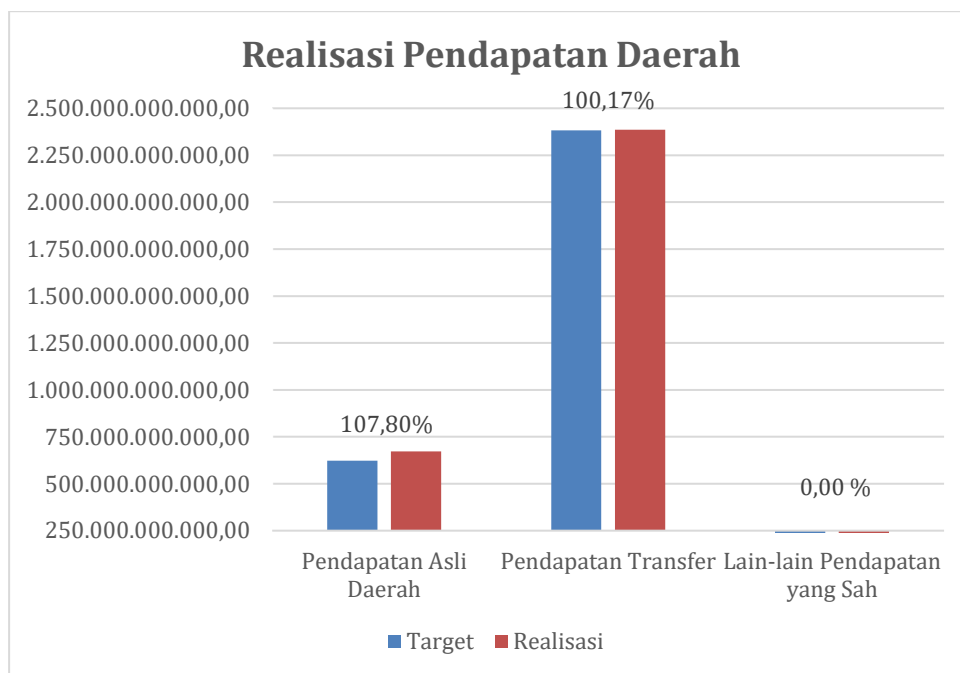
Pelampauan pendapatan terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar 107,80% dan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 100,17%. Perincian Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp623.224.234.468,00 terealisasi Rp671.880.253.719,00 atau 107,80%.
- b. Pendapatan Transfer dengan target Rp2.382.525.448.073,00 terealisasi

Rp 2.386.727.986.386,00 atau sebesar 100,17%.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp0,00 terealisasi Rp0,00 atau 0,00%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada gambar II.1 sebagai berikut:



Gambar II.1
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2025

Adapun angka target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	PENDAPATAN	3.005.749.682.541,00	3.058.608.240.105,00	101,75
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	623.224.234.468,00	671.880.253.719,00	107,80
1	Pajak Daerah	307.127.012.000,00	320.323.545.698,00	104,29

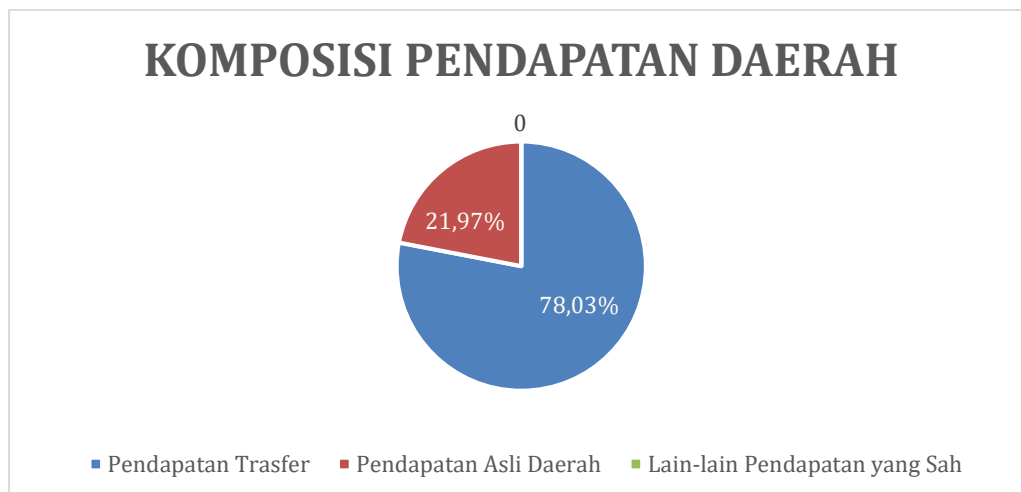
NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2	Retribusi Daerah	204.410.792.200,00	227.999.810.291,00	111,54
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.249.541.000,00	40.299.223.169,00	111,17
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.436.889.268,00	83.257.674.561,00	110,36
B	PENDAPATAN TRANSFER	2.382.525.448.073,00	2.386.727.986.386,00	100,17
1	Dana Perimbangan	1.889.014.940.709,00	1.923.382.445.738,00	101,81
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	314.136.177.000,00	310.479.006.000,00	98,83
	Dana Desa	306.953.273.000,00	303.296.102.000,00	98,80
	Insentif Fiskal	7.182.904.000,00	7.182.904.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.374.330.364,00	152.866.534.648,00	85,22
	Pendapatan Bagi Hasil	159.702.330.364,00	141.766.230.648,00	88,76
	Bantuan Keuangan	19.672.000.000,00	11.100.304.000,00	56,42
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer sebesar 78,03% dari total pendapatan, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 21,97% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,0% terhadap pendapatan daerah.

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dalam bentuk grafik dapat dilihat dalam gambar II.2 sebagai berikut:



Gambar II.2
Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan rutin Pemerintah Daerah dan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- a) Gaji Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan DPRD;
- b) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- c) Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan *Zero Growth*.
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025.
- f) Penganggaran Jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- g) Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- h) Tambahan Penghasilan PNS.
- i) Insentif Pajak dan Retribusi Daerah.
- j) Honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Penganggaran belanja pegawai bagi:

- a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
- b) Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang

- Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan memedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - (1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada

perangkat daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- g) Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- k) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah Kabupaten Grobogan.
- l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- m) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3) Belanja Subsidi

Kebijakan penganggaran belanja subsidi sebagai berikut:

- a. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- b. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Hibah

Kebijakan penganggaran belanja hibah sebagai berikut:

- a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- c) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Grobogan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- e) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah berkenaan.

5) Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan penganggaran belanja bantuan sosial sebagai berikut:

- a) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

b. Belanja Modal

Kebijakan penganggaran belanja modal sebagai berikut:

- 1) Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Layanan Dasar Permukiman.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e) belanja aset tetap lainnya;
 - f) belanja aset lainnya;
- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga sebagai berikut:

- 1) Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 2) Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di dalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak/retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada tahun

berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat.

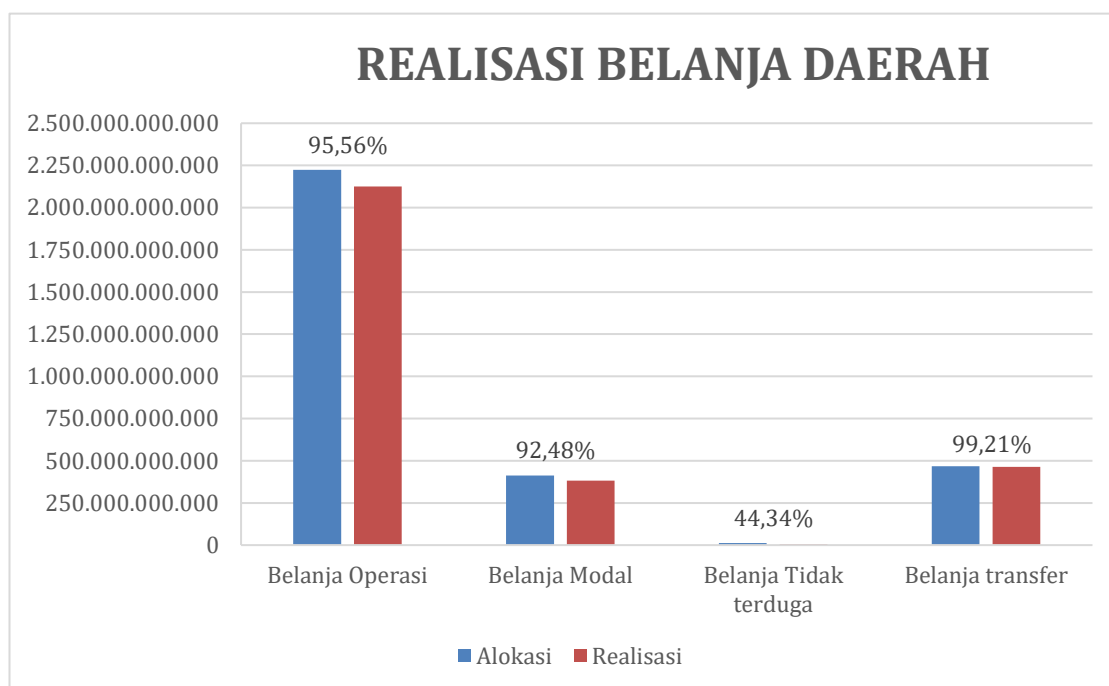
2. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran Belanja berdasarkan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.116.483.113.255,00 terealisasi sebesar Rp2.976.476.442.558,00 atau 95,50%, dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dengan alokasi sebesar Rp2.223.876.661.965,00 terealisasi sebesar Rp2.125.292.419.819,00 atau 95,56%.
- Belanja Modal dengan alokasi sebesar Rp412.312.584.275,00 terealisasi Rp381.337.289.973,00 atau 92,48%.
- Belanja Tidak Terduga dengan alokasi sebesar Rp12.201.148.015,00 terealisasi sebesar Rp5.411.184.766,00 atau 44,34%.
- Belanja Transfer dengan alokasi sebesar Rp468.092.719.000,00 terealisasi sebesar Rp464.435.548.000,00 atau 99,21%.

Target dan realisasi belanja APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar

II.3 sebagai berikut :



Gambar II.3
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2025

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II.2
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2025

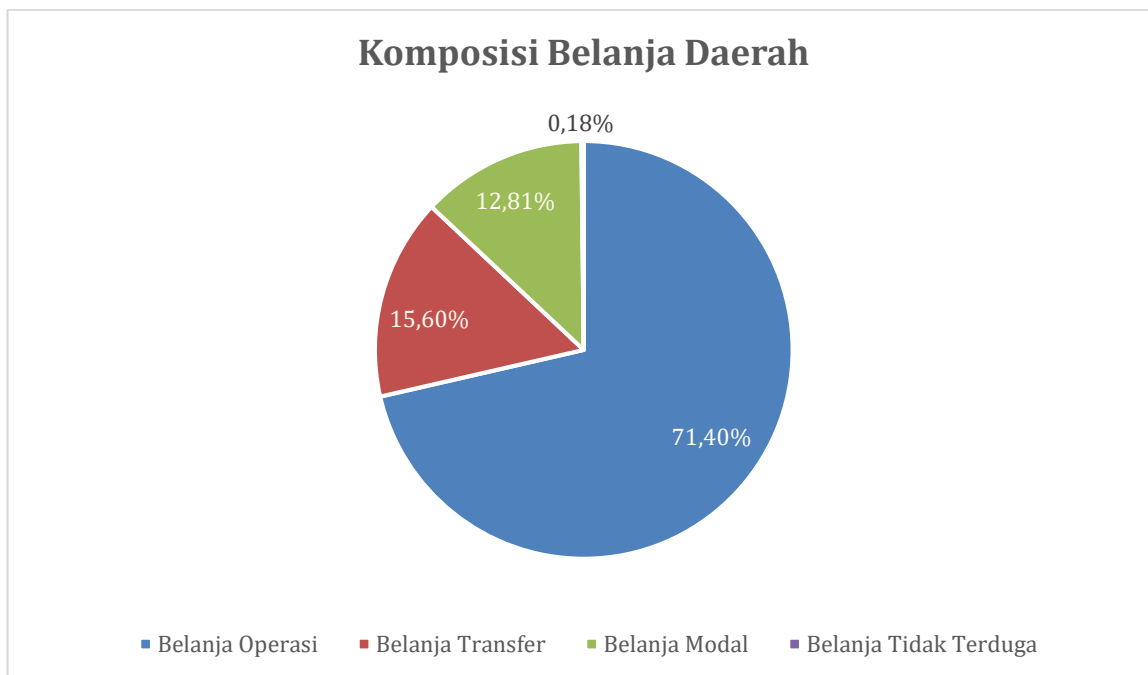
NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA DAERAH	3.116.483.113.255,00	2.976.476.442.558,00	95,50
A	BELANJA OPERASI	2.223.876.661.965,00	2.125.292.419.819,00	95,56
1	Belanja Pegawai	1.324.190.582.779,00	1.271.855.372.068,00	96,04
2	Belanja Barang dan Jasa	744.426.094.306,00	701.050.484.578,00	94,17
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	940.448.000,00	940.424.750,00	99,99
5	Belanja Hibah	128.785.224.880,00	126.103.571.106,00	97,91
6	Belanja Bantuan Sosial	25.534.312.000,00	25.342.567.317,00	99,24
B	BELANJA MODAL	412.312.584.275,00	381.337.289.973,00	92,48
1	Belanja Modal Tanah	1.597.198.250,00	442.942.700,00	27,73
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.667.380.975,00	100.818.574.872,00	92,77
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.761.884.429,00	135.673.990.305,00	95,03
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.576.969.431,00	129.244.386.909,00	90,01
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.058.191.190,00	14.749.290.224,00	97,94
6	Belanja Modal Aset Lainnya	650.960.000,00	408.104.963,00	62,69

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.201.148.015,00	5.411.184.766,00	44,34
1	Belanja Tidak Terduga	12.201.148.015,00	5.411.184.766,00	44,34
D	BELANJA TRANSFER	468.092.719.000,00	464.435.548.000,00	99,21
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	30.712.702.000,00	30.712.702.000,00	100,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.360.280.000,00	1.360.280.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	435.019.737.000,00	431.362.566.000,00	99,15

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

Komposisi Belanja Daerah Tahun 2025 dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai berikut: Belanja Operasi sebesar 71,41%, selanjutnya Belanja Transfer sebesar 15,60%, Belanja Modal sebesar 12,81%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,18% dari total belanja daerah.

Adapun komposisi Belanja Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar II.4 sebagai berikut:



Gambar II.4
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2025

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan pembiayaan daerah, terdiri atas kebijakan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diantaranya telah dicantumkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Untuk besaran SiLPA merupakan nilai sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI dari pelampauan target pendapatan dan penghematan belanja di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.683.430.714,00. Untuk pengeluaran

pembiayaan telah dicantumkan Penyertaan Modal tahun 2025 sebesar Rp4.950.000.000,00. Selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan atau dengan penyebutan Pembiayaan Netto sebesar Rp110.733.430.714,00.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut:

Tabel II.3
Target dan Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.683.430.714,00	115.619.287.899,00	99,94
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115.683.430.714,00	115.619.287.899,00	99,94
1				
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00
1	Penyertaan Modal Daerah	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00
2				
	PEMBIAYAAN NETTO	110.733.430.714,00	110.669.287.899,00	99,94

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp115.619.287.899,00 atau 99,94% dari target penerimaan pembiayaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp4.950.000.000,00 atau 100,00% dari target pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp110.669.287.899,00 atau 99,94%.

Berdasarkan perhitungan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2025 terdapat Surplus sebesar Rp82.131.797.547,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp110.669.287.899,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp192.801.085.446,00.

Ringkasan Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.4 sebagai berikut:

Tabel II.4
Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PENDAPATAN	3.005.749.682.541,00	3.058.608.240.105,00	101,75
II	BELANJA	3.116.483.113.255,00	2.976.476.442.558,00	95,50
	SURPLUS / DEFISIT	(110.733.430.714,00)	82.131.797.547,00	(74,17)
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.683.430.714,00	115.619.287.899,00	99,94
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	110.733.430.714,00	110.669.287.899,00	99,94
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	192.801.085.446,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan (LRA *un-audit*).

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2025 meliputi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.116.483.113.255,- dan terealisasi sebesar Rp 2.976.476.366.573,- atau 95,50%.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap urusan pemerintahan, Kebijakan Strategis yang dilaksanakan selama tahun 2025, serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya (LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024) secara rinci dapat dilihat pada Matrik sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1 paket (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Material	1 paket	1 paket (100%)				
			7) Fasilitas Kunjungan Tamu	1 paket	1 paket (100%)				
			8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 paket	5 paket (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 paket	6 paket (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 paket	2 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket (100%)				
			2. Program Pengelolaan Pendidikan	100%	100%	249.248.975.426	247.719.421.581		
			a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
			1) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 paket	2 paket (100%)				
			2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	39 paket	39 paket (100%)				
			3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 paket	4 paket (100%)				
			4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4 paket	4 paket (100%)				
			5) Pengadaan Mebel Sekolah	3 paket	3 paket (100%)				
			6) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5 lomba	5 lomba (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			7) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.000 orang	890 orang (89%)				
			8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95 orang	95 orang (100%)				
			9) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14 sekolah	14 sekolah (100%)				
			10) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	802 SD	802 SD (100%)				
			11) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	802 SD	802 SD (100%)				
			12) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	70 SD	70 SD (100%)				
			13) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	95 satuan pendidikan	120 satuan pendidikan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	46 SD	46 SD (100%)				
			15) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12 SD	12 SD (100%)				
			b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
			1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 SMP	6 SMP (100%)				
			2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7 SMP	7 SMP (100%)				
			3) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2 SMP	2 SMP (100%)				
			4) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	6 lomba	6 lomba (100%)				
			5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.600 orang	1.455 orang (90,94%)				
			6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	73 orang	73 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
			7) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	37 SMP	37 SMP (100%)				
			8) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	136 SMP	136 SMP (100%)				
			9) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	136 orang	136 orang (100%)				
			10) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	176 orang	176 orang (100%)				
			11) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 SMP	1 SMP (100%)				
			c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
			1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga pendidikan bagi satuan PAUD	2357 orang	2211 orang (93,80%)				
			2) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	70 lembaga	70 lembaga (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Pengelolaan Dana BOP PAUD	1201 lembaga	1201 lembaga (100%)				
			4) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	304 orang	304 orang (100%)				
			5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 lembaga	1 lembaga (100%)				
			6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	16 lembaga	16 lembaga (100%)				
			7) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	250 orang	250 orang (100%)				
			d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
			1) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/kesetaraan	21 lembaga	21 lembaga (100%)				
			2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	34 PKBM	34 PKBM (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75 orang	75 orang (100%)				
			4) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	70 orang	70 orang (100%)				
			3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	133.000.000	115.157.535		
			a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
			1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

2. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1	Kesehatan	RSUD dr. Soedjati	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	178.097.732.375	162.551.341.542		
			1) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 paket	2 paket (100%)				
			2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	179.777.569.644	161.228.302.414		
			a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			b. Peningkatan Pelayanan BLUD						
			1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	51 pekerjaan	51 pekerjaan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.2		Dinas Kesehatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	446.958.918.095	337.278.100.041		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen (100%)				
			2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 ASN	12 ASN (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			7) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			8) Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 jenis	60 jenis (100%)				
			2) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 jenis	2 jenis (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 jenis	12 jenis (100%)				
			h. Peningkatan Pelayanan BLUD						
			1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	31 pekerjaan	31 pekerjaan (100%)				
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	100%	100%	178.097.732.375	162.551.341.542		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
			a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (DINKES)						
			1) Pengembangan Rumah Sakit	2 paket	2 paket (100%)				
			2) Pengembangan Puskesmas	11 paket	11 paket (100%)				
			3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150 paket	150 buah (100%)				
			4) Pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	455 paket	455 paket (100%)				
			5) Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	1 paket	1 paket (100%)				
			6) Pengelolaan pelayanan kesehatan	25 jenis	25 jenis (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dasar melalui pendekatan keluarga						
			b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.399 jiwa	16.369 jiwa (83,64%)				
			2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.825 jiwa	16.404 jiwa (87,80%)				
			3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.573 jiwa	16.281 jiwa (87,65%)				
			4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	71.216 jiwa	75.612 jiwa (89,61%)				
			5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	195.598 jiwa	187.501 jiwa				
			6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	966.953 jiwa	895.447 jiwa (86,35%)				
			7) Pengelolaan Pelayanan	192.712 jiwa	200.747 jiwa				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kesehatan pada Usia Lanjut						
			8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	449.358 jiwa	348.918 jiwa (63,25%)				
			9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.740 jiwa	26.468 jiwa (100%)				
			10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.711 jiwa	3.468 jiwa (100%)				
			11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.006 jiwa	11.006 jiwa (100%)				
			12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	32.800 jiwa	32.800 jiwa (87,25%)				
			13) Pengelolaan Pelayanan	4 paket	4 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kesehatan Gizi Masyarakat						
			14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 paket	1 paket (100%)				
			15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 paket	5 paket (100%)				
			16) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	33 paket	33 paket (100%)				
			17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 paket	12 paket (100%)				
			18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.268 jiwa	5.560 jiwa				
			19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 orang	22 orang (100%)				
			20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 paket	1 paket (100%)				
			21) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	38 paket	38 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Laboratorium Rujukan/Nasional						
			22) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 paket	1 paket				
			23) Operasional Pelayanan Puskesmas	30 jenis	30 jenis (100%)				
			24) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 jenis	30 jenis (100%)				
			25) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	56 puskesmas	56 puskesmas (100%)				
			26) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 kasus	6 kasus (100%)				
			27) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 kasus	12 kasus (100%)				
			28) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	42 paket	42 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Darurat Terpadu (SPGDT)						
			29) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.360 jiwa	2.360 jiwa (100%)				
			30) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.199 jiwa	2.199 jiwa (100%)				
			31) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	20 paket	20 paket (100%)				
			32) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 paket	1 paket (100%)				
			33) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 paket	1 paket (100%)				
			3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	1.121.099.700	1.090.959.787		
			a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
			1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 jenis	4 jenis (100%)				
			b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Adanya 7 Puskesmas yang belum memiliki Tenaga Sanitasi.	Melakukan recruitment untuk Formasi Tenaga Sanitasi.
			1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	612 orang	612 orang (100%)				
			4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	100%	305.732.000	271.766.317		
			a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1 jenis	1 jenis (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga)						
			1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	1 jenis	1 jenis (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
			c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						
			1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	24 sasaran	24 sasaran (100%)				
			5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	308.966.600	244.766.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	67 unit	67 unit (100%)				
			b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.000 unit	62.000 unit (100%)				
			b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.047 unit	1.047 unit (100%)				

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	20.881.578.400	19.901.139.615		
				12 bulan	12 bulan (100%)				
				12 bulan	12 bulan (100%)				
				12 bulan	12 bulan (100%)				
				12 bulan	12 bulan (100%)				
				12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	280 setel pakaian	280 setel pakaian (100%)				
			2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1 paket (100%)				
			e. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			6) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11 Gedung kantor	11 Gedung kantor (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Gedung kantor	11 Gedung kantor (100%)				
			2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100%	100%	44.539.741.150	39.586.847.315		
			a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	96 pekerjaan	95 pekerjaan (98,96%)			Waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan karena dana transfer dari provinsi turun menjelang akhir tahun	Dana transfer dari provinsi sebaiknya di transfer ke daerah di awal atau pertengahan tahun
			2) Normalisasi/Restorasi Sungai	23 pekerjaan	23 pekerjaan (100%)				
			3) Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1 pekerjaan	1 pekerjaan (100%)				
			b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	5 pekerjaan	5 pekerjaan (100%)				
			2) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	36 pekerjaan	36 pekerjaan (100%)				
			3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6 pekerjaan	6 pekerjaan (100%)				
			4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2 pekerjaan	2 pekerjaan (100%)				
			5) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1 pekerjaan	1 pekerjaan (100%)				
			3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100%	100%	6.421.862.250	6.312.080.131		
			a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	7 pekerjaan	7 pekerjaan (100%)				
			4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%	100%	11.110.141.580	10.812.585.500		
			a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	3 pekerjaan	3 pekerjaan (100%)				
			2) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	24 pekerjaan	24 pekerjaan (100%)				
			3) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1 pekerjaan	1 pekerjaan (100%)				
			5. Program Penataan Bangunan Gedung	100%	100%	5.099.371.050	4.962.659.800		
			a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
			1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	1 pekerjaan	1 pekerjaan (100%)				
			2) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 pekerjaan	3 pekerjaan (100%)				
			6. Program Penyelenggaraan Jalan	100%	100%	80.942.356.132	74.016.186.810		
			a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
			1) Penyusun Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	15 pekerjaan	15 pekerjaan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
			2) Pembangunan Jalan	134 pekerjaan	133 pekerjaan (99,25%)				
			3) Pemeliharaan Rutin Jalan	5 pekerjaan	5 pekerjaan (100%)				
			4) Pembangunan Jembatan	12 pekerjaan	12 pekerjaan (100%)				
			5) Pemeliharaan Rutin Jembatan	2 pekerjaan	2 pekerjaan (100%)				
			7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100%	100%	246.827.000	232.852.150		
			a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil						
			1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 pekerjaan	1 pekerjaan (100%)				
			8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	100%	973.320.000	945.935.000		
			a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi RRTR Kabupaten/Kota	4 pekerjaan	4 pekerjaan (100%)				
			b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 pekerjaan	1 pekerjaan (100%)				
			2) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2 pekerjaan	2 pekerjaan (100%)				

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100%	100%	1.252.538.000	1.182.955.750		
			a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik (100%)				
			2) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	60 Unit	60 Unit (100%)				
			3) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)				
			2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	100%	2.740.609.928	2.614.255.607		
			a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	937 RT	937 RT (100%)				
			3. Program Pengembangan Perumahan	100%	100%	664.808.000	648.939.970		
			a. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Relokasi Program Kabupaten/Kota						
			1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 unit	1 unit (100%)				
			4. Program Kawasan Permukiman	100%	100%	1.970.400.000	1.864.617.000		
			b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
			1) Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	2.66 Ha	2.66 Ha (100%)				
			5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100%	100%	8.196.128.400	8.191.531.905		
			a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh	338 unit	338 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						
			6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	11.169.289.000	11.043.580.500		
			a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
			1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	44 lokasi	44 lokasi (100%)				
			2) Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengebang	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.909.775.744	6.367.680.836		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 laporan	4 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51 orang	51 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	30 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27 unit	27 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25 unit	25 unit (100%)				

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	4.943.685.800	4.721.699.596		
			a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota						
			1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	336 laporan	336 laporan (100%)				
			2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;	7 dokumen	7 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;	2242 orang	2242 orang				
			5) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	7 laporan	0 laporan (0%)				
			b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota						
			1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	141 laporan	141 laporan (100%)				
			2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	41 laporan	41 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	2.246.750.000	2.122.971.731		
			a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			2) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	216 orang	216 orang (100%)				
			3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	57 unit	57 unit (100%)				
			b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						
			1) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 dokumen	2 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						
			2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	45 lokasi	45 lokasi (100%)				
			3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	9.591.466.200	9.254.323.239		
			a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya	422 paket	422 paket (100%)				
			2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang (100%)				
			3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11 orang	11 orang (100%)				
			c. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	8 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	40 unit (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit (100%)				
			2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
5.2		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.806.917.280	4.514.542.890		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	27 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31 paket	31 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan/Material	4 paket	4 paket (100%)				
			4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	63 unit	63 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	5 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Mebel	3 unit	3 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	12 unit (100%)				
			2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	471.600.000	442.117.130		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
			1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	371 orang	371 orang (100%)				
			3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	2.383.444.500	2.365.002.899		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
			1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 orang	400 orang (100%)				
			4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	2.788.025.000	2.528.696.618		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
			1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	260 orang	260 orang (100%)				
			5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	136.500.000	130.534.610		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
			1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan	350 orang	350 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
			6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	439.000.000	384.518.110		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
			1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 orang	750 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.3		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.367.447.500	5.127.201.827		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33 dokumen	33 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	60 paket (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	4 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan komponen instalasi	2 paket	2 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			listrik/penerangan bangunan kantor						
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 paket	5 paket (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 dokumen	4 dokumen (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Material	3 paket	3 paket (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346 laporan	346 laporan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	17 unit	17 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 unit	18 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Mebel	10 unit	10 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	14 unit (100%)				
			4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65 unit	65 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2. Program Penanggulangan Bencana	100%	100%	11.248.281.600	10.953.613.242		
			a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota						
			1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	144.223 orang	144.223 orang (100%)				
			b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
			1) Sarana dan prasarana mobilisasi bagi petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	1 unit	1 unit (100%)				
			2) Uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	400 orang	400 orang (100%)				
			3) Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			4) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	38 kawasan	38 kawasan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
			1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	350 orang	350 orang (100%)				
			3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	74.151 orang	74.151 orang (100%)				
			c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
			1) Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	47 kegiatan	47 kegiatan (100%)				

6. Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.1	Sosial	Dinas Sosial	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	10.946.195.40 ₀	10.723.718.95 ₉		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	3 paket (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasan dan Fungsi	3 orang	3 orang (100%)				
			3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	55 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	12 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 paket	5 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	54 paket	54 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	89 unit	89 unit (100%)				
			2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Sosial	100%	100%	230.000.000	226.400.000		
			a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota						
			1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8 paket	8 paket (100%)				
			2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	2 lembaga	2 lembaga (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota						
			3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	4.841.000	4.727.500		
			a. Pemulangan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kesehatan						
			1) Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kekerasan	10 orang	10 orang (100%)				
			4. Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	604.587.000	595.789.503		
			a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Permakanan	200 orang	200 orang (100%)				
			2) Penyediaan Sandang	200 orang	200 orang (100%)				
			3) Penyediaan Alat Bantu	40 orang	40 orang (100%)				
			4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.	320 orang	320 orang (100%)				
			5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	7.244.000.000	7.214.143.731		
			a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota						
			1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	300 orang	300 orang (100%)				
			2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.200 orang	8.200 orang (100%)				
			2) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.600 orang	11.600 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			6. Program Penanganan Bencana	100%	100%	330.000.000	325.980.985		
			a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Makanan	1000 orang	1000 orang (100%)				
			b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota						
			1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25 orang	25 orang (100%)				
			7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	84%	84%	171.571.000	170.762.000		
			a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota						
			1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 lokasi	4 lokasi (100%)				

LKPJ BUPATI GROBOGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025	III-64
--	--------

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.081.275.190	5.652.002.332		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74 dokumen	74 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40 dokumen	40 dokumen (100%)				
			c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 barang	72 barang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 stel	60 stel (100%)				
			2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	60 orang (100%)				
			e. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			6) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	16 unit	16 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	40 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit (100%)				
			2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	2.055.825.000	1.904.572.843		
			a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
			1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	400 orang	400 orang (100%)				
			2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1 lembaga	1 lembaga (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/kota	4 unit	-				
			b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
			1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60 lembaga	60 lembaga (100%)				
			3. Program Penempatan Tenaga Kerja	100%	100%	525.640.000	522.579.083		
			a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	2 ASN	2 ASN (100%)				
			2) Pelayanan antar Kerja	11.950 orang	11.950 orang (100%)				
			3) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	150 orang	150 orang (100%)				
			b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
			1) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Informasi Pasar Kerja Online						
			2) Job Fair/Bursa Kerja	10.000 orang	10.000 orang (100%)				
			c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	480 orang	480 orang (100%)				
			2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	40 orang	40 orang (100%)				
			4. Program Hubungan Industrial	100%	100%	179.440.400	175.873.825		
			a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	55 perusahaan	55 perusahaan (100%)				
			b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 perusahaan	2 perusahaan (100%)				
			2) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 lembaga	1 lembaga (100%)				

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AKB	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.947.376.650	6.348.114.055		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	10 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 paket	5 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	1 paket	1 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	10 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit (100%)				
			4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit (100%)				
			2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	515.653.200	490.221.150		
			a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	5 dokumen (100%)				
			b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
			1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4 dokumen	4 dokumen (100%)				
			2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	3 organisasi	3 organisasi (100%)				
			c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
			1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	1 lembaga (100%)				
			2) Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			3. Program Perlindungan Perempuan	100%	100%	10.200.000	9.505.600		
			a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kewenangan Kabupaten/Kota						
			4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	100.513.400	97.663.400		
			a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	40.052.000	37.278.500		
			a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Pengajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	100%	291.788.500	276.626.404		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
			1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 organisasi	3 organisasi (100%)				
			b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang (100%)				
			2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	4 dokumen	4 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Kabupaten/Kota						

3. Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2) Bimbingan Teknis Implementasi	100% 2 dokumen 2 dokumen 28 orang 1 dokumen	100% 2 dokumen (100%) 2 dokumen (100%) 28 orang (100%) 1 dokumen (100%)	5.689.081.000	5.320.056.506		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Peraturan Perundang-Undangan						
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 paket	3 paket (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	12 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit (100%)				
			2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	100%	100%	380.530.000	362.065.300		
			a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	6 lumbung	4 lumbung (80%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	4.514.145.100	4.442.620.263		
			a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
			1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan (100%)				
			2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 UMKM	12 UMKM (100%)				
			3) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			4) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			6) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						
			1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.000 Kg	32.000 Kg				
			c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
			2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 kegiatan	3 kegiatan (90%)				
			4. Program Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	38.002.900	37.308.915		
			a. Penyusunan Peta Kerenanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan (100%)				
			5. Program Pengawasan Keamanan Pangan	100%	100%	60.000.000	59.665.370		
			a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 unit	12 unit (100%)				

LKPJ BUPATI GROBOGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025	III-86
--	--------

4. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pertanian		-	-	-				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4) Penyediaan Bahan /Material	7000 paket	7000 paket (100%)				
			5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 kali	350 kali (100%)				
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	30 unit (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50 laporan	50 laporan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	76 unit	76 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Operasional atau Lapangan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	143.082.000	136.797.619		
			a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
			1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
			1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak /Resiko Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	898.218.600	880.303.270		
			a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 kegiatan	3 kegiatan (100%)				
			2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			3) Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan profile emisi GRK	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 uji sampel	12 uji sampel (100%)				
			b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
			1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2 laporan	2 laporan (100%)				
			c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
			1) Pelaksanaan Rehabilitasi	1 ha	1 ha (100%)				
			4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	100%	3.750.000.000	3.610.932.502		
			a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						
			1) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3000 m2	3000 m2 (100%)				
			2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana	3 lokasi	3 lokasi (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Keanekaragaman Hayati						
			5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	63.750.000	59.882.000		
			a. Penyimpanan Sementara Limbah B3						
			1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 laporan	100 laporan (100%)				
			6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	75.000.000	63.690.179		
			a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	4 laporan	4 laporan (100%)				
			2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha (100%)				
			7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	340.000.000	317.531.440		
			a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10 lembaga	10 lembaga (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	500 orang	500 orang (100%)				
			3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Alam Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas /Kelompok Masyarakat	1 lembaga	1 lembaga (100%)				
			8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	30.000.000	27.446.500		
			a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						-
			1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5 aduan	5 aduan (100%)				
			9. Program Pengelolaan Persampahan	100%	100%	7.811.440.000	7.566.673.253		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Pengelolaan Sampah						
			1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80 ton	80 ton (100%)				
			2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	15 kelompok	15 kelompok (100%)				

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	14.967.896.500	13.760.578.738		
			a. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah						
			1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				-
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	4 jenis	4 jenis (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)			-	-
			4) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				-
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				-
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Mebel	8 unit	8 unit (100%)				
			2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47 unit	47 unit (100%)				
			3) Pengadaan Aset Tak Berwujud	2 unit	2 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	10 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 unit	100 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3 unit	3 unit (100%)				
			4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42 unit	42 unit (100%)				
			2. Program Pendaftaran Penduduk	100%	100%	62.275.000	50.744.720		
			a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
			1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	308.000 dokumen	308.000 dokumen (100%)				
			3. Program Pencatatan Sipil	100%	100%	92.290.000	80.250.500		
			a. Pelayanan Pencatatan Sipil						
			1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1760 buku 42.218 akta pencatatan sipil	1760 buku 59.514 akta pencatatan sipil (100%)				
			b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan						
			1) Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 laporan	6 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	180.831.000	154.287.125		
			a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
			1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	31.700.000	29.283.250		
			a. Penyusunan Profil Kependudukan						
			1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	7.736.421.800	7.440.717.798		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	42 Orang (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42 dokumen	42 dokumen (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 orang	6 orang (100%)				
			3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 orang	125 orang (100%)				
			e. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 paket	6 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110 paket	110 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 paket	10 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145 Eksemplar	145 Eksemplar (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	6 paket	6 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229 Kali	229 Kali (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	12 unit (100%)				
			3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	5 unit	5 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan Mebel	25 unit	25 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit (100%)				
			4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61 unit	61 unit (100%)				
			2. Program Penataan Desa	100%	100%	40.000.000	34.296.500		
			a. Penyelenggaraan Penataan Desa						
			1) Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	50 unit	50 unit (100%)				
			3. Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%	100%	5.244.650.000	5.078.447.468		
			a. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa						
			1) Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	3 dokumen (100%)				
			2) Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15 dokumen	15 dokumen (100%)				
			3) Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 dokumen	3 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4. Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	4.227.131.200	4.115.777.749		
			a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	273 dokumen	273 dokumen (100%)				
			2) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	2 dokumen	1 dokumen (50%)				
			3) Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	273 dokumen	273 dokumen (100%)				
			4) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	273 dokumen	273 dokumen (100%)				
			5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	273 dokumen	273 dokumen (100%)				
			6) Fasilitas Penyusunan Profil Desa	273 dokumen	273 dokumen (100%)				
			7) Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	273 dokumen	273 dokumen (100%)				
			8) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			serta Lomba Desa dan Kelurahan						
			5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	1.787.217.000	1.696.100.946		
			a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	273 Desa	273 Desa (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	273 Desa	273 Desa (100%)				
			3) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	273 Desa	273 Desa (100%)				
			4) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 desa	1 desa (100%)				
			5) Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	273 Desa	273 Desa (100%)				

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
8.1	Pengendalian Penduduk	DP3AKB	1. Program Pengendalian Penduduk	100%	100%	622.340.200	544.813.050		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan Keluarga Berencana		a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	100%	5.851.688.400	5.533.476.315		
			a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						
			1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1 laporan	1 laporan (100%)				
			2) Pelaksanaan Mekanisme	1 laporan	1 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
			3) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			4) Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 organisasi	12 organisasi (100%)				
			b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
			1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	351 orang	351 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 laporan	10 laporan (100%)				
			2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.259 orang	6.259 orang (100%)				
			3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 laporan	3 laporan (100%)				
			d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesenitaraan Ber-KB						
			1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	68 lokasi	68 lokasi (100%)				
			3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	7.841.949.000	7.777.734.400		
			a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
			1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10 laporan	10 laporan (100%)				
			2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	10 unit	10 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						
			3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 laporan	1 laporan (100%)				
			b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
			1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional	10 laporan	10 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPP KS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
			2) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 organisasi	1 organisasi (100%)				
			3) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	10 laporan	10 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)						
			4) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	10 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kelengkapannya						
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	3 paket	3 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			2) Pengadaan Mebel	27 unit	27 unit (100%)				
			2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			2. Program	100%	100%	16.581.431.307	15.699.721.506		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
			a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	54 unit	54 unit (100%)				
			2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	53 unit	53 unit (100%)				
			b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
			1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	5 unit	5 unit (100%)				
			c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						
			1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	12 kegiatan	12 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
			d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
			1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18 unit	18 unit (100%)				
			2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.700 dokumen	4.700 dokumen (100%)				
			3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15 Unit	15 Unit (100%)				
			e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
			1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						
			1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan	2 Kegiatan	2 Kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						
			2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Kegiatan	3 Kegiatan (100%)				

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
10.1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	7.538.979.200	7.165.470.423		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	7 unit	7 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76 buah	76 buah (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			3. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	100%	983.108.000	943.762.451		
			a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Relasi Media	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Diseminasi Informasi	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			4) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	5 dokumen	5 dokumen (100%)				
			5) Penyusunan Konten	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			6) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4. Program Aplikasi Informatika	100%	100%	1.676.903.000	1.654.759.932		
			a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	375 domain	375 domain (100%)				
			b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	1 paket	1 paket (100%)				
			4) Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	1 paket	1 paket (100%)				
			4) Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi	1 paket	1 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah						
			5) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/ atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 paket	1 paket (100%)				
			6) Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	1 paket	1 paket (100%)				

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
11.1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	4.937.819.700	4.546.637.161		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	60 paket (100%)				
			2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 orang	100 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 paket	7 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 paket	7 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9 paket	9 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Material	33 paket	33 paket (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700 laporan	700 laporan (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	8 unit	8 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100%	100%	95.780.000	91.987.540		
			a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
			1) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	59 unit usaha	59 unit usaha (100%)				
			2) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	60 unit usaha	60 unit usaha (100%)				
			3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	100%	49.500.000	48.364.300		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 unit usaha	60 unit usaha (100%)				
			4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100%	100%	500.000.000	453.041.907		
			a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.260 orang	1.260 orang (100%)				
			5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100%	100%	204.000.000	199.983.400		
			a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten/Kota						
			1) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	290 orang	290 orang (100%)				
			6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	11.610.000	11.331.200		
			a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
			1) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	30 unit	30 unit (100%)				
			7. Program Pengembangan UMKM	100%	100%	1.088.390.000	1.076.328.874		
			a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	795 unit	795 unit 100%)				

11. Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
12.1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	6.372.289.000	5.945.650.991		
				1 dokumen	1 dokumen (100%)				
				1 dokumen	1 dokumen (100%)				
				12 bulan	12 bulan (100%)				
				1 dokumen	1 dokumen (100%)				
				1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 paket	100 paket (100%)				
			2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang	50 orang (100%)				
			e. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	12 unit	12 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 unit	60 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	142.500.000	136.594.800		
			a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			3. Program Promosi Penanaman Modal	100%	100%	257.500.000	256.147.000		
			a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4. Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	99.000.000	91.440.000		
			a. Pelayanan Perizinandan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insetif daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	500 pelaku usaha	657 pelaku usaha (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
			3) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	1300 pelaku usaha	1325 pelaku usaha (100%)				
			6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	149.800.000	139.418.000		
			a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	381 orang	348 orang (100%)				
			2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	360 orang	450 orang (100%)				
			3) Pengawasan Penanaman Modal	21 kegiatan	21 kegiatan (100%)				
			7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	22.000.000	21.100.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
13.1	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	7.047.532.000	6.660.753.758		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 orang	1 orang (100%)				
			3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	200 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	12 paket (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	1 paket	1 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	250 laporan (100%)				
			7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Mebel	63 unit	63 unit (100%)				
			2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	18 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	11 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	40 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	100%	350.400.000	341.467.734		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	50 orang	50 orang (100%)				
			3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1.050 orang	1.050 orang (100%)				
			3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	100%	1.300.000.000	1.300.000.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						
			1) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 laporan	3 laporan (100%)				
			4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	100%	11.636.000,000	11.620.758.507		
			a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	13 unit	13 unit (100%)				
			b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	311 orang	311 orang (100%)				
			c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
			1) Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	84 orang	84 orang (100%)				
			2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						
			1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4 dokumen	14 dokumen (100%)				
			e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						
			1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 laporan	1 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 lembaga	1 lembaga (100%)				

13. Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
14.1	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100% 1 dokumen 50 orang	100% 1 dokumen (100%) 50 orang (100%)	202.832.000 	197.648.200 		

14. Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
15. 1	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	100%	379.239.000	367.706.232		
			a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			3) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	1 paket (100%)				
			b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar						

		Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							
		1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48 OPD	48 OPD (100%)					

15. Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
16.1	Kebudayaan	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1. Program Pengembangan Kebudayaan a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	1.033.500.000	1.007.015.180		
				2 obyek	2 obyek (100%)				
				2 obyek	2 obyek (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	5 unit	5 unit (100%)				
			2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	100%	196.250.000	193.019.900		
			a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
			1) Penetapan Cagar Budaya	15 obyek	15 obyek (100%)				
			3. Program Pengelolaan Permuseuman	100%	100%	867.070.000	839.447.003		
			a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						
			1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	1.145 unit	1.145 unit (85%)				
			2) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 unit	1 unit (100%)				
			3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1 unit	1 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	1 unit	1 unit (100%)				

16. Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
17.1	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100% 12 bulan 20 dokumen 1 paket	100% 12 bulan (100%) 20 dokumen (100%) 1 paket (100%)	5.572.059.900 5.310.945.830			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21 orang	21 orang (100%)				
			c. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan 1 unit (100%)	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan 1 unit (100%)	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan 1 unit (100%)	12 bulan (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan 1 unit (100%)	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan 1 unit (100%)	12 bulan (100%)				
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	6 unit (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	4 unit (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2. Program Pembinaan Perpustakaan	100%	100%	1.122.583.000	1.081.081.447		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1 layanan	1 layanan (100%)				
			2) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	35 perpustakaan	35 perpustakaan (100%)				
			3) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	25 perpustakaan	25 perpustakaan (100%)				
			4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang (100%)				
			5) Pengembangan Bahan Pustaka	494 buku	494 buku (100%)				
			6) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.910 buku	1.910 buku (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			7) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 dokumen	40 dokumen (100%)				
			b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	6 orang	6 orang (100%)				
			2) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1 perpustakaan	1 perpustakaan (100%)				

17. Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
18. 1	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1. Program Pengelolaan Arsip	100%	100%	282.057.000	278.403.621		
			a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	5.000 berkas	5.000 berkas (100%)				
			2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	48 laporan	48 laporan (100%)				
			b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	6000 berkas	6000 berkas (100%)				
			c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	50 pengguna	50 pengguna (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten/Kota melalui JIKN						
			2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kerasipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan (100%)				
			3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100%	100%	95.000.000	94.136.496		
			a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						
			1) Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	10000 berkas	10000 berkas (100%)				
			2) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	10000 berkas	10000 berkas (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						
			1) Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	1000 berkas	1000 berkas (100%)				
			c. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						
			1) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5000 berkas	5000 berkas (100%)				
			3) Program Perizinan Penggunaan Arsip	100%	100%	78.410.000	75.499.991		
			a. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						
			1) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	70 arsip	70 arsip (100%)				

d. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%	100%	89.997.000	88.157.120		
			a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
			1) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	4 unit	4 unit (100%)				
			2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%	100%	335.000.000	332.394.500		
			a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
			1) Pengembangan Kapasitas	9 kelompok	9 kelompok (100%)				

		Daerah Kabupaten/Kota						
		2) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47 pelaku usaha	47 pelaku usaha (100%)				

2. Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1	Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100% 8 unit	100% 8 unit (100%)	1.625.120.000	1.600.014.445		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan (100%)				
			2. Program Pemasaran Pariwisata	100%	100%	570.200.000	539.957.340		
			a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
			1) Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan (100%)				
			2) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 promosi	6 promosi (100%)				
			3. Program Pengembangan Sumber Daya	100%	100%	350.000.000	306.227.070		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
			a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
			1) Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	110 orang	110 orang (67%)				

3. Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	10.959.309.800	10.348.666.220		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang	72 orang (100%)				
			2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	6 dokumen (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ^a	2 paket	2 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	1 paket	1 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 paket	12 paket (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	36 unit	36 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215 unit	215 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13 unit	13 unit (100%)				
			2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	7.088.260.000	6.917.168.750		
			a. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit	12 laporan	12 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil						
			b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	12 laporan	12 laporan (100%)				
			c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten/Kota Lain						
			1) Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.176 ekor	1.176 ekor (100%)				
			2) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	10 ton	10 ton (100%)				
			3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	1.423.490.000	1.409.695.336		
			a. Pembangunan Prasarana Pertanian						
			1) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3 unit	3 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	13 unit	13 unit (100%)				
			4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%	2.647.896.000	2.058.779.808		
			a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	12 laporan (100%)				
			c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						
			1) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	12 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5. Program Penyuluhan Pertanian	100%	100%	1.039.488.000	791.172.200		
			a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
			1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	325 unit	325 unit (100%)				
			2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	8 unit	8 unit (100%)				
3.2		Dinas Pertanian	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%				
				1 dokumen (100%)	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKS-SKPD 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen (100%) 1 dokumen (100%) 1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 bulan 12 bulan 1 paket	14 bulan (100%) 12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			e. Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Operasional atau Lainnya 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,	100% 1 laporan	100% 1 laporan (100%)	5.481.620.000	4.730.535.653		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Jalan Usaha Tani 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	73 unit	73 unit (100%)				
			4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100% 7.018 Ha	100% 7.702 Ha (109,75%)	2.847.639.500	2.721.216.515		
			5. Program Penyuluhan Pertanian a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100% 19 unit	100%	5.917.513.000	5.561.691.749		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupfaten/Kota 5) Penyediaan dan Peningkatan	19 unit 19 unit 20 unit 118 orang	19 unit (100%) 19 unit (100%) 19 unit (100%) 20 unit (100%) 118 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kapasitas Penyuluh Pertanian 6) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	3 unit	3 unit (100%)				

6. Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi SKPD b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN c. Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	100%	12.914.104.072	12.281.633.302		
				5 dokumen	5 dokumen (100%)				
				14 bulan	14 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah						
			1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	60 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27 paket	27 paket (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan	12 laporan	12 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Peraturan Perundang-undangan						
			6) Penyediaan Bahan/Material	12 laporan	12 laporan (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100%	100%	635.000.000	587.085.073		
			a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

7. Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%	3.734.143.928	3.710.584.695		
			a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
			1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	6 unit (100%)				
			b. Pembinaan terhadap Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						
			1) Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2. Program Stabilisasi Harga	100%	100%	667.000.000	664.743.350		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						
			a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota						
			1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /	20 lokasi	120 lokasi (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kota					
			3) Pengawasan dan Penyaluran penggunaan Pupuk Pestisida bersubsidi	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)			
			3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	100%	200.000.000	196.691.328	
			a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					
			1) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen (100%)			
			4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	100%	22.750.000	21.162.400	
			a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,					

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Tera Ulang, dan Pengawasan					
			1) Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	1000 unit	1000 unit (100%)			

8. Urusan Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.1	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	70,25%	30.466.000	12.762.500		
			1) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 KK	3 KK (30%)			Kewenangan jumlah kuota transmigran ada di Pusat dan kuota final di Bulan Desember sehingga anggaran	Diperlukan revisi kebijakan dari pusat agar kuota dapat dipastikan sebelum pertengahan tahun sehingga

e. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPERIDA	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	14.920.504.500	14.366.696.567		
				1 dokumen	1 dokumen (100%)				
				1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	10 orang (100%)				
			3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	45 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			ngan Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit	7 unit (100%)				
			3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	17 unit	17 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	1.502.785.000	1.471.603.905		
			a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
			1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			2) Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			3) Koordinasi Pelaksanaan Forum	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			SKPD/Lintas SKPD 4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 5) Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan 1 dokumen 4 dokumen	1 kegiatan (100%) 1 dokumen (100%) 4 dokumen (100%)				
			b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	4 dokumen 90 orang	4 dokumen (100%) 90 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD						
			c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
			1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	1.624.997.500	1.576.040.559		
			a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
			1) Asistensi Penyusunan	28 OPD	28 OPD (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 4) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28 OPD	28 OPD (100%)				
				2 laporan	2 laporan (100%)				
				7 OPD	7 OPD (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 OPD	7 OPD (100%)				
			6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 laporan	8 laporan (100%)				
			b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
			1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	2 dokumen	2 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	7 OPD 7 OPD 1 laporan	7 OPD (100%) 7 OPD (100%) 1 laporan (100%)				
			c. Koordinasi Perencanaan Bidang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Infrastruktur dan Kewilayahan						
			1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 laporan	2 laporan (100%)				
			3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	2 laporan	2 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
			4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	100%	737.406.000	714.921.280		
			a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						
			1) Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						
			1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						
			1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi						
			1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 laporan	10 laporan (100%)				
			3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	8 laporan	8 laporan (100%)				

2. Keuangan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1	Fungsi Penunjang Keuangan	BPPKAD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	31.471.746.847	23.557.047.033		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen (100%)				
			2) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang	66 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 orang	15 orang (100%)				
			3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95 orang	95 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	13 paket	13 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 dokumen	4 dokumen (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/ Material	5 paket	5 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	69 unit	69 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191 unit	191 unit (100%)				
			2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	483.790.582.515	472.630.059.021		
			a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
			1) Koordinasi, Penyusunan	48 dokumen	48 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Verifikasi RKA SKPD						
			2) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Bidang Anggaran						
			5) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	48 dokumen	48 dokumen (100%)				
			6) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang (100%)				
			b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
			1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.427 dokumen	1.427 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	6 dokumen	6 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Dana Transfer Lainnya						
			3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	48 dokumen	48 dokumen (100%)				
			4) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210 orang	210 orang (100%)				
			c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
			1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 dokumen	18 dokumen (100%)				
			2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan	4 dokumen	4 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
			4) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			5) Pembinaan Akuntansi,	120 orang	120 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pelaporan dan Pertanggungj awaban Pemerintah Kabupaten/ Kota						
			d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
			1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	19 laporan	19 laporan (100%)				
			2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	19 laporan	19 laporan (100%)				
			3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.044.438.000	797.727.901		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Pengelolaan Barang Milik Daerah						
			1) Penyusunan Standar Harga	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 dokumen	10 dokumen (100%)				
			3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			4) Penatausahaan Barang Milik Daerah	51 dokumen	51 dokumen (100%)				
			5) Penilaian Barang Milik Daerah	48 dokumen	48 dokumen (100%)				
			6) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			7) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	12 dokumen	12 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
			8) Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	51 dokumen	51 dokumen (100%)				
			9) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	5.557.319.000	5.040.232.694		
			a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
			1) Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak Daerah	2 laporan	2 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	143 unit	143 unit (100%)				
			3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	105.020 laporan	105.020 (100%)				
			4) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan (100%)				
			5) Penetapan Wajib Pajak Daerah	884.320 dokumen	884.320 dokumen (100%)				
			6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 layanan	9 layanan (100%)				
			7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	8.000 dokumen	8.000 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			8) Penagihan Pajak Daerah	870.000 dokumen	870.000 dokumen (100%)				
			9) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	475 dokumen	475 dokumen (100%)				

3. Kepegawaian

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1	Fungsi Penunjang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan	100% 6 dokumen	100% 6 dokumen (100%)	7.926.557.000 	7.565.066.526 		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	12 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang	12 paket	12 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Cetakan dan Penggandaan						
			4) Penyediaan Bahan/Materia	12 paket	12 paket (100%)				
			5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit (100%)				
			2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 unit	20 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	1 unit	1 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor dan Bangunan Lainnya						
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 unit	60 unit (100%)				
			2. Program Kepegawaian Daerah	100%	100%	1.428.270.000	1.339.299.349		
			a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
			1) Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	7 dokumen	7 dokumen (100%)				
			2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Mutasi dan Promosi ASN						
			1) Pengelolaan Mutasi ASN	4 dokumen	4 dokumen (100%)				
			2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	6 dokumen (100%)				
			3) Pengelolaan Promosi ASN	4 dokumen	4 dokumen (100%)				
			b. Pengembangan Kompetensi ASN						
			1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	200 orang	82 orang (41%)				
			d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja						
			1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			2) Pembinaan Disiplin ASN	180 orang	180 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	1.679.892.000	1.553.900.616		
			a. Pengembangan Kompetensi Teknis						
			1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	936 orang	936orang (100%)				
			b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
			1) Penyelenggaraan Pengembangan	7 laporan	7 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						

4. Pengawasan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1	Fungsi Penunjang Pengawasan	Inspektorat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	23.889.665.200	21.407.484.960		
				2 dokumen	2 dokumen (100%)				
				55 orang	55 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	60 set	60 set (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46 orang	46 orang (100%)				
			3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55 orang	55 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	48 jenis	48 jenis (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313 unit	313 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	16 unit	16 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 unit	50 unit (100%)				
			2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	100%	2.047.960.400	1.643.100.400		
			a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
			1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65 laporan	65 laporan (100%)				
			2) Kerjasama Pengawasan Internal	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			3) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	225 dokumen	225 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
			3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	315.211.000	200.095.000		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						
			1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	48 peserta	48 peserta (100%)				
			2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	48 peserta	48 peserta (100%)				
			b. Pendampingan dan Asistensi						
			1) Pendampingan, Asistensi,	48 peserta	48 peserta (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
			2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	4 kegiatan (100%)				

5. Administrasi Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1. a	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan Setda	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	676.705.800	594.554.740		
			a. Administrasi Tata Pemerintahan						

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penataan Administrasi Pemerintahan	3 kegiatan	3 kegiatan (100%)				
			2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 kegiatan	2 kegiatan (100%)				
			3) Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 kegiatan	4 kegiatan (100%)				
5.1.b		Bagian Hukum Setda	b. Fasilitas dan Koordinasi Hukum	100%	100%	595.110.000	483.016.000		
			1) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	12 Perda, 76 Perbup	12 Perda, 76 Perbup (100%)				
			2) Fasilitas Bantuan Hukum	2 kasus	2 kasus (100%)				
			3) Pendokumen tasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	12 Perda, 76 Perbup	12 Perda, 76 Perbup (100%)				
5.1.c			c. Pelaksanaan Kebijakan	100%	100%	15.723.375.000	15.025.461.704		

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Kesejahteraan Rakyat						
			1) Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 kegiatan	4 kegiatan (100%)				
			2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2 kegiatan	2 kegiatan (100%)				
			3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan (100%)				
5.1.d		Bagian Perekonomian dan SDA Setda	1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	100%	899.600.000	766.724.849		
			a. Pemantauan Sumber Daya Alam						
			1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	2 pekerjaan	2 pekerjaan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						
			2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 pekerjaan	2 pekerjaan (100%)				
			b. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
			1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 BUMD	6 BUMD (100%)				
			3) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 kegiatan	2 kegiatan (100%)				
			3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 kegiatan	8 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1.f		Bagian Administrasi Pembangunan Setda	c. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	357.697.000	321.340.300		
			1) Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	48 dokumen	48 dokumen (100%)				
			2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 kali	4 kali (100%)				
			3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	48 OPD	48 OPD (100%)				
5.1.g		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	d. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	586.163.000	511.536.779		
			1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%				
			e. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik						
			1) Pekerjaan Penyusunan Rencana Umum	100%	100%				

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pengadaan Kabupaten Grobogan						
			2) Pekerjaan Pengelolaan LPSE	100%	100%				
			3) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas UKPBJ Kabupaten Grobogan	100%	100%				
			4) Pekerjaan Sosialisasi Bela Pengadaan/ Blangkon Jateng	100%	100%				
			f. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
			1) Pendampingan Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 kali	1 kali (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Sosialisasi Regulasi Pengadaan Barang Jasa	1 kali	1 kali (100%)				
			3) Forum Pembinaan Pengadaan Barang Jasa	1 kali	1 kali (100%)				
			4) Rapat Koordinasi Kontrak Kritis	1 kali	1 kali (100%)				
5.1.h		Bagian Umum Setda	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (BKDH dan WAKIL KDH) 2) Bimbingan Teknis Implementasi	100% 100%	100% 100%	41.391.426.430 	37.435.212.538 		

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Peraturan Perundang						
			3) Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100%	100%				
			b. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	100%	100%				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor	100%	100%				
			3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%				
			4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%				
			5) Penyediaan Barang	100%	100%				

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Cetakan dan Penggandaan						
			6) Penyediaan Bahan/Material	100%	100%				
			7) Penataan Arsip Dinamis	100%	100%				
			c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%				
			2) Pengadaan Mebel	100%	100%				
			d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%				
			2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	100%	100%				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%				
			e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan an, Biaya Pemeliharaan an dan Pajak Kendaraan	100%	100%				

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan an Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%				
			3) Pemeliharaan n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%				
			f. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
			1) Pelaksanaan Medical Check Up Untuk KDH dan WKDH	100%	100%				
5.1 .i		Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	g. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	24.533.769.000	22.714.613.494		

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 buah	2 buah (100%)				
			2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 buah	1 buah (100%)				
			h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali (100%)				
			i. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%				
			j. Pemeliharaan Barang Milik						

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%				
			k. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%				
5.1.j		Bagian Protokol dan Komunikasi	l. Pelaksanaan Protokol dan	100%	100%	624.400.000	606.680.000		

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pimpinan Setda	Komunikasi Pimpinan						
			1) Fasilitas Keprotokola n	100%	100%				
			2) Fasilitas Komunikasi Pimpinan	100%	100%				
			3) Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	100%	100%				
		Bagian Organisasi	m. Penataan Organisasi	100%	100%	1.462.528.400	1.422.469.395		
			1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	34 OPD	34 OPD (100%)				
			n. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 OPD	20 OPD (100%)				
			1) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	30 OPD	30 OPD (100%)				
			2) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49 OPD	49 OPD (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

b. Sekretariat DPRD

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.2	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran,	100%	100%	75.798.911.460	67.472.033.711		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali (100%)				
			2) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Verifikasi Keuangan						
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	281 stel	281 stel (100%)				
			2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	162 orang	140 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor						
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Mebel	178 unit	178 unit (100%)				
			2) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	22 unit	22 unit (100%)				
			3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	52 unit	52 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	5 unit (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	25 unit	25 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit (100%)				
			4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245 unit	241 unit				
			5) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			h. Layanan Keuangan dan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kesejahteraan DPRD						
			1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 orang	50 orang (100%)				
			1) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50 orang	27 orang (52%)				
			2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	250 stel	250 stel (100%)				
			i. Layanan Administrasi DPRD						
			1) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	350 kali	315 kali (98%)				
			3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	48 paket	48 paket (100%)				
			2. Program Dukungan Pelaksanaan	100%	99,40%	11.034.715.700	8.851.705.108		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Tugas dan Fungsi DPRD						
			a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
			1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			b. Pembahasan Kebijakan Anggaran						
			1) Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen (100%)				
			2) Pembahasan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen (100%)				
			c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
			1) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	48 laporan	48 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintahan dan Hukum						
			2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48 laporan	48 laporan (100%)				
			3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48 laporan	48 laporan (100%)				
			4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48 laporan	48 laporan (100%)				
			d. Peningkatan Kapasitas DPRD						
			1) Orientasi DPRD	1 laporan	1 laporan (100%)				
			2) Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	3 dokumen (50%)				
			3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	7 orang (100%)				
			4) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6 dokumen	6 dokumen (100%)				
			d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
			1) Pelaksanaan Reses	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			e. Fasilitasi Tugas DPRD						
			1) Penyusunan Laporan Kinerja	12 laporan	12 laporan (100%)				

c. Kecamatan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.3.a	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Purwodadi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	8.985.328.000	7.957.012.198		
			a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Keuangan Akhir Tahun						
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket (100%)				
			c. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	1 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 laporan	12 laporan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	12 laporan	12 laporan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan (100%)				
			7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 laporan	1 laporan (100%)				
			d. Pengadaan Barang Milik						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit (100%)				
			2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	12 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daya Air dan Listrik						
			2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 unit	1 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Bangunan Lainnya						
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	3.824.000	2.818.700		
			a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
			1) Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	1.223.824.000	1.214.415.598		
			a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
			1) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 paket	10 paket (100%)				
			b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
			4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	5.575.000	4.169.700		
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum						
			1) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan (100%)				
			5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	428.225.000	419.333.300		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Republik Indonesia						
			2) Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	370.434.000	286.025.450		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 laporan	2 laporan (100%)				
			3) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			4) Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			5) Fasilitas Pelaksanaan Tugas, dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			6) Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			7) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan Partisipatif	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			8) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Masyarakat Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			9) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			10) Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
5.3.b		Kecamatan Toroh	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran,	100%	100%	2.591.654.100	2.508.729.875		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 paket	53 paket (100%)				
			a. Administrasi Umum Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 unit	4 unit (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit (100%)				
			2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	3.750.000	3.750.000		
			a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Uit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
			1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Masyarakat di Kecamatan						
			3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	100%	100%	8.607.000	8.593.600		
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum						
			1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4. Program Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	14.400.000	14.400.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			5. Program Pembinaan dan	100%	100%	52.770.000	52.511.800		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pengawasan Pemerintahan Desa						
			a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
5.3.c		Kecamatan Geyer	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	2.874.058.000	2.698.688.967		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor dan Mesin Lainnya						
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa	7 unit	7 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	10 unit (100%)				
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	14.375.000	13.475.000		
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
			6. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	20.000.000	19.425.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	125 orang	125 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
			7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	54.500.000	53.980.000		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 desa	13 desa (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.3.d		Kecamatan Grobogan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	2.675.980.000	2.621.015.384		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan	24 orang	24 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			4) Penyediaan Barang	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Cetakan dan Penggandaan						
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit (100%)				
			2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			3) Pengadaan Sarana dan	4 unit	4 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Prasarana Gedung Kantor						
			h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	10 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	314.740.000	314.271.000		
			a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
			1) Peningkatan Efektifitas	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
			b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
			1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 paket	5 paket (100%)				
			2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	31.556.000	31.556.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan kebangsaan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan (Pemeliharaan Keutuhan Negara)						
			4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	58.187.000	58.187.000		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
5.3.e		Kecamatan Brati	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	2.288.847.500	2.063.260.949		
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kendaraan Dinas Jabatan						
			4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	1 paket (100%)				
			5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket (100%)				
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	21.010.000	17.820.682		
			a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
			1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			3. Program Pemberdayaan	100%	100%	14.400.000	14.359.680		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Masyarakat Desa dan Kelurahan						
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	17.087.000	17.071.622		
			1) Fasilitasi, Koordinasi dan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan						
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	12 bulan (100%)				
5.3.f		Kecamatan Klambu	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	2.158.032.000	2.465.330.500		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	25 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan	34 unit	34 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	4 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	20 unit (100%)				
			2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	25.998.000	25.998.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Republik Indonesia						
			3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	34.494.000	34.494.000		
			a. Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 desa	9 desa (100%)				
5.3.g		Kecamatan Tawangharjo	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	3.540.907.402	2.510.893.353		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	23 unit	23 unit (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi	1 paket	1 paket (200%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	1 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	3 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan/Materia	4 paket	4 paket (100%)				
			5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	120 laporan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	7 unit (100%)				
			2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	7 unit	7 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31 unit	31 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	14.370.000	14.085.000		
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	20 keluarga	20 keluarga (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Berkualitas dan Berdaya Saing						
			3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	19.161.000	18.988.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	150 orang	150 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
			4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	49.603.000	48.918.650		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
5.3.h		Kecamatan Wirosari	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	4.502.093.000	4.360.839.265		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Kabupaten / Kota						
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 bulan	12 bulan (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	617.450.000	615.156.800		
			a. Pemberdayaan Kelurahan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi (100%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	19.573.000	19.573.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	94.244.000	94.244.000		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			2) Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
5.3.i		Kecamatan Ngaringan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7.686.614.000	7.431.224.690		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten / Kota						
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	3 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Penyediaan Bahan/Materia	1 paket	1 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Urusan Pemerintahan						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa	12 unit	12 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	20.000.000	18.546.500		
			a. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan	12 desa	12 desa (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	22.787.500	20.955.800		
			a. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	120 orang	120 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
			4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	56.568.000	54.995.000		
			a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 desa	12 desa (100%)				
5.3.j		Kecamatan Pulokulon	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	1.734.403.000	1.682.005.018		
			a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 paket	30 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	10 paket (100%)				
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 paket	25 paket (100%)				
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	4 paket (100%)				
			4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	4 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Penyediaan Bahan/Materia	14 paket	14paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 paket	260 paket (100%)				
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 unit	5 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	12.811.000	12.691.000		
			a. Pemberdayaan dan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	13 keluarga	13 keluarga (100%)				
			4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	13.360.000	12.868.400		
			a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						
			1) Sinergitas dengan kepolisian	2 laporan	2 laporan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal vertikal di wilayah kecamatan						
			5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	13.360.000	12.868.400		
			a. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah						
			1) Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	50 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	49.616.000	48.829.350		
			a. Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			1) Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
5.3.k		Kecamatan Kradenan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran,	100%	100%	8.104.323.000	7.957.012.198		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	3 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi	12 paket	12 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	4 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	2 paket	2 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	250 laporan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Mebel	27 unit	27 unit (100%)				
			2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit	35 unit (100%)				
			3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	7 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit	35 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	8.000.000	6.400.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
			1) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	26.056.000	24.631.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	64.517.000	64.517.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dokumen	14 dokumen (100%)				
5.3.1		Kecamatan Gabus	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	2.078.824.500	1.962.329.321		
			1)Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perangkat Daerah						
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	27 buah	27 buah (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	5 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	4 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 dokumen	36 dokumen (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	16 paket	16 paket (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 unit	13 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	7 unit	7 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	14 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	10.640.000	10.411.000		
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28 keluarga	28 keluarga (100%)				
			3. Program Penyelenggara	100%	100%	23.653.000	23.618.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			n Urusan Pemerintahan Umum						
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila , pelaksanaan Undang undang Dasar negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4. Program Pembinaan dan	100%	100%	65.289.000	64.374.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pengawasan Pemerintahan Desa						
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
5.3.m		Kecamatan Penawangan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	2.634.255.000	2.492.847.004		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (97,43%)				
			2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket (100%)				
			2) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	35 orang	35 orang (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	3 paket	3 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	2 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	2 laporan	2 laporan (100%)				
			4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	6 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	16.998.000	15.200.000		
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	100 keluarga (100%)				
			3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	34.432.000	33.012.800		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	120 orang	120 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Ketahanan Nasional						
			7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	78.632.000	76.500.770		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	2 dokumen (100%)				
			2) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
5.3.n		Kecamatan Godong	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	2.869.670.000	2.735.422.903		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	1 paket	1 paket (100%)				
			3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1 paket (100%)				
			4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Cetakan dan Penggandaan						
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Mebel						
			2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	50 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	4.355.000	4.202.700		
			b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	12 dokumen (100%)				
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	40.310.000	40.190.130		
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	100 keluarga (100%)				
			3. Program Koordinasi	100%	100%	113.235.000	111.599.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Ketentraman dan Ketertiban Umum						
			a. Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
			1)Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	2 laporan (100%)				
			4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	22.894.000	22.521.250		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	100 orang	100 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Republik Indonesia						
			5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	114.166.000	113.137.000		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
5.3.0		Kecamatan Karangrayung	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	2.590.871.500	2.502.686.624		
			a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32 unit	32 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit (100%)				
			5) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			6) Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	5 unit	5 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan	100%	100%	12.050.000	12.040.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Masyarakat Desa dan Kelurahan						
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	100 keluarga	100 keluarga (100%)				
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	4.150.000	2.990.000		
			a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						
			1) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Agama dan Tokoh Masyarakat						
			4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	12.934.000	11.779.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	86.944.000	78.284.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 dokumen	21 dokumen (100%)				
5.3.p		Kecamatan Gubug	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	2.566.155.000	2.465.920.737		
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 unit	34 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 unit	8 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	10 unit (100%)				
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	5.100.000	4.500.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
			1) Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	31.849.000	30.599.000		
			a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
			1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			di Wilayah Kecamatan						
			b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	12.662.000	12.062.000		
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
			1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	2 laporan (100%)				
			5. Program Penyelenggaraan Urusan	100%	100%	35.857.000	35.857.000		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemerintahan Umum						
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.3.4			Negara Kesatuan Republik Indonesia						
			6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	73.740.000	73.240.000		
			a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	2.940.420.000	2.848.648.509		
		Kecamatan Kedungjati	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 paket	2 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Bangunan Kantor						
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket (100%)				
			4) Penyediaan Bahan/Materia	3 paket	3 paket (100%)				
			5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341 laporan	341 laporan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	11 unit	11 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			2) Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 unit	13 unit (100%)				
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	16.450.000	15.180.000		
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	160 keluarga	160 keluarga (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Berkualitas dan Berdaya Saing						
			3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	15.002.000	14.202.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	200 orang	200 orang (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
			4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%	46.621.000	45.300.000		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 dokumen	3 dokumen (100%)				
5.3.r		Kecamatan Tanggungharjo	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	100%	2.303.564.000	2.229.826.176		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	1 paket	1 paket (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Atribut Kelengkapan nya						
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			5) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 unit	23 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket (100%)				
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	37.882.000	37.758.136		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat						
			1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	19.250.000	19.057.400		
			a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Tingkat Kecamatan						
			1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	31.753.000	31.220.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1) Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kebangsaan dan Ketahanan						
			5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	15.716.000	15.462.320		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			2) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
5.3.s		Kecamatan Tegowanu	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	3.486.486.000	3.380.746.363		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen (100%)				
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan (100%)				
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
			1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	1 paket	1 paket (100%)				
			2) Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	30 dokumen	30 dokumen (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Penilaian Kinerja Pegawai						
			3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1 paket (100%)				
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan (100%)				
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			5) Penyediaan Bahan/Materia	12 bulan	12 bulan (100%)				
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan (100%)				
			e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			1) Pengadaan Mebel	38 unit	38 unit (100%)				
			2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 unit	8 unit (100%)				
			f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan (100%)				
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan (100%)				
			g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit (100%)				
			2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	25 unit (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	7.165.000	7.102.500		
			b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
			1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum	100%	100%	12.893.000	12.486.900		
			a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dan Ketertiban Umum						
			1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				
			4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	27.597.000	27.205.000		
			a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan (100%)				

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	70.996.000	66.515.900		
			a. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi						

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 dokumen	36 dokumen (100%)				
			2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	36 dokumen (100%)				

f. **Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan**

Kebijakan strategis adalah kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Grobogan, meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Grobogan selama Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat dalam matrik berikut ini:

1. **Kebijakan Strategis Dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- OPD pelaksana: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

N o	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Grobogan Tahun 2023 – 2027.	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	

2. **Kebijakan Strategis Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- OPD Pelaksana: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun 2024.	- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024	- Terlaksananya penganggaran dana desa sesuai prioritas nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, layanan dasar kesehatan dan stunting, pengembangan potensi desa, adaptasi perubahan iklim, desa digital, padat karya tunai, serta dana operasional pemerintahan desa. - Terlaksananya penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem paling tinggi 15% dalam hal ini BLT Dana Desa, penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keuangan Desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital. - Terlaksananya penganggaran Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa dalam penguatan program ketahanan pangan sebesar 20%.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.	

3. Kebijakan Strategis Dalam Bidang Perhubungan

- OPD Pelaksana: Dinas Perhubungan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 551.1/780/2024 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan	- Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dihadiri Bappeda Kabupaten Grobogan menghadiri kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Grobogan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Acara ini

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;	dihadiri oleh anggota forum diantaranya, yaitu perwakilan dari Polisi Resor Kabupaten Grobogan, DPUPR, Satpol PP, Kademisi dan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Jawa Tengah. - Hasil dan kesimpulan dari Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan agenda rapat Penanganan Parkir Liar KBM Truk di Batas Kota Purwodadi dan Jalan Gajah Mada adalah sebagai berikut: - Dari permasalahan parkir liar truk di Batas Kota dan Jalan Gajah Mada akan dilakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif terhadap masyarakat agar taat aturan lalu lintas untuk truk tidak parkir di bahu jalan yang sudah dipasang rambu. - Jika memang penanganan dari sosialisasi dan himbauan tidak dihiraukan maka akan dilakukan penindakan ringan sampai berat berupa tilang sampai penyitaan kendaraan tersebut.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	

4. Kebijakan Strategis Dalam Bidang Kepegawaian

• OPD Pelaksana : BKPSDM

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021	Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,	Penyederhanaan birokrasi sehingga pemerintahan berjalan efektif efisien yang berdampak pada

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan	sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang - Undang.	meningkatkan pemberian layanan pemerintahan dan fungsi pemerintahan berjalan optimal.
	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.	Pengelolaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menghasilkan pegawai yang memiliki integritas, profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Optimalisasi manajemen mutasi Pegawai Negeri Sipil guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya.

5. Kebijakan Strategis Dalam Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

• OPD Pelaksana : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

N o	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 000.5.15.1/261/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pasal 51 tentang Pengawasan Kearsipan Internal ditingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati	Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025
2.	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 000.5.1/53/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
3.	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 005.1/720/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang	Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bupati Grobogan Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
4.	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 000.5.6.2/32/2024 Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip dan Pemusnahan Arsip Tahun Anggaran 2024	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip	Membentuk Panitia Penilai Arsip dan Pemusnahan Arsip Tahun Anggaran 2025
5.	Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 000.5.15.1/186/DINARPUA/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

6. Kebijakan Strategis Dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- OPD : DISPENDUKAPIL

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 470/ 544 / 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan Se Kabupaten Grobogan	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Menetapkan kebijakan administrasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017, guna memberhentikan dengan hormat Petugas Registrasi Desa/Kelurahan yang telah meninggal dunia atau diangkat dalam jabatan lain, serta mengangkat Petugas Registrasi Desa/Kelurahan yang baru untuk menjamin kelancaran tugas administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, - Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	

7. Kebijakan Strategis Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika

• OPD : DISKOMINFO

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. - Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.	- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. - Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk : a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengembangkan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; b. menciptakan sinkronisasi dan sinergitas dalam

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			perencanaan, pengembangan dan implementasi SPBE di Daerah; dan c. mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan SPBE secara optimal. - Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi: a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; d. Penyelenggara SPBE; e. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; dan f. Pembiayaan.

8. Kebijakan Strategis Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan

• OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Keputusan Bupati Grobogan Nomor 9 / 286 / 2023 tentang Pembentukan Tim	- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang	Untuk menjamin bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta untuk

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Yustisi Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Grobogan	Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. - Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun	mengantisipasi dan menanggulangi bahan pangan asal hewan yang tidak layak konsumsi serta pemalsuan bahan pangan asal hewan yang beredar di wilayah Kabupaten Grobogan diperlukan upaya yang berkelanjutan dengan melibatkan beberapa sektor. Tim Yustisi sebagaimana dimaksud bertugas: a. mengadakan penertiban dan pembinaan kepada para pedagang terhadap peredaran dan perdagangan bahan pangan asal hewan seperti daging, telur dan susu sehingga Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Grobogan; b. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan penertiban dan pembinaan terhadap para Pedagang di Kabupaten Grobogan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Grobogan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.	

9. Kebijakan Strategis Dalam Bidang Pertanian

• OPD : DINAS PERTANIAN

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Daerah Grobogan Nomor 3 Tahun 2024	- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan : a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856). - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		6867); - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48); - Peraturan Daerah Kabupaten	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12).	

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI GROBOGAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.2.914.256.809.358,- dan terealisasi sebesar Rp.2.924.887.256.753,- atau 100,36 % melebihi target realisasi sebesar Rp.10.630.447.395,-. 2. Pelampauan pendapatan terjadi pada pos pendapatan asli daerah yang terealisasi 108,32% yaitu dari target Rp.454.793.182.422,- realisasi menjadi Rp.492.630.530.877,- yang terdiri dari : a) Pajak Daerah target Rp.168.510.000.000,-, realisasi Rp.183.530.687.212,- atau sebesar 108,32%; b) Retribusi Daerah Rp.242.945.222.422,-, realisasi Rp.262.887.493.076,- atau sebesar 108,91%; c) Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.35.514.160.000,- realisasi Rp.35.514.160.000,- atau sebesar 100%; d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp.7.823.800.000,- realisasi Rp.10.698.187.626,- atau sebesar 136,74%. <u>Permasalahan :</u> 1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam	Keputusan Dewan Rakyat Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Grobogan.	Terima kasih atas saran dan masukannya, Pemerintah Kabupaten Grobogan akan menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil, dengan melakukan kegiatan kajian awal menghitung potensi pajak dan retribusi untuk mendapatkan acuan data dan proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Terima kasih atas saran dan masukannya, Pemerintah Kabupaten Grobogan akan menetapkan potensi PAD dengan beberapa faktor diantaranya Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan potensi PAD : 1. Analisis PDRB a. Menghitung laju pertumbuhan PDRB. b. Menganalisis kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB 2. Analisis PAD sebelumnya a. Membandingkan realisasi PAD dengan target. b. Menghitung rasio PAD terhadap PDRB (PAD/PDRB) untuk melihat tingkat intensitas pajak daerah. 3. Identifikasi faktor lain

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 dan Perubahannya masih kurang terukur secara rasional dan tidak memiliki kepastian secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 12 Tahun 2019). Mengingat pendapatan tersebut untuk mendanai APBD Tahun 2024, mestinya Pemerintah Kabupaten Grobogan harus melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Grobogan dan harus memperhatikan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud; 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan tanggung jawab Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPPKAD) dan SKPD lain yang mengelola pendapatan daerah. 4. Realisasi "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah" mencapai 136,74% dari target, namun tidak disertai dengan penjabaran rinci asal usul pendapatan tersebut. 3. Pemanfaatan aset daerah belum optimal sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Sebagai contoh: aset wisata Goa Lawa dan Macan. 4. Kurangnya event tingkat nasional di Grobogan yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi. 5. Kondisi pasar tradisional yang kurang nyaman dan		Kebijakan pajak/retribusi baru, perubahan tarif, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. 4. Proyeksi PAD a. Menggunakan metode statistik (misalnya regresi, tren, atau elastisitas) untuk memproyeksikan PAD mendatang. b. Mempertimbangkan asumsi makroekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional). 5. Validasi dan Penetapan a. Melakukan validasi dengan instansi terkait (Badan Keuangan, Dinas Pendapatan, dll.). b. Menetapkan target PAD yang realistis dan dapat dicapai. Terima kasih atas saran dan masukannya, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan perencanaan dan pengendalian dan pengawasan pendapatan sebagai berikut: 1. Perencanaan pengelolaan pendapatan : Perencanaan pengelolaan pendapatan daerah adalah proses menyusun rencana untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang sah oleh pemerintah daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Proses ini mencakup penetapan target pendapatan, analisis sumber-sumber pendapatan, penyusunan kebijakan dan strategi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	memadai. Saran : - Dalam menentukan pendapatan daerah BPPKAD dan SKPD pengelola pendapatan daerah Kabupaten Grobogan harus cermat dan melakukan pronogsis target pendapatan secara akurat sesuai sumber-sumber potensi pendapatan yang ada; - Dalam penetapan potensi PAD kedepan Pemerintah Kabupaten Grobogan harus mempertimbangkan juga factor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah sebelumnya; - BPPKAD dan SKPD pengelola pendapatan kedepan harus cermat melakukan perencanaan dan pengendalian dan pengawasan pendapatan; - Pemerintah Daerah perlu menyampaikan rincian dan asal-usul "Lain-lain PAD yang sah" secara terbuka dalam laporan keuangan dan dokumen LKPJ berikutnya. - Apabila ada oknum penyalahgunaan pendapatan daerah selanjutnya harus ada sanksi tegas dari Pemerintah Kabupaten Grobogan; - Mengembangkan strategi pemanfaatan asset untuk mendukung PAD, misalnya melalui kerja sama dengan sektor swasta; - Agendakan event skala nasional dengan jadwal rutin agar menarik warga luar daerah berkunjung ke Kab Grobogan; - Modernisasi dan peningkatan fasilitas pasar agar dapat meningkatkan retribusi daerah dan mendorong aktivitas ekonomi lokal; - Sinergikan dana desa dengan program prioritas daerah dan ajak perusahaan local berpartisipasi		Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga mencakup beberapa aspek penting, seperti: - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi: Penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data wajib pajak, system informasi pajak dan analisis data pajak. - Optimalisasi Pemungutan Pajak: Penggunaan berbagai strategi dan metode untuk meningkatkan pemungutan pajak, seperti penyuluhan pajak, layanan konsultasi pajak, dan penghargaan kepada wajib pajak yang taat. - Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi: Penggunaan teknologi dan metode pengelolaan yang efisien untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 2. Pengendalian pendapatan : Pengendalian pendapatan daerah adalah proses memastikan pendapatan daerah, yang berasal dari pajak, retribusi, dan sumber lain, sesuai dengan target yang ditetapkan dan digunakan secara efektif untuk pembiayaan pembangunan daerah. Kegiatan Pengendalian: - Pemeriksaan Pajak:

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	10. Perbanyak shelter UMKM dengan memanfaatkan tanah asset daerah. melalui CSR;		BPPKAD melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak memastikan pemungutan pajak berjalan sesuai dengan peraturan. b. Pengawasan Retribusi: Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan retribusi untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan. c. Evaluasi Realisasi Pendapatan: Evaluasi dilakukan terhadap realisasi pendapatan daerah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target. Dengan adanya pengendalian yang efektif, pendapatan daerah dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 3. Pengawasan Pendapatan Pengawasan pendapatan daerah bertujuan untuk menjamin pengelolaan pendapatan daerah berjalan sesuai rencana, serta mencegah dan menindak penyimpangan yang ditemukan. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Daerah (BPPKAD), DPRD dan Korsupgah KPK RI. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan pendapatan daerah: a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI): Memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah, termasuk pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. b. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD): • Mengelola pemungutan pendapatan pajak daerah dan koordinator retribusi daerah. • Melakukan pengawasan dan penagihan pajak daerah c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah d. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK); Pengawasan Korsupgah KPK bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			melalui pelaksanaan <i>Monitoring Center for Strategic Prevention</i> (MCSP) KPK yang diharapkan dapat membantu mengurangi titik rawan korupsi yang ditemukan dalam perencanaan APBD dan pengelolaan pendapatan daerah Bentuk-bentuk pengawasan pendapatan daerah: a. Pengawasan intern: Tim Penertiban Pajak Daerah melakukan pengawasan internal terhadap pemungutan pajak. b. Pengawasan eksternal: DPRD melakukan pengawasan eksternal terhadap pemerintah daerah. c. Pengawasan intern BPK RI : Audit atas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PAD dan memastikan pengelolaan yang efisien. Kegiatan pengawasan pendapatan daerah: a. Sosialisasi Pengawasan Pajak Daerah. b. FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) tentang pengawasan dan penagihan pajak daerah. c. Audit atas pengelolaan PAD. d. Pelaksanaan pengawasan intern oleh BPK RI. e. Koordinasi dengan pengawas intern dan ekstern oleh BPPKAD. Terima kasih atas saran dan masukannya, untuk kedepannya akan ditampilkan rincian "Lain-lain

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			PAD yang sah” dalam laporan keuangan dan dokumen LKPJ Terima kasih atas saran dan masukannya,disetiap awal Tahun Anggaran seluruh ASN BPPKAD telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja secara Berjenjang dengan atasan masing-masing pegawai (bukan hanya yang terkait Pendapatan Daerah), hal ini adalah salah satu upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, jabatan yang dapat menyebabkan kerugian negara; walaupun demikian penindakan secara tegas bila terjadi kasus harus menjadi perhatian serius, kedepan BPPKAD akan lebih mengoptimalkan peran pengawasan internal untuk mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih atas saran dan masukannya,BPPKAD secara rutin telah melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dengan Perangkat Daerah terkait, selanjutnya perumusan strategi pemanfaatan aset untuk mendukung PAD akan kami koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait. Terima kasih atas saran dan masukannya, event skala nasional untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata tidak dipungkir memang dapat meningkatkan PAD, kami akan agendakan untuk mendiskusikan dengan Perangkat Daerah yang terkait.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Terima kasih atas saran dan masukannya, akan kami koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait Terima kasih atas saran dan masukannya, pengalokasian Dana Desa kedepannya memang seharusnya untuk mendukung program prioritas daerah agar lebih tepat sasaran/ efektif; beberapa perusahaan lokal sudah kami minta untuk berpartisipasi melalui CSR walaupun sifatnya masih insidental (event-event tertentu) selanjutnya akan kami bangun komunikasi yang lebih intensif dan positif sehingga kontribusi perusahaan lokal terhadap daerahnya lebih meningkat lagi. Terima kasih atas saran dan masukannya, pembangunan shelter UMKM dengan memanfaatkan tanah aset daerah akan kami koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dikarenakan wewenang tersebut tidak hanya melekat pada BPPKAD. Langkah yang bisa dilakukan di Bidang Aset BPPKAD Kab. Grobogan dalam pemanfaatan Tanah antara lain: 1. Identifikasi dan Pemetaan Tanah Pemda melakukan inventarisasi menyeluruh: • Menyusun daftar tanah yang kosong, tidak dimanfaatkan, atau pemanfaatannya kurang optimal.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			• Memastikan status hukum, luas, batas, dan dokumen (sertifikat, berita acara, peta bidang). • Mengelompokkan tanah yang berpotensi dipakai untuk shelter UMKM. 2. Penetapan Tanah yang Layak Dimanfaatkan Setelah dipetakan, melakukan: • Analisis kelayakan tata ruang dan kesesuaian dengan RDTR/RTRW. • Koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas PUPR, Bappeda. 3. Penentuan Skema Pemanfaatan yang Tepat menetapkan skema pemanfaatan tanah sesuai regulasi: • Sewa • Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) • Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) • Pinjam Pakai Untuk shelter UMKM, pilihan paling umum: ✓ KSP (Pemda menyediakan tanah, mitra membangun shelter) Sewa (UMKM/komunitas menyewa unit shelter yang dibangun Pemda)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	b. Pengelolaan Belanja Daerah <u>Permasalahan :</u> 1. Pengelolaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional; 2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 target Rp.3.023.382.838.379,- terealisasi Rp.2.919.832.691.208,-, atau sebesar 96,58% terserap dari target anggaran sisa sebesar Rp.103.550.147.171,- yang terdiri : 1) Belanja Operasi target sebesar Rp.2.204.593.470.685,-, realisasi sebesar Rp.2.117.871.572.193,-, atau sebesar 96,07%, dengan sisa anggaran Rp.86.721.898.492,- yang terdiri dari : a) Belanja Pegawai Rp.1.238.724.449.672,- realisasi Rp.1.190.778.119.599,-, atau sebesar 96,13%, sisa Rp.47.946.330.073,-; b) Belanja Barang Jasa Rp.744.700.358.373,- realisasi Rp.709.708.037.962,-, atau sebesar 95,30%, sisa	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	Terima kasih atas saran dan masukannya, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD telah dilaksanakan dengan jadwal yang diatur sedemikian rupa dengan alokasi waktu yang cukup diharapkan dokumen perencanaan yang telah diverifikasi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan kami evaluasi kembali untuk meningkatkan kualitas perencanaan belanja daerah yang lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien sesuai regulasi. Terima kasih atas saran dan masukannya,Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran DaerahPemerintah Kabupaten/Kotabagi seluruh Perangkat Daerah telah rutin dilaksanakan dengan tujuan agar seluruh Perangkat Daerah dapat membuat perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien. Namun ketercapaian tujuan tersebut perlu dilakukan evaluasi sehingga masing-masing Perangkat Daerah akan lebih baik lagi dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Terima kasih atas saran dan masukannya, untuk kedepan akan kami lakukan pencermatan atas program, kegiatan , sub kegiatan dalam APBD selanjutnya

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Rp.34.992.320.411,-; c) Belanja Bunga Rp.538.456.000,- realisasi Rp.535.363.742,- atau sebesar 99,43%, sisa anggaran Rp.3.092.258,-; d) Belanja Subsidi Rp.940.998.340,- realisasi Rp.940.998.340,- atau sebesar 100%; e) Belanja Hibah Rp.194.093.346.300,- realisasi Rp.190.663.150.390,- atau sebesar 98,23%, sisa anggaran Rp.3.430.195.910,-; f) Belanja Bansos Rp.25.595.862.000,- realisasi Rp.25.245.918.000,-, atau sebesar 98,63%, sisa anggaran Rp.349.944.000,-. 2) Belanja Modal target Rp.344.491.561.544,- realisasi Rp.331.150.920.156,- atau sebesar 96,13 %, ada sisa anggaran Rp.13.340.641.388,-; 3) Belanja Tidak Terduga Rp.15.806.979.150,- realisasi Rp.12.319.371.859,- atau sebesar 77,94%, sisa anggaran Rp.3.487.607.291,-; 4) Belanja Transfer, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan terealisasi 100%. 3. Dalam Pengelolaan Belanja Daerah tidak direncanakan dengan cermat, dapat terlihat		Terima kasih atas saran dan masukannya, untuk kedepan akan kami tindak lanjuti. Terima kasih atas saran dan masukannya, untuk kedepan akan kami hitung lebih cermat lagi agar prosentase belanja pegawai serta belanja barang jasa sesuai dengan regulasi terbaru. Terima kasih atas saran dan masukannya, untuk kedepan akan kami tindak lanjuti dengan melibatkan APIP Kabupaten Grobogan. Terima kasih atas saran dan masukannya, setiap akhir tahun BPPKAD telah menyusun dokumen Rencana Aksi untuk Tahun Anggaran Berikutnya, diharapkan ketika awal Tahun Anggaran masing-masing Bidang sudah mempunyai <i>time line</i> pelaksanaan tiap-tiap pekerjaan. Evaluasi berkala juga telah dilaksanakan setiap bulan. Namun harus diakui bahwa masih perlu ditingkatkan lagi kualitas perencanaan pekerjaan (jadwal) sehingga tidak mundur dari yang telah dijadwalkan pada dokumen Rencana Aksi.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	dalam penjabaran belanja diatas adanya sisa anggaran lebih disetiap belanja, khususnya contoh di belanja operasi dan belanja barang dan jasa. 4. Belanja Tidak Terduga Terserap Rendah (77,94%) mengindikasikan kurangnya mekanisme respon cepat terhadap situasi darurat atau belum adanya dasar hukum teknis untuk melakukan eksekusinya. 5. Proyek fisik (infrastruktur, pengadaan barang/jasa) sering tertunda karena masalah perencanaan atau lelang yang mengakibatkan mengendap di akhir tahun. Saran : 1. Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus lebih cermat dalam perencanaan belanja daerah; 2. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui TAPD memberikan pemahaman kepada SKPD dalam penyusunan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan yang dianggarkan; 3. Kedepan Pemerintah Kabupaten Grobogan harus melakukan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dengan Prioritas Kabupaten Grobogan yang belum mencapai 100% dengan cara melakukan pencermatan atas program, kegiatan, sub kegiatan dalam APBD selanjutnya;		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	4. Untuk memenuhi pengawasan anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus memenuhi anggaran pengawasan 0,50% dari belanja daerah untuk Inspektorat; 5. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam perencanaan anggaran agar menghitung cermat khususnya belanja pegawai dan belanja barang jasa agar teresap sesuai keadaan dan data yang ada, tidak terjadi sisa anggaran berlebih yang disengaja; 6. Pemerintah daerah perlu untuk melakukan audit evaluatif terhadap Belanja Tidak Terduga. Pelaksanaan audit ringan terhadap penggunaan anggaran tidak terduga. Apabila tingkat serapan anggaran rendah karena kendala regulasi, perlu penyempurnaan Perbup atau juknis pelaksanaan. 7. Susun jadwal pelaksanaan kegiatan secara merata sepanjang tahun untuk menghindari penumpukan di akhir tahun.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	c. Pengelolaan Pembiayaan Daerah <u>Permasalahan :</u>	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas	Perhitungan SILPA secara Cermat dan Rasional Perhitungan SILPA secara cermat dan rasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyeksi SILPA digunakan secara realistis, sehingga Pemerintah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	1. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun Anggaran berkenaan (2024) maupun tahun anggaran berikutnya (2025); 2. Realisasi penerimaan pembiayaan APBD TA 2024 mencapai Rp.177.715.350.069,- atau sebesar 100,85 % dari target penerimaan pembiayaan, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp.67.086.484.900,- atau sebesar 100% dari target pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga ada pembiayaan netto sebesar Rp.110.628.865.169,-; 3. Berdasarkan realisasi anggaran APBD 2024 terdapat surplus Rp.5.054.565.545,- dan pembiayaan netto sebesar Rp.110.628.865.169,-. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.115.683.430.714,-. 4. Grobogan rentan kekeringan dan banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan meningkatkan belanja tidak terduga; 5. Hutang daerah jangka panjang berpotensi mengurangi alokasi belanja produktif. Saran : 1. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus melakukan penghitungan pembiayaan daerah secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun	Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	Kabupaten Grobogan tidak mengalami kekurangan pendanaan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dengan menghindari belanja yang tidak dapat ditutup akibat SiLPA yang tidak tercapai. Evaluasi Penyertaan modal kepada BUMD yang tidak memberikan dividen optimal sebelum memberikan penyertaan modal dilakukan pengkajian melalui analisis investasi. Ini bertujuan : - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah - Untuk memastikan bahwa dana publik yang ditanamkan pada BUMD memberikan manfaat ekonomi dan kontribusi PAD yang memadai. - untuk melakukan penataan ulang penyertaan modal apabila kinerja BUMD tidak sesuai harapan Pengalokasian dana darurat dan pembangunan infrastruktur tahan iklim,mengalokasikan dana darurat untuk menghadapi bencana dan membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah langkah yang sangat strategis. Dalam Konteks perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunanembung dan sumur resapan sangat penting untuk mengatasi masalah krisis air dan banjir.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	anggaran sebelumnya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada tahun anggaran berikutnya akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan; 2. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyertaan modal untuk mengevaluasi terhadap BUMD yang tidak memberi deviden secara maksimal. 3. Alokasikan dana darurat khusus untuk antisipasi bencana dan bangun infrastruktur tahan iklim, seperti embung dan sumur resapan; 4. Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait pengelolaan perhutanan sosial yang tidak berjalan sesuai harapan. Dominasinya penanaman hutan dengan tanaman pangan dan tidak diikuti penanaman hutan keras menyebabkan hutan tidak mampu menahan air; 5. Hindari hutang tidak produktif. Hutang hanya untuk proyek yang meningkatkan PAD, seperti pembangunan pasar modern, pengembangan kawasan ekonomi.		Pengalokasian Dana Darurat pada prinsipnya sebagai penyediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan darurat mendesak dan penanganan bencana. Penyediaan anggaran cadangan pangan telah disediakan dalam belanja kegiatan di SKPD sedangkan untuk penanganan kedaruratan bencana dipenuhi dari penyediaan anggaran belanja tidak terduga Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat memang sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan setiap program yang dijalankan, khususnya program perhutanan sosial berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Disamping itu perlu perbaikan pola tanam yang saat ini didominasi tanaman pangan agar kembali menyeimbangkan penanaman pohon keras (hutan lestari). Perlu juga dilakukan konsultasi dan koordinasi apabila terdapat kendala implementasi melalui dukungan kebijakan, teknis, maupun pendampingan dari kementerian/lembaga. Saran ini sangat tepat, karena hutang yang digunakan untuk proyek-proyek yang tidak produktif justru akan membebani keuangan daerah dalam jangka panjang. Pemkab Grobogan sebaiknya hanya memanfaatkan pinjaman atau

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			hutang untuk proyek-proyek yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pembangunan pasar modern atau pengembangan kawasan ekonomi. Dengan demikian, utang yang diambil dapat memberikan manfaat ekonomi langsung dan meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan memperkuat kondisi keuangan daerah.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
2.	URUSAN PENDIDIKAN Permasalahan : 1) Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dalam Program penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 97,47% dengan anggaran Rp.775.073.927.711,- Rp.755.437.391.141,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.19.636.536.570,-; 2) Program Pengelolaan Pendidikan target 100% realisasi 98,86% dengan anggaran Rp.284.389.268.568 Rp.281.164.490.069,- sisa anggaran sebesar Rp.3.233.878.499,-; 3) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan target 100% realisasi 90,26% dengan	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Grobogan.	1) Saran kami perhatikan. Penempatan SDM sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) yang ditetapkan dan kualifikasi pendidikan pengalaman kerja menurut regulasi. 2) Saran kami perhatikan selanjutnya kami akan lebih berhati – hati dalam penyusunan anggaran. Sub Kegiatan dengan sisa banyak dan pagu besar dikarenakan efisiensi kontrak diantaranya; a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sisa anggaran dari Penyediaan perjalanan dinas untuk Dewan Pendidikan yang dianggarkan saat perubahan anggaran namun tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak cukup waktu. b) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	anggaran Rp.130.000.000,- realisasi Rp.117.343.425,- sisa anggaran sebesar Rp.12.656.575,-; 4) Dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program dari target dan realisasi tertulis 100%, timbul pertanyaan kegiatan atau sub kegiatan apa yang didanai dengan anggaran berlebih yang berakibat tidak terserapnya anggaran Dinas Pendidikan; 5) Permasalahan yang muncul adalah Dinas Pendidikan atau Urusan Pendidikan tidak cermat atau tidak cakap dalam perencanaan anggaran; 6) Dari program-program tersebut diatas yang dibiayai/dianggarkan beberapa masalah yang ada seperti : a. Masih banyak adanya Anak tidak Sekolah (ATS), terdapat 11 ribu anak putus sekolah yang disebabkan oleh pernikahan dini, keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak ke sekolah dan masalah biaya pendidikan; b. Sarana Prasarana sekolah yang tidak memenuhi standar (sekolah negeri) sesuai dengan BOSP yaitu kondisi ruang kelas SD maupun SMP masih banyak yang rusak; c. Masih kurangnya partisipasi PAUD yang disebabkan mungkin karena sarana dan		- Sisa anggaran merupakan cadangan tunjangan PPH 21 untuk gaji 13 dan THR namun sampai dengan akhir tahun tidak ada tagihan dari kantor pajak. - Anggaran TPP untuk guru yang belum sertifikasi pendidik namun realisasinya banyak yang lulus sertifikasi sehingga TPP tidak direalisasi. c) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. - Sisa Tender dari 75 paket pengadaan d) Penyediaan pendidik dan tenaga kesatuan kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah Dasar. - Anggaran semula diperuntukkan penyediaan honor bagi K2 Non PNS maupun non K2 namun sampai dengan akhir tahun tidak direalisasikan karena sudah diangkat sebagai PPPK. e) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. - Sisa anggaran merupakan SILPA dari Dana BOS tahun 2023 yang menjadi pengurang salur di tahun 2024. f) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar - Sisa Tender dari 70 paket pengadaan. g) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar. - Sisa Tender dari 55 paket pengadaan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	prasaranya atau kurangnya partisipasi Masyarakat menyekolahkan anak pada jenjang PAUD dan kopetensi Pendidikan formal guru PAUD belum optimal; d. Khusus terhadap Pendidik, penataan dan distribusi guru belum optimal, ditandai dengan adanya kekurangan guru mapel dan guru kelas serta belum semua pendidik memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/D4. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus memberikan/menempatkan SDM perencanaan yang berkualitas baik; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menunjukan kegiatan atau sub kegiatan apa yang didanai anggaran berlebih di Dinas Pendidikan yang dalam pelaksanaan kegiatan tersisa dan tidak terserap; 3) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus memberi sanksi kepada Pengguna Anggaran (PA) yang sengaja merencanakan anggaran yang tidak berguna; 4) Dalam perencanaan belanja yang dianggarkan di Dinas Pendidikan kedepan tidak terjadi lagi anggaran yang sia-sia tidak dipergunakan;		h) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah - Sisa Tender dari 8 paket pengadaan i) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah - Sisa Tender dari 24 paket pengadaan j) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Sisa Tender dari Smart Classrom 20 paket dan alat TIK (Chrome Book) 104 buah k) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama. - Sisa anggaran merupakan SILPA dari Dana BOS tahun 2023 yang menjadi pengurang salur di tahun 2024. l) Penyediaan Pendidik dan Tenaga pendidikan bagi satuan PAUD. - Anggaran semula diperuntukkan penyediaan honor bagi K2 Non PNS maupun non K2 namun sampai dengan akhir tahun tidak direalisasikan karena sudah diangkat sebagai PPPK. m) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. - SILPA salur dari Pagu 5.048.160.000 yang tersalurkan ke lembaga sejumlah 4.924.270.000 3) Saran kami perhatikan. Seluruh Sub Kegiatan yang tertuang di DPA 2024 yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD yang mendukung Visi/Misi Daerah Kabupaten Grobogan. 4) Saran kami perhatikan, Selajutnya kami akan lebih berhati – hati dalam penyusunan anggaran.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	5) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus memperhatikan Pengelolaan Pendidikan; 6) Menggalakkan program pendidikan alternatif, seperti pendidikan kesetaraan (PKBM) untuk anak putus sekolah; 7) Memperluas akses beasiswa melalui kerjasama dengan lembaga swasta dan pemerintah; 8) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan hingga jenjang menengah; 9) Mempercepat proses redistribusi tenaga pendidik berdasarkan hasil pemetaan yang akurat; 10) Meningkatkan sinergi antara sekolah, masyarakat dan lembaga literasi untuk mendukung gerakan literasi; 11) Mengintegrasikan program literasi dengan kurikulum berbasis teknologi agar menarik bagi generasi muda.		Kedepan, Dinas Pendidikan akan memberikan reward dan punishment pada pejabat dalam melaksanakan anggaran, sehingga tidak ada anggaran yang tersisa. 5) Terima kasih, saran kami perhatikan, karena pengelolaan pendidikan merupakan tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan. 6) Saat ini untuk penanganan anak putus sekolah Disdik telah bekerjasama dengan Kepala Desa, Bappeda, PKBM mendata dan mengupayakan untuk kembali bersekolah. 7) Saran kami perhatikan. Telah ada dana CSR dari Bank Jateng untuk insentif Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kembali ke sekolah. 8) Akses pendidikan Menengah secara umum telah tersedia memadai baik yang dibawah naungan Disdik maupun Kemenag namun penyebarannya tidak merata di setiap Kecamatan hal ini berakibat banyak lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Saat ini Dinas Pendidikan sedang menginisiasi Raperda tentang Pendidikan Dasar 13 Tahun. 9) Saran kami perhatikan saat ini penempatan CPNS dan PPPK sesuai dengan formasi yang dilamar waktu pendaftaran. 10) Saran kami perhatikan, kerjasama sekolah, masyarakat dan lembaga literasi yang telah terjalin selama ini akan lebih ditingkatkan untuk mendukung gerakan literasi.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			11) Saran kami perhatikan, salah satu implementasinya Disdik telah melaksanakan Workshop/Sosialisasi/Bimtek mendalam/Deep Learning bekerjasama dengan BBPMP Prov. Jawa Tengah yang salah satu materinya berkaitan dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
3.	URUSAN KESEHATAN <u>Permasalahan :</u> 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD Dr SOEDJADI, target 100% realisasi 95,56% dengan anggaran Rp.20.542.827.760,- realisasi Rp.19.631.150.570,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.911.677.190,-; 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota RSUD Dr SOEDJADI, target 100% realisasi 89,68% dengan anggaran Rp.179.777.569.644,- realisasi Rp.161.228.302.414,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.18.549.267.230,-; 3) Dinas Kesehatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota target 100% realisasi 90% dengan anggaran Rp.446.958.918.095,- realisasi	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Saran diterima, Pembinaan ini kami akan lakukan dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan transparan 2. Untuk anggaran sisa pada anggaran BLUD, Fleksibilitas anggaran BLUD: BLUD memiliki fleksibilitas untuk mengelola dana yang bersumber dari pendapatan non-APBD/APBN, termasuk SILPA, untuk digunakan kembali sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta dapat dipergunakan tahun berikutnya. pendapatan yang melebihi target dan belanja yang tidak terealisasi sesuai anggaran, sehingga menyisakan kas yang bisa digunakan untuk kegiatan lanjutan, menutupi defisit, atau kewajiban lainnya di periode berikutnya. 3. Saran Diterima

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Rp.337.278.100.041,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.109.680.818.054,-; 4) Dinas Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat target 100% realisasi 94% dengan anggaran Rp.132.997.388.007,- realisasi Rp.125.328.125.051,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.7.669.262.956,-; Dinas Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan target 100% realisasi 94% dengan anggaran Rp.2.596.350.000,- realisasi Rp.2.450.400.700,- terjadi sisa anggaran Rp.145.949.300,-; 5) Dinas Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman target 100% realisasi 75% dengan anggaran Rp.515.831.000,- realisasi Rp.386.836.760,- masih sisa anggaran Rp.128.994.240,-; 6) Dinas Kesehatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan target 100% realisasi 98% dengan anggaran Rp.1.527.472.800,- realisasi sebesar Rp.1.493.965.550,- terjadi sisa anggaran Rp.33.507.250,-; 7) Urusan Kesehatan RS Dr SOEDJADI dan Dinas Kesehatan terlebih sisa anggaran yang luar biasa banyak, pertanyaanya program, kegiatan dan sub kegiatan apa yang sudah didanai kemudian tidak bisa terserap dan tidak dijalankan;		4. Saran diterima serta pemberian larvasida untuk memutus perkembangbiakan nyamuk dengan pemantauan pemangku kepentingan wilayah (desa, sekolah/instansi) 5. Saran diterima, kader Jumantik yaitu petugas sukarela dari masyarakat atau siswa yang bertugas memantau, memeriksa, dan memberantas jentik nyamuk, khususnya <u>Aedes aegypti</u>, untuk mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Tugas mereka meliputi pemeriksaan genangan air di lingkungan rumah, sekolah, atau tempat umum, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus, hasil dari pengisian form jumantik per RT/RW di evaluasi oleh kader, petugas Kesehatan maupun di Tingkat desa. 6. Saran diterima, kami akan melakukan evaluasi kegiatan fogging secara berkala untuk memastikan penurunan populasi nyamuk dan angka kesakitan, jadwal dan cakupan area fogging sudah kami dasari dengan data epidemiologi dengan angka kasus penyakit dan kepadatan populasi nyamuk, dengan penggunaan bahan insektisida yang berganti untuk menghindari resistensi vektor DBD (nyamuk Aedes Aegypti) 7. Saran diterima

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	8) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan apa yang tidak berjalan; 9) Banyak permasalahan yang menjadi perhatian Urusan Kesehatan diantaranya : - Masih banyak adanya kasus kematian ibu dan bayi; - Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting; - Masih banyaknya kasus ibu hamil KEK dan Anemia; - Masih rendahnya success rate TB dan; - Masih tingginya prevalensi hipertensi . 10) Peningkatan kasus DBD; 11) Dua kali bencana banjir signifikan selama tahun 2024 yang berpengaruh pada munculnya penyakit pasca banjir; 12) Rendahnya rasio dokter umum di sejumlah fasilitas kesehatan, yang dinilai belum memadai untuk melayani jumlah penduduk; 13) Evaluasi Kualitas air minum rumah tangga. Saran : - Pemerintah Kabupaten Grobogan harus ada pembenahan perencanaan anggaran dalam setiap perencanaan APBD; - Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus memberi sanksi Pengguna Anggaran yang sengaja menyalahgunakan anggaran yang tidak terserap; - Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus memperhatikan penurunan AKI, AKB		8. Saran diterima, evakuasi korban banjir sudah melibatkan koordinasi antara tim SAR dan tenaga Dinas Kesehatan, dimulai dari penilaian cepat kondisi medis korban di lokasi bencana hingga penyediaan fasilitas kesehatan di tempat pengungsian. 9. Saran diterima, obat-obatan pasca-banjir untuk mengantisipasi penyakit umum seperti diare, penyakit kulit, demam berdarah, dan ISPA, sudah di siapkan oleh Dinas Kesehatan. 10. Saran diterima 11. Saran diterima 12. Saran diterima 13. Saran diterima 14. Saran diterima 15. Saran diterima

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	dan AKABA dan peningkatan Kesehatan Keluarga, Penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, DBD, Paru dan yang lain, serta memperhatikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; 4) Implementasi program 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang plus perlindungan diri) secara intensif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat; 5) Pembentukan kader jumantik (juru pemantau jentik) di setiap RT/RW untuk pemantauan rutin; 6) Penjadwalan fogging yang konsisten dan teratur di wilayah endemis; 7) Penggunaan sistem peringatan dini untuk deteksi dan respons cepat terhadap peningkatan kasus; 8) Evakuasi korban banjir yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan; 9) Penyiapan paket kesehatan dan obat-obatan untukantisipasi penyakit pasca-banjir; 10) Pengawasan kualitas air bersih secara intensif di daerah terdampak banjir; 11) Pembentukan tim siaga bencana kesehatan di setiap kecamatan rawan banjir; 12) Pemberian insentif khusus untuk tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah dengan rasio dokter umum rendah; 13) Pengembangan program dokter terbang atau dokter keliling untuk menjangkau daerah yang kekurangan tenaga dokter; 14) Perluasan cakupan pengawasan kualitas air minum ke seluruh desa;		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	15) Pengembangan program penyediaan teknologi penjernihan air sederhana untuk wilayah dengan kualitas air buruk.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
4.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG <u>Permasalahan:</u> 1) Urusan PUPR, Program Penunjang pemerintahan Daerah target 100% realisasi 90,82% dengan anggaran Rp.21.853.282.100,- Rp.19.847.027.978,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.2.006.254.122,-; 2) Urusan PUPR, Program Pengelolaan Sumber Daya Air target 100% realisasi 96,41% dengan anggaran Rp.41.677.179.140,- Rp.41.351.609.200,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.325.569.940,-; 3) Urusan PUPR, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, program yang tidak didanai atau tidak ada anggarannya; 4) Urusan PUPR, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase target 100% realisasi 98,86% dengan anggaran Rp.6.849.910.710,-	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Pada TA 2025 Dinas PUPR sudah memfokuskan anggaran pada pelaksanaan Program yang membutuhkan penanganan maksimal serta dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Program penanganan banjir terus dilaksanakan dan selalu menjadi fokus utama dari Dinas PUPR dengan menganggarkan Penanganan Banjir berupa Normalisasi Sungai. 3. – 4. – 5. Dinas PUPR untuk meningkatkan Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan lebih memfokuskan dalam hal peningkatan infrastruktur air yang berkelanjutan untuk mengatasi kekeringan serta meningkatkan produksi pangan. 6. – 7. Akan dilaksanakan Perbaikan tebing serta tanggul-tanggul yang jebol guna mengurangi banjir yang ada 8. Akan dilaksanakan dengan meningkatkan saluran drainase baik di perkotaan dan di perdesaan serta akan melakukan perencanaan masterplan drainase di purwodadi guna mengatasi terjadinya luapan air yang

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Rp.6.517.590.230,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.332.320.480,-; 5) Urusan PUPR, Program Penataan Bangunan Gedung target 100% realisasi 94,44% dengan anggaran Rp.636.200.000,- realisasi Rp.521.719.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.114.481.000,-; 6) Urusan PUPR, Program Penyelenggaraan Jalan target 100% realisasi 92,20% dengan anggaran Rp.78.230.013.700,- realisasi Rp.75.130.331.351,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.3.099.682.349,-; 7) Urusan PUPR, Program Pengembangan Jasa Konstruksi target 100% realisasi 94,76% dengan anggaran Rp.325.195.250,- realisasi Rp.313.873.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.11.322.250,-; 8) Urusan PUPR, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang target 100% realisasi 98,61% dengan anggaran Rp.805.338.000,- realisasi Rp.783.263.400,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.22.074.600,-; 9) Permasalahan di PUPR diatas ada anggaran sisa disebabkan karena perencanaan atau sisa tender yang sudah selesai, karena dari target 100% ada beberapa program yang tidak terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus bisa menjelaskan; 10) Permasalahan yang sering didapatkan PUPR diantaranya sebagai berikut : a. Adanya pengurangan anggaran atas efisiensi anggaran berkaitan program		diakibatkan dari tingginya curah hujan serta luapan kali lusi yang sering kali mengakibatkan banjir di area perkotaan purwodadi.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	PUPR tahun 2024, berdampak kepada tidak terlaksananya beberapa Pembangunan infrasetruktur perkotaan dan Desa; b. Banyaknya infrasetruktur jaringan trotoar, jalan, jembatan, drainase dan irigasi yang memerlukan peningkatan fungsi; c. Kurangnya kepedulian kesadaran Masyarakat terhadap infrastuktur di perkotaan seperti pembuangan sampah, grill saluran drainase banyak yang hilang, pemanfaatan saluran trotoar dengan tidak semestinya; d. Perlunya kesadaran Masyarakat terhadap pemanfaatan lahan di wilayah PUPR; e. Meningkatnya lahan kritis menjadi masalah serius yang berdampak pada bencana banjir. Saran : 1. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus memperhatikan program PUPR berjalan maksimal, karena permasalahan jalan, Sungai dan yang lain butuh perhatian serius; 2. Atasi banjir segera, Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah masuk darurat banjir; 3. Pemerintah Kabupaten Grobogan segera berbenah terhadap permasalahan yang berkaitan program-program yang dianggarkan; 4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Pemerintah perlu melakukan audit terhadap kualitas		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	infrastruktur yang ada dan memperbaiki yang rusak atau tidak optimal. Fokus pada trotoar dan drainase di pusat kota dan area padat penduduk agar dapat memperlancar aliran air dan menghindari banjir. Selain hal tersebut, Pemerintah perlu memperhatikan kualitas serta kondisi jembatan-jembatan penghubung antar desa maupun antar kecamatan; 5. Pemerintah perlu meningkatkan pemantauan dan pengelolaan sistem irigasi, serta memperhatikan kebutuhan infrastruktur air yang efisien. Pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan harus menjadi prioritas, terutama di wilayah-wilayah rawan kekeringan atau banjir; 6. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan lahan, terutama di daerah-daerah rawan bencana banjir. Pengaturan zonasi yang lebih tegas harus diterapkan, untuk mencegah pembangunan di lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Selain pencegahan, upaya rehabilitasi lahan kritis juga perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana alam, seperti banjir dan longsor. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta dan lembaga non-pemerintah untuk melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan. 7. Percepat perbaikan tanggul-tanggul yang jebol dengan koordinasi dengan pihak terkait; 8. Tingkatkan kapasitas saluran drainase perkotaan dan perdesaan.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
6.	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Permasalahan : 1) Satpol PP, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, target 100% realisasi 94,11% dengan anggaran Rp.3.862.138.000,- realisasi Rp.3.634.898.440,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.227.239.560,-; 2) Satpol PP, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, target 100% realisasi 96,63% dengan anggaran Rp.2.080.594.000,- realisasi Rp.2.010.638.965,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.69.955.035,-; 3) Satpol PP, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 98,03% dengan anggaran Rp.6.132.773.000,- realisasi Rp.6.012.096.506,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.120.676.494,-; 4) Badan Kesbangpol, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 97,72% dengan anggaran Rp.4.569.141.500,- realisasi Rp.4.464.832.914,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.104.308.586,-; 5) Badan Kesbangpol, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, target 100% realisasi 99,36% dengan anggaran Rp.635.000.000,- realisasi	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan. UU No 9 tahun 2015 Perubahan Kedua dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Perda Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang	Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menempatkan Kepala Dinas, Kepala Badan, serta pejabat struktural secara proporsional dan profesional sesuai disiplin ilmu, kompetensi manajerial, dan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan program urusan trantibum linmas lebih efektif. Penguatan SDM perencanaan anggaran perlu dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, sehingga penyusunan anggaran Satpol PP, Linmas, dan Damkar lebih akurat, realistis, dan mampu meminimalisir sisa anggaran yang tidak terserap. Pemkab Grobogan perlu mendorong inovasi peningkatan PAD, terutama dari sektor penegakan Perda seperti retribusi izin reklame, penataan PKL, serta pengelolaan kawasan tertib. Optimalisasi PAD ini harus tetap memperhatikan aspek pelayanan publik dan sosial masyarakat. Peningkatan pencegahan, kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha : 1. Melakukan proteksi sarana dan prasarana kebakaran secara berkala pada bangunan komersial, bangunan publik, bangunan industri dll; 2. Meningkatkan jumlah relawan pemadam pemadam kebakaran (REDKAR) ditingkat desa untuk membantu dalam pencegahan dan respons cepat sebelum armada

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Rp.630.966.100,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.4.033.900,-; 6) Badan Kesbangpol, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, target 100% realisasi 99,29% dengan anggaran Rp.2.445.880.800,- realisasi Rp.2.428.552.660,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.17.328.140,-; 7) Badan Kesbangpol, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, target 100% realisasi 99,97% dengan anggaran Rp.40.250.200.000,- realisasi Rp.40.237.129.200,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.13.070.800,-; 8) Badan Kesbangpol, Program Pembinaan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, target 100% realisasi 96,45% dengan anggaran Rp.60.000.000,- realisasi Rp.57.870.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.2.130.000,-; 9) Badan Kesbangpol, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, target 100% realisasi 95,52% dengan anggaran Rp.469.000.000,- realisasi Rp.447.990.400,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.21.009.600,-; 10) BPBD, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 97,64% dengan anggaran Rp.5.257.477.900,-	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	damkar tiba dilokasi, terutama mengingat wilayah Grobogan yang luas; 3. Melakukan sosialisasi/ edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang bahaya kebakaran cara menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), alat pemadam api tradisional (APAT), Prosedur evakuasi dan jenis – jenis hewan yang berbahaya. 4. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan SDM aparatur pemadam kebakaran melalui diklat damkar / rescue dan melakukan latihan mandiri di pos damkar 5. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan relawan pemadam kebakaran (REDKAR) 6. Upaya untuk meningkatkan personil Satpol PP dilak ukan secara rutin, baik secara mandiri maupun kerjasama pihak lain seperti TNI dan POLRI. 7. Adapun upaya untuk meningkatkan kapasitas Anggota Satlinmas Desa dilaksanakan melalui kerjasama dengan para Camat / para Kepala Desa dengan menggunakan Anggaran yang bersumber dari APBDes dan Anggaran Kecamatan. 8. Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang ketertiban umum karena perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencegah, menanggulangi, dan menertibkan perilaku yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, agama, adat, dan budaya masyarakat setempat. Peningkatan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Rp.5.133.233.002,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.124.244.898,-; 11) BPBD, Program Penanggulangan Bencana, target 100% realisasi 99,36% dengan anggaran Rp.7.890.311.300,- realisasi Rp.7.840.080.015,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.50.231.285,-; 12) Terhadap program urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat relative banyak anggaran yang tersisa, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan dalam program dari target dan realisasi 100% terlaksana, permasalahan dan pertanyaan yang muncul adalah sisa anggaran dari kegiatan apa yang tidak terserap atau sengaja dalam perencanaannya tidak tepat atau kurang cakap; 13) Dalam pembahasan anggaran untuk menambah sedikit anggaran di urusan tersebut betapa sulit, tetapi pelaksanaan anggaran malah terjadi sisa, maka untuk dievaluasi; 14) Permasalahan yang selalu dihadapi untuk urusan ketenteraman umum dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut : - Sarana dan Prasarana Lapangan, contohnya bidang damkar kendaraan khusus damkar, selalu tidak maksimal kalau digunakan; - Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi standart;		sosialisasi dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga ketertiban dan ketenteraman dapat terwujud secara bersama-sama. Selain itu, pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana juga penting sebagai upaya perlindungan dan pengurangan dampak bencana yang mungkin terjadi, sesuai dengan peran Satpol PP dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forum komunikasi dan pendidikan masyarakat ini sangat membantu mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perda serta pemeliharaan ketertiban dan kesiapsiagaan bencana. Sosialisasi tentang Ketertiban Umum perlu diperluas ke seluruh desa/kelurahan, termasuk pembentukan forum komunikasi masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Grobogan dan mengurangi pelanggaran Perda seperti parkir liar, reklame ilegal, dan penataan PKL. 9. Pengembangan aplikasi pelaporan gangguan keamanan berbasis smartphone, seperti aplikasi IC4 yang diluncurkan oleh PT Digital Forensic Indonesia, dapat memudahkan koordinasi antara masyarakat dan aparat keamanan melalui fitur pelaporan kejahatan online secara

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	c. Kurang maksimal sosialisasi perda, sehingga banyak Masyarakat yang melanggar perda dan masyarakat sangat kurang memahami perda dan perkara; d. Terhadap penanganan BPBD tidak maksimalnya beberapa dokumen sarana dan prasarana minimal dari tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan resiko dari penanggulangan bencana; e. Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan serius terkait bencana alam dan kekeringan yang berdampak pada masalah ketentrman dan ketertiban; f. Pentingnya sinergi antara kepolisian dengan ulama dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menempatkan Kepala Dinas dan Kepala Badan yang sesuai dengan Disiplin Ilmu secara proposional dan profesional; 2) Memberi SDM yang cakap dalam perencanaan anggaran; 3) Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah saatnya inovasi dalam peningkatan PAD; 4) Pemerintah Kabupaten Grobogan secara terukur harus segera meningkatkan program paska pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran; 5) Penanggulangan Bencana adalah prioritas Pemerintahan Kabupaten Grobogan kedepan;		cepat dan mudah. Aplikasi ini juga memberikan edukasi dan perlindungan terhadap kejahatan siber, sehingga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan keamanan digital maupun fisik. Selain itu, pemasangan CCTV di tempat-tempat strategis dengan sistem pemantauan terpadu dapat memperkuat pengawasan keamanan secara real-time, membantu aparat keamanan dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara efisien. Kombinasi teknologi aplikasi pelaporan dan sistem pengawasan terpadu memberikan solusi komprehensif untuk meningkatkan keamanan masyarakat secara proaktif dan responsif. Pemkab Grobogan perlu mengembangkan sistem digital keamanan daerah, seperti aplikasi pelaporan gangguan ketertiban berbasis smartphone, pemasangan CCTV di titik-titik rawan, serta ruang kontrol (command center) yang terintegrasi dengan Diskominfo, Polri, dan Satpol PP untuk meningkatkan respons cepat. Perlu dibentuk tim koordinasi terpadu tingkat kabupaten yang melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan instansi terkait lainnya, lengkap dengan sistem informasi bersama. Tim ini bertujuan memperkuat respons penanganan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	6) Peningkatan kapasitas personel Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan melalui pelatihan berkala tentang penanganan konflik, manajemen kerumunan, dan penanganan bencana; 7) Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya ketertiban umum. Pembentukan forum komunikasi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat di daerah rawan bencana juga penting untuk mengurangi dampak bencana; 8) Pengembangan aplikasi pelaporan gangguan keamanan berbasis smartphone dapat memudahkan koordinasi antara masyarakat dan aparat keamanan. Pemasangan CCTV di tempat-tempat strategis dengan sistem pemantauan terpadu juga dapat meningkatkan pengawasan keamanan; 9) Pembentukan tim koordinasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait lainnya dapat meningkatkan efektivitas penanganan Kamtibmas. Pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh semua instansi terkait juga penting untuk mendukung pengambilan keputusan.		kamtibmas, bencana, dan kedaruratan secara terpadu dan cepat. Team ini sangat mendukung efektivitas penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tim ini meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam mencegah dan menangani gangguan keamanan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat pusat maupun daerah. Pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh instansi terkait sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, karena memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time sehingga mendorong koordinasi lebih baik dalam merespons berbagai kondisi Kamtibmas. Model koordinasi terpadu ini telah diterapkan dalam berbagai program dan rapat koordinasi secara rutin untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
7.	URUSAN SOSIAL <u>Permasalahan :</u> 1) Dinas Sosial, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 95,39% dengan anggaran Rp.5.065.875.604,- realisasi Rp.4.832.353.341,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.233.522.263,-; 2) Dinas Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, target 100% realisasi 98,13% dengan anggaran Rp.110.930.000,- realisasi Rp.108.855.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.2.075.000,-; 3) Dinas Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, target 100% realisasi 98,64% dengan anggaran Rp.1.006.530.000,- realisasi Rp.992.889.800,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.13.640.200,-; 4) Dinas Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, target 100% realisasi 99,97% dengan anggaran Rp.7.644.071.000,- realisasi Rp.7.641.931.750,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.2.139.250,-; 5) Dinas Sosial, Program Penanganan Bencana, target 100% realisasi 99,51% dengan anggaran yang tidak tertulis dilaporkan,	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1) Sebagai dasar pemutakhiran data, kami berpedoman pada ketentuan teknis Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG, termasuk sinkronisasi data kependudukan dengan dukcapil. Dan untuk tahun 2025, data yang digunakan adalah DTSEN yang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Update data dilaksanakan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan juga sedang berupaya aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, BPS, dan instansi teknis lainnya, agar proses pendataan dapat berjalan sebaik mungkin. Selain itu, penetapan indikator pendataan terus diperjelas dan disosialisasikan kepada petugas lapangan serta masyarakat, sehingga proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak menimbulkan permasalahan maupun kesalahpahaman di masyarakat.

	namun kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaannya realisasi 100%; 6) Dinas Sosial, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, target 100% realisasi 99,17% dengan anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.750.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.250.000,-; 7) Dilihat dari penyerapan anggaran di Dinas Sosial pencapaian kinerja Outcome Pemerintah Kabupaten Grobogan cukup baik meskipun ada sisa anggaran yang juga lumayan; 8) Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial adalah : a. Permasalahannya dengan system kinerja berbasis anggaran, maka pada saat terjadi rasionalisasi anggaran akan berdampak kepada pelayanan minimum secara kualitas maupun secara kuantitas; b. SPM yang bersifat bimbingan dan pemberdayaan selama ini baru berupa pelatihan ketrampilan dasar kedepannya bagi desabilitas yang memiliki embrio usaha dapat lebih didorong untuk lebih produktif dan berkembang, dengan cara pengalokasian anggaran berupa bantuan kewirausahaan sebagai stimulan modal untuk menjamin kelangsungan usaha dan menopang kemandirian hidup secara ekonomi; c. Keterbatasan jumlah kamar isolasi dan adanya ruang terbuka yang terbengkalai di area rumah singgah,		Terima kasih atas saran yang diberikan, sebagai dasar pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat, kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana. Selanjutnya Dinas Sosial telah dan akan terus melakukan langkah-langkah berikut: a. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas Tagana dan relawan Kampung Siaga Bencana (KSB) untuk memperkuat kesiapsiagaan. b. Memperkuat koordinasi lintas sektor bersama BPBD, kecamatan dan pemerintah desa dalam perencanaan dan penanganan siaga. c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah berisiko. d. Menyiapkan mekanisme tanggap cepat melalui pelaporan bencana, kesiapan logistik, dan mobilisasi Tagana untuk pendirian Dapur Umum ketika terjadi bencana. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran serta masyarakat serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
--	--	--	---

	perlu dilakukan pembenahan tau penambahan kamar isolasi untuk penanganan orang terlanjar dengan gangguan jiwa, termasuk kamar perawatan umum untuk penanganan lanjut usia dan disabilitas terlanjar; d. Banjir bandang melanda Kabupaten Grobogan, menyebabkan kerusakan signifikan di 32 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Banjir ini menyebabkan 2.662 rumah terendam, 56 hektar lahan pertanian tergenang, dan 6 sekolah terkena dampak; e. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 mencapai 11,43%, lebih tinggi dari rata-rata nasional (sekitar 9%) dan rata-rata Jawa Tengah (sekitar 10%); f. Meskipun telah ada upaya untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 dan pemberian bantuan alat bantu mobilitas, masih terdapat tantangan signifikan dalam penanganan isu disabilitas di Grobogan; g. Permasalahan stunting masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Grobogan tahun 2024, dengan berbagai upaya dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target Zero Stunting; h. Polres Grobogan telah mengidentifikasi perlunya penanganan preventif terhadap masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar;	Terkait Perbaikan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Evakuasi dan Distribusi Bantuan Sosial Bencana a) Dasar Hukum Pelaksanaan kegiatan evakuasi dan distribusi bantuan sosial oleh Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial, yang menegaskan bahwa: • Penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. • Melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik unsur pemerintah maupun masyarakat/relawan. • Berorientasi pada perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. b) Upaya Penguatan Koordinasi Lintas Sektoral Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain: • BPBD sebagai leading sector penanggulangan bencana, khususnya dalam perencanaan, komando evakuasi, dan penanganan darurat. • Dinas Kesehatan dalam penanganan aspek kesehatan darurat, layanan di lokasi pengungsian, serta dukungan psikososial awal.
--	--	---

	i. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2024 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan bantuan sosial6, namun implementasinya masih perlu diperkuat. 9) Target dan realisasi program dan kegiatan yang sudah terlaksana Dinas Sosial harus memperhatikan perencanaan dan anggaran secara efektif, berkualitas, dengan harapan tidak ada sisa anggaran lebih yang tidak dipergunakan. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan agar memperhatikan Update data terpadu kesejahteraan social (DTSK) yang tidak pernah kunjung selesai; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan mengoptimalkan peran Karang Taruna Kabupaten diwilayah perkotaan dan pedesaan; 3) Dalam program rehabilitasi social Pemerintah Kabupaten Grobogan yang harus sangat diperhatikan adalah Kegiatan rehabilitasi social dasar penyandang diabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti social; 4) Dalam hal penanggulangan bencana yang dihadapi segera ditindaklanjuti adalah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan, kordinasi, sosialisasi dalam tanggap siaga bencana;	• Organisasi relawan, seperti TAGANA, PMI, dan relawan kemanusiaan lainnya untuk mendukung proses evakuasi, dapur umum, dan distribusi logistik. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, komunikasi cepat saat tanggap darurat, pembagian tugas yang jelas, serta sinergi di lokasi terdampak dan pengungsian. c) Pelaksanaan Evakuasi dan Distribusi Bantuan Sesuai amanat Permensos Nomor 26 Tahun 2015, Dinas Sosial melaksanakan peran sebagai berikut: • Mendukung proses evakuasi korban terdampak bencana bersama BPBD dan relawan. • Melakukan pendataan dan verifikasi korban bencana, khususnya kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak-anak, ibu hamil/menyusui). • Menyediakan dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar, seperti: ◦ Sandang dan pangan ◦ Selimut dan matras ◦ Paket kebutuhan keluarga ◦ Perlengkapan dapur umum • Mengelola dan mendukung operasional posko pengungsian dan dapur umum lapangan. d) Penguatan Sistem Informasi dan Pelaporan Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas, Dinas Sosial juga mengoptimalkan:
--	---	---

	5) Memperbaiki koordinasi lintas sektoral untuk evakuasi dan distribusi bantuan sosial; 6) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi khusus untuk petani, mengingat 52% masyarakat miskin di Grobogan adalah petani; 7) Memperbaiki akurasi data kemiskinan untuk penentuan target penerima bantuan sosial yang lebih tepat; 8) Memanfaatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem; 9) Melengkapi fasilitas publik dan sekolah dengan infrastruktur ramah disabilitas seperti akses kursi roda dan toilet khusus; 10) Menyediakan program pelatihan keterampilan dan dukungan pemasaran produk bagi penyandang disabilitas untuk membangun usaha mandiri²; 11) Memperkuat regulasi daerah yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan akses fasilitas umum; 12) Melanjutkan kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank Jateng dan Bank BKK untuk meningkatkan dukungan bagi penyandang disabilitas; 13) Memperkuat koordinasi Tim Audit Stunting yang telah dibentuk melalui SK Bupati Grobogan No. 440/506/2022; 14) Memastikan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita di Puskesmas untuk pemantauan perkembangan anak secara berkala;	• Pelaporan cepat dari petugas lapangan dan relawan • Rekapitulasi data korban dan kebutuhan berbasis lokasi • Sinkronisasi data dengan BPBD dan instansi terkait • Dokumentasi dan pelaporan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan ke depan Langkah ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih bantuan serta memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tepat guna. e) Komitmen dan Tindak Lanjut Ke depan, Dinas Sosial berkomitmen untuk terus: • Memperkuat sinergi lintas sektor • Meningkatkan kapasitas SDM dan relawan kebencanaan • Mengoptimalkan kesiapsiagaan melalui pelatihan dan simulasi rutin • Mengembangkan sistem distribusi bantuan yang lebih terencana dan responsif Sebagai dasar pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan kami berpedoman pada Pedoman teknis pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG yang mewajibkan daerah melakukan verifikasi faktual dan sinkronisasi data dengan Dukcapil. Sebagai tindak lanjut atas saran DPRD, Dinas Sosial telah dan akan terus mengambil langkah-langkah berikut: a. Meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi (verval) data melalui koordinasi
--	--	---

	15) Memastikan distribusi PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi ibu hamil dan balita berjalan efektif; 16) Memberikan suplemen zat besi secara gratis kepada ibu hamil untuk mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan janin; 17) Melanjutkan program pembinaan dan penyuluhan bagi siswa tentang bahaya narkoba, bullying, dan pentingnya tertib berlalu lintas; 18) Memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan aparat keamanan dalam pemantauan dan pencegahan kenakalan remaja; 19) Menyediakan kegiatan positif dan konstruktif bagi remaja sebagai alternatif pencegahan; 20) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial; 21) Memastikan monitoring dan evaluasi berjalan efektif untuk memastikan bantuan tepat sasaran; 22) Mengoptimalkan sistem "ATRI-BUT" (Akurasi Terbaik dengan Data Terpadu) untuk meningkatkan akuntabilitas penanggulangan kemiskinan.		intensif dengan pemerintah desa/kelurahan, TSKS, dan operator DTKS. b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan berjenjang, serta memastikan proses usulan baru, penghapusan, dan perbaikan data berjalan sesuai ketentuan. c. Meningkatkan kapasitas operator desa/kelurahan dan petugas lapangan melalui pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan SIKS-NG dan tata cara verval. d. Mengupayakan keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa untuk memastikan usulan penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang aktual. Terima kasih atas sarannya, sesuai dengan SK Bupati tersebut, kami akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan audit dari BKKBN, yang menekankan pentingnya peran lintas sektor dan integrasi data dalam penyusunan rekomendasi perbaikan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial telah dan akan terus melakukan langkah-langkah berikut: a. Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Bappeda, DP3AKB, dan unsur kecamatan/desa untuk memastikan proses audit kasus berjalan efektif dan tepat waktu. b. Mengikuti rapat koordinasi, reviu kasus, dan pembahasan rekomendasi secara berkala sesuai jadwal Tim Audit Stunting.
--	---	--	--

		c. Mendukung tindak lanjut rekomendasi penanganan kasus melalui intervensi bantuan sosial, penguatan P2K2, serta pemantauan kondisi keluarga sasaran. Terima kasih atas sarannya, terkait optimalisasi Sistem "ATRI-BUT" (Akurasi Terbaik dengan Data Terpadu) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penanggulangan Kemiskinan, ada beberapa hal yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas Sosial, yaitu: a) Komitmen Peningkatan Akurasi Data Dinas Sosial mendukung penuh upaya optimalisasi sistem "ATRI-BUT" (Akurasi Terbaik dengan Data Terpadu) sebagai instrumen penting dalam meningkatkan keakuratan, validitas, dan integritas data masyarakat miskin dan rentan. Data yang akurat menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan. b) Sinkronisasi dengan Sistem Nasional Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial terus melakukan sinkronisasi dan integrasi data dengan sistem nasional, seperti DTSEN, SIKS-NG, dan data kependudukan (Dukcapil), guna memastikan kesesuaian dan keterpaduan data lintas sektor serta meminimalisir potensi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. c) Penguatan Koordinasi Lintas OPD dan Desa/Kelurahan Optimalisasi ATRI-BUT juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait (Bappeda, Dispendukcapil, Dinkes,
--	--	--

			Dinas Pendidikan, dan OPD lainnya) serta pemerintah desa/kelurahan sebagai ujung tombak pendataan di lapangan. Proses verifikasi dan validasi (verval) dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan pendamping dan aparat setempat. d) Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Dinas Sosial secara bertahap meningkatkan kapasitas SDM pengelola data melalui pelatihan teknis serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses input, pembaruan, dan pelaporan data. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi. e) Dampak atas Akuntabilitas Penanggulangan Kemiskinan Dengan optimalisasi sistem ATRI-BUT, diharapkan program bantuan sosial dan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan dapat semakin tepat sasaran, terukur, tidak tumpang tindih, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun publik.
--	--	--	--

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
8.	URUSAN TENAGA KERJA Permasalahan : 1) Disnakertran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Terimakasih atas saran yang diberikan : 1. Saran : Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menempatkan SDM perencanaan anggaran yang cakap, agar dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tidak

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	100% realisasi 92,52% dengan anggaran Rp.6.533.880.117,- realisasi Rp.6.045.765.387,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.488.114.730,-; 2) Disnakertran, ada sisa anggaran dalam program tersebut cukup banyak, sedangkan kegiatan terealisasi 100%, maka timbul permasalahan dan pertanyaan tersisa dari anggaran apa yang kegiatan dan sub kegiatannya sdh terlaksana, apakah perencanaannya yang salah, halmana harus menjadi perhatian; 3) Disnakertran, Program Perencanaan Tenaga Kerja, target 100% realisasi 88,52% dengan anggaran Rp.105.974.532,- realisasi Rp.93.810.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.12.164.532,-; 4) Disnakertran, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, target 100% realisasi 97,67% dengan anggaran Rp.10.158.628.361,- realisasi Rp.9.922.553.910,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.236.074.451,-; 5) Disnakertran, Program Penempatan Tenaga Kerja, target 100% realisasi 92,73% dengan anggaran Rp.555.688.990,- realisasi	Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Grobogan.	mensisakan anggaran yang lebih. Tanggapan : Koordinasi antara Subag Perencanaan dan Bidang maupun UPTD BLK akan terus kami perbaiki, sehingga usulan anggaran dapat ditentukan dengan tepat dan realisasi bisa optimal, tidak menisakan anggaran yang besar. Masalah terselesaikan No 1, No 2, No 3, No 4, No 5 dan No 6 2. Saran : Pemerintah Kabupaten Grobogan segera berbenah terhadap Tenaga Kerja yang disesuaikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tanggapan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan pembinaan dan pemantauan secara intensif kepada perusahaan agar mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan telah melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan terkait pentingnya perusahaan mendaftarkan pekerjaanya ke program perlindungan tenaga kerja sesuai dengan amanat dari UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Rp.515.345.435,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.40.343.555,-; 6) Disnakertran, Program Hubungan Industrial, target 100% realisasi 99,25% dengan anggaran Rp.400.000.000,- realisasi Rp.397.039.070,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.2.960.930,-; 7) Disnakertran, dari beberapa program tersebut ada beberapa permasalahan : a. Tidak maksimalnya pemantauan dan validasi data TKA khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan dan tidak maksimalnya pemantauan monitoring TKA serta pembinaan ke perusahaan mengenai pelaporan keberadaan TKA di Kabupaten Grobogan; b. Masih adanya Perusahaan tidak mengikutkan tenaga kerja terhadap pendaftaran tenaga kerja untuk ikut Jaminan Sosial Tenaga Kerja; c. Kurang maksimalnya pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD); d. Kurangnya kesesuaian Pelatihan dengan Kebutuhan Pasar Kerja;		Sosial. Selain kunjungan ke perusahaan baru di CV Jaya Setya Plastik Grobogan. Kami juga melakukan pembinaan kewajiban pengusaha mendaftarkan pekerja dalam program kepesertaan BPJS tersebut saat kami diundang dalam pemeriksaan dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) di PT Viridi Group Manufaktur, PT Karya Podo Moro, PT Harmoni Cahaya Indonesia, termasuk beberapa perusahaan yang berkonsultasi langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan seperti Rumah Sakit Permata Utama dan PT Universal Agri Bisnisindo. Menyelesaikan masalah No 7 b 3. Saran : Pemerintah Kabupaten Grobogan segera memonitoring dan pembinaan secara berkala terhadap TKA. Tanggapan : a) Untuk Validasi data TKA sudah dilaksanakan pada saat pemberi kerja mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan akan melakukan pembayaran Retribusi, Untuk pemantauan merupakan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Provinsi. b) Menyampaikan arahan kepada Pengguna Tenaga Kerja asing mengenai pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing pada saat pengguna tenaga kerja

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	e. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari Grobogan. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menempatkan SDM perencanaan anggaran yang cakup, agar dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tidak mensisakan anggaran yang lebih; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera berbenah terhadap Tenaga Kerja yang disesuaikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2011; 3) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera memonitoring dan pembinaan secara berkala terhadap TKA; 4) Peningkatan kapasitas BLK tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas pelatihan; 5) Penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri melalui kemitraan aktif dengan sektor swasta; 6) Pengembangan program magang terstruktur dengan perusahaan-perusahaan di Grobogan dan sekitarnya;		asing mengajukan permohonan validasi pemayara tenaga kerja asing. Menyelesaikan permasalahan No 7a dan 7c 4. Saran : Peningkatan kapasitas BLK tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Tanggapan : BLK telah Melaksanakan sertifikasi pelatihan bekerja sama dengan LSP / BNSP sehingga setiap alumni UPTD BLK bukan hanya mendapatkan sertifikat kelulusan dari UPTD BLK tetapi juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang berskala nasional. Hal tersebut akan mempermudah alumni pelatihan dari UPTD BLK dalam mencari pekerjaan karena memiliki sertifikat kompetensi yang kredibel. Menyelesaikan permasalahan No 7 d 5. Saran : Penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri melalui kemitraan aktif dengan sektor swasta. Tanggapan : Dalam rangka penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri, UPTD BLK telah melaksanakan Training Need Analysis (TNA) ke Perusahaan dan UMKM yang bertujuan untuk mengetahui materi/kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri untuk selanjutnya

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
7)	Penguatan sistem informasi dan pemantauan PMI asal Grobogan;		dimasukkan dalam kurikulum pelatihan di tahun berikutnya.
8)	Peningkatan kualitas pelatihan pra-keberangkatan yang lebih komprehensif;		6. Saran : Pengembangan program magang terstruktur dengan perusahaan-perusahaan di Grobogan dan sekitarnya. Tanggapan : BLK telah melaksanakan MoU dengan perusahaan dan UMKM terkait penempatan alumni pelatihan sesuai bidang kompetensi yang dilatih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan <i>outcome</i> pelatihan dan menurunkan angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Menyelesaikan permasalahan No 7 d
9)	Penyelenggaraan Job Fair secara berkala (tidak hanya tahunan);		
10)	Pengembangan platform digital bursa kerja khusus Kabupaten Grobogan;		
11)	Pembentukan jaringan informasi lowongan kerja yang terintegrasi dengan sekolah dan perguruan tinggi.		7. Saran Penguatan sistem informasi dan pemantauan PMI asal Grobogan : Tanggapan : Kegiatan ini sudah masuk dalam sistem informasi online melalui aplikasi <i>siapkerja.kemnaker</i> yang berlaku secara nasional, juga aplikasi <i>siskop2mi</i> . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai admin dalam verifikasi dan notifikasi sistem yg tersedia sesuai domisili CPMI. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memaksimalkan sistem informasi yang telah disediakan oleh @Kemnaker dan KP2MI (Kementerian Pelindungan PMI). Menyelesaikan permasalahan no 7e.
			8. Saran : Peningkatan kualitas pelatihan pra-keberangkatan yang lebih

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			komprehensif. Tanggapan : Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah melakukan kerjasama dan pembinaan dengan BLK LN terkait pelatihan pra keberangkatan. Kualitas pelatihan cukup baik sesuai kebutuhan pasar kerja. 9. Saran : Penyelenggaraan Job Fair secara berkala (tidak hanya tahunan) Tanggapan : Saran kami terima. Penyelenggaraan Jobfair secara berkala (tidak tahunan) , penting untuk di adakan minimal per semester untuk lebih meningkatkan penyebarluasan informasi lowongan kerja dari berbagai perusahaan yg membutuhkan tenaga kerja dan Masyarakat pencari kerja. Namun demikian karena keterbatasan anggaran, Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi baru bisa melaksanakan Job Fair sekali dalam satu tahun. 10. Saran : Pengembangan platform digital bursa kerja khusus Kabupaten Grobogan. Tanggapan : belum dikembangkan karena terbatasnya anggaran dan banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja belum mendaftar secara online. 11. Saran : Pembentukan jaringan informasi lowongan kerja yang terintegrasi dengan sekolah dan perguruan tinggi. Tanggapan : Belum dilakukan karena banyak

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			perusahaan tidak update kebutuhan tenaga kerja. Menjelang job Fair baru dilakukan penawaran kebutuhan tenaga kerja ke perusahaan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
9.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <u>Permasalahan :</u> 1) DP3AKB, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 91,71% dengan anggaran Rp.6.730.089.700,- realisasi Rp.6.172.000.062,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.588.089.738,-; 2) Dalam Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas tertulis dalam 12 bulan realisasi 100%, permasalahan dan pertanyaanya adalah sisa anggaran kegiatan dan sub kegiatan apa yang outcomenya menyisakan anggaran sebesar tersebut; 3) DP3AKB, Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, target 100% realisasi 99,28% dengan anggaran Rp.591.588.200,- realisasi	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	<u>Jawaban atas permasalahan :</u> - 6).Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) telah terealisasi 94,14% dengan anggaran Rp 279.481.600,- terjadi silfa anggaran sebesar Rp 17.411.100,- dengan perincian sebagai berikut : 1. Dari 34 kali pertemuan ada silfa honor narasumber dari OPD penyelenggara karena ada kebijakan honor narasumber internal sebesar 50% = Rp15.300.000,- 2. Silfa dari ATK kegiatan = Rp 1.598.100,- 3. Silfa belanja natura = Rp 6.800,- 4. Silfa belanja makan minum = Rp 256.200,- 5. Silfa Belanja Tenaga Penanganan Sosial =Rp 200.000,- 6. Silfa tenaga kebersihan=Rp 50.000,-

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Rp.587.341.600,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.4.246.600,-; 4) DP3AKB, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, target 100% realisasi 98,18% dengan anggaran Rp.92.101.000,- realisasi Rp.90.429.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.1.672.000,-; 5) DP3AKB, Program Pengelolaan Data Gender dan Anak, Target 100% realisasi 99,05% dengan anggaran Rp.37.000.000,- realisasi Rp.36.650.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.350.000,-; 6) DP3AKB, Program Pemenuhan hak Anak (PHA), target 100% realisasi 94,14% dengan anggaran Rp.296.892.700,- realisasi Rp.279.481.600,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.17.411.100,-; 7) DP3AKB, dari program-program tersebut diatas masih banyaknya permasalahan yang ada diantaranya : a. Masih banyaknya korban kekerasan rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap anak; b. Masih banyaknya kenakalan anak-anak pelajar; c. Masih banyaknya perkawinan dibawah umur, anak hamil diluar nikah; d. Kurang berjalannya kordinasi antara pemangku kepentingan terhadap permasalahan kenakalan anak, hamil diluar nikah, hak kebersamaan Gender;		Pada tahun anggaran berikutnya akan lebih teliti lagi dalam menggunakan anggaran agar tidak terlalu banyak silfa. Jawaban atas saran : 1. Akan kami tindak lanjuti dengan menempatkan SDM perencanaan yang berkompeten 2). DP3AKB telah melaksanakan KIE untuk upaya pencegahan pernikahan usia anak melalui siaran radio melalui Purwodadi FM bersama Forum Anak Grobogan, melaksanakan kegiatan KIE dan konseling tentang pola asuh positif dalam keluarga melalui PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) "Nusa Bangsa", melaksanakan KIE pada saat Masa Orientasi Sekolah pada siswa/ siswi SMA, SMP, MA dan MTs. Selain itu bekerja sama dengan PUSPA (Forum Pemerintah Perempuan dan Anak) melaksanakan Edukasi pada beberapa sekolah dalam rangka untuk mencegah kekerasan dan mencegah pernikahan usia anak. Edukasi pendewasaan usia perkawinan juga dilakukan oleh Duta Genre dan Program PIK-R (pusat Informasi dan Konseling Remaja) 3). Sampai dengan November 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi PATBM pada 237 desa/ kelurahan. Sedangkan desa/kelurahan yang telah ber-SK dan melaksanakan program sebanyak 195 desa/ kelurahan dan terdapat

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	e. Keterbatasan Akses Layanan di Daerah Terpencil. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menempatkan SDM perencanaan anggaran di DP3AKB yang cakap, agar dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak sisa anggaran yang cuma-cuma; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera mendapatkan Solusi terhadap banyaknya anak yang hamil diluar nikah, segera meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganannya termasuk kenakalan anak-anak menginjak dewasa; 3) Memperkuat dan memperluas cakupan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ke seluruh desa di Kabupaten Grobogan; 4) Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping korban kekerasan di unit Swatantra (P2TP2A) Grobogan untuk memberikan penanganan yang lebih komprehensif; 5) Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih ramah korban dan mudah diakses, termasuk melalui platform digital dan hotline khusus; 6) Mengadopsi strategi nasional pencegahan perkawinan anak dengan lima pilar: optimalisasi kapasitas anak remaja,		PATBM Percontohan sebanyak 29 desa/kelurahan. 4). Peningkatan kapasitas tenaga pendamping korban kekerasan akan dilaksanakan setelah terbentuk UPTD PPA 5). Sistem pelaporan yang lebih ramah korban dan mudah diakses sudah dilakukan melalui SIMFONI (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). 6). Bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Grobogan dan Pengadilan Agama Purwodadi dalam upaya menurunkan jumlah Dispensasi Kawin. 7). Sampai dengan November 2025 sudah ada 171 Desa Layak Anak di Kabupaten Grobogan. 8). Optimalisasi fungsi koordinasi DP3AKB dengan lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, LBH dan OPD terkait lainnya untuk penanganan kasus secara terpadu telah dilaksanakan melalui Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak " SWATANTRA " Kabupaten Grobogan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	lingkungan yang mendukung, akses pengembangan dan layanan, regulasi hingga tingkat desa, dan koordinasi efektif; 7) Memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat desa melalui pengembangan Desa Layak Anak seperti yang telah diinisiasi di Desa Cingkrono; 8) Mengoptimalkan fungsi koordinasi DP3AKB dengan lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk penanganan kasus secara terpadu; 9) Membangun sistem informasi terpadu antar lembaga terkait untuk pemantauan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 10) Menjalin kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, seperti kerjasama yang telah diinisiasi dengan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) melalui Program Sekolah Perempuan Desa Kandangrejo.		9). Sudah dilaksanakan melalui SIMFONI Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). 10). Sudah dilaksanakan dengan Yayasan SETARA (yayasan pemberdayaan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak anak yang mana salah satu programnya adalah perlindungan anak) melalui program SAVE4C (Safe and Friendly Environment for Children) sebuah program yang bertujuan membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Kegiatannya : • Sosialisasi dan Pembentukan PATBM • Penampingan pencegahan kekerasan pada anak • Pendampingan penyusunan regulasi perlindungan anak di tingkat desa
NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
10.	URUSAN PANGAN <u>Permasalahannya :</u>	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025	1) Sependapat dan akan dijelaskan pada poin berikutnya;

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	1) DKPD, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 88,17% dengan anggaran Rp.5.836.014.000,- Rp.5.145.779.027,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.690.234.973,-; 2) Sisa anggaran program tersebut diatas sisa yang cukup banyak, apakah itu disengaja; 3) DKPD, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Target 100% realisasi 100% dengan anggaran Rp.30.000.000,-; 4) DKPD, Program Peningkatan Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, target 100% realisasi 93,57% dengan anggaran Rp.1.584.760.000,- Rp.1.571.636.855,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.13.123.145,-; 5) DKPD, Program Penanganan Kerawanan Pangan, target 100% realisasi Rp.83,72% dengan anggaran Rp.60.000.000,- realisasi Rp.56.329.250,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.3.670.750,-; 6) DKPD, Program Pengawasan Keamanan Pangan, target 100% realisasi 98,95% dengan anggaran Rp.70.000.000,- realisasi Rp.	tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	2) Pada Tahun Anggaran 2024, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di DKPD terdiri dari 7 Kegiatan 16 sub kegiatan. Tidak ada unsur kesengajaan dengan sisa anggaran Program sebesar Rp.690.234.973,- tersebut. Porsi terbesar dari sisa anggaran tersebut adalah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, khususnya pada pos anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai. Mengikuti arahan dari TAPD, pada saat perencanaan anggaran, terdapat wacana pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai SKPD dengan status PPPK. Akan tetapi hingga Tahun 2024 berakhir, wacana tersebut tidak bisa direalisasikan oleh karena tidak terdapat dasar hukum yang melandasinya. Sisa anggaran selainya berasal dari sisa atas pembayaran tagihan listrik, air dan telepon SKPD serta sisa-sisa kontrak pengadaan barang/jasa. 3) SEPENDAPAT 4) SEPENDAPAT 5) SEPENDAPAT 6) SEPENDAPAT 7) SEPENDAPAT

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	69.406.000,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 594.000,-; 7) Dari program-program DKPD tersebut diatas masih banyak permasalahan yang muncul diantaranya : a. Belum terkendalinya fluktuasi harga pangan dalam ekonomi global; b. Belum maksimalnya penggunaan Gudang pangan dipedesaan; c. Cendangan pangan dalam persediaan tidak maksimal penggunaannya; d. Tidak berfungsinya Gudang-gudang pangan di DKPD. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah saatnya punya SDM perencanaan anggaran yang mumpuni; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus bisa mengendalikan harga pasar yang kadang bergejolak yang sulit diatasi; 3) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera mefungsikan Gudang Cadangan Pangan di Desa Dapurno Kecamatan Wirosari secara maksimal dan mefungsikan banyaknya		JAWABAN ATAS SARAN : 1. Peningkatan Kualitas SDM Perencanaan Anggaran tentunya sudah dimulai pada saat proses rekrutmen dan dengan berjalannya waktu ditingkatkan terus melalui pemberian arahan, pembinaan, <i>reward dan punishment system</i> yang berjalan serta kebijakan yang mendukung, baik di tingkat nasional maupun lokal. 2. Dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Grobogan berusaha berperan dalam mengatasi DAMPAK inflasi harga pangan, baik dengan kegiatan-kegiatan berikut : - Kegiatan koordinatif dalam TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) - Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan para produsen pangan dalam beberapa kesempatan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) - Menggalakkan upaya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan pekarangan warga bekerja sama dengan Kelompok-

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Gudang atau lumbung-lumbung pangan yang ada di pedesaan.		Kelompok Wanita Tani (KWT) dan TP PKK masing-masing desa. - Memberikan respon cepat jika ada kelompok masyarakat yang mengalami kerawanan pangan karena berbagai sebab termasuk akibat dampak lonjakan harga pangan yang luar biasa. 3. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Grobogan selama ini telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai tempat penyimpanan stok bahan pangan untuk penanganan kasus-kasus kerawanan pangan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Grobogan. Sumber daya yang dimiliki, baik oleh DKPD sendiri maupun berkolaborasi dengan SKPD lain, telah mampu menjangkau sasaran hingga ke pelosok-pelosok Kabupaten Grobogan. Adapun terkait lumbung-lumbung pangan yang ada di desa-desa, DKPD juga senantiasa mengajak kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bangunan maupun sarana lumbung yang telah diberikan oleh Pemerintah.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
12.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Belanja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar Rp. 19.362.879.100,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 18.786.465.355,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 576.413.745,-; 2) Anggaran Urusan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; c. Program KEHATI; d. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahnya; e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; h. Program Pengelolaan Sampahan. 3) Permasalahan yang muncul urusan lingkungan hidup Kawasan hutan dengan tanaman keras menjadi hutan jagung, sehingga sering	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Saran diterima, Pemerintah Kabupaten Grobogan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi kawasan hutan melalui penataan yang didukung oleh kebijakan yang selaras dan tidak saling bertentangan, sehingga pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan serta mampu mengatasi degradasi lingkungan, ketidakteraturan pemanfaatan ruang, dan meningkatnya risiko bencana. 2. Retribusi layanan persampahan mengalami peningkatan target dipenetapan 2025 dan meningkat lagi di perubahan 2025. Ini menjadi indikator pendapatan dari layanan persampahan telah dalam jalur atau lintasan diharapkan. Sedang untuk keterlibatan investor/pihak ketiga dalam pengelolaan TPA telah berproses hingga saat ini telah terdapat empat calon investor potensial untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. 3. Saran diterima, DLH akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan reboisasi intensif di kawasan pegunungan dan hutan sebagai upaya memulihkan ekosistem yang terdegradasi melalui peningkatan tutupan vegetasi guna menjaga keseimbangan lingkungan, memperbaiki fungsi hidrologi, serta mencegah erosi

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	disalahkan setiap hujan mengakibatkan banjir bandang; 4) Permasalahan muncul juga terhadap pengelolaan retribusi persampahan dan TPA. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus menyelesaikan Kawasan hutan yang sudah alih fungsi dengan arah kebijakan yang tidak saling bertentangan; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menginovasi retribusi persampahan menjadikan PAD yang maksimal dan Pengelolaan sampah TPA segera ada penanganan khusus meski melibatkan pihak ketiga; 3) Lakukan reboisasi intensif di kawasan Pegunungan dan hutan; 4) Kembangkan program pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan tanaman keras dan tanaman semusim; 5) Terapkan teknologi pengelolaan lahan kritis seperti terasering, rorak, dan sumur resapan; 6) Memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu lintas kabupaten; 7) Perluas program Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ke lebih banyak wilayah; 8) Mengembangkan program edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumber;		dan bencana ekologis, sekaligus mengatasi permasalahan degradasi hutan, penurunan daya dukung lingkungan, meningkatnya risiko erosi dan longsor, berkurangnya ketersediaan air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. 4. Saran diterima, DLH akan mengembangkan program pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan tanaman keras (buah-buahan) dan tanaman semusim bekerja sama dengan instansi terkait, dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan, menjaga keseimbangan ekologi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, sekaligus mengatasi permasalahan degradasi lahan akibat monokultur, penurunan kesuburan dan daya dukung lingkungan, ketidakstabilan pendapatan petani, serta meningkatnya kerentanan terhadap erosi dan kekeringan 5. Saran diterima, DLH akan menerapkan terasering, rorak, dan sumur resapan, bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, menekan erosi, menjaga stabilitas lereng, serta memperbaiki fungsi ekologis lahan, sekaligus mengatasi degradasi lahan, banjir lokal,

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	9) Mengoptimalkan peran 5 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang sudah ada dan membentuk KSM baru di wilayah lain; 10) Membangun fasilitas pengolahan sampah organik menjadi kompos di tingkat desa; 11) Menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan ekonomis; 12) Menggalakkan program penghijauan di daerah tangkapan air; 13) Meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui kampanye hemat air dan penggunaan teknologi hemat air; 14) Mengembangkan teknologi pemanenan air hujan (rainwater harvesting) di tingkat rumah tangga dan komunitas; 15) Mengembangkan program konservasi sumber daya air melalui pembuatan embung-embung di daerah rawan kekeringan; 16) Merevitalisasi sistem drainase dan resapan air untuk meningkatkan cadangan air tanah.		dan menurunnya kesuburan tanah pada lahan kritis 6. Saran diterima, DLH akan memperkuat pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga ekosistem, meningkatkan kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan, serta mengatasi degradasi dan pencemaran lingkungan 7. Pada tahun anggaran 2025 telah siap dibangun TPS3R di dua lokasi, yakni Kelurahan Kuripan dan Desa Boloh. Kedepan kami akan mengupayakan penambahan unit TPS3R khususnya di lokasi yang paling membutuhkan. 8. Kami pada saat ini telah mendapatkan dukungan dari anggota Dewan dan mendapat penambahan anggaran untuk upaya edukasi masyarakat yang berkaitan dengan penanganan sampah dari sumbernya. Kami berharap dukungan tersebut dapat terus berlangsung, sehingga upaya penanganan sampah dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik. 9. Pada awal tahun 2025 telah ada 7 KSM baru yang bergerak dalam pengolahan sampah. Kami berharap dukungan dalam meningkatkan kapasitas KSM pengolahan sampah sehingga KSM yang baru tersebut dapat berkembang sesuai dengan harapan dan rencana peningkatan peran serta masyarakat

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			dalam pengelolaan sampah dapat selalu ditingkatkan. 10. Kami mendorong upaya pengomposan di skala rumah tangga dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Dalam STBM terdapat pilar ke 4 yang khusus menangani penyelesaian/penelolaan sampah domestik disumbahnya (di setiap rumah tangga) 11. Dengan mendasari konsep 3 R (reduce, reuse dan recycle) tiap rumah tangga melalui Program STBM sampah domestik dapat diharapkan terselesaikan. Untuk sampah dari sumber yang lain pada tahun 2025 direncanakan pembangunan PDU (pusat daur ulang) mengupayakan pengolahan plastik sekali pakai untuk diolah menjadi petasol (BBM setara dextlite) 12. .Saran diterima, DLH akan melaksanakan program penghijauan di wilayah tangkapan air bekerja sama dengan instansi terkait guna memperkuat tutupan vegetasi, meningkatkan kemampuan infiltrasi tanah, menjaga kestabilan ekosistem, serta menekan risiko erosi, banjir, kekeringan, dan kerusakan lingkungan 13. Saran diterima, DLH akan meningkatkan dan mendorong efisiensi penggunaan air melalui edukasi, kampanye hemat air, dan pemanfaatan teknologi hemat air

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			guna mengurangi pemborosan, menjaga ketersediaan air bersih, menekan tekanan terhadap sumber daya air, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. 14. Saran diterima, DLH akan bekerja sama dengan DPUPR dan instansi terkait untuk mengembangkan teknologi pemanenan air hujan di rumah tangga dan komunitas guna meningkatkan ketersediaan air, mengurangi ketergantungan pada sumber utama, serta mencegah pemborosan dan kekurangan air. 15. Saran diterima, DLH akan mengembangkan program konservasi sumber daya air melalui pembangunan embung di daerah rawan kekeringan bekerja sama dengan DPUPR atau instansi terkait untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan air, sekaligus mengatasi kekurangan pasokan, penurunan kualitas sumber daya air, serta dampak negatif kekeringan terhadap masyarakat, pertanian, dan ekosistem 16. Saran diterima, DLH akan bekerja sama dengan DPUPR dan instansi terkait untuk merevitalisasi sistem drainase dan resapan air, guna meningkatkan cadangan air tanah, memperbaiki pengelolaan air, serta mencegah banjir, penurunan kualitas air, dan degradasi lingkungan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
13.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp 13.381.278.500 dengan realisasi belanja Rp 12.450.355.882 terjadi sisa anggaran sebesar Rp 930.922.618; 2) Anggaran Urusan Admindukcapil tersebut diantaranya untuk mengelola beberapa program, sayang sisa terlalu banyak yang mestinya bisa untuk program-program admindukcapil yang belum optimal pelayanan administrasi kependudukannya; 3) Permasalahan Admindukcapil yang disebabkan karena : a. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan; b. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM; c. Keterbatasan sarana dan sistem kearsipan administrasi kependudukan; d. Belum terbangunnya sistem keamanan teknologi administrasi yang kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat; e. Keterbatasan fasilitas aksesibilitas bagi penduduk rentan; f. Pelaksanaan inovasi pelayanan adminduk yang belum optimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18/9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 204 Bupati Grobogan.	1) Saran diterima, kami menyambut baik dan siap untuk melaksanakan rekomendasi DPRD terkait perencanaan anggaran untuk meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak terpakai; 2) Saran diterima, secara prinsip kami setuju dan telah mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan SDM yang kreatif dan mampu menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; 3) Saran diterima, dan saat ini kami telah melakukan sosialisasi layanan <i>e-Simpe!</i> melalui - Sosialisasi tatap muka langsung kepada masyarakat - Leaflet/brosur dan roll banner; - Media sosial Dispendukcapil; - Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di 4 (empat) stasiun radio yang ada di Kota Purwodadi. Terkait penyediaan klinik pelayanan, saran diterima dan saat ini sudah ada petugas adminduk di tiap kecamatan yang melayani penerbitan dokumen kependudukan, memberikan bantuan dan edukasi pendaftaran melalui e-SIMPEL. Sedangkan di tingkat desa kami telah menjalin kerja sama dengan pemerintah desa melalui penetapan Petugas Registrasi Desa se-Kabupaten Grobogan dengan Keputusan Bupati, selain itu juga pelaksanaan inovasi <i>Pos Pakde</i> (Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan), yang membantu masyarakat

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	belum dapat menggunakan e-SIMPEL, terutama masyarakat lansia dan yang tidak paham teknologi; g. Sosialisasi pelaksanaan administrasi kurang tepat sasaran; h. Pelayanan diluar jam kerja belum maksimal; i. Kesulitan akses pelayanan administrasi untuk desa yang mempunyai kesulitan tinggi dan terpencil; j. Penduduk merasa telah memiliki dokumen akta kelahiran namun dokumen akte kelahiran tersebut belum tercatat dalam database kependudukan (setelah berlaku SIAK). Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan ke depan dalam perencanaan menyusun anggaran dan belanja disesuaikan kebutuhan agar tidak terjadi sisa anggaran yang tidak terpakai dalam program dan kegiatan; 2) Dalam hal prinsip Pemerintah Kabupaten Grobogan segera menyediakan SDM untuk berinovasi dalam urusan administrasi; 3) Dispendukcapil Kabupaten Grobogan perlu melakukan intensifikasi sosialisasi tentang layanan e-SIMPEL melalui berbagai media dan forum masyarakat di seluruh wilayah. Selain itu, perlu disediakan pendampingan khusus atau klinik pelayanan bantuan penggunaan e-SIMPEL di setiap kecamatan untuk membantu masyarakat yang kurang paham teknologi.		dalam pengurusan dokumen kependudukan baik secara luring maupun melalui e-SIMPEL.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
14.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024 sebesar Rp.18.815.890.800,- realisasi belanja sebesar Rp.17.758.261.889,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.1.057.628.911,-; 2) Permasalahan sisa anggaran yang cukup banyak tersebut sangatlah tidak bermanfaat, sehingga program dan kegiatan yang terealisasi tidak optimal seperti dalam program dan kegiatan pengentasan desa tertinggal, kerja sama antar desa untuk menuju peningkatan desa mandiri, peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa dan BPD; 3) Permasalahan Asset Desa yang tumpang tindih dengan asset kabupaten, BUMDES dan BUMDESMA masih rentan masalah terus; 4) Permasalahan penataan pasar desa yang belum optimal;	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	Permasalahan yang dihadapi yaitu Aset Desa ada yang dipergunakan untuk pembangunan aset Kabupaten, BUMDES dan BUMDESMA yang tidak sesuai dengan mekanisme pemanfaatan Aset Desa. Dispermades sepakat untuk ditindaklanjuti dengan memberikan pemahaman regulasi terhadap pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sehingga permasalahan yang berkaitan dengan aset bisa diminimalisir. Permasalahan yang dihadapi yaitu belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dispermades menindaklanjuti dengan telah melaksanakan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 1. Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa menindak lanjuti penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Desa-Desa dengan tetap mempertimbangkan aspek regulasi.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	5) Regulasi aturan yang mengatur Kepala Desa dan Perangkat Desa, membutuhkan penanganan segera; 6) Permasalahan Bankeudes dari provinsi; 7) Efektivitas pemanfaatan dana desa masih terkendala oleh pemahaman yang kurang mengenai prioritas nasional. Empat fokus prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan, pencegahan stunting, dan pengembangan BUMDes serta potensi desa. 8) Kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meningkatkan pembinaan desa dan Monitoring dan Evaluasi terhadap para Kepala Desa yang dalam menjalankan pemerintahannya kurang baik;		2) Sepakat Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa ditindak lanjuti penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Desa-Desa dengan tetap mempertimbangkan aspek regulasi. 3) sepakat untuk ditindaklanjuti dengan memberikan pemahaman regulasi terhadap pengelolaan aset desa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sehingga permasalahan yang berkaitan dengan aset bisa diminimalisir. 4) Sepakat Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa ditindak lanjuti penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Desa, kami juga membuka konsultasi untuk desa 5) Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sudah ada Aplikasi SIPADES Sejak Tahun 2021 untuk mengakomodir aset-aset di Desa 6) Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sudah ada peraturan bupati Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai Dana Desa Tahun 2024 yang berdasar kepada Peraturan Menteri Desa

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	2) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Desa- Desa; 3) Menyelenggarakan pelatihan komprehensif bagi perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa, pembuatan SPJ, dan inventarisasi aset desa. 4) Mengembangkan sistem pendampingan intensif dan berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk pelatihan singkat. 5) Memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan administrasi desa, termasuk sistem inventarisasi aset digital. 6) Menyusun panduan teknis yang detail dan mudah dipahami terkait penggunaan dana desa sesuai prioritas nasional. 7) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif. 8) Mengembangkan mekanisme insentif bagi desa yang berhasil mengimplementasikan prioritas nasional dengan baik. 9) Mengalokasikan dana khusus untuk penyelesaian proyek strategis yang berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal.		Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 7) Scpatat Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada saat Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Desa sudah dilaksanakan pada semester pertama dan akhir Tahun 2024 8) Sepakat Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah merupakan kegiatan yang telah dilakukan setiap Tahunnya 9) - 10) Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mengajak kerjasama dalam partisipasi pada kegiatan tertentu

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	10) Mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk kemitraan dengan pihak swasta.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
15.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sebesar Rp.13.866.548.300,- realisasi belanja sebesar Rp.13.720.776.954,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.145.771.346,-; 2) Permasalahan yang muncul urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus diperhatikannya angka kelahiran total (TFR), pengendalian dan sosialisasi terhadap pemakaian kontrasepsi modern belum maksimal, kendornya Masyarakat dalam menggunakan kebutuhan ber-KB; 3) Meskipun program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) memiliki tujuan yang baik yaitu memberikan bekal ilmu berumah tangga, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala:	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) baik melalui pertemuan langsung maupun media lain (media sosial, media luar ruang) sudah kami laksanakan sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami program Keluarga Berencana 2. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (KRS) sudah dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarag (TPK) yang ada di seluruh desa se- Kab. Grobogan. Adapun yang didampingi mulai Catin, Bumil, Pascasalin dan Baduta. 3. Pendampingan jarak jauh sudah dilakukan dengan adanya menu "chat WA" ayang ada di aplikasi Elsimil. 4. Kerjasama sudah kami laksanakan melalui MOU antara KUA, Dinas Kesehatan dan DP3AKB sejak tahun 2022 5. Dalam setiap pertemuan di Kampung KB juga di selipkan tentang PEK (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dan kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) melalui Pokja Kampung KB khususnya seksi ekonomi

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	a. Banyak calon pengantin yang bekerja di luar kota, sehingga sulit untuk dihubungi dan diberikan pendampingan secara optimal; b. Pendaftaran pernikahan di desa yang dilakukan mendekati waktu pernikahan (mepet), sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pendampingan secara maksimal selama 3 bulan sebelum pernikahan sebagaimana yang diharapkan dalam program ELSIMIL. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menekan laju pertambahan penduduk, kedepan harus lebih meningkatkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB); 2) Kebutuhan menuju Keluarga Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Grobogan sepatat menurunkan keluarga berisiko stunting diantaranya melalui remaja calon pengantin, ibu hamil atau yang lainnya; 3) Adaptasi model pendampingan : Mengembangkan model pendampingan jarak jauh bagi calon pengantin yang bekerja di luar kota, misalnya melalui konsultasi online atau kunjungan khusus di akhir pekan; 4) Kerjasama dengan KUA : Memperkuat kerjasama dengan Kantor Urusan Agama		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	(KUA) untuk mendorong pendaftaran pernikahan lebih awal, minimal 3 bulan sebelum tanggal pernikahan, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk pendampingan melalui ELSIMIL; 5) Mengintegrasikan pendidikan keuangan keluarga ke dalam program Kampung KB, dengan memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, perencanaan anggaran, dan investasi sederhana.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
16.	URUSAN PERHUBUNGAN <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp.27.004.962.840,- realisasi belanja sebesar Rp.25.346.374.404,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.1.658.588.436,-; 2) Permasalahan muncul dari sisa anggaran yang terlalu banyak di Dinas Perhubungan, perencanaannya tidak optimal; 3) Dari Perencanaan yang tidak optimal banyak permasalahan diantaranya :	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1) Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan sedang merencanakan sistem Digitalisasi Retribusi Parkir (sistem pembayaran parkir non tunai). Beberapa langkah yang telah kami lakukan diantaranya: 1. Kunjungan kerja terkait parkir ke beberapa daerah (Tegal-Jawa Tengah, Sleman-DIY Yogyakarta, dan Kediri-Jawa Timur); 2. Koordinasi dengan PT. Bupendra Kira Teknologi pada tanggal 7 Agustus 2025 dengan hasil sebagai berikut: a. Pembayaran parkir non tunai dapat menggunakan dua opsi yaitu: EDC atau Aplikasi Perparkiran dalam

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	a. Penerangan jalan banyak yang padam, kurang ada perhatian terhadap perawatannya; b. Pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan termanagement tidak baik; c. Penataan terminal tidak maksimal; d. Pengelolaan E-Tilang yang telah dibiayai dengan anggaran tinggi tidak maksimal; e. Sudah saatnya diperhatikan kelas jalan. 4) Permasalahan kurang kordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Dishub; 5) Krisis Transportasi Umum: Kabupaten Grobogan mengalami krisis transportasi umum. Jumlah angkutan umum semakin berkurang, dan banyak trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang tidak lagi beroperasi 6) Infrastruktur Perhubungan yang Kurang Memadai : Kabupaten Grobogan masih menghadapi masalah terkait infrastruktur perhubungan yang belum optimal. Salah satu kasus yang tercatat adalah kurangnya penerangan jalan di beberapa ruas jalan kabupaten. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan menentukan kebijakan penataan parkir, karena berkaitan dengan PAD yang diperoleh dari Dishub;		<i>smartphone</i>. Masing-masing opsi memiliki kelemahan dan kelebihan. b. Dalam penerapan sistem pembayaran parkir non tunai ada dua opsi penerapan teknis yang ditawarkan oleh PT. Buphendra <i>Pertama</i>, mewajibkan menggunakan QRIS dengan menerapkan semua sistem pembayaran parkir secara non tunai dan menolak pengguna jasa yang akan membayar parkir secara tunai, tetapi sistem ini akan menimbulkan banyak kontra seperti protes dari pengguna jasa, pemilik toko dan jukir itu sendiri. <i>Kedua</i>, berfokus untuk pemungutannya secara QRIS (tetap menerima pembayaran parkir secara tunai dan non tunai / <i>hybrid</i>, ketika ada pengguna jasa yang melakukan pembayaran secara tunai maka tetap diterima dan jukir nantinya yang akan melakukan setoran secara non tunai.) Oleh karena itu pentingnya menerapkan sistem minimum transaksi per harinya. 3. Koordinasi dengan Bank Jateng Cabang Purwodadi pada tanggal 28 Oktober 2025 terkait sistem pembayaran elektronik. Proses pembayaran ini belum dapat terlaksana karena pembuatan QRIS baru dari Bank Jateng masih <i>maintenance</i> dari pusat (Bank Indonesia) sampai akhir tahun ini. Penerapan sistem parkir yang ditawarkan oleh Bank

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	2) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat tentang Kelas Jalan. 3) Revitalisasi Sistem Transportasi Umum, dengan melakukan : a. Mengembangkan layanan bus kota/kabupaten yang terintegrasi dengan sistem Trans Jateng; b. Memberikan subsidi terukur untuk mendorong keberlanjutan operasional angkutan umum; c. Membuat program pembaruan armada angkutan umum dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan; d. Menyusun rute angkutan strategis yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi dan pendidikan. 4) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Perhubungan, dengan melakukan : a. Melakukan pemetaan komprehensif terhadap kondisi infrastruktur jalan di seluruh kecamatan; b. Memprioritaskan pemasangan lampu jalan di ruas-ruas strategis yang sering dilalui masyarakat;		Jateng menggunakan fitur Aplikasi “<i>Billing Center</i>”, sistem ini telah diterapkan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Blora. 4. Melakukan sosialisasi pembayaran parkir non tunai di Kabupaten Grobogan pada tanggal 13 November 2025 bertempat di Aula Dishub Kabupaten Grobogan, yang dihadiri oleh Bank Jateng Cabang Purwodadi sebagai Narasumber dan perwakilan koordinator serta juru parkir di Kabupaten Grobogan. Penerapan akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan <i>hybrid</i> (tunai dan non tunai), yang rencananya sistem pembayaran non tunai ini akan dilakukan uji coba di beberapa lokasi terlebih dahulu seperti di sekitar alun- alun Purwodadi. Penerapan sistem non tunai dibutuhkan dukungan dari semua pihak terkait terutama juru parkir dan masyarakat untuk mensukseskan implementasi sistem pembayaran parkir non tunai di Kabupaten Grobogan. Selain rencana sistem Digitalisasi Retribusi Parkir (sistem pembayaran parkir non tunai), Dinas Perhubungan juga: 1. Memperkuat aspek regulasi dengan menyusun ulang peraturan terkait kebijakan parkir. 2. Melaksanakan penataan beberapa titik lokasi parkir seperti di jalan Ahmad Yani dengan menerapkan sistem penataan parkir nol derajat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan lalu lintas yang ada.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	c. Mengalokasikan dana khusus untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan vital.		3. Menerapkan parkir insidental di beberapa acara, seperti pada acara pengajian akbar, konser, dan expo. 4. Melaksanakan monitoring ke beberapa juru parkir dengan memberikan karcis retribusi dan rompi secara rutin setiap minggunya. 2) Dinas Perhubungan akan berkoordinasi mengenai Kelas Jalan ke instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dikarenakan penentuan kelas jalan merupakan kewenangan dinas di setiap tingkatan pemerintahan, tergantung pada kelas jalannya yang dibagi menjadi Kelas I, II, III. Yang berwenang menangani kelas jalan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 3) Revitalisasi Sistem Transportasi Umum : a. Pada kondisi eksisting penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Grobogan, sudah terdapat layanan angkutan perkotaan yang terintegrasi langsung dengan Trans Jateng, yakni angkutan perkotaan dengan trayek G yang melayani rute Purwodadi-Godong, sehingga untuk pengembangannya mungkin dapat difokuskan pada Optimalisasi dan Peningkatan Frekuensi. Karena integrasi sudah terwujud, fokus program harus dialihkan ke: 1. Peningkatan Frekuensi : Menambah jumlah trip dan jam operasional Trayek G agar waktu tunggu (<i>headway</i>) lebih singkat dan layanan lebih menarik.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			2. Standardisasi Armada : Memastikan armada Trayek G memenuhi standar kenyamanan dan keamanan. b. Pemberian subsidi terukur yang bisa diberikan dengan sederhana berdasarkan kondisi eksisting untuk mendorong keberlanjutan operasional angkutan umum yakni dengan : 1. Subsidi kredit dengan bunga kecil : subsidi kredit dengan bunga kecil yang bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan bank daerah agar pengusaha dapat melakukan peremajaan kendaraan, hal ini berkaitan dengan permasalahan angkutan umum di Kabupaten Grobogan terkait dengan usia kendaraan yang rata-rata sudah lebih dari 20 tahun. 2. Subsidi tarif : langkah awal subsidi tarif yang bisa dilakukan dengan pemberian subsidi tarif kepada pelajar, jika dirasa daerah mampu, maka dapat dilanjutkan dengan subsidi tarif pada semua pengguna layanan angkutan umum. c. Program pembaruan armada dengan kendaraan yang ramah lingkungan (kendaraan listrik) dirasa belum dapat dilakukan dikarenakan harga armada yang cenderung mahal, harga baterai yang juga cenderung lebih mahal dibandingkan suku cadang mobil konvensional, serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau <i>Electric Vehicle Charging Station</i> (EVCS) yang belum memadai.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			d. Pada kondisi eksisting penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Grobogan, terdapat beberapa trayek angkutan perkotaan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi dan pendidikan terutama pada daerah Central Business District (CBD) yakni angkutan perkotaan dengan trayek A, C, D, dan H, dikarenakan sudah adanya beberapa trayek yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi dan pendidikan maka selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi kinerja dan penambahan rute non perkotaan : 1. Evaluasi Kinerja Rute Eksisting : Melakukan studi mendalam terhadap okupansi (load factor) dan profitabilitas Trayek A, C, D, dan H. Jika okupansi rendah, lakukan penyesuaian rute minor atau jam operasional. 2. Pengembangan Rute <i>Feeder</i> (Pengumpan) : Menyusun rute baru yang menghubungkan wilayah pedesaan atau industri pinggiran dengan pusat kota Purwodadi (menambah cakupan layanan di luar CBD). 4) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Perhubungan a. Untuk melakukan pemetaan komprehensif terhadap kondisi infrastruktur jalan, Dinas Perhubungan melakukan monitoring wilayah mulai dari desa-perkotaan di Kabupaten Grobogan untuk mengetahui kondisi infrastruktur jalan terutama di bidang perhubungan seperti Rambu, Marka,

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			<i>Warning Light, Traffic Light</i>, Penerangan Jalan Umum (PJU) secara rutin setiap harinya. Monitoring dilakukan untuk memantau kondisi infrastruktur di bidang perhubungan dalam keadaan baik/tidak, jika terjadi suatu kendala akan langsung ditangani oleh Dinas Perhubungan guna memastikan keamanan, kelancaran, dan optimalisasi fungsi jaringan transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan transportasi. b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan-jalan protokol dan kawasan potensi ramai masyarakat (jalan sekitar pabrik, pasar, dan sejenisnya) masih belum optimal dikarenakan luas Kabupaten Grobogan mencapai 2023,84 km². Dinas Perhubungan akan terus mengusulkan anggaran untuk pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Grobogan, terutama di ruas-ruas strategis yang sering dilalui masyarakat untuk menunjang aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Grobogan. Kami akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan <i>stake-holder</i> terkait baik di Jajaran Pemerintah Daerah, maupun Provinsi sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang menjadi kewenangan nya guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta kemudahan bagi pengguna jalan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			c. Setiap tahunnya, kami mengusulkan anggaran melalui sub kegiatan rehabilitasi perlengkapan jalan sebagai bagian dari pemeliharaan infrastruktur perhubungan. Beberapa kegiatan yang kami lakukan seperti rehabilitasi <i>warning light</i>, rambu-rambu lalu lintas, dan <i>traffic light</i>. Pengecatan kembali marka yang pudar, maupun pemeliharaan lampu PJU yang mengalami kerusakan. Penganggaran sub kegiatan rehabilitasi perlengkapan jalan didasarkan pada kebutuhan infrastruktur perhubungan dan kebutuhan masyarakat. Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan telah menyediakan dan terus mensosialisasikan penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian aduan masyarakat terkait pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Adapun akun media sosial yang dikelola Dinas Perhubungan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut: a. Instagram: dishubgrobogan b. Twiter : Dishub Grobogan c. Facebook: Dishub Grobogan d. Whatsapp: 085293223877 e. Web : s.id/lapordishubgrob

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			f. CCTV <i>Online</i> : cctv.dishub.grobogan.go.id g. SP4N Lapor Selain itu masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan dan aduan terkait pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan melalui masing-masing UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan. Aduan masyarakat akan menjadi dasar penentuan kebutuhan pengadaan dan rehabilitasi infrastruktur perhubungan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
17.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebesar Rp.10.302.032.600,- realisasi belanja sebesar Rp.9.441.824.021,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.860.208.579,-; 2) Permasalahan anggaran urusan Komunikasi dan Informatika sisa banyak, akibatnya program dan kegiatan tidak maksimal, antara lain :	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020/4 Bupati Grobogan. Undang – Undang Penyiaran no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 38 ayat 1.	1). Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan terdapat 30 orang yang terdiri dari 27 orang PNS dan 3 orang PPPK. Berdasarkan Peta Jabatan Anjab ABK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan membutuhkan SDM sebanyak 99 orang untuk memenuhi Kebutuhan Jabatan yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Untuk mendukung menyiapkan SDM yang optimal di Diskominfo Kabupaten Grobogan perlu penambahan kompetensi baik Diklat Teknis maupun Bimbingan Teknis bagi PNS dan PPPK secara berkala sesuai bidang jabatan. 2). Sudah dilaksanakan dengan publikasi lewat web Pemkab dan Medsos Pemkab

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	a. Server untuk komunikasi public dan aplikasinya pengelolaannya tidak maksimal, sehingga Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet sambat; b. Banyak proyek internet kurang pengawasan. 3) Infrastruktur Internet Tidak Merata : Masih terdapat kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur seperti menara BTS dan serat optik belum menjangkau seluruh wilayah, menghambat layanan pendidikan, bisnis, dan kesehatan digital; 4) Literasi Digital Rendah: Sebagian masyarakat, terutama lansia dan penduduk pedesaan, kurang mampu memanfaatkan teknologi digital. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan mengakses layanan pemerintah daring (e-government); 5) Sistem Komunikasi Bencana yang Lemah : Grobogan rawan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, namun sistem peringatan dini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat; 6) Kurangnya Konten Lokal yang Relevan : Informasi dari pemerintah atau layanan publik seringkali tidak tersedia dalam bahasa		3) Dinas Komunikasi dan Informatika sudah berkoordinasi dengan DPUPR dan DPMPTSP terkait penataan usaha internet oleh pihak swasta, karena selama ini di Kabupaten Grobogan belum ada regulasi yang mengatur tentang jasa usaha internet yang menggunakan sarana Fiber Optic. Dimana dari hasil koordinasi akan dibuat Peraturan Bupati Grobogan yang mengatur tentang Infrastruktur Pasif Fiber Optic 4) Bahwa untuk akses internet baik itu dengan menggunakan infrastruktur Fiber optic maupun Menara BTS penempatannya bukan kewenangan Diskominfo, namun ada beberapa factor kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara lain: a) Kepadatan penduduk: wilayah perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada di desa, sehingga kebutuhan akan jaringan telekomunikasi lebih besar. b) Infrastruktur: wilayah perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, listrik dan akses internet. Sehingga lebih mudah untuk membangun dan memelihara Fiber optic maupun Menara BTS c) Operator telekomunikasi lebih cenderung untuk berinvestasi di kota daripada di desa, karena jumlah pelanggan di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Jawa atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat pedesaan. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan menyiapkan SDM yang optimal terkait urusan Komunikasi dan Informasi; 2) Pemkab Grobogan meningkatkan layanan public yang diselenggarakan Dinas Kominfo secara online dan terintegrasi, agar Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah; 3) Pemerintah Kabupaten Grobogan memerintahkan Dinas Kominfo berkordinasi dengan instansi terkait (Dinas PUPR atau yang lain) dalam hal penataan usaha internet oleh fihak ketiga (swasta); 4) Infrastruktur Internet Tidak Merata: Masih terdapat kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur seperti menara BTS dan serat optik belum menjangkau seluruh wilayah, menghambat layanan pendidikan, bisnis, dan kesehatan digital;		5) Diskominfo Kabupaten Grobogan telah bekerjasama dengan beberapa Kecamatan untuk melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pelayanan desa secara digital. Diharapkan admin dan perangkat desa yang menjadi pengelola website desa dapat menyebarkan terkait keberadaan web desa dengan segala fitur / layanan di dalamnya, sehingga masyarakat bisa lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam upaya peningkatan Literasi Digital, terutama bagi Lansia, yang bisa dilakukan pendampingan oleh perangkat desa terkait. 6). Kabupaten Grobogan memiliki aplikasi SIGANA (Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana) yang dikelola oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dimana aplikasi SIGANA ini masyarakat bisa melaporkan terkait bencana alam yang ada, dan bisa melakukan monitoring / pemantauan terkait penanganan laporan tersebut. Selain itu, peringatan dini bencana dari BMKG, sudah terhubung di aplikasi SIGANA, dan juga terintegrasi di aplikasi mobile Portal Smart City Grobogan. 7. Sudah dilaksanakan dengan membuat iklan layanan masyarakat kawruh sapolo yang disiarkan melalui Purwodadi FM.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	5) Literasi Digital Rendah, sebagian masyarakat, terutama lansia dan penduduk pedesaan, kurang mampu memanfaatkan teknologi digital. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan mengakses layanan pemerintah daring (e-government); 6) Sistem Komunikasi Bencana yang Lemah: Grobogan rawan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, namun sistem peringatan dini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat; 7) Kurangnya Konten Lokal yang Relevan: Informasi dari pemerintah atau layanan publik seringkali tidak tersedia dalam bahasa Jawa atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat pedesaan.		
NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
18.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Permasalahannya : 1) Anggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2024 sebesar Rp.6.381.593.000,- realisasi belanja sebesar Rp.6.286.719.194,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.94.873.806,-;	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pendataan sekaligus revitalisasi koperasi pada tahun 2024, dengan melakukan pemetaan terhadap koperasi aktif maupun tidak aktif. Dari total 573 koperasi yang ada, sebanyak 286 koperasi tercatat aktif, sedangkan 287 koperasi lainnya masuk kategori tidak aktif. Sebagai tindak lanjut, Dinas Koperasi UKM telah mengusulkan 100 koperasi tidak aktif

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	2) Permasalahan biasa muncul di Dinas Koperasi yaitu : a. Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi kurang maksimal khususnya koperasi yang mengelola dana masyarakat yaitu unit simpan pinjam (KSP); b. Penataan UMKM belum sepenuhnya beres. 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Koperasi : a. Kompetensi Pengurus dan Manajer: Hanya 30% pengurus koperasi di Grobogan yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai Permenkop No. 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dampaknya adalah pengelolaan yang kurang tepat, seperti alokasi dana tidak produktif dan minimnya pencatatan transaksi dan ketidakmampuan mengadopsi teknologi, menghambat digitalisasi layanan; b. Pelatihan yang Tidak Berkelanjutan: Meski Dinas Koperasi UKM telah menyelenggarakan pelatihan berbasis sertifikasi, cakupan peserta masih terbatas (30 orang per angkatan). Kebutuhan riil mencapai 200 pengurus yang tersebar di 19 kecamatan; 2. Rendahnya Literasi Digital dan Pemasaran Modern: Studi oleh Telkom University (2024) menunjukkan bahwa hanya 22% UMKM Grobogan menggunakan platform digital untuk		kepada Kementerian Koperasi untuk diproses pencabutan atau pembekuan badan hukumnya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Grobogan agar ke depan terbentuk koperasi yang lebih handal dan berkualitas. 2. Dinas Koperasi UKM setiap tahun telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong para pelaku UMKM untuk menjadi wirausaha yang lebih mandiri dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan pemberdayaan dan pengembangan UKM di Kabupaten Grobogan, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta kapasitas usahanya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung tumbuhnya wirausaha baru di daerah. 3. Dinas Koperasi UKM tidak mengelola kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah merupakan kewenangan Dinas Perdagangan (Deperindag). 4. Dinas Koperasi UKM untuk saat ini sudah melakukan kegiatan pembinaan seperti bimbingan teknis (bintek) bagi para pengelola koperasi, baik pengurus maupun pengawas. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	pemasaran. Kendala utama meliputi biaya internet tinggi (Rp150.000–Rp300.000/bulan) untuk usaha mikro dan kurangnya pelatihan teknis penggunaan e-commerce; 3. Overlap Program Pemerintah: Program seperti Grobogan Expo 2024 dan Agro Expo melibatkan 5 dinas berbeda, tetapi tidak terintegrasi dalam sistem evaluasi dampak ekonomi. Saran : 1. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Koperasi segera mengevaluasi semua Badan Hukum Koperasi yang Hidup mau mati Segan, kedepan terbentuk Koperasi yang handal dan berkualitas; 2. Dinas Koperasi mendorong para pelaku UMKM menjadi wirausaha; 3.Dinas Koperasi kedepan mengevaluasi pasar murah yang dikelola setiap tahun tidak tepat sasaran; 4. Pelatihan massal dengan pola Kombinasi webinar dan praktik lapangan untuk 200 pengurus koperasi per tahun, bekerja sama dengan LSP Koperasi Jateng; 5. Pendirian Digital Hub Koperasi: Pusat pelatihan gratis di Purwodadi dengan modul e-		koperasi, serta mendukung pengembangan koperasi yang sehat dan berdaya saing. Terkait usulan Pendirian Digital Hub Koperasi sebagai pusat pelatihan gratis di Purwodadi dengan modul <i>e-commerce</i>, desain kemasan, dan analisis pasar digital, Dinas Koperasi UKM untuk saat ini belum melaksanakan pelatihan khusus terkait <i>e-commerce</i>. Namun demikian, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas digital dan pemasaran bagi pelaku koperasi dan UMKM, antara lain: Program kemitraan, Pelatihan boga, Pelatihan desain kemasan, Bimbingan teknis pemasaran online, Serta promosi produk unggulan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi dasar penguatan kapasitas pelaku UMKM menuju penerapan <i>e-commerce</i> di masa mendatang. Kami akan mengkoordinasikan dengan OPD terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga integrasi program antar Disperindag, Dinkop UKM, dan Dinas Pertanian dapat berjalan lebih efektif sesuai indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian kesehatan koperasi saat ini telah dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing koperasi dengan mengisi formulir yang telah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	commerce, desain kemasan, dan analisis pasar digital; 6. Integrasi Program Pemerintah dan Pengawasan Berkala, dengan melakukan : a. Pembentukan Tim Evaluasi Dampak Ekonomi: Mengkonsolidasikan program dari Disperindag, Dinkop UMKM, dan Dinas Pertanian dengan indikator kinerja terukur; b. Pemeriksaan kesehatan koperasi triwulanan: Prioritas untuk KSP dengan aset di atas Rp.1.000.000.000,-.		disediakan. Hingga saat ini, baru 36 koperasi dengan aset di atas Rp.1.000.000.000,- yang telah melaksanakan penilaian tersebut.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
19.	URUSAN PENANAMAN MODAL Permasalahan : 1) Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2024 sebesar Rp.7.691.306.000,- realisasi belanja sebesar Rp.6.976.624.140,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.714.681.860,-; 2) Permasalahan sisa anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dalam urusan penanaman modal lumayan banyak, menyebabkan program dan kegiatan tidak berjalan maksimal antara lain :	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Grobogan.	1) Terimakasih atas sarannya, kedepan kami berupaya lebih maksimal dalam meningkatkan investasi sehingga mampu menarik calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Grobogan. Untuk mendukung pencapaian peningkatan investasi tersebut diperlukan berbagai strategi, antara lain: a. Memberikan informasi yang akurat terkait peluang investasi yang ada di Kabupaten Grobogan b. Melakukan promosi investasi melalui berbagai media dan event pameran untuk menarik Investor masuk ke Kabupaten Grobogan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	a. Program pengembangan iklim penanaman modal harus ditingkatkan; b. Program promosi marketing penanaman modal dan pelayanannya harus ditingkatkan; c. Merawat pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pengelolaan system informasi harus terjaga. 3) Permasalahan Mafia Tanah : Salah satu permasalahan signifikan yang dihadapi Kabupaten Grobogan adalah adanya praktik mafia tanah yang menghambat investasi. Berdasarkan pernyataan Menteri ATR/BPN, kasus mafia tanah di Kabupaten Grobogan telah membelenggu potensi investasi mencapai Rp. 3,415 triliun. Kasus tersebut melibatkan praktik pemalsuan akta autentik yang merugikan investor dan menghambat masuknya investasi di kawasan industri; 4) Ketersediaan Lahan dan Tata Ruang : Investor sering mengalami hambatan dalam pengadaan lahan karena ketidaksesuaian lahan yang diinginkan dengan peruntukannya serta masalah sulitnya pembebasan lahan. Permasalahan terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang kurang sesuai lagi dengan kondisi, terutama berkaitan dengan kebutuhan lahan hijau dengan kawasan peruntukan industri juga menjadi hambatan; 5) Ketidaksiuaian Keahlian Tenaga Kerja: Tenaga kerja yang dibutuhkan investor sering kali sulit didapat karena tenaga kerja lokal kebanyakan tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan. Tuntutan kompetensi yang didukung		c. Melayani proses perizinan dan pelayanan dengan cepat, mudah, dan transparan sesuai SOP yang berlaku d. Mengembangkan SDM yang kompeten dan terampil untuk mendukung kegiatan Investasi. e. Membangun dan memperbaiki Infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air untuk mendukung kegiatan investasi. f. Membangun Kerjasama dengan stakeholder terkait meningkatkan investasi di Kabupaten Grobogan. 2) Terimakasih atas sarannya, ke depan kami akan melakukan langkah – langkah untuk memaksimalkan serapan anggaran terutama pada program dan kegiatan yang belum optimal diantaranya melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM pengelola keuangan dengan cara mengikuti pelatihan - pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan tugas yang dilakukan dan menempatkan SDM berdasarkan kompetensi yang di miliki. Dengan SDM yang berkualitas akan mampu menyusun perencanaan anggaran yang lebih akurat, realistis dan terencana, sehingga target penyerapan dapat dicapai secara optimal. 3) a. Terimakasih atas sarannya, kedepan kami akan menyediakan data perizinan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	sertifikat kompetensi juga membuat perusahaan sering tidak dapat menerima karyawan yang belum tersertifikasi. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus meningkatkan investasi; 2) Pemkab melalui DPMPTSP menata SDM; 3) Penguatan Kepastian Hukum dan Keamanan Investasi, melalui : a. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan BPN untuk memberantas mafia tanah secara sistematis. b. Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang transparan dan dapat diakses oleh calon investor. c. Menyediakan pendampingan hukum bagi investor yang menghadapi permasalahan terkait kepemilikan lahan. 4) Penataan Lahan dan Revisi RTRW, melalui : a. Melakukan evaluasi dan revisi RTRW untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan investasi dan keberlanjutan lingkungan. b. Mengembangkan kawasan industri terpadu yang sudah clear and clean dari segi kepemilikan lahan.		serta informasi administratif yang dibutuhkan melalui mekanisme resmi, serta mengikuti koordinasi lintas instansi yang ditetapkan dan membantu menjaga kepastian hukum melalui penyediaan data perizinan yang valid, transparan dan terdokumentasi dengan baik, pemberian informasi regulasi serta persyaratan usaha secara jelas, verifikasi kelengkapan dokumen sesuai ketentuan, serta fasilitasi koordinasi awal dengan instansi terkait. b. Terimakasih atas sarannya, kedepan kami akan mendukung pengembangan sistem informasi pertanahan yang transparan dengan menyediakan data perizinan dan informasi administratif sesuai kewenangan serta melakukan integrasi dan koordinasi dengan instansi terkait. c. Terimakasih atas sarannya ke depan kami akan mendukung kebutuhan investor melalui fasilitasi yang sesuai dengan kewenangan kami, meliputi pemberian informasi terkait regulasi perizinan, penataan ruang dan persyaratan usaha, serta koordinasi dengan OPD terkait jika muncul hambatan administratif. 4) a. Terimakasih atas sarannya, kedepan akan kami evaluasi kembali RTRW untuk memastikan kesesuaian dengan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	c. Menyediakan peta potensi investasi yang sesuai dengan RTRW dan mudah diakses oleh calon investor. 5) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, melalui : a. Mengembangkan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. b. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. 6) Penguatan Promosi dan Pelayanan Investasi, melalui : a. Meningkatkan promosi potensi investasi Kabupaten Grobogan melalui platform digital dan forum bisnis. b. Mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang efektif dan efisien. c. Memperkuat kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani investor.		kebutuhan investasi dan keberlanjutan lingkungan. b. Terimakasih atas sarannya, kedepan akan kami upayakan Kawasan Peruntukan Industri ini menjadi Kawasan Industri terpadu, yang utamanya diprioritaskan dari segi kepemilikan tanah (pengadaan tanah, kerjasama dengan pemilik tanah, hak penggunaan tanah dll) c. Terima atas sarannya, kedepan akan kami susun peta potensi investasi yang sesuai dengan RTRW dan akan kami akses ke media promosi sehingga dapat di akses bagi yang ingin mengetahui informasi. 5) a. Terima atas sarannya, kedepan akan kami siapkan tenaga kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan melalui bimbingan atau pelatihan kerja bagi para tenaga kerja b. Terima atas sarannya, kedepan akan kami upayakan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan kerja sehingga akan tersedia tenaga kerja ahli sesuai dengan keahlian di bidangnya. 6) a. Terimakasih atas sarannya, kedepan kami akan lebih memaksimalkan dalam mempromosikan potensi investasi yang ada di Kabupaten Grobogan baik melalui

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Media elektronik maupun media non elektronik b. Terimakasih atas sarannya, kedepan kami akan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi MPP yang ada. c. Terimakasih atas sarannya, kedepan kami akan terus melakukan berbagai langkah pengembangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan meliputi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan pelayanan publik, optimalisasi sistem layanan berbasis digital, serta penguatan koordinasi dengan OPD terkait

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
20.	URUSAN STATISTIK Permasalahannya : 1) Anggaran Urusan Statistik Tahun 2024 sebesar Rp.85.518.400,- realisasi belanja sebesar Rp.83.470.200,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.2.048.200; 2) Permasalahan yang muncul Urusan statistic adalah :	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020/4 Bupati Grobogan.	Tindak Lanjut : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Diskominfo selaku Walidata telah melaksanakan peningkatan kapasitas SDM seluruh Perangkat Daerah dalam bidang statistik sektoral, termasuk standarisasi data, proses bisnis statistik, serta pengelolaan data statistik. Dengan peningkatan kemampuan tersebut, Perangkat Daerah kini telah lebih siap

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	a. Update data Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan daerah tidak optimal; b. Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik alam evaluasi Pembangunan daerah tidak segera menyesuaikan data yang sebenarnya. 3) Kebutuhan Peningkatan Literasi Statistik di Tingkat Desa : Salah satu permasalahan signifikan adalah rendahnya literasi statistik di tingkat desa yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Grobogan di tahun 2024. Hal ini terlihat dari diluncurkannya program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) pada Agustus 2024 di Desa Jatilor, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik. Program ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di tingkat desa yang perlu diatasi; 4) Standardisasi Pengolahan Data yang Belum Optimal: Masih terdapat tantangan dalam standardisasi pengolahan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik di berbagai wilayah Kabupaten Grobogan. Dalam sosialisasi Data Strategis Kabupaten Grobogan pada 17 Desember 2024,		dalam melakukan pembaruan data sesuai kebutuhan pembangunan. Dan melakukan update data melalui Portal Data Grobogan secara berkala sesuai dengan pedoman yang telah diberikan sehingga menghasilkan data yang faktual dan informatif. 2) Saat ini, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan selaku produsen data telah didorong untuk secara konsisten memperbaiki data sektoralnya setiap periode melalui koordinasi rutin dan pendampingan intensif dengan Walidata dan Pembina Data, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Grobogan sebagai dasar perencanaan Pembangunan Daerah. 3) Penguatan kapasitas aparatur desa melalui agen-agen statistik merupakan kunci untuk menghasilkan data desa yang mutakhir, konsisten, dan dapat dipadupadankan hingga level nasional. Walidata bersama Pembina Data terus mendorong pendampingan teknis secara berkelanjutan agar proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data di desa berjalan sesuai dengan standar statistik. Selain itu, kolaborasi dan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Kepala BPS Kabupaten Grobogan, Anang Sarwoto, menyoroti pentingnya data yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. Ini mengindikasikan adanya isu konsistensi dan standarisasi dalam pengumpulan dan pengolahan data; 5) Pemanfaatan Data Statistik yang Belum Maksimal, meskipun Kabupaten Grobogan memiliki capaian statistik yang positif dalam beberapa sektor, seperti penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,02% pada 2023 menjadi 3,23% pada 2024 dan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 3.500 orang, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran; 6) Kebutuhan Peningkatan Aksesibilitas Data, BPS Kabupaten Grobogan telah meluncurkan aplikasi mygrobogan yang menyediakan data strategis dan sektoral, namun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas data bagi masyarakat umum dan stakeholder lainnya. Pengenalan Nomor Layanan Informasi dan Data (NONA SITA) juga menunjukkan upaya untuk mengatasi masalah aksesibilitas ini. Saran :		koordinasi penuh antara Koordinator Satu Data Indonesia, Pembina Data, dan Walidata secara intensif dalam menentukan plotting desa-desa yang menjadi sasaran program Desa Cantik, sebagai bentuk penguatan komitmen agar desa-desa tersebut mampu menjaga kualitas data yang menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. 4) Pemerintah Daerah melalui Walidata bersama BPS menekankan pentingnya penerapan prosedur pemeriksaan data (<i>data checking</i>) dan deteksi anomali dalam setiap kegiatan statistik, baik di tingkat OPD maupun desa. Selain itu juga telah dilakukan pendampingan teknis kepada operator desa dengan memberikan template standar berbasis pedoman Satu Data Indonesia, serta menyiapkan sesi pelatihan berkala mengenai metodologi dan validasi data sesuai standar BPS nasional untuk memastikan data desa menjadi lebih konsisten. 5) Sebagai tindak lanjut terkait optimalisasi pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, walidata bersama pembina data terus memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada OPD agar mampu

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	1) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Kominfo atau Kantor Statistik melakukan update data sesuai kebutuhan kedepan; 2) Update data adalah kenyataan dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Perluasan Program Desa Cantik, Perluasan program Desa Cantik ke lebih banyak desa di Kabupaten Grobogan perlu diprioritaskan. Program ini telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan statistik. Pembentukan agen-agen statistik di setiap desa akan membantu menjembatani kesenjangan antara BPS dengan masyarakat desa; 4) Peningkatan Standardisasi dan Kualitas Data, Pengembangan pedoman dan standar pengolahan data statistik yang mudah dipahami dan diterapkan oleh perangkat desa harus menjadi prioritas. Pelatihan teknis tentang metodologi pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan standar BPS nasional perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi dan kualitas data; 5) Optimalisasi Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan, perlu adanya sosialisasi dan pendampingan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Grobogan		menganalisis dan menggunakan data statistik secara tepat dalam perencanaan pembangunan. Melalui kegiatan seperti Sosialisasi Data Strategis Kabupaten Grobogan, BPS memberikan pemahaman mengenai pembacaan indikator, identifikasi tren, dan penerapan analisis statistik dasar untuk mendukung penanganan isu prioritas seperti inflasi, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya ini dilengkapi dengan koordinasi bersama Walidata dan Perangkat Daerah agar pemanfaatan data sektoral dan statistik semakin terintegrasi dan digunakan secara optimal sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. 6) Pemerintah Daerah bersama dengan BPS terus memperkuat penyajian data statistik resmi melalui myGrobogan agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses data strategis, khususnya sektor pertanian, secara lebih mudah dan terstruktur. Mengingat Kabupaten Grobogan merupakan produsen pangan terbesar di Jawa Tengah tahun 2024, Pembina Data Statistik yaitu BPS memastikan bahwa data pertanian seperti luas panen, produksi, dan komoditas unggulan dirilis secara rutin dan dapat diakses melalui

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	tentang cara menganalisis dan memanfaatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan. Seperti yang disampaikan dalam sosialisasi Data Strategis Kabupaten Grobogan, data statistik dapat membantu OPD melakukan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan seperti inflasi, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan; 6) Peningkatan Aksesibilitas dan Integrasi Data, peningkatan fitur dan cakupan aplikasi mygrobogan untuk lebih memudahkan akses terhadap data statistik harus terus dilakukan. Selain itu, perlu adanya integrasi data statistik dari berbagai sektor untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi Kabupaten Grobogan, khususnya untuk sektor-sektor prioritas seperti pertanian, mengingat Kabupaten Grobogan menjadi produsen pangan nomor satu di Jawa Tengah pada 2024; 7) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Teknologi, Investasi dalam pengembangan SDM di Kabupaten Grobogan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas perlu ditingkatkan. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik yang lebih efisien dan akurat juga menjadi kebutuhan penting.		myGrobogan dengan format yang konsisten dan informatif. 7) Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh kepada Perangkat Daerah, mencakup standarisasi statistik, penyusunan metadata, dan proses bisnis statistik. Pendampingan teknis turut dilakukan untuk memastikan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data berjalan sesuai standar. Diskominfo Grobogan terus memperkuat kompetensi internal dengan rutin mengirimkan personel mengikuti Pelatihan Statistik Sektoral dan Manajemen Data Statistik di Pusdiklat BPS RI. Dari sisi infrastruktur teknologi, telah dikembangkan portaldata.grobogan.id sebagai pusat data sektoral daerah yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Untuk mendukung operasional portal tersebut, Diskominfo meningkatkan kapasitas server melalui penambahan ruang penyimpanan, peningkatan stabilitas sistem, serta penguatan keamanan data sehingga proses pengumpulan hingga diseminasi data dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
22.	URUSAN PERSANDIAN <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Persandian Tahun 2024 sebesar Rp.75.000.000,- realisasi belanja sebesar Rp.73.374.057,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.1.625.943,-; 2) Permasalahan yang muncul dalam Urusan Persandian yang dikelola oleh Dinas Kominfo adalah harus terjaminnya tingkat keamanan informasi pemerintah yang bersifat rahasia; 3) Keamanan Data dan Implementasi Kriptografi: Salah satu permasalahan utama dalam urusan persandian di Kabupaten Grobogan adalah kerentanan keamanan data pada sistem layanan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari langkah proaktif yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan yang baru mulai menerapkan kriptografi pada aplikasi layanan administrasi kependudukan e-Simpel; 4) Belum Meratanya Penerapan Sistem Enkripsi : Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah belum meratanya penerapan sistem enkripsi pada seluruh aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Grobogan. Hal ini terlihat dari pernyataan pihak Dispendukcapil yang menyebutkan bahwa "diharapkan ke depan semua aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan akan menerapkan sistem enkripsi. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1) Untuk aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo, kami telah menerapkan enkripsi pada data sensitif di tingkat basis data serta pengamanan in-transit melalui HTTPS / SSL. Sementara itu, ketidakmerataan penerapan enkripsi pada aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah lain menjadi salah satu tantangan utama yang kami hadapi, mengingat implementasi enkripsi pada level aplikasi merupakan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Namun demikian kami tetap berupaya dengan menyediakan infrastruktur server yang aman, dan memberikan rekomendasi standar kriptografi sesuai pedoman BSSN, kami berupaya meminimalkan risiko kebocoran data serta meningkatkan kesiapan daerah menuju penerapan enkripsi yang lebih menyeluruh dan terstandarisasi. 2) Permasalahan yang kami hadapi saat ini adalah keterbatasan jumlah SDM, sehingga beberapa tugas teknis seperti evaluasi keamanan aplikasi, implementasi kriptografi, serta pemantauan insiden siber belum dapat dijalankan secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, kami telah menyiapkan langkah peningkatan kapasitas melalui pelatihan intensif keamanan siber dan persandian, serta menjalin koordinasi

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	masih banyak aplikasi pemerintahan yang belum menerapkan enkripsi data, sehingga berpotensi mengalami kebocoran informasi; 5) Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Persandian : Permasalahan persandian juga terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang persandian. Saran : 1) Implementasi Sistem Enkripsi Menyeluruh : Perlu memprioritaskan implementasi sistem enkripsi secara menyeluruh pada semua aplikasi layanan publik, tidak hanya di Dispendukcapil tetapi juga di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses ini dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan aplikasi yang mengelola data sensitif seperti keuangan, kesehatan, dan data pribadi penduduk. Penggunaan standar enkripsi yang direkomendasikan oleh BSSN akan memberikan jaminan keamanan yang lebih baik; 2) Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Persandian : Peningkatan kapasitas SDM di bidang persandian menjadi kunci keberhasilan implementasi keamanan informasi. Diskominfo Kabupaten Grobogan perlu melakukan pelatihan intensif tentang keamanan siber dan persandian bagi staf IT di seluruh OPD. Kolaborasi dengan BSSN untuk program pendampingan dapat mempercepat		dan peluang kerja sama dengan BSSN sebagai lembaga pembina teknis, guna memperkuat kompetensi personel secara bertahap dan berkelanjutan. 3) Kami telah membentuk tim respons keamanan siber berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 555.3/786/2022 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Kabupaten Grobogan (Computer Security Response Team Kabupaten Grobogan/GroboganKab-CSIRT)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	peningkatan kompetensi teknis personel persandian daerah; 3) Pembentukan Tim Respons Insiden Keamanan Siber : Kabupaten Grobogan perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk merespons insiden keamanan siber. Tim ini bertugas untuk memantau, mendeteksi, dan menanggapi ancaman keamanan informasi secara real-time. Dengan adanya tim khusus ini, respons terhadap potensi kebocoran data atau serangan siber dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
24.	URUSAN PERPUSTAKAAN Permasalahan : 1) Anggaran Urusan Perpustakaan Tahun 2024 sebesar Rp.5.686.049.000,- realisasi belanja sebesar Rp.5.435.657.473,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.250.391.527,-; 2) Permasalahan yang muncul urusan perpustakaan antara lain : a. Penataan SDM pengelola perpustakaan sampai ke desa-desa; b. Masih minimnya bahan Pustaka dari Tingkat kabupaten sampai kedesra; c. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat untuk gemar membaca;	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1) Dinarpusda telah melaksanakan kegiatan- kegiatan untuk meningkatkan minat baca masyarakat salah satunya dengan dilaksanakannya kegiatan festival literasi pada tahun 2025 dan perencanaan kegiatan tersebut pada tahun 2026. 2) Dinarpusda Kabupaten Grobogan telah melakukan pembinaan terhadap perpustakaan desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta perpustakaan instansi untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan. Pembinaan ini meliputi pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan kompetensi para pengelola perpustakaan. Selain itu, sebagai upaya untuk memperbaiki dan menambah koleksi pustaka di masing-

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	d. Keterbatasan Gedung dan Infrastruktur: Kabupaten Grobogan masih belum memiliki gedung khusus perpustakaan yang memadai; e. Kondisi Perpustakaan Sekolah yang Belum Standar: Banyak sekolah dasar di Grobogan belum memiliki gedung perpustakaan sendiri; f. Kekurangan Bahan Bacaan Bermutu: Perpustakaan desa dan Taman Baca Masyarakat (TBM) di Grobogan masih menghadapi keterbatasan bahan bacaan; g. Akreditasi Perpustakaan Sekolah Terhambat: masih banyak sekolah yang enggan mengusulkan akreditasi karena berbagai kendala; h. Menurunnya Minat Baca di Perpustakaan : Perkembangan teknologi telah membawa dampak pada menurunnya minat baca siswa di perpustakaan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meremajakan perpustakaan agar lebih menarik. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan memotivasi Tingkat kegemaran membaca oleh Masyarakat; 2) Membenahi perpustakaan yang ada di masing-masing desa (280 Desa/Kelurahan) baik SDM dan koleksi pustakanya;		masing perpustakaan desa, Dinarpusda telah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) untuk memperoleh bantuan buku. Sebagai hasilnya, setiap perpustakaan desa dan TBM yang mengajukan telah menerima bantuan sebanyak 1.000 buku serta rak buku untuk mendukung peningkatan koleksi dan sarana perpustakaan. 3) Terima kasih atas saran dan masukannya. Dinarpusda awalnya dilihat oleh Perpunas belum pernah mengajukan anggaran DAK untuk pembangunan Gedung Perpustakaan. Oleh karena itu dilakukan pembicaraan intensif dengan pihak perpunas dan Pemda Kab. Grobogan terkait hal tersebut. Namun setelah dilakukan survey dari Perpunas ke gedung perpustakaan daerah kabupaten grobogan, diperoleh kesimpulan bahwa Gedung Perpustakaan yang ada dianggap sudah bagus dan layak serta berada di lokasi yang lebih strategis dibandingkan dengan rencana lokasi baru yang berada di kawasan Kelurahan danyang. sehingga apabila dalam master plan perpustakaan direncanakan akan ditempatkan di kawasan perkantoran kelurahan Danyang maka pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah (tidak bisa mengusulkan DAK fisik ke Perpunas). 4) Pembangunan serta rehabilitasi perpustakaan sekolah merupakan kewenangan Dinas Pendidikan. Namun demikian, Dinarpusda Grobogan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait saran tersebut agar upaya

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
3)	Akselerasi Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum : Pemkab Grobogan perlu mempercepat persiapan pembangunan gedung perpustakaan di Kelurahan Danyang. Selain itu, perlu adanya perencanaan yang melibatkan stakeholder untuk memastikan gedung perpustakaan baru dirancang dengan memperhatikan kebutuhan akses informasi masyarakat modern;		peningkatan dan standarisasi perpustakaan sekolah dapat terwujud sesuai harapan. 5) Dinarpusda selama ini telah memfasilitasi pengajuan bantuan buku dan rak dari Perpunas RI dengan membantu desa dan TBM dalam melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kami juga melakukan pendampingan serta memantau proses distribusi hingga bantuan diterima oleh perpustakaan desa dan TBM. Untuk memanfaatkan bantuan selanjutnya, Perpunas RI masih melakukan pembinaan terkait pengelolaan perpustakaan melalui sesi daring (Zoom) yang diinformasikan melalui grup WA Bantuan Buku yang beranggotakan Perpunas RI, Dinarpusda Grobogan, serta para penerima bantuan. Dengan demikian, proses distribusi dan pendampingan tetap berlangsung secara berkelanjutan.
4)	Program Rehabilitasi dan Standardisasi Perpustakaan Sekolah : Pemkab Grobogan perlu memprioritaskan anggaran untuk rehabilitasi perpustakaan sekolah. Perlu juga dibuat roadmap jangka panjang untuk memastikan seluruh sekolah memiliki perpustakaan yang sesuai standar;		6) Dinarpusda telah memberikan pembinaan kepada perpustakaan sekolah yang akan mengajukan akreditasi, baik melalui kegiatan luring maupun daring. Ke depan, dukungan akan terus ditingkatkan, antara lain melalui kegiatan visitasi ke perpustakaan sekolah untuk memantau kesiapan serta memberikan pendampingan dan motivasi agar proses akreditasi dapat berjalan lebih optimal.
5)	Optimalisasi Bantuan Bahan Bacaan untuk Perpustakaan Desa : Dinarpusda Grobogan perlu memastikan proses distribusi bantuan buku dari Perpunas RI berjalan lancar. Selain itu, perlu adanya pendampingan untuk pengelola perpustakaan desa;		7) Dinarpusda telah menyediakan layanan buku digital melalui eBookGrobogan, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ke depan, diharapkan layanan ini dapat dikembangkan dengan fitur-fitur yang lebih menarik untuk meningkatkan jumlah pengguna. Selain itu, Dinarpusda juga menyediakan 12 unit komputer
6)	Dukungan Komprehensif untuk Akreditasi Perpustakaan Sekolah : Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan lebih besar bagi sekolah yang mengajukan akreditasi perpustakaan;		
7)	Pengembangan Layanan Digital dan Inovasi Perpustakaan : Perpustakaan di Grobogan perlu memanfaatkan teknologi digital untuk menarik minat pengguna;		
8)	Program Revitalisasi Perpustakaan untuk Meningkatkan Minat Baca : Menginisiasi		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	program revitalisasi perpustakaan mencakup renovasi fisik, pengadaan buku-buku baru yang menarik, pelatihan untuk tenaga perpustakaan, dan kegiatan-kegiatan yang menarik minat pembaca seperti storytelling, bedah buku, dan lomba literasi; 9) Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan : Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan perlu dilakukan secara berkelanjutan.		dan WiFi gratis untuk mendukung akses informasi dan pemanfaatan teknologi digital di perpustakaan. 8) Dinarpusda telah melakukan revitalisasi perpustakaan berupa penambahan koleksi buku, sosialisasi minat baca, bedah buku dan lomba lomba literasi seperti lomba bertutur, lomba menggambar dan MTQ. 9) Dinarpusda telah melakukan peningkatan SDM melalui pembinaan kepada perpustakaan pendidikan dasar, peningkatan kapasitas dan pembinaan perpustakaan umum dan khusus.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
25.	URUSAN KEARSIPAN <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Kearsipan Tahun 2024 sebesar Rp.622.158.000,- realisasi belanja sebesar Rp.613.490.920,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.8.667.080,-; 2) Permasalahan urusan kearsipan antara lain : a. Pengelolaan arsip dan perlindungan arsip di masing-masing OPD tidak ada keseragaman;	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020/4 Bupati Grobogan. - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan komponen meliputi : persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yang telah dibuat daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuat daftar arsip, persentase arsip yang telah dibuatkan daftar temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan ke dalam SIKN dan JIKN. - Tingkat ketersediaan arsip di tahun 2024 telah mencapai target sebesar 90%. - Dinarpusda Grobogan siap menindak lanjuti saran atas rekomendasi DPRD untuk meningkatkan persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	b. Tidak ada jaminan dan perlindungan arsip dilingkungan Kabupaten Grobogan yang hilang karena keadaan darurat; c. Transisi dari Sistem Manual ke Digital : masih terdapat tantangan dalam proses adaptasi dan implementasi aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Perubahan ini memerlukan penyesuaian signifikan dalam pengelolaan kearsipan di seluruh perangkat daerah; d. Pengelolaan Arsip Inaktif yang Belum Optimal : Pengelolaan arsip inaktif pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan masih memerlukan pengembangan sistem yang lebih efisien. Meskipun telah ada upaya pengembangan aplikasi pengelolaan arsip inaktif, masih diperlukan penyempurnaan untuk mengelola atau menginput arsip inaktif melalui komputer secara lebih terintegrasi; e. Kurangnya Koordinasi antar Lembaga dalam Pengelolaan Arsip : Pengelolaan arsip yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga. Meskipun telah ada sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip dan	- PP No. 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - Perda Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	bukti yang sah di tahun berikutnya yaitu tahun 2025. 2. Tingkat Keberadaan Arsip merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dengan komponen meliputi : • Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK; • Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan arsip terhadap bencana; • Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung; • Tingkat kesesuaian autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media; • Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis; dan • Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup. Tahun 2024 capaian Tingkat Keberadaan Arsip sebesar 24.000 berkas atau 90%, sesuai target. Dinarpusda siap menindaklanjuti saran atas rekomendasi DPRD untuk peningkatan di tahun 2025 3. Dinarpusda Grobogan telah melakukan optimalisasi implementasi Sistem informasi Kearsipan Digital yaitu melalui :

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Jadwal Retensi Arsip pada 24 September 2024, masih diperlukan peningkatan koordinasi untuk implementasi yang efektif di seluruh perangkat daerah. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus meningkatkan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban bekerja; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus memberikan jaminan kepada Masyarakat, dalam tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk pemerintahan maupun pelayanan public dan kesejahteraan rakyat; 3) Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Digital, dengan melakukan : a. Melaksanakan program pelatihan komprehensif bagi seluruh pengelola arsip di perangkat daerah, seperti yang telah dilakukan pada sosialisasi SRIKANDI bagi UPTD pada 28 Agustus 2024.		- Bimbingan teknis dan pendampingan aplikasi SRIKANDI pada semua Perangkat Daerah dan UPTD di Kabupaten Grobogan secara berkelanjutan sejak tahun 2023, 2024 sampai 2025 masih terus melakukan pendampingan dan bimtek baik melalui luring maupun daring. - Dinarpusda Grobogan juga membuka layanan konsultasi penggunaan aplikasi Srikandi bagi Perangkat Daerah dan UPTD yang mengalami kendala atau permasalahan. - Evaluasi sistem dan identifikasi implementasi dilaksanakan melalui group WA admin aplikasi SRIKANDI Kabupaten. Dinarpusda Grobogan siap menindaklanjuti saran rekomendasi DPRD untuk optimalisasi implemntasi Sistem Informasi Kearsipan Digital. 4. Pengembangan dan implementasi aplikasi yang terintegrasi dengan SRIKANDI hanya dapat dilakukan dengan aplikasi lain yang telah ditetapkan dalam ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sedangkan aplikasi yang dikembangkan secara lokal oleh Daerah tidak dapat diintegrasikan dengan aplikasi SRIKANDI. 5. Dinarpusda Grobogan siap menindak lanjuti saran rekomendasi DPRD untuk membentuk tim koordinasi kearsipan dengan perwakilan seluruh

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	b. Menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan selama masa transisi dari sistem manual ke digital. c. Mengembangkan modul evaluasi sistem untuk mengidentifikasi kendala implementasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan. 4) Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi pengelolaan arsip inaktif yang terintegrasi dengan SRIKANDI; 5) Untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu : a. Membentuk tim koordinasi kearsipan yang melibatkan perwakilan dari seluruh perangkat daerah. b. Penyelenggaraan forum rutin untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip. c. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi bersama untuk memastikan implementasi regulasi kearsipan yang efektif.		perangkat daerah, menyelenggarakan forum rutin untuk berbagi pengetahuan dan praktik pengelolaan arsip dan melakukan money atas implementasi regulasi kearsipan yang efektif.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
26.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp.1.540.907.300,- realisasi belanja sebesar Rp.1.473.886.948,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.67.020.352,; 2) Permasalahan yang harus dihadapi kedepan adalah tentang total produksi perikanan (tangkap dan budidaya). <u>Saran :</u> 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan meningkatkan pembinaan dan pemberian bantuan kepada petani ternak ikan serta membantu permodalannya; 2) Dinas Peternakan dan Perikanan secara adil dan merata dalam memberi bantuan kepada para kelompok petani perikanan; 3) Penurunan jumlah kasus terhadap penyakit menular.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Pemerintah setuju dan sependapat dengan rekomendasi Dewan yang terhormat berkenaan dengan upaya meningkatkan pembinaan dan pemberian bantuan kepada petani ternak ikan serta membantu permodalannya dengan memperhatikan potensi unggulan tiap-tiap wilayah dan kemampuan keuangan daerah. 2. Berkaitan dengan pemberian bantuan kepada kelompok petani perikanan secara adil dan merata, pemerintah setuju dan sependapat untuk memberikan bantuan secara adil dan merata kepada kelompok perikanan sesuai dengan potensi kelompok yang ada. 3. Upaya penganggulangan penyakit hewan menular dan penyakit hewan menular strategis seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) dan Septicemia Epizootica (SE) terus dilakukan pada ternak di Kabupaten Grobogan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi dan monitoring wilayah penyebaran penyakit, melakukan pengendalian dengan tindakan preventif/pencegahan (Penyuluhan, Desinfeksi, Vaksinasi), kuratif/pengobatan, edukasi kepada stakeholder terkait, dan monitoring lalu lintas ternak antar daerah (pada Pasar Hewan). Selain itu dilaksanakan juga kerjasama dengan instansi terkait (Balai Veteriner/Balai Inseminasi Buatan/OPD terkait) dalam peneguhan diagnosa,

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			serta pelaksanaan vaksinasi terutama PMK pada ternak berdampak. Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dengan peningkatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pencegahan yang meliputi desinfeksi baik di kandang peternak maupun di pasar hewan sebagai salah satu epicentrum kasus penyakit hewan, selain itu upaya vaksinasi lanjutan pada tahun 2024 hanya mencakup populasi rentan dengan berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat untuk pengadaan vaksin dan operasional petugas. Sehingga kasus penyakit terutama PMK yang pada triwulan 1-3 dapat dikendalikan karena masih terlindungi vaksin di akhir 2023 dan awal 2024, mengalami peningkatan signifikan di Triwulan ke 4. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan Biosecurity dengan pembatasan dan pengawasan lalu lintas ternak terutama di pasar hewan, isolasi pada ternak yang terkena dan upaya respon cepat dengan pengobatan dan isolasi ternak serta pengiriman sampel ke Balai Besar Veteriner Wates untuk memastikan diagnosa definitif serta perencanaan pengendalian yang tepat.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
28.	URUSAN PERTANIAN Permasalahan : 1) Anggaran Urusan Pertanian Tahun 2024 sebesar Rp.71.433.214.495,- realisasi belanja sebesar Rp.69.081.817.667,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.2.351.396.828,-; 2) Anggaran Urusan Pertanian sangat banyak sisanya, percuma tidak terserap; 3) Permasalahan Urusan Pertanian antara lain : a. LSD dan LP2B belum sepenuhnya diperhatikan; b. Tingkat produksi pertanian terhadap pangan nasional (PAJALE) mulai menurun; c. Ketersediaan harga pupuk yang masih delematis; d. Fluktuatif permainan harga hasil pertanian belum terkendali penuh; e. Rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian; f. Banyaknya Sistem Irigasi terkendala. Saran :	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus meningkatkan produktivitas pertanian; Terimakasih atas sarannya, Pemerintah Kabupaten Grobogan akan terus meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan dan meningkatkan aspek baik teknis, aspek kelembagaan, maupun kebijakan di sektor pertanian 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera menyelesaikan lahan pertanian dengan lahan hutan sosial; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Pemerintah Kabupaten Grobogan akan melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan Lembaga yang terkait dengan lahan hutan sosial dalam hal ini Masyarakat, Perhutani, Dinas Pertanian dan Kementerian Lingkungan, karena terkait hal tersebut diperlukan komitmen dari semua stakeholder. 3) Membangun citra positif profesi petani melalui kampanye public awareness; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memanfaatkan media sosial, event publik, dan kolaborasi dengan akademisi/komunitas untuk menunjukkan bahwa pertanian kini modern, inovatif, dan bernilai ekonomi tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menggunakan tagline menarik "Bertani itu Happy" untuk menumbuhkan kebanggaan, meningkatkan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus meningkatkan produktivitas pertanian; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan segera menyelesaikan lahan pertanian dengan lahan hutan sosial; 3) Membangun citra positif profesi petani melalui kampanye public awareness; 4) Pengembangan program pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda; 5) Pelatihan kewirausahaan pertanian dan akses permodalan bagi pemuda desa; 6) Implementasi lebih ketat Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2014; 7) Pemetaan digital lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk memudahkan monitoring; 8) Melanjutkan program rehabilitasi Daerah Irigasi seperti DI Glapan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman dari 200% menjadi 250%; 9) Pembangunan saluran irigasi tersier sesuai kebutuhan petani; 10) Pengelolaan sedimentasi pada saluran irigasi secara berkala.		apresiasi masyarakat, serta menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. 4) Pengembangan program pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan berusaha menghadirkan pertanian yang lebih efisien, produktif, dan kekinian. Program ini dilakukan melalui penerapan teknologi seperti pembangunan screen house komoditas hortikultura, drone, aplikasi digital dan penyediaan pelatihan, sekolah lapang dan magang berbasis teknologi pertanian serta media penyuluhan pertanian modern. Dengan pendekatan ini, pertanian tampil lebih inovatif, profesional, dan menarik bagi anak muda. 5) Pelatihan kewirausahaan pertanian dan akses permodalan bagi pemuda desa; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melakukan program magang bagi petani muda untuk memberikan pembekalan tentang manajemen usaha tani, pemasaran digital, serta inovasi produk. Selain itu Dinas Pertanian menggandeng BUMD dan BUMN untuk memfasilitasi petani muda guna memperoleh modal melalui kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Pertanian. Upaya ini membantu pemuda memulai dan mengembangkan usaha pertanian secara mandiri dan berkelanjutan.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			6) Implementasi lebih ketat Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2014; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dalam hal ini Dinas Pertanian terus berkoordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait guna Implementasi lebih ketat Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2014. 7) Pemetaan digital lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk memudahkan monitoring; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dinas Pertanian telah melakukan pemetaan dan pendataan lahan sawah berbasis spasial guna mempermudah monitoring dan pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan perlindungan LP2B. 8) Melanjutkan program rehabilitasi Daerah Irigasi seperti DI Glapan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman dari 200% menjadi 250%; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dinas Pertanian berusaha meningkatkan indeks pertanaman guna peningkatan produksi di Kabupaten Grobogan. Untuk program rehabilitasi Daerah Irigasi seperti DI Glapan harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR, BBWS sesuai dengan wilayah kewenangan. 9) Pembangunan saluran irigasi tersier sesuai kebutuhan petani; Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pembangunan saluran irigasi tersier sesuai usulan dari gapoktan/kelompok tani guna

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			meningkatkan efisiensi pengairan, mengurangi kehilangan air, dan mendukung kelancaran jadwal tanam. 10) Pengelolaan sedimentasi pada saluran irigasi secara berkala. Kami sependapat dan terimakasih atas sarannya. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melalui petugas lapangan bersama gapoktan/kelompok tani dengan pembersihan manual atau bantuan alat ringan untuk memastikan kapasitas alir saluran tetap optimal.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
29.	URUSAN PERDAGANGAN Permasalahan : 1) Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2024 sebesar Rp.6.366.556.548,- realisasi belanja sebesar Rp. 6.321.918.695,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.44.637.853,- 2) Permasalahan yang muncul dalam Urusan Perdagangan yang dikelola Disperindag diantaranya adalah : a. Pengendalian harga pasar khususnya bahan pokok; b. Pengelolaan pasar rakyat (tradisional) dan pasar modern; c. Pengelolaan PAD khususnya retribusi pasar dan parkir yang belum maksimal;	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Terimakasih atas sarannya, dapat dilaporkan bahwa untuk jumlah Pasar Daerah ada 18 pasar, Pasar Desa 100 pasar, Pusat Perbelanjaan 1 unit, Supermarket 6 unit, minimarket 224 unit. 2. Terimakasih atas sarannya, dalam memastikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Disperindag melaksanakan tera ulang di SPBU, SPBE, Pasar, Agen LPG 2 kg dan pangkalan, Toko Kelontong dengan personil 2 pegawai yang berhak/penera.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	d. Penataan pasar daerah yang tidak ada kepastian, contoh pasar induk purwodadi dan pasar gubug, dll; e. Penataan pedagang kaki lima dan ojogan belum maksimal. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan, segera menata dan melaporkan jumlah pasar daerah, pasar rakyat (tradisional) serta toko modern dan pusat pembelian sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) dan IUTM/IUTS nya; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disperindag memastikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
30.	URUSAN PERINDUSTRIAN Permasalahan : 1) Anggaran Urusan Perindustrian Tahun 2024 sebesar Rp.12.866.979.131,- realisasi belanja sebesar Rp.11.890.138.921,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.976.840.210,-; 2) Sisa anggaran untuk urusan Perindustrian yang dikelola oleh Disperindag cukup banyak yang tidak terserap;	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1. Terima kasih atas sarannya, dapat dilaporkan bahwa pembinaan terhadap home industri yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah melalui Pertemuan Rutin setiap bulan yang tergabung dalam Kelompok Makanan Olahan, Kelompok Batik, Tenun dan Ecoprint Bersemi Kab.Grobogan. 2. Terima kasih atas sarannya, dapat dilaporkan bahwa : a. Data pertambahan IKM tahun 2024 sebanyak 1.805 IKM (untuk data

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	3) Permasalahan yang muncul diantaranya : - Promosi industri diwilayah Kabupaten Grobogan belum maksimal; - Pendataan industri khususnya home industry tidak diadakan; - Belum masuknya semua home industry ke UMKM sehingga mempersulit promosi-promosi yang disediakan seperti di Indomart, Alfamart, Media Digital Tokopedia (Shopee) dll. Saran : - Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan untuk meningkatkan pembinaan terhadap home industry; - Pemerintah Kabupaten Grobogan segera melakukan : - Pendataan jumlah pertambahan industri kecil dan menengah; - Pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan di RPIK; - Peningkatan dan membuat laporan jumlah pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, termasuk juga jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) serta;	Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	pertambahan IKM tahun 2025 menyusul karena masih menunggu proses sampai Desember 2025) - Ada 9 Jenis Industri Prioritas Kabupaten yang di tetapkan dalam RPIK sebagai berikut : - Industri Makanan, - Industri Tekstil, - Industri Pakaian Jadi, - Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, - Industri Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya - Industri Bahan Kimia dan Barang dari bahan kimia - Industri barang galian bukan logam - Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya - Industri Furniture. - Pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah adalah 167, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) adalah 0 karena Kab.Grobogan belum ada Kawasan Industri (KI) - Informasi industri secara lengkap dan terkini bisa diakses pada aplikasi SIINAS

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	d. Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini.		dan Website Disperindag Tetapi belum semua IKM memiliki akun SIINAS dan perlu adanya sosialisasi dan fasilitasi SIINAS secara massif.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
31.	URUSAN TRANSMIGRASI <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Transmigrasi Tahun 2024 sebesar Rp.177.018.000,- realisasi belanja sebesar Rp.124.364.600,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.52.653.400,-; 2) Permasalahan urusan transmigrasi adalah pentingnya Masyarakat Grobogan yang sudah melakukan transmigrasi di wilayah lain dipastikan hidup layak. <u>Saran :</u> 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disnakertran mensosialisasi kepada Masyarakat Grobogan pentingnya transmigrasi; 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan melaporkan data minat Masyarakat yang masih menggunakan peluang transmigrasi.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Penyerapan Anggaran Urusan Transmigrasi Tahun 2024 terjadi sisa Rp. 52.653.400 terdiri dari beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kuota penempatan transmigrasi pada tahun 2024 Kabupaten Grobogan mendapatkan 1 KK sehingga ada 2 kegiatan di Urusan Transmigrasi yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal yaitu : a. Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Target Pelatihan 20 KK namun dikarenakan pada tahun 2024 hanya mendapatkan kuota 1 KK sehingga kita hanya memberikan pelatihan transmigrasi kepada 10 KK yang telah mendaftar sebagai calon transmigran di Kabupaten Grobogan. Dimana calon transmigran yang sudah mengikuti pelatihan namun belum diberangkatkan masuk dalam cadangan calon transmigran. b. Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Pada kegiatan Pemindahan dan Penempatan digunakan untuk penampungan transmigran sebelum diberangkatkan ke Embarkasi Provinsi namun dikarenakan pada tahun 2024 Kabupaten Grobogan mendapatkan kuota penempatan 1 KK sehingga kegiatan penampungan tidak dilaksanakan, transmigran diberangkatkan dari rumah menuju Embarkasi Provinsi menggunakan kendaraan dinas. 2. Untuk memastikan masyarakat Grobogan yang sudah melakukan transmigrasi di wilayah lain hidup layak sesuai naskah perjanjian kerja sama kita mempunyai kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi dalam masa pembinaan 5 tahun sejak transmigran ditempatkan di lokasi transmigrasi, selain hal tersebut kita juga memantau perkembangan transmigran melalui komunikasi baik dengan transmigran maupun dengan pihak terkait yang menangani ketransmigrasian di daerah penempatan transmigran. 3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai transmigrasi terakhir kita melaksanakan pada tahun 2024 dengan sub kegiatan penyuluhan transmigrasi, dan untuk menjangkau masyarakat kita membuka pendaftaran transmigrasi baik melalui online maupun offline tanpa batasan waktu pendaftaran. 4. Data minat transmigrasi pendaftar online terdapat dalam aplikasi Sibarduktrans dan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			untuk pendaftar offline tercatat dalam buku register pendaftaran transmigrasi, kita siap melaporkan perkembangan terkait animo masyarakat dalam program transmigrasi.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
32.	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Perencanaan Tahun 2024 sebesar Rp.11.895.754.200,- realisasi belanja sebesar Rp.11.321.499.221,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.574.254.979,-; 2) Sisa anggaran cukup banyak; 3) Permasalahan Perencanaan diantaranya sebagai berikut : a. Masih banyaknya program dan kegiatan yang bersifat rutinitas, maka harus dikurangi; b. Adanya kreatifitas dan inovatif dalam memunculkan program/kegiatan masih lemah; c. Kurangnya program/kegiatan (outcome) yang bermanfaat untuk masyarakat. <u>Saran :</u>	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Terimakasih atas saran Bapak/Ibu pimpinan dan anggota DPRD terkait evaluasi, metode pengadaan serta pendapatan dan belanja yg tentunya harus di optimalkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah dan akan terus berkomitmen dalam menentukan belanja daerah secara terintegrasi serta memaksimalkan peran SDM perencanaan yang ada dan akan senantiasa mengevaluasi penataan terhadap SDM perencanaan; 2. Silpa di Bappeda pada tahun 2024 3. Terkait program kegiatan Bappeda yang tentunya dilaksanakan setiap tahun seperti penyusunan dokumen perencanaan tahunan RKPD baik Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Dokumen RKPD Tahun 2025 juga Penyusunan Dokumen KUA PPAS baik Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 dan Dokumen KUA PPAS Tahun 2025, selain dokumen perencanaan tahunan RKPD Bappeda juga melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan jangka 20 (dua puluh) tahunan yakni RPJPD Tahun 2025-2045 dan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, dimana

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan mengevaluasi penataan terhadap SDM perencanaan; 2) Perencanaan jumlah pengadaan dilakukan dengan menggunakan metode kompetitif dalam mendapatkan dan belanja daerah; 3) Dalam pendapatan daerah harus maksimal direncanakan; 4) Dalam belanja daerah harus ditentukan secara terintegrasi		dokumen-dokumen tersebut memiliki dampak outcome yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu sesuai jangka tahunan dokumen tersebut. 4. Bappeda sebagai perangkat daerah penunjang yang mengkoordinir Perangkat Daerah melalui tusti Perencanaan baik urusan Prasarana Wilayah, Ekonomi, Pemerintahan, Sosial, dan Budaya setiap tahun selalu mengembangkan inovasi melalui Lomba Inovasi Daerah Innovative Government Award (IGA), tidak sekedar rutin dilaksanakan, tapi kegiatan ini telah memberikan outcome pada peningkatan kapasitas pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan mendorong penciptaan inovasi pada pemerintahan daerah;

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
33.	FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN <u>Permasalahan :</u> 1) Anggaran Urusan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp.508.594.038.005,- realisasi belanja sebesar Rp.501.395.785.519,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.7.198.252.486,; 2) Anggaran cukup banyak tidak terserap;	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir	Terima kasih atas saran dan masukannya, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan kompetensi masing-masing ASN. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan intensifikasi

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	3) Permasalahan yang muncul diantaranya : - Pengelolaan pendapatan kurang masimal; - Anggaran belanja tidak sesuai kebutuhan (contohnya belanja pegawai); - Pengelolaan Asett belum maksimal. <u>Saran :</u> - Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui BPPKAD kedepan harus melakukan hal- hal sebagai berikut : - Melakukan penguatan tata kelola keuangan dan asset daerah; - Meningkatkan Intensifikasi terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah. - Fungsi penunjang urusan Keuangan untuk meningkatkan pengawasan berbasis resiko dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi; - Meningkatkan kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).	Tahun Anggaran 2020-2024 Bupati Grobogan.	terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah melalui: - Sosialisasi pemungutan Pajak Daerah melalui inovasi ke Wajib Pajak dan masyarakat pengguna layanan atas: - PBB P2; - BPHTB; - Pajak Reklame; - Pajak Air Tanah (PAT); - Pajak MBLB; - Pajak Sarang Burung Walet; - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): - PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; - PBJT Tenaga Listrik; - PBJT Jasa Perhotelan; - PBJT Jasa Parkir; - PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan; - Opsen PKB - Opsen BBNKB - Penggunaan Aplikasi SIPADA (Sistem Informasi Pajak Daerah) yang berbasis Web yang mempermudah Wajib Pajak dalam pembayaran dan penyetoran pajak daerah secara elektronik (non tunai).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3. Pemasangan Alat rekam data dan aplikasi perekaman serta pemantauan Pajak Daerah secara online dan dapat dipantau secara riil time (<i>Tapping Box</i>) pada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah. 4. Pengembangan inovasi digitalisasi dengan pembayaran pajak daerah melalui QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>), dimana Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah dengan mudah dan aman menggunakan ponsel dengan memindai kode QR di berbagai aplikasi pembayaran, seperti e-wallet, mobile banking, dan aplikasi uang elektronik. 5. Membentuk Tim Penertiban Pajak Daerah (TP2D) yang bertugas untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan penanganan secara intensif atas ketidakpatuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Susunan keanggotaan Tim ini terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Satpol PP, Inspektorat dan BPPKAD. 6. Melakukan Undian Pajak Daerah yang diadakan setiap satu tahun sekali dengan tujuan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			memberikan penghargaan bagi Wajib Pajak yang tertib memungut pajak daerah dan bagi pengunjung yang taat membayar pajak daerah. 7. Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu Retribusi untuk memperluas inovasi pembarayan retribusi. Terima Kasih saran dan masukannya, BPPKAD telah membentuk Tim SAKIP untuk pengawasan internal yang ditetapkan oleh Kepala Badan selanjutnya secara berkala Tim SAKIP melaksanakan rapat evaluasi setiap triwulan yang menghasilkan laporan yang diserahkan kepada Kepala Badan sebagai Penanggungjawab. Terimakasih atas saran dan masukannya. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Inspektorat Kabupaten Grobogan telah melaksanakan secara rutin sosialisasi terkait peningkatan Sistem Pengendalian Internal dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah (termasuk BPPKAD) terkait Regulasi terbaru serta untuk kanal aduan <i>Whistleblower System</i>, selanjutnya kami akan agendakan secara rutin bimbingan teknis/ pendampingan bagi Tim SAKIP BPPKAD dengan Narasumber/ Pendamping dari Inspektorat Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
34.	FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN Permasalahan : 1) Anggaran Urusan Kepegawaian Tahun 2024 sebesar Rp.10.853.175.000,- realisasi belanja sebesar Rp.9.942.907.872,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.910.267.128,-; 2) Belanja Kepegawaian menyisakan anggaran yang cukup banyak; 3) Dalam fungsi kepegawaian muncul permasalahan diantaranya : a. Sistem Merit kepegawaian tidak dijalankan secara maksimal; b. Penataan pegawai ASN dan P3K kurang proporsional dan profesional tidak sesuai studi keilmuan; c. Diklat pegawai secara umum masih dikelola oleh BKPPD; d. Dalam pembinaan pegawai belum sepenuhnya berhasil (penerapan sanksi pegawai); e. Penataan pegawai non ASN belum selesai tuntas.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Dalam pengembangan karier ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya menuju penerapan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin baiknya capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2023 yaitu 0,67 dengan nilai 273, kategori III (Baik). 2. Dalam rangka menuntaskan permasalahan pegawai non ASN sebagaimana amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, pada tahun 2025 ini telah ditetapkan/diangkat PPPK Paruh Waktu dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Keputusan Kemen PAN RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu 3. Upaya peningkatan pengelolaan kepegawaian yang proposional dan profesional terus dilakukan dan dikembangkan sejalan dengan penerapan Manajemen ASN berbasis sistem merit 4. Pengembangan ASN untuk menunjang kinerja yang tinggi menjadi bagian dari manajemen ASN yang akan terus dilakukan perbaikan dan peningkatan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan dalam pengembangan karier pegawai (ASN) dengan menggunakan Sistem Merit yang adil dan bijaksana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan (Meritokrasi); 2) Segera menuntaskan permasalahan pegawai Non ASN; 3) Meningkatkan tata Kelola kepegawaian porposional dan profesional; 4) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui BKPPD meningkatkan pengembangan ASN untuk menunjang kinerja yang tinggi.		kualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan jaman.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
35.	FUNGSI PENGAWASAN Permasalahan : 1) Anggaran Urusan Pengawasan Tahun 2024 sebesar Rp.11.949.054.000,- realisasi belanja sebesar Rp.11.098.620.320,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.850.433.680,-; 2) Sisa anggaran cukup banyak tidak terserap; 3) Permasalahan muncul dalam fungsi pengawasan diantaranya :	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	1. Dalam rangka Meningkatkan Kapabilitas APIP, Tahun 2025 anggaran pengawasan sudah dipenuhi 0,5% Tahun 2025 juga sudah ada penambahan pegawai 10 orang dengan rincian sebagai berikut : - 4 org CPNS JF auditor - 4 org CPNS JF PPUPD - 1 org CPNS JF Analis SDMA - 1 org PPPK Arsiparis Ahli Pertama

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	a. Belum terpenuhi anggaran dalam APBD sesuai kebutuhan; b. Kurangnya pemeriksaan (ASN) yang dikelola Inspektorat; c. Review terhadap APBD belum optimal. Saran : 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah saatnya meningkatkan APIP; 2) Meningkatkan pencegahan dan penanganan resiko korupsi.		2. Untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan risiko korupsi tahun 2025 telah diadakan kegiatan sebagai berikut : a. Pendidikan anti Korupsi b. E-Learning Integritas di tingkat SLTP c. Perluasan Desa Anti Korupsi

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
36.	FUNGSI PENDUKUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Permasalahannya : 1) Anggaran Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebesar Rp.79.035.640.990,- realisasi belanja sebesar Rp.73.525.488.999,- terjadi sisa anggaran sebesar Rp.5.510.151.991,-; 2) Belanja yang sudah dianggarkan tidak terserap cukup tinggi; 3) Fungsi pengawasan belum optimal. Saran :	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 9 Tahun 2025 tentang Persetujuan atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 20204 Bupati Grobogan.	Sekretariat DPRD berupaya untuk terus meningkatkan capaian kinerja dengan : 1. penguatan perencanaan kinerja melalui penyusunan indikator yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah. 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan rencana anggaran kas 3. Meminimalisir perubahan rencana kegiatan dan anggaran 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala per triwulan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2024	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	1) Pemerintah Kabupaten Grobogan Bersama DPRD meningkatkan capaian kinerja sesuai bidang masing-masing; 2) DPRD melakukan tugas sesuai tupoksi secara maksimal.		Untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya untuk melakukan koordinasi dengan masing-masing komisi untuk alokasi waktu pengawasan sebelum pembahasan agenda kegiatan DPRD dalam rapat badan musyawarah. Pelaksanaan pengawasan DPRD pada Tahun 2025 lebih banyak dilakukan melalui Rapat Kerja Alat Kelengkapan Dewan.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan total anggaran sebesar Rp.25.295.680.000,- terserap Rp. 22.827.757.826,- atau 90,24% dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pertanian dengan program kegiatan sebanyak 5 (lima) Program dan 8 (delapan) kegiatan.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2025, meliputi dasar hukum, instansi pemberi tugas pembantuan, organisasi perangkat daerah pelaksana, serta pelaksanaan program dan kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

A. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUANKAN

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Pusat

Total anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp. 17,534,964,000,- terealisasi sebesar Rp. 15.071.594.426,- atau 85,95%, dikelola oleh 1 (satu) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 17,534,964,000,- terealisasi sebesar Rp.15.071.594.426,- atau 85,95%. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian pemberi tugas pembantuan, dasar pelaksanaan, program kegiatan dan keluaran, lokasi, perangkat pelaksana, alokasi dan realisasi

anggaran, serta realisasi capaian kegiatan, dapat dilihat pada matrik Tabel IV.1 berikut ini :

TABEL IV.1
MATRIK CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2025

No	Kementerian an	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementeri an Perumaha n dan Kawasan Permukima n Republik Indonesia	1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DPA/A.1/1.04.1. 03.2.10.01.0000/ 001/2025	Program : Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum Output: Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses minum layak	1. Lingkungan RT 08, RT 09 RW 07 Kelurahan Purwodadi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.	1.728.791.000	1.605.946.000	92.8	Sesuai ketentuan bahwa program kegiatan tersebut telah terlaksana a pada 1 lokasi	100	
2	Kementeri an Perumaha n dan Kawasan Permukima	1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan	Program : Program Pengelolaan dan Pengembang	1. Pembanguna n SPALDS Desa Padas Kecamatan Kedungjati	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.419.670.750	8.403.110.000	99.8	Sesuai ketentuan bahwa program kegiatan tersebut	100	

No	Kementerian an	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
	n Republik Indonesia	Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DPA/A.1/1.04.1. 03.2.10.01.0000/ 001/2025	n Sistem Air Limbah Output: Persentase rumah tangga yang memenuhi hunian dengan akses sanitasi (air limbahdomesti k) layak	2. Pembanguna n SPALDS Desa Mangin Kecamatan Karangrayun 3. Pembanguna n SPALDS Desa Genengsari Kecamatan Toroh 4. Pembanguna n SPALDS Desa Asemrudung Kecamatan Geyer 5. Pembanguna n SPALDS Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon 6. Pembanguna n SPALDS Desa Sambongan Kecamatan Kradenan 7. Pembanguna n SPALDS Desa Sengonwetan	Kabupaten Grobogan.				telah terlaksana pada 20 lokasi		

No	Kementerian an	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
				Kecamatan Kradenan 8. Pembanguna n SPALDS Desa Banjardowo Kecamatan Kradenan 9. Pembanguna n SPALDS Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus 10. Pembanguna n SPALDS Desa Banjarejo Kecamatan Gabus 11. Pembanguna n SPALDS Desa Kalangdosari Kecamatan Ngaringan 12. Pembanguna n SPALDS Desa Tanjungharjo Kecamatan Ngaringan 13. Pembanguna n SPALDS							

No	Kementerian an	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
				Desa Sumberagun g Kecamatan Ngaringan 14. Pembanguna n SPALDS Desa Putatsari Kecamatan Grobogan 15. Pembanguna n SPALDS Desa Karangenen g Kecamatan Godong 16. Pembanguna n SPALDS Desa Manggarmas Kecamatan Godong 17. Pembanguna n SPALDS Desa Rowosari Kecamatan Gubug 18. Pembanguna n SPALDS Desa Sugihmanik Kecamatan							

No	Kementerian an	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
3	Kementeri an Perumaha n Kawasan Permukima n Republik Indonesia	1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DPA/A.1/1.04.1.	Program : Program Kawasan Permukiman Output : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	1. Lingkungan RT 08, RT 09 RW 07 Kelurahan Purwodadi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.	5,976,840,250	3,606,992,800	60.3	Sesuai ketentuan bahwa program kegiatan tersebut telah terlaksana a pada 1 lokasi	100	

No	Kementerian an	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
		03.2.10.01.0000/ 001/2025									
4	Kementeri an Perumaha n dan Kawasan Permukima n Republik Indonesia	1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DPA/A.1/1.04.1. 03.2.10.01.0000 /001/2025	Program : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Output : Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	1. Pembanguna n Baru Rumah Swadaya 2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.	1.589.662.000	1.455.545.626	91.6	Sesuai ketentuan bahwa program kegiatan tersebut telah terlaksana a pada 58 lokasi	100	

2. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Provinsi

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 7.760.716.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.756.163.400,- atau 99,94%, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari instansi pemberi tugas pembantuan, dasar pelaksanaan, program kegiatan dan keluaran, lokasi, SKPD pelaksana, alokasi dan realisasi anggaran, serta realisasi capaian kegiatan, dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini :

TABEL IV.2
MATRIK CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2025

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
	Pertanian	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.08.4.0391 58/2025	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Berkualitas Kegiatan : 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Irigasi Perpompaan (12 unit) Optimalisasi Lahan (700 Ha) 2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Alat Mesin Pertanian (1 Kegiatan)	Kabupaten Grobogan	Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	7.760.716.000 7.458.906.000	7.756.163.400 7.458.900.400	99,94 100	Sesuai ketentuan bahwa program kegiatan tersebut telah terlaksana 12 Unit 700 Ha 1 Kegiatan	100 100	

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaks Penugasan (TP)	Program kegiatan Output dan rincian kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi capaian kinerja	(%)	Ket
			3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (1 Kegiatan)			238.030.000	236.708.000	99,44	1 Kegiatan		
			4) Layanan Manajemen Keuangan (1 Kegiatan)			38.780.000	35.555.000	91,68	1 Kegiatan		

B. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2025, yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yaitu dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan antara lain :

1. Pada beberapa lokasi masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air baku yang memadai dan berkelanjutan.
2. Jarak antara sumber air (sumur) dengan lokasi penerima manfaat relatif jauh sehingga menyulitkan dalam pembangunan dan distribusi jaringan pelayanan.
3. Ada penolakan dari warga yang mendapatkan program
4. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL komunal, khususnya di wilayah dengan kepadatan permukiman tinggi
5. Terjadi penolakan lahan IPAL/Sanitasi komunal
6. Tingginya kepadatan permukiman dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam.
7. Kondisi infrastruktur eksisting yang belum memadai serta luasnya wilayah penanganan.

Adapun saran tindak lanjut adalah:

1. Melakukan pemindahan lokasi pengeboran ke titik yang memiliki potensi sumber air baku lebih memadai.
2. Mendorong dukungan swadaya dari masyarakat dan pemerintah desa dalam penyediaan lahan serta keberlanjutan pengelolaan sarana.
3. Melakukan penyesuaian atau penggantian penerima manfaat sesuai hasil verifikasi lapangan.
4. Melakukan pemindahan lahan atau lokasi kegiatan apabila lokasi awal tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Sedangkan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi JawaTengah, pada Tahun 2025 tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Keseluruhan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman dan target yang telah ditetapkan.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2025 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Bupati Grobogan kepada DPRD Kabupaten Grobogan secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif serta Legislatif dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Grobogan yang mendukung situasi dan kondisi sehingga tetap terjaga kondusif dan penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Demikian penyampaian LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025 ini, diiringi harapan semoga di tahun - tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Grobogan, Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Purwodadi, 26 Maret 2026
BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 12 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Grobogan telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, sesuai Pasal 97 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025., dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 yang dihadiri oleh 42 (empat puluh dua) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan telah menyetujui secara aklamasi pembahasan tahap selanjutnya

dilaksanakan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan jumlah keanggotaan sebanyak 13 (tiga belas);

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, sejumlah 13 orang dengan komposisi atau utusan Fraksi sebagai berikut :
1. Utusan Fraksi PDI Perjuangan : 5 orang
 2. Utusan Fraksi PKB : 2 orang
 3. Utusan Fraksi Gerindra : 2 orang
 4. Utusan Fraksi Hanura : 1 orang
 5. Utusan Fraksi PPP : 1 orang
 6. Utusan Fraksi Karya Demokrat : 1 orang
 7. Utusan Fraksi Keadilan Nasional : 1 orang
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas menyusun Rancangan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna paling lama tanggal 11 Mei 2026.

- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KETIGA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 26 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,



LUSIA INDAH ARTANI

- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
 2. Bupati Grobogan.
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 12 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 MARET 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	TRIANA HANDAYANI, ST.	KETUA / ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
2.	MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	WK. KETUA / ANGGOTA	F – PKB
3.	RIZKY BINTANG FAUZI, ST.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
4.	ERIN VINCIA DORA, S.Pd.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
5.	H. MOCH. SUTARNO, SH.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
6.	HERU SANTOSA, SH., MM.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
7.	AHMAD HABIBI, S.Ag.	ANGGOTA	F – PKB
8.	MUSTOFA BUDI SANTOSO, S.IP., M.Si.	ANGGOTA	F – GERINDRA
9.	dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF SUGENG, MARS.	ANGGOTA	F – GERINDRA
10.	M. QANNIEXNA BMA, SH.	ANGGOTA	F – HANURA
11.	MA. AMIN ROIS ABDUL GHONI, SE.	ANGGOTA	F – PPP
12.	H. BUKHORI, SH.	ANGGOTA	F – KARYA DEMOKRAT
13.	H. SHOLIKIN	ANGGOTA	F – KEADILAN NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,


LUSIA INDAH ARTANI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 03 Telp. (0292) 421145 Purwodadi

RISALAH RAPAT

Tahun Sidang : 2026
Masa Persidangan : 1
Rapat Ke- : 10
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I
Ketua Rapat : Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M.
(Ketua DPRD Kab. Grobogan)
Acara : Pengambilan Keputusan atas
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati
Grobogan Akhir TA. 2025 – Pembubaran
Panitia Khusus III Tahun 2026.

Sekretaris Rapat : Drs. Daru Wisakti, M.Si (Sekwan).
Hadir :
A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:
43 dari 50 orang Anggota DPRD
Kab. Grobogan dengan rincian :

Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan
(4 dari 4 orang Pimpinan) :

1. Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M.
2. Ir. H. Mukhlisin, M.M., M.Si.
3. Supardi, S.M.
4. Setiawan Djoko Purwanto, S.H.

Fraksi PDI-Perjuangan

(15 dari 16 orang Anggota) :

5. Agus Siswanto, S.Sos., MAP
6. Heru Santosa, S.H., M.M.
7. H. Eko Budi Santoso

8. Musapak, S.H.
9. Moch Sutarno, S.H.
10. Gunawan
11. Rio Ardian
12. Subandriyo
13. Rimbawanto, S.H.
14. Rizky Bintang Fauzi, S.T.
15. Tonny Hidayanto
16. Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi.
17. Magdalena Selvi
18. Triana Handayani, S.T.
19. Erin Vincia Dora, S.Pd.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(5 dari 7 orang Anggota) :

20. H. Sukanto, S.H., M.H.
21. Hj. Sri Murdiati, S.H.
22. Arief Dwi Agustianto, S.H.
23. Ahmad Habibi, S.Ag.
24. Harnomo, S.H.

Fraksi Gerindra

(5 dari 7 orang Anggota) :

25. Ir. Kariyoso
26. Mustofa Budi S, S.IP., M.Si.
27. Beni Susanto, S.T.
28. Achmad Taufik, S.IP.
29. Harsono, S.Pd., M.H.

Fraksi Hati Nurani Rakyat

(3 dari 3 orang Anggota) :

30. Sumarli, S.E.
31. Sofiatul Mudhakiroh, S.E., M.H.
32. M. Qanniexna BMA, S.H.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(4 dari 4 orang Anggota) :

33. H. Muhamad Misbah, S.Ag., M.Si.

34. Budi Prihdiyono
35. Drs. Sriyanto
36. MA Amin Rois Abdul Ghoni, S.E.

Fraksi Karya Demokrat

(5 dari 5 orang Anggota) :

37. drh. Wahono Endro Purnawanto, M.M.
38. Muhammad Sidiq, A.Md.
39. Drs. Karsono, M.Pd
40. H. Bukhori, S.H.
41. H. Arif Miftakhul Huda

Fraksi Keadilan Nasional

(2 dari 4 orang anggota) :

42. Ahmad Sidik, M.Pd.
43. H. Sholikin

B. Pemerintah Daerah

1. Sdr. Bupati Kabupaten Grobogan;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan;
4. Asisten Sekda Kab. Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan;
6. Ka. OPD Kab. Grobogan;
7. Ka. Bag. Setda Kab. Grobogan;
8. Camat se Kab. Grobogan;
9. Direktur BUMD Kab. Grobogan.

Menyanyikan Bersama lagu **“Indonesia Raya”**

I. PEMBUKAAN RAPAT

Ketua Rapat : (Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M. –
Ketua Dewan)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian dan Selamat Pagi, Shallom, Om Swastiastu, Namo Buddaya, Salam kebajikan, Rahayu.

Yth. Bupati Grobogan;
Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan, dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
Yth. Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekda Kabupaten Grobogan;
Yth. Para Staf Ahli Bupati;
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Grobogan;
Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;
Yth. Para Camat se Kabupaten Grobogan;
Yth. Direktur BUMD se Kabupaten Grobogan;
Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, Saudara Sekwan, rekan-rekan PERS, pendengar Radio Purwodadi FM di manapun anda berada, serta.....

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Saat sekarang menunjukkan pukul 10.19 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan – menurut laporan Sdr. Sekwan – dari 50 orang Anggota, 43 orang diantaranya telah membubuhkan tanda tangannya, 1 orang ijin.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinakan kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Rabu, 22 April 2026 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan :

“ DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” (XXX)

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Sebagai insan yang bertaqwa, marilah sejenak kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul kembali di ruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan

sehat wal'afiat, untuk bersama – sama menyelenggarakan Rapat Paripurna Dewan, yang kali ini merupakan Rapat Paripurna Ke-10 untuk Tahun Sidang 2026 Masa Sidang ke-1.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbinganNya, sehingga persidangan hari ini dapat kita selesaikan dengan tertib dan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih atas kehadiran Saudara sekalian dalam Rapat Paripurna ini, dengan agenda acara :

**“Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ
Bupati Grobogan Akhir TA. 2025 – Pembubaran Panitia Khusus III
Tahun 2026”**

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum kita memulai agenda persidangan hari ini, izinkan saya selaku Ketua DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan mengucapkan Selamat Hari Kartini ke- 147 kepada seluruh perempuan hebat di Indonesia khususnya di Kabupaten Grobogan kita tercinta. Peringatan Hari Kartini bukan sekedar seremonial. Bagi kita di lembaga legislatif ini, semangat Kartini adalah pengingat untuk terus memperjuangkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berpihak pada pemberdayaan perempuan. Kehadiran perempuan di kursi legislatif dan di berbagai sektor publik adalah bentuk nyata bahwa ‘habis gelap, terbitlah terang’ bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah perjuangan yang terus kita lanjutkan.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sdr. Bupati Grobogan telah menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke – 8 tanggal 26 Maret 2026 yang lalu, selanjutnya LKPJ dimaksud telah dibahas oleh DPRD secara internal yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus III Tahun 2026 pada tanggal 27 Maret 2026 dan 8 April 2026

dengan menghasilkan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisi permasalahan, saran, masukan dan atau koreksi bagi Sdr. Bupati dan jajarannya, berdasarkan capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun kemarin, untuk digunakan sebagai acuan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran berikutnya.

Sesuai Keputusan Badan Musyawarah Nomor 3 Tahun 2026 perihal Agenda Dewan Bulan April 2026 dan surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 400.14.1.4/168/SETWAN/2026 perihal Undangan Rapat Paripurna Ke-10, maka pada hari ini akan kita sampaikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Demikian pengantar singkat kami memasuki persidangan hari ini, untuk lebih tertibnya acara, marilah terlebih dahulu kita susun bersama urutan acara kita hari ini.

Apabila Saudara sekalian sependapat dengan kami, susunan acara kami rencanakan sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus III Tahun 2026;
2. Pengambilan Keputusan Dewan atas Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026;
3. Pembubaran Panitia Khusus III Tahun 2026;
4. Rapat baru kita tutup.

Demikian, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

R a p a t : Dapaaaaatt

Ketua Rapat : Terima kasih (X).

Untuk menghemat waktu dan guna mengetahui Rekomendasi DPRD yang merupakan hasil rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 dimaksud, marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan hasil rapat Panitia

Khusus III Tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Pelapor, untuk itu kepada Sdr. H. Sholikin, dipersilahkan!

II. PEMBAHASAN MATERI

1. Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus III Tahun 2026

Pelapor : Sdr. H. Sholikin

Ketua Rapat : Kepada Sdr. H. Sholikin, kami sampaikan terima kasih atas penyampaian laporannya.

2. Pengambilan Keputusan

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus III Tahun 2026, yang telah menghasilkan sebuah rekomendasi yang apabila disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat, Rekomendasi tersebut akan kami sampaikan kepada Sdr. Bupati sebagai salah satu pedoman perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena keputusan tertinggi adalah ditangan Anggota Dewan.

Untuk itu, kami tawarkan :

Apakah rekomendasi Dewan sebagaimana hasil pembahasan internal DPRD yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus III Tahun 2026 dapat disetujui dan selanjutnya ditetapkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Grobogan???

Rapat : Dapat / Setujuuuuu!

Ketua Rapat : Terima Kasih (**X**)

Dengan demikian persetujuan akan kami tuangkan ke dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan yang sesuai register bernomor 180.18/15 Tahun 2026, tertanggal hari ini 22 April 2026.

3. Pembubaran Panitia Khusus III Tahun 2026

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan ditetapkannya hasil pembahasan Panitia Khusus III Tahun 2026 ke dalam Keputusan Dewan, maka selesailah sudah tugas Panitia Khusus III Tahun 2026. Untuk itu dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dalam mengemban tugas Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan, kami nyatakan dibubarkan**(X)**.

III. Penutup

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian, maka selesailah sudah Rapat Paripurna Ke-10 yang berlangsung dengan tertib dan lancar dari awal sampai akhir.

Sebelum ditutup perlu kami sampaikan bahwa setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan rapat kerja Badan Musyawarah dan rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Grobogan.

Demikian, dan akhirnya kami tawarkan apakah sampai disini Rapat dapat DITUTUP ?

R a p a t : Dapaaaaat....!!!

Ketua Rapat : Terima kasih ... (X).

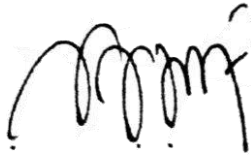
Untuk itu, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pukul 10.38 WIB, Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2026, Rabu, 22 April 2026, kami nyatakan :

“ DITUTUP “ (XXX)

Sekian, Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

KETUA DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Ketua Rapat,



Hj. LUSIA INDAH ARTANI, S.E., M.M.

SEKRETARIS DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Sekretaris Rapat,



Drs. DARU WISAKTI, M.Si.

NIP. 19690511 199001 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jalan Bhayangkara Nomor 3, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon : (0292) 421145, Faksimile : (0292) 422932,
Laman : <https://dprd.grobogan.go.id>, Pos-el : dprd@grobogan.go.id

Grobogan, 20 April 2026

Nomor : 400.14.1.4/168/SETWAN/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 lembar
Hal : Undangan Rapat Paripurna
ke-10 DPRD Kab. Grobogan

Yth. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara dalam Rapat Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, yang akan diselenggarakan besok pada :

Hari : **RABU**
Tanggal : 22 April 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan
Acara : Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Grobogan Akhir TA. 2025 – Pembubaran Panitia Khusus III Tahun 2026.
Pakaian : P S R (Pakaian Sipil Resmi)
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu.

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara, disampaikan terima kasih.



Ketua DPRD Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE., MM.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
2. Arsip.

LAMPIRAN
Undangan Rapat Paripurna ke-10
DPRD Kabupaten Grobogan
Nomor :

400.14.1.4/168/SETWAN/2026
Tanggal : 20 April 2026

DAFTAR UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA KE-10 DPRD KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LKPJ BUPATI GROBOGAN AKHIR TA. 2025
– PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026

NO	UNDANGAN
1.	BUPATI GROBOGAN
2.	WAKIL BUPATI GROBOGAN
3.	KOMANDAN KODIM 0717 GROBOGAN
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI
7.	KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
8.	SEMUA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GROBOGAN
9.	SEKRETARIS DAERAH
10.	SEKRETARIS DPRD
11.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA
12.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
13.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
14.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
15.	STAF AHLI BUPATI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN SDM
16.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN
17.	KEPALA DINAS KESEHATAN
18.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
19.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN (DISPERAKIM)
20.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)

21.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
22.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
23.	KEPALA DINAS SOSIAL (DINSOS)
24.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)
25.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA (DP3AKB)
26.	KEPALA DINAS PANGAN
27.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
28.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)
29.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMASDES)
30.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)
31.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
32.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DINKOPUKM)
33.	Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
34.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISPORABUDPAR)
35.	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH (DINARPUSTA)
36.	Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN (DISPERTAN)
37.	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISNAKKAN)
38.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG)
39.	KEPALA INSPEKTORAT DAERAH
40.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
41.	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
42.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
43.	KABAG. PEMERINTAHAN SETDA
44.	KABAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
45.	KABAG. HUKUM SETDA
46.	KABAG. PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA
47.	KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
48.	KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
49.	KABAG. UMUM SETDA

50.	KABAG. ORGANISASI SETDA
51.	KABAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
52.	KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA
53.	CAMAT KEDUNGJATI
54.	CAMAT KARANGRAYUNG
55.	CAMAT PENAWANGAN
56.	CAMAT TOROH
57.	CAMAT GEYER
58.	CAMAT PULOKULON
59.	CAMAT KRADENAN
60.	CAMAT GABUS
61.	CAMAT NGARINGAN
62.	CAMAT WIROSARI
63.	CAMAT TAWANGHARJO
64.	CAMAT GROBOGAN
65.	CAMAT PURWODADI
66.	Plt. CAMAT BRATI
67.	CAMAT KLAMBU
68.	CAMAT GODONG
69.	CAMAT GUBUG
70.	PLt. CAMAT TEGOWANU
71.	CAMAT TANGGUNGHARJO
72.	DIREKTUR PDAM
73.	DIREKTUR BANK JATENG
74.	DIREKTUR BPR BKK
75.	DIREKTUR PURWA ARTHA
76.	DIREKTUR PURWA AKSARA
77.	DIREKTUR JAMKRIDA
78.	PARA TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN GROBOGAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2026
Pukul : 09.00 WIB
Jenis Rapat : Rapat Ke-10
Tgl / MS : 2026
Acara : Pengambilan Keputusan Atas Rekomendasi DPRD Terhadap LKPS
Bupati Grobogan Th. 2025
Pembubaran Panas III Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SETYO HADI	BUPATI GROBOGAN	1
2	H. SUGENG PRASETYO, SE. MM	WK. BUPATI GROBOGAN	2
3	Wahid Kismoro	KAPOLRES GROBOGAN	3
4	EKA	DANDIM 0717	4
5	Dwi Agus P.	KA. KEJAKSAAN NEGERI	5
6		KA. PENGADILAN NEGERI	6
7		KA. PENGADILAN AGAMA	7

Purwodadi, 22 APRIL 2026

KETUA RAPAT

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR
ANGGOTA DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2026
Pukul : 09.00 WIB
Jenis rapat : Paripurna 10
TS / MS : 2026
Acara : Pengambilan Keputusan Atas Rekomendasi DPRD Terhadap
LEDJ Bupati Grobogan Akhir TA. 2025 - Pembubaran
Panitia Khusus III Tahun 2026.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. LUSIA INDAH ARTANI, SE. MM	KETUA	1v.....
2	Ir. H. MUKHLISIN, M.M., M.Si.	WAKIL KETUA	2v.....
3	SUPARDI, S.M	WAKIL KETUA	3.....
4	SETIAWAN DJOKO P. S.H.	WAKIL KETUA	4v.....
5	AGUS SISWANTO, S.Sos.,MAP	ANGGOTA	5.....
6	HERU SANTOSA, SH. MM	ANGGOTA	6.....
7	H. EKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	7.....
8	MUSAPAK, SH	ANGGOTA	8.....
9	MOCH SUTARNO, S.H	ANGGOTA	9.....
10	GUNAWAN	ANGGOTA	10.....
11	RIO ARDIAN	ANGGOTA	11.....
12	SUBANDRIYO	ANGGOTA	12.....
13	RIMBAWANTO, SH	ANGGOTA	13.....
14	RIZKY BINTANG FAUZI, ST	ANGGOTA	14.....
15	TONNY HIDAYANTO	ANGGOTA	15.....
16	DEWI MEGAWATI	ANGGOTA	16.....
17	NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi.	ANGGOTA	17.....
18	MAGDALENA SELVI	ANGGOTA	18.....
19	TRIANA HANDAYANI, S.T.	ANGGOTA	19.....
20	ERIN VINCIA DORA, S.Pd.	ANGGOTA	20.....

2	3	4
21 H. SUKANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA	21
22 Hj. SRI MURDIATI, SH	ANGGOTA	22
23 ARIEF DWI AGUSTIANTO, S.H.	ANGGOTA	23
24 AHMAD HABIBI, S.Ag.	ANGGOTA	24
25 HARNOMO, S.H	ANGGOTA	25
26 SUPROJO	ANGGOTA	26
27 MANSATA INDAH MARATONA, M.S.I.	ANGGOTA	27
28 dr. KARIYOSO	ANGGOTA	28
29 MUSTOFA BUDI S. S.IP, M.Si	ANGGOTA	29
30 dr. H. MIFTAHUDDIN ALIF S. MARS	ANGGOTA	30
31 FARIDA RISTIANTI, S.H.	ANGGOTA	31
32 BENI SUSANTO, S.T	ANGGOTA	32
33 ACHMAD TAUFIK, S.IP.	ANGGOTA	33
34 HARSONO, S.Pd. M.H	ANGGOTA	34
35 SUMARLI, S.E.	ANGGOTA	35
36 SOFIATUL MUDHAKIROH, S.E.	ANGGOTA	36
37 M. QANNIEXNA B.M.A, S.H.	ANGGOTA	37
38 H. MUHAMAD MISBAH, S.Ag., M.Si.	ANGGOTA	38
39 BUDI PRIHDIYONO	ANGGOTA	39
40 Drs. H. SRIYANTO	ANGGOTA	40
41 MA AMIN ROIS ABDUL GHONI, S.E.	ANGGOTA	41
42 drh. WAHONO ENDRO P	ANGGOTA	42
43 MUHAMMAD SIDIQ, A. Md	ANGGOTA	43
44 Drs. KARSONO. M. Pd	ANGGOTA	44
45 AHMAD SIDIK, M. Pd	ANGGOTA	45
46 SURANTO, S. Pd, M.Psi	ANGGOTA	46
47 AHMAD SYARIF, ST	ANGGOTA	47
48 H. BUKHORI, SH	ANGGOTA	48
49 H. ARIF MIFTAKHUL HUDA	ANGGOTA	49
50 H. SHOLIKIN	ANGGOTA	50

Purwodadi, 22 APRIL 2026

KETUA RAPAT

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi - Grobogan

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2026
Pukul : 09.00 WIB
Jenis rapat : Paripurna ke 10
TS / MS : 2026
Acara : Pencabutan Keputusan Atas Rekomendasi DPRD Terhadap LKPS Bupati Grobogan TS-2025
Pembubaran Pang III Tahun 2026

NO	NAMA	SKPD	TANDA TANGAN
2		3	
1	Anang Amunanto	SEKDA KAB. GROBOGAN	1
2		ASS. PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA	2
3		ASS. PEREKON. PEMBANGUNAN SEKDA	3
4	Catur S	ASS. ADMINISTRASI UMUM SEKDA	4
5	Mad Tadj	SA. BUP. BID. PEM. HUKUM DAN POLITIK	5
6	M. M. M. M.	SA. BUP. BID. SOS. KEMASY DAN SDM.	6
7		SA. BUP. BID. PEMB. EKO. DAN KU.	7
8	M. Muhanim	KABAG PEMERINTAHAN SEKDA	8
9	R. R. R.	KABAG. HUKUM SEKDA	9
10	R. R. R.	KABAG. PROTOKOL DAN KOM. PIMPINAN	10
11	Endah R. P.	KABAG. PEREKONOMIAN DAN SDM	11
12	Budi S	KABAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12
13	Ali anwar .	KABAG. KESRA SEKDA	13
14	M. M. M.	KABAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	14
15	S. M. M.	KABAG. UMUM SEKDA	15
16		KABAG. ORGANISASI SEKDA	16
17	Alvina M	KABAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	17
18	Xur Krowana	INSPEKTORAT	18
19	AFI WILDANI	BAPPEDA	19
20	W. W. W.	BPPKAD	20
21	R. R. R.	BKPPD	21
22	U. U. U.	BAKESBANGPOL	22
23	Adi X	BPBD	23
24	M. Kamim, M. M.	DINAS PENDIDIKAN	24
25	Y. Y. Y.	DINAS. PEM. OR. KEBUD. DAN PRWSTA	25

Dehas S	DINAS SOSIAL	26	
Fitri H R	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS.	27	
Indah H	DINAS PERHUBUNGAN	28	
M W	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	
Siwi L S M U	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	30	
Kasim Anwar	DINAS KOPERASI, UKM	31	
RAO R P S	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAG.	32	
Kuku H	DINAS PERTANIAN	33	
Min N H	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	34	
Far N	DINAS PERUM. RKYT DAN KAW. PEMUK.	35	
E K	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	36	
	DINAS KESEHATAN	37	
Yakub P	DINAS KETAHANAN PANGAN	38	
Sandi K	DINAS PEMBERDY. MASY. DAN DESA	39	
Fitri M	DINAS PEMBERDY. PEREM. PA. DAN KB.	40	
Rahmat Tahir	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41	
Winarini	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSDA	42	
Ed. Mumi	DIN. PENANAMN MOD. & PEL. SATU PINTU	43	
Teguh P	SATPOL PP	44	
	DIREKTUR JAMKRIDA JATENG	45	
Santoso	DIREKTUR PURWA ARTHA	46	
	DIREKTUR PURWA AKSARA	47	
in Sugiyarto	DIREKTUR PDAM	48	
na Vidyut	DIREKTUR BKK	49	
	DIREKTUR BANK JATENG	50	
	Dir. RSUD	51	
Supriyadi	KECAMATAN PURWODADI	52	
Indah Mwi H	KECAMATAN TOROH	53	
OE TO DO	KECAMATAN GEYER	54	
Supriyadi	KECAMATAN GROBOGAN	55	
Ali	KECAMATAN BRATI	56	
Bustamagi	KECAMATAN KLAMBU	57	
Wiko M	KECAMATAN WIROSARI	58	
Oluf E	KECAMATAN TAWANGHARJO	59	
W S D O	KECAMATAN NGARINGAN	60	
Arumy	KECAMATAN PULOKULON	61	
Si Suharti M	KECAMATAN KRADENAN	62	
Joko P	KECAMATAN GABUS	63	
Dono	KECAMATAN KARANGRAYUNG	64	

Putri Purwati	KECAMATAN GUDUNG	65	
Putri Purwati	KECAMATAN PENAWANGAN	66	
Putri Purwati	KECAMATAN GUBUG	67	
Pony Catur P.	KECAMATAN TEGOWANU	68	
Heru S.	KECAMATAN KEDUNGJATI	69	
Aris C. It.	KECAMATAN TANGGUNGHARJO	70	
		71	
		72	
Juni Purwanti MS		73	
Syahrillawati M.		74	
Patri Noviana.		75	
Vety Yuni L.		76	
Siwi Prambodo		77	
SUIARWADI		78	
Joko Murjono		79	
Joko Nugroho		80	
Misbaqul M.		81	
Binto	Sekpri	82	
Kevin	Sekpri	83	
Mastur	---	84	
Faizal	---	85	
Bagus	---	86	
Asrori	---	87	
Rudini	---	88	
FERRY S	Hugos	89	
RISKI	---	90	
Hadi Purwono	TA F Karya Dendrat	91	
M. Jalmik	TA F Karya Nara	92	
Fitra	Siswa	93	
Bondan	---	94	
Fitra	---	95	
Bondan	---	96	
Teguh	---	97	
WICAKRISWANTO	---	98	
		99	
		100	

PURWODADI,

22 APRIL
KETUA RAPAT

2026

[Signature]



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026

LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 09 / PANSUS III – 2026 / IV / 2026.

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN GROBOGAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI GROBOGAN

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa LPPD, LKPJ dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Sesuai amanat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk itu Sdr. Bupati Grobogan telah menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 tanggal 26 Maret 2026 yang lalu.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ. Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Maret 2026, dan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan April 2026 maka pembahasan LKPJ dimaksud sebagaimana kesepakatan anggota Dewan dalam Rapat Paripurna ke-8 tanggal 26 Maret 2026 dilaksanakan oleh Panitia Khusus III Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/12 Tahun 2026 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.1.7/127/SETWAN/2026 tanggal 26 Maret 2026, dan Nomor : 100.1.7/142/SETWAN/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Undangan Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 telah dilaksanakan Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026, dan hari Rabu tanggal 8 April 2026.

Kemudian berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : B/400.14.1.4/136/SETWAN/2026 tanggal 1 April 2026 Perihal Undangan Kunjungan Kerja Pansus III Tahun 2026, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan kunjungan kerja Pansus III Tahun 2026 ke DPRD Kota Yogyakarta DIY, dalam rangka menambah wawasan dan memperoleh referensi serta masukan guna menyusun rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan, melaksanakan pembahasan atas LKPJ dimaksud secara internal dan sekaligus menyusun rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan dan atau koreksi sebagai pedoman perbaikan pemerintahan ke depan bagi Bupati dan jajarannya.

A. Dasar

Pelaksanaan Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
8. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana/Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Maret 2026;
9. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Rencana/Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan April 2026

10. Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor Nomor 180.18/12 Tahun 2026 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan;
11. Surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.1.7/127/SETWAN/2026 tanggal 26 Maret 2026 perihal Undangan Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 hari Jumat tanggal 27 Maret 2026;
12. Surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : B/400.14.1.4/136/SETWAN/2026 tanggal 1 April 2026 Perihal Undangan Kunjungan Kerja Pansus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan ke DPRD Kota Yogyakarta;
13. Surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 100.1.7/142/SETWAN/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Undangan Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 hari Rabu tanggal 8 April 2026.

B. Maksud dan Tujuan

Membahas dan menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.

C. Waktu dan Tempat

1. Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali waktu Rapat, yaitu :
 - 1) Hari : Jumat
Tanggal : 27 Maret 2026
 - 2) Hari : Rabu
Tanggal : 8 April 2026
2. Tempat pelaksanaan Rapat di Ruang Paripurna II DPRD Kabupaten Grobogan.

3. Kunjungan kerja luar daerah Pansus III Tahun 2026 dilaksanakan

1 (satu) kali, yaitu :

Hari : Minggu s/d Selasa

Tanggal : 5 s/d 7 April 2026.

Tempat : Kantor DPRD Kota Yogyakarta

Ipda Tut Harsono No.43, Muja Muju, Kec.
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta.

D. Peserta Rapat

Peserta Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten
Grobogan terdiri dari:

Unsur Legislatif : - Triana Handayani, ST.

(Ketua Pansus III Tahun 2026 merangkap
Anggota, selaku Ketua Rapat);

- Mansata Indah Maratona, M. Si.

(Wakil Ketua Pansus III Tahun 2026 merangkap
anggota);

Anggota Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD
Kab. Grobogan :

- Rizky Bintang Fauzi, ST.

- Heru Santoso, SH, MM.

- Moch. Sutarno, SH.

- Erin Vincia Dora, S. Pd.

- Ahmad Habibi, S. Ag.

- Mustofa Budi Santoso, SIP, M. Si.

- dr. H. Miftahuddin Alif Sugeng

- M. Qanniexna BMA, SH.

- MA. Amin Rois AG, SE.

- H. Bukhori, SH.

- H. Sholikin.

- Setwan : - Drs. Daru Wisaksti, MSi.
(Sekretaris DPRD);
- Agoes Prasetyo Adi P, SH
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan);
 - Herlambang Bayuaji, AP, MA
(Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan);
 - Karsono Joni S, S.Sos
(Kabag Program & Keuangan);
 - Supriyadi, SH
(Perancang Peraturan Perundang-undangan);
 - Anik Wibawati, SE. MM.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda);
 - Nunung Desi Eliana, SE, MM
(Perisalah Legislatif Ahli Muda);
 - Rossa Oktaviyani, S.I.Kom.
(Penelaah Teknis Kebijakan);
 - Nurul Syamsiah, SE
(Analisis Kebijakan Ahli Pertama);
 - Lutfia Layla MSF, SH
(Perisalah Legislatif Ahli Pertama);
 - Staf Sekretariat DPRD.

E. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan ini disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Dasar;
- B. Maksud dan Tujuan;
- C. Waktu dan Tempat;
- D. Peserta Rapat;
- E. Sistematika Laporan.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Materi Pembahasan;

B. Hasil Pembahasan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan;

B. Saran.

IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Materi Pembahasan

Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.

B. Hasil Pembahasan

1. Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan sepakat dan setuju untuk menyusun rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan dengan hasil sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 ini.
2. Menunjuk Sdr. H. Sholikin anggota Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan sebagai Pelapor.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan menyetujui dan menyepakati hasil pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan menjadi rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.

B. Saran

1. Bupati Grobogan diharapkan untuk memperhatikan dan melaksanakan hasil rekomendasi ini beserta jajarannya guna perbaikan pelaksanaan pemerintahan kedepannya.
2. Pemerintah Kabupaten Grobogan agar mencermati dalam merencanakan kegiatan dan penganggarannya, dengan memperhatikan dan mengkaji kebutuhan masyarakat serta efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan, kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan DPRD untuk mengambil keputusan, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Grobogan sebagai Rekomendasi DPRD.

Purwodadi, 22 April 2026.

**PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

ttd

TRIANA HANDAYANI, ST.

WAKIL KETUA,

ttd

MANSATA INDAH MARATONA, M. Si.

LAMPIRAN : LAPORAN HASIL RAPAT PANSUS III TAHUN
2026

NOMOR : 09/PANSUS III-2026/ IV /
TAHUN 2026

TANGGAL : 22 APRIL 2026

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN GROBOGAN
ATAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI GROBOGAN**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan hal tersebut, maka Bupati telah menyampaikan nota pengantar perihal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 tanggal 26 Maret 2026, dan sekaligus dilaksanakan pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025, yang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Maret sampai dengan 15 April 2026.

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025, tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis (progress report) yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran 2025, yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah dilaksanakan khususnya di tahun 2025. Banyaknya penghargaan dan penilaian nasional yang diterima Pemerintah Kabupaten Grobogan mencerminkan prestasi kinerja Bupati beserta jajaran, meskipun dalam realita di masyarakat masih ada beberapa permasalahan yang belum tuntas pada beberapa program kegiatan pembangunan, optimalisasi penanganan berbagai masalah pendidikan, kesehatan, sosial, dan perekonomian rakyat. Semua itu harus menjadi perhatian dalam penuntasan program kegiatan selajutnya.

DPRD sebagai mitra kerja Kepala Daerah wajib memberikan saran, evaluasi, serta pengarahan/rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kinerja pemerintah dalam membangun Kabupaten Grobogan dapat meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, hingga terwujud Visi Pembangunan Kabupaten Grobogan, yaitu **"Menuju Grobogan Maju, Sejahtera,**

dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan pencermatan atas informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025, dan disandingkan dengan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, maka DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BELANJA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar 101,75%, sudah melebihi target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan, jika dibandingkan realisasi Tahun 2024 (100,36%) terjadi kenaikan sebesar 1,39%. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 hanya 21,97% dari keseluruhan Pendapatan Daerah, hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Grobogan terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat terus meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan terus menggali potensi – potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Perlu adanya evaluasi tentang hal – hal yang mempengaruhi peningkatan keberhasilan serta hal – hal yang menghambat tercapainya target pendapatan daerah.
3. Dalam menentukan pendapatan daerah BPPKAD dan SKPD pengelola pendapatan daerah Kabupaten Grobogan harus semakin cermat dan melakukan pronogsis target pendapatan secara akurat sesuai sumber-sumber potensi pendapatan yang ada.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar 95,50%, turun sebesar 1,08% jika dibandingkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar 96,58%.
2. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Daerah Tahun 2025 masih diatas 30%, yaitu sebesar 42,73%. Pemerintah Daerah agar terus melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu mengimbangi komposisi belanja Pegawai, sehingga dapat memenuhi ketentuan maksimal belanja pegawai sebesar 30%.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Realisasi penerimaan pembiayaan APBD TA 2025 mencapai Rp. 115.619.287.899,- atau sebesar 99,94 % dari target penerimaan pembiayaan, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 4.950.000.000,- atau sebesar 100% dari target pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga ada pembiayaan netto sebesar Rp. 110.669.287.899,-;
2. Berdasarkan realisasi anggaran APBD 2025 terdapat surplus Rp. 82.131.797.547,- dan pembiayaan netto sebesar Rp. 110.669.287.899,-. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 192.801.085.446,-;
3. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus selalu melakukan penghitungan pembiayaan daerah secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada tahun anggaran berikutnya akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
4. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyertaan modal untuk mengevaluasi terhadap BUMD yang tidak memberi deviden secara maksimal.

II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Catatan :

- 1) Masih banyak adanya Anak tidak Sekolah (ATS), terdapat 10.831 anak putus sekolah di Kabupaten Grobogan, yang disebabkan oleh pernikahan dini, keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak ke sekolah dan masalah biaya pendidikan;
- 2) Sarana Prasarana sekolah yang tidak memenuhi standar, yaitu kondisi ruang kelas SD maupun SMP masih banyak yang rusak;
- 3) Masih kurangnya partisipasi PAUD yang disebabkan mungkin karena sarana dan prasarananya, atau kurangnya partisipasi Masyarakat menyekolahkan anak pada jenjang PAUD dan kompetensi pendidikan formal guru PAUD belum optimal;
- 4) Khusus terhadap Pendidik, penataan dan distribusi guru belum optimal, ditandai dengan adanya kekurangan guru mapel dan guru kelas serta belum semua pendidik memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/D4.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus memperhatikan Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Menggalakkan program pendidikan alternatif, seperti pendidikan kesetaraan (PKBM) untuk anak putus sekolah, terutama di kantung-kantung ATS;
- 3) Memperluas akses beasiswa melalui kerjasama dengan lembaga swasta dan pemerintah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan hingga jenjang menengah, bahkan Perguruan Tinggi;
- 5) Mempercepat proses distribusi tenaga pendidik berdasarkan hasil pemetaan yang akurat;
- 6) Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang dibawah naungan Pemkab maupun Kemenag agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu tinggi, dengan memberikan bantuan sosial kepada guru-guru dibawah naungan Kemenag (RA, MI, MTs) di Kabupaten Grobogan.

2. URUSAN KESEHATAN

Catatan :

- 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, antara lain :
 1. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, dimulai dari pendaftaran dan layanan tindakan pasien di ruang rawat.
 2. Rumah sakit rujukan dan faskes 1 (puskesmas) dalam pelayanan terhadap kesehatan masyarakat masih belum memenuhi standar pelayanan masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat yang di adukan kepada Bapak / Ibu Dewan.
 3. Belum maksimalnya peran Posyandu di Daerah.
 4. Belum maksimalnya Pengelolaan Layanan Bagi Lansia.
 5. Untuk Rumah Sakit rujukan dan Puskesmas maupun faskes 1 dalam layanan kenyamanan pasien memerlukan perhatian khusus.
- 2) Masih banyak adanya kasus kematian ibu dan bayi; kasus gizi buruk dan stunting; tingginya prevalensi hipertensi; Peningkatan kasus DBD; rendahnya success rate TB, dan penyakit menular lainnya.

Rekomendasi :

- 1) Untuk Rumah Sakit rujukan dan Puskesmas maupun faskes 1 dalam layanan kenyamanan pasien memerlukan perhatian khusus. Dinas Kesehatan bisa memberlakukan tindak tegas bagi oknum pegawai maupun Tenaga Kesehatan yang melanggar kode etik dan juga melanggar standar pelayanan kesehatan;
- 2) Untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan memenuhi standar, juga bisa diadakan rekrutmen pegawai sesuai anjab/abk atau pelatihan maupun BinteK kepada petugas yang sudah ada, agar pelayanan prima sesuai standar segera terpenuhi, dan semakin meningkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan;
- 3) Memaksimalkan kembali peran Posyandu sebagai tonggak utama untuk pemenuhan kesehatan Balita, dan diadakannya evaluasi Triwulan agar kesehatan ibu dan anak dapat terpenuhi. Dan pendekteksi penyakit Kronis bagi Balita segera tertangani;
- 4) Peran Kader Lansia yang belum sepenuhnya terlihat, harus segera di berdayakan. Peran kader Lansia sangat strategis dalam mendukung Kesejahteraan lansia di masyarakat. Dalam Bidang Kesehatan, Peran Kader Lansia sangat penting, dalam Pemantauan dan Deteksi Dini gejala penyakit kronis. Edukasi dan Penyuluhan juga sangat penting mengingatkan Lansia pada umumnya kurang memperhatikan aktifitas fisik dan pemenuhan gizi yang tepat. Kader Lansia Juga berperan penting dalam Pendampingan dan rujukan;
- 5) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus terus melakukan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABA dan peningkatan Kesehatan Keluarga, Penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, DBD, Paru dan yang lain, serta memperhatikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Catatan :

- 1) Banyaknya infrastruktur jaringan trotoar, jalan, jembatan, drainase dan irigasi yang memerlukan peningkatan fungsi/rehab;
- 2) Kurangnya kepedulian kesadaran Masyarakat terhadap infrastruktur di perkotaan seperti pembuangan sampah, grill saluran drainase banyak yang hilang, pemanfaatan saluran trotoar dengan tidak semestinya;
- 3) Meningkatnya intensitas bencana banjir, mengakibatkan infrastruktur rusak;

- 4) Kurangnya sumber daya air bersih di masyarakat sehingga masih selalu terjadi bencana kekeringan di Kabupaten Grobogan.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus memperhatikan program PUPR berjalan maksimal, karena permasalahan jalan, Sungai dan yang lain butuh perhatian serius;
2. Tingkatkan kualitas dan kapasitas saluran drainase perkotaan dan perdesaan;
3. Atasi banjir segera, karena Kabupaten Grobogan sudah masuk darurat banjir. Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk perawatan saluran-saluran air dan sungai-sungai di Kabupaten Grobogan guna mengantisipasi bencana banjir;
4. Meningkatkan pencarian sumber-sumber air bersih baru untuk mengatasi bencana kekeringan di kabupaten Grobogan.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Catatan :

- 1) Permasalahan untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Grobogan tahun 2025 antara lain :
 - a. Kondisi Tingkat keswadayaan penerima bantuan yang kurang mencukupi, dokumen teknisnya tidak tercantum dalam proposal dan sering berubah-ubah;
 - b. Masih banyaknya asset PSU Perumahan belum atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan sehingga dinas belum bisa apa-apa.
- 2) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni;
- 3) Tingginya angka backlog atau ketidakmilikan rumah;
- 4) Banyaknya masalah pengembang perumahan / developer di Kabupaten Grobogan.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan segera meningkatkan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh secara cermat dan terukur;
- 2) Memperluas cakupan program rumah subsidi ke kecamatan-kecamatan lain yang belum tersentuh program;
- 3) Meningkatkan sosialisasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk mendorong lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam program kepemilikan rumah;

- 4) Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta melalui program CSR yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mempercepat perbaikan RTLH, dengan target minimal mencapai 80% sesuai target;
- 5) Meningkatkan pengawasan / monitoring kepada aktivitas para pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Grobogan guna mengantisipasi pengembang bermasalah, dan tingkatan sosialisasi / edukasi kepada masyarakat sebelum membeli property.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Catatan :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perda (seperti penertiban PGOT dan usaha ilegal).

Rekomendasi :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda ke tingkat desa;
2. Meningkatkan penertiban bangunan-bangunan liar dan penanganan gangguan Trantibmas di wilayah.

6. URUSAN SOSIAL

Catatan :

- 1) Sarana Fasilitas Publik penyandang Disabilitas perlu terus ditingkatkan;
- 2) Dibutuhkan lebih banyak dukungan pemasaran produk yang dihasilkan bagi penyandang Disabilitas;
- 3) Penertiban dan pelatihan bagi gelandang, pengemis, pengamen dan anak terlantar (anak Punk);
- 4) Belum akuratnya data kemiskinan untuk penentuan penerima bantuan sosial yang tepat;
- 5) Transparansi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin;
- 6) Pendampingan pengaktifan BPJS dan evaluasi penentuan penerima bantuan social yang tepat sasaran.

Rekomendasi :

- 1) Memperbaiki sarana dan prasarana penyandang Disabilitas;
- 2) Meningkatkan komunikasi lintas sector untuk lebih meluasnya pemasaran produk para Disabilitas, dan menambah pelatihan untuk meningkatkan mutu Komoditi produk yang dihasilkan Disabilitas;
- 3) Tindak tegas bagi gelandang, pengemis, pengamen dan anak punk yang tidak mau bekerja sama dan tidak mau ditertibkan dan diberi pelatihan;

- 4) Memperbaiki akurasi data kemiskinan untuk penentuan target penerima bantuan sosial yang lebih tepat;
- 5) Komunikasi dengan lintas sector jika diperlukan, demi memperbaiki akurasi data masyarakat miskin agar pemberian bantuan tepat sasaran;
- 6) Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan yang sempat nonaktif agar kembali aktif dan dapat digunakan.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. URUSAN TENAGA KERJA

Catatan :

- 1) Perlu terus ditingkatkan pemantauan dan validasi data TKA khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan serta pembinaan ke perusahaan mengenai pelaporan keberadaan TKA di Kabupaten Grobogan;
- 2) Kurang maksimalnya pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Kurangnya kesesuaian Pelatihan dengan Kebutuhan Pasar Kerja;
- 4) Perlu ditingkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari Grobogan.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selalu melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala terhadap TKA dan perusahaan yang mempekerjakannya;
2. Peningkatan kapasitas BLK tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas pelatihan, lakukan pemantauan / monitoring terhadap para alumninya sebagai bahan evaluasi;
3. Penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri melalui kemitraan aktif dengan sektor swasta;
4. Pengembangan program magang terstruktur dengan perusahaan-perusahaan di Grobogan dan sekitarnya;
5. Peningkatan kualitas pelatihan pra-keberangkatan yang lebih komprehensif;
6. Tingkatkan koordinasi lintas sektor, seperti dengan DPMPTSP agar para investor / penanam modal di Kabupaten Grobogan dapat lebih menyerap tenaga kerja lokal, terutama yang telah dibekali oleh Disnakertrans.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Catatan :

- 1) Masih banyaknya korban kekerasan rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap anak;
- 2) Masih banyaknya kenakalan anak-anak pelajar;
- 3) Masih banyaknya perkawinan dibawah umur, anak hamil diluar nikah;

Rekomendasi :

- 1) Memperkuat dan memperluas cakupan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ke seluruh desa di Kabupaten Grobogan;
- 2) Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping korban kekerasan di unit Swatantra (P2TP2A) Grobogan untuk memberikan penanganan yang lebih komprehensif;
- 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi DP3AKB dengan lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk penanganan kasus secara terpadu;
- 4) Mengadopsi strategi nasional pencegahan perkawinan anak dengan lima pilar: optimalisasi kapasitas anak remaja, lingkungan yang mendukung, akses pengembangan dan layanan, regulasi hingga tingkat desa, dan koordinasi efektif.

3. URUSAN PANGAN

Catatan :

- 1) Belum maksimalnya penanganan keamanan pangan segar yang dapat menekan kenaikan harga yang signifikan setelah selesai masa panen pangan segar;
- 2) Kurangnya penguatan kelembagaan tani, seperti gapoktan dan koperasi tani untuk menjaga stabilitas harga pangan;
- 3) Belum maksimalnya gerakan pangan murah untuk mengatasi fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen yang dapat dijangkau oleh masyarakat terutama kalangan menengah kebawah.

Rekomendasi :

- 1) Memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha dan petani penghasil pangan segar untuk dapat memaksimalkan teknologi agar pangan segar dapat tersedia setiap saat dan dengan kualitas yang bagus sehingga harga dapat relatif lebih stabil;
- 2) Perlunya dukungan dari OPD untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada Gapoktan dan koperasi tani serta bantuan baik permodalan maupun sarana dan prasarananya;

- 3) Perlunya perhatian dari OPD untuk melakukan operasi pasar dan kegiatan pasar murah untuk kalangan menengah ke bawah agar dapat membantu kestabilan harga pangan.

4. URUSAN PERTANAHAN

Catatan :

- 1) Urusan Pertanahan tidak dianggarkan tahun 2025;
- 2) Urusan Pertanahan berkaitan dengan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan atau asset yang dikelola oleh BPPKAD yang berhubungan dengan dinas yang lain seperti Dinas Perakim serta intansi vertical ATR BPN;
- 3) Kasus Mafia Tanah yang Signifikan;

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menginventarisasi barang milik yang masuk asset Pemkab;
- 2) Segera menindaklanjuti permasalahan yang muncul keterkaitan asset yang menjadi sengketa;
- 3) Meningkatkan kapasitas dan intensitas operasi Satuan Tugas Anti Mafia Tanah di Kabupaten Grobogan dengan pendekatan yang lebih proaktif;
- 4) Membuat portal transparansi biaya PTSL yang dapat diakses public.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Catatan :

- 1) Permasalahan yang muncul urusan lingkungan hidup Kawasan hutan dengan tanaman keras menjadi hutan jagung, sehingga sering disalahkan setiap hujan mengakibatkan banjir;
- 2) Permasalahan muncul juga terhadap pengelolaan retribusi persampahan dan TPA.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus menyelesaikan Kawasan hutan yang sudah alih fungsi dengan arah kebijakan yang tidak saling bertentangan;
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menginovasi retribusi persampahan menjadikan PAD yang maksimal dan Pengelolaan sampah TPA segera ada penanganan khusus meski melibatkan pihak ketiga;
- 3) Menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan ekonomis;

- 4) Menggalakkan program penghijauan di daerah tangkapan air dengan menanam pohon-pohon yang bersifat menyerap air (sponge tree), berakar dalam dan luas, serta mampu bertahan di tanah lembap atau tergenang, contohnya : Pohon Beringin, Terembesi, Pule, Gayam, dll.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Catatan :

- 1) Masih rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan masyarakat pedesaan;
- 2) Masih ditemukannya selisih data atau keterlambatan pemutakhiran data peristiwa penting (seperti kematian atau pindah datang) yang berdampak pada akurasi data terpadu untuk keperluan bantuan sosial (DTKS) maupun data pemilih;
- 3) Masih adanya penduduk rentan administrasi (seperti penyandang disabilitas, penduduk usia lanjut, atau ODGJ) yang belum memiliki dokumen kependudukan dasar karena kendala mobilitas.

Rekomendasi :

1. Memperluas layanan jemput bola hingga ke tingkat desa untuk perekaman e-KTP dan aktivasi IKD;
2. Meningkatkan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan e-KTP baik di tingkat Desa maupun Kecamatan;
3. Dispendukcapil perlu mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan mandiri yang mudah diakses oleh masyarakat guna memastikan data kependudukan selalu mutakhir dan valid;
4. Meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan jemput bola khusus bagi penduduk rentan. Program ini harus dilakukan secara terpadu dengan Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan untuk memastikan setiap warga negara di Kabupaten Grobogan mendapatkan hak akses layanan publik melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Catatan :

1. Masih adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes di beberapa desa serta perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa agar lebih selaras dengan prioritas daerah (penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem);
2. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah terbentuk namun belum beroperasi secara maksimal atau belum memberikan kontribusi

nyata terhadap Pendapatan Asli Desa. Kurangnya inovasi dalam pemilihan unit usaha menjadi kendala utama;

3. Peran lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, dan Karang Taruna dalam perencanaan partisipatif (Musrenbangdes) masih perlu dioptimalkan agar aspirasi masyarakat bawah lebih terakomodasi;
4. Masih terdapat beberapa kantor desa yang kondisi fisiknya kurang representatif untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi Masyarakat.

Rekomendasi :

1. Meningkatkan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif bagi perangkat desa mengenai tata kelola keuangan desa. Perlu dipastikan bahwa alokasi Dana Desa benar-benar difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar-dusun;
2. Mendorong revitalisasi BUMDes dengan memberikan pelatihan manajemen usaha dan pemetaan potensi pasar. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kemitraan antara BUMDes dengan sektor swasta atau pasar modern untuk memperluas jaringan pemasaran produk unggulan desa;
3. Memberikan penguatan kapasitas bagi pengurus LKD melalui pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasian masyarakat. Selain itu, perlu adanya apresiasi atau stimulan bagi LKD yang aktif dalam menggerakkan gotong royong dan swadaya Masyarakat;
4. Melanjutkan program bantuan keuangan untuk rehabilitasi kantor desa secara bertahap dengan tetap mengedepankan skala prioritas pada desa dengan kondisi kerusakan yang mendesak.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Catatan :

1. Program Pengendalian Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Pencatatan dan Pengumpulan Data belum fixed
 - b. Pengolahan Data dan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB / Petugas Lapangan KB
 - b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan

Rekomendasi :

1. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Dalam lingkungan masyarakat terutama di daerah, untuk penyuluh lapangan diberikan fasilitas dan juga ditingkatkan kemampuan komunikasinya agar program yang dibawa sampai kepada masyarakat secara maksimal.
 - b. Pencatatan dan pengumpulan data harus fixed, dan dibutuhkan metode baru, jika diperlukan dengan sistem digitalisasi agar data cepat terdistribusi.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Penyuluh lapangan dipilih yang berintegritas yang melaksanakan tugasnya dengan maksimal
 - b. Pengendalian dan juga Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan diberikan kepada pihak-pihak terkait. Dan juga juga diberikan sosialisasi terkait vasektomi, agar yang melaksanakan KB tidak hanya pihak wanita. Sehingga program KB ini bisa berjalan lancar dan target tercapai.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

Catatan :

- 1) Penerangan jalan banyak yang padam, kurang perawatannya;
- 2) Pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan belum termanagement baik.

Rekomendasi :

- 1) Memprioritaskan pemasangan lampu jalan di ruas-ruas strategis yang sering dilalui masyarakat (terutama di jantung kota dan sekitar pabrik / industri di pinggir jalan Raya), dan meningkatkan monitoring terhadap penerangan jalan yang ada. Hal ini untuk menekan potensi tindak-tindak kriminal dan laka lantas yang sering terjadi;
- 2) Kebijakan penataan parkir perlu dibuat, karena berkaitan dengan PAD yang diperoleh dari Dishub. meliputi penerapan parkir non-tunai (e-parking) atau QRIS pada tempat-tempat strategis seperti di lingkungan Rumah Sakit dan Pasar Swalayan.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Catatan :

- 1) Server untuk komunikasi public dan aplikasinya pengelolaannya belum maksimal, sehingga Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet sering terkendala;

- 2) Banyak penyedia jasa internet kurang pengawasan, khususnya dalam memasang jaringan kabel, sehingga banyak keluhan masyarakat;
- 3) Sistem Komunikasi Bencana perlu dibangun untuk sistem peringatan dini seluruh masyarakat.

Rekomendasi :

- 1) Meningkatkan kapasitas server guna kelancaran akses aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah;
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan memerintahkan Dinas Kominfo berkordinasi dengan instansi terkait (Dinas PUPR atau yang lain) dalam hal penataan usaha internet oleh pihak ketiga (swasta);
- 3) Membangun dan mengembangkan sistem komunikasi bencana yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Catatan :

- 1) Kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari dinas untuk usaha kecil dan menengah terutama dalam penerbitan NIB dan sertifikasi (halal dan PIRT);
- 2) Pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam masih rendah sehingga beberapa masyarakat masih terjebak dalam hutang dengan bunga yang tinggi dan kredit macet;
- 3) Kurangnya support dinas ke UMKM terkait pemodalan, pelatihan, dan perlengkapan usaha.

Rekomendasi :

- 1) Perlunya penambahan kegiatan untuk kemudahan pelaku usaha dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal dan pendampingan dari OPD terkait;
- 2) Perlunya pengawasan yang ketat terkait koperasi simpan pinjam, dan adanya kesamaan penerapan suku bunga sehingga memudahkan dan tidak memberatkan konsumen;
- 3) Perlunya penambahan kegiatan untuk sosialisasi dan pelatihan ke pelaku UMKM dan bantuan permodalan serta pembinaan dan bimbingan agar pelaku UMKM dapat berjalan di atas kakinya sendiri.
- 4) Sinkronisasi tentang rencana kegiatan KDKMP yg telah menyerap dana desa lebih dari 60 % agar program tsb bisa berjalan

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Catatan :

- 1) Meskipun realisasi investasi menunjukkan tren positif, persebaran investasi masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki akses infrastruktur lebih matang. Potensi investasi di wilayah pinggiran belum tergarap secara maksimal;
- 2) Masih ditemukan kendala teknis bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengoperasikan sistem *Online Single Submission* (OSS) Risk Based Approach, serta adanya keterlambatan dalam proses verifikasi persyaratan dasar (seperti persetujuan bangunan gedung dan lingkungan) di tingkat OPD teknis;
- 3) Perlunya penyesuaian beberapa regulasi daerah terkait insentif dan kemudahan penanaman modal agar selaras dengan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat (UU Cipta Kerja).

Rekomendasi :

- 1) Perlu menyusun *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang memetakan potensi spesifik di setiap kecamatan. Perlu adanya promosi investasi yang lebih agresif untuk menarik minat investor ke sektor non-manufaktur, seperti pariwisata dan pengolahan hasil pertanian;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bantuan pengisian OSS bagi pelaku UMKM hingga ke tingkat desa. Selain itu, perlu penguatan koordinasi tim teknis antar-OPD agar proses verifikasi pemenuhan komitmen perizinan dapat diselesaikan lebih cepat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);
- 3) Segera melakukan tinjauan atau revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal untuk menyisipkan klausul pemberian insentif pajak daerah atau kemudahan non-fiskal bagi investor yang berkomitmen memberdayakan potensi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 4) Meningkatkan upaya promosi dan branding daerah sebagai daya tarik kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Grobogan.

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Catatan :

- 1) Kurangnya partisipasi dan motivasi pemuda dalam meningkatkan prestasi dalam olah raga;
- 2) Perlu meningkatkan Penyelenggaraan Turnamen Olah Raga Tingkat Daerah;
- 3) Perlu meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kepada Organisasi Olah Raga.

Rekomendasi :

- 1) Peningkatan prestasi sangat penting, dan juga harus diberikan peluang yang luas. Kerja sama Disporabudpar dan juga dengan Dinas Pendidikan, harus erat. Dan koordinasi harus intens untuk meningkatkan prestasi;
- 2) Penyelenggaraan turnamen olah raga ditingkat Daerah diperbanyak;
- 3) Pemerintah harus semakin yakin dengan anak didik dan atlit yang di hasilkan daerah, sehingga tidak ada / diperkecil untuk ambil atlit dari luar daerah. Kompetensi pelatih yang bagus, dan juga diadakannya pelatihan pelatih profesional;
- 4) KONI harus berperan aktif dalam penjaringan atlit yang berkualitas.

14. URUSAN STATISTIK

Catatan :

- 1) Update data Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan daerah belum optimal;
- 2) Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam evaluasi Pembangunan daerah tidak segera menyesuaikan data yang sebenarnya (kurang update).

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Kominfo melakukan update data sesuai kebutuhan kedepan;
- 2) Update data agar rutin dilakukan guna memudahkan dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan Pembangunan Daerah.

15. URUSAN PERSANDIAN

Catatan :

- 1) Salah satu permasalahan utama dalam urusan persandian di Kabupaten Grobogan adalah kerentanan keamanan data pada sistem layanan pemerintah daerah;
- 2) Belum Meratanya Penerapan Sistem Enkripsi pada seluruh aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sehingga berpotensi mengalami kebocoran informasi;
- 3) Permasalahan persandian juga terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang persandian.

Rekomendasi :

- 1) Perlu memprioritaskan implementasi sistem enkripsi secara menyeluruh pada semua aplikasi layanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 2) Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Persandian;

- 3) Pembentukan Tim Respons Insiden Keamanan Siber: Kabupaten Grobogan perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk merespons insiden keamanan siber. Tim ini bertugas untuk memantau, mendeteksi, dan menanggapi ancaman keamanan informasi secara real-time. Dengan adanya tim khusus ini, respons terhadap potensi kebocoran data atau serangan siber dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Catatan :

- 1) Perlu terus meningkatkan Kelestarian Kesenian Tradisional, sekaligus pembinaan Lembaga Adat yang ada;
- 2) Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 3) Tingkatkan pengelolaan museum agar menarik minat masyarakat.

Rekomendasi :

- 1) Pelestarian kesenian tradisional ini harus sangat diperhatikan, dimulai dari anak-anak SD dalam muatan lokal diberikan materi yang ringan tapi memenuhi standar pemahaman dasar, Kesenian tradisional semakin tidak diperhatikan jika generasi muda tidak ada yang peduli, sehingga bisa punah. Lembaga adat diberikan apresiasi khusus dari pemerintah sebagai bentuk perhatian dan juga sebagai sarana pemerintah dalam melestarikan budaya daerah;
- 2) Cagar budaya yang sudah ditetapkan, diinventarisir ulang untuk menghindari kerusakan dan juga kehilangan. Yang mana cagar budaya bisa dijadikan ikon Kabupaten Grobogan, yang bisa menjadi wajah Kabupaten Grobogan;
- 3) Sosialisasi dan edukasi serta Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap permuseuman harus ditambah, karena masyarakat Kabupaten Grobogan belum familier terhadap museum yang ada di Kabupaten Grobogan. Permuseuman bisa dijadikan salah satu andalan untuk sector pariwisata.

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Catatan :

- 1) Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
- 2) Meningkatkan Pembudayaan Gemar membaca.

Rekomendasi :

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Daerah perlu ditingkatkan dengan menambah dan melengkapi bacaan serta meningkatkan fasilitas dan kenyamanan ruang perpustakaan;
- 2) Pemkab Grobogan perlu mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi perpustakaan sekolah. Perlu juga dibuat roadmap jangka panjang untuk memastikan seluruh sekolah memiliki perpustakaan yang sesuai standar, selain itu, perlu juga adanya pendampingan untuk pengelola perpustakaan desa;
- 3) Pembudayaan Gemar membaca, lokasi – lokasi strategis dibuatkan pojok baca bagi masyarakat umum, Event – event di Kabupaten Grobogan juga ada stand baca (pojok baca) tempat dibuat nyaman mungkin dan orang yang masuk harus yang berniat membaca.

18. URUSAN KEARSIPAN

Catatan :

1. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
2. Program Perizinan dan Penggunaan Arsip.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menyediakan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, untuk keamanan dan akses terhadap arsip harus ditingkatkan. Karena Arsip Kabupaten mencakup segala hal yang ada di Kabupaten Grobogan. Penyimpanan Arsip Konvensional yang dilakukan, harus dibuatkan program khusus untuk bisa di arsipkan secara digital;
2. Perizinan akses penggunaan arsip, harus melalui system otoritas khusus yang independent, sehingga tidak dapat diintervensi pihak manapun. Pertanggungjawaban perizinan dan penggunaan arsip bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sehingga apa bila ada penyalahgunaan arsip, bisa lebih mudah dalam penanganannya.

C. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Catatan :

- 1) Permasalahan yang harus dihadapi kedepan adalah tentang total produksi perikanan (tangkap dan budidaya);
- 2) Kurangnya pemantauan OPD terhadap penyakit yang menyerang ternak;
- 3) Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap petani ternak.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan meningkatkan pembinaan dan pemberian bantuan kepada petani ternak ikan serta membantu permodalannya;
- 2) Pemberian vaksin untuk mencegah KLB terhadap penyakit tertentu yang dapat menyerang ternak;
- 3) Pemberian sarana dan prasarana yang dapat mendukung kesejahteraan petani ternak.

2. URUSAN PARIWISATA

Catatan :

- 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata;
- 2) Peningkatan Pemasaran Wisata Baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- 3) Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rekomendasi :

- 1) DISPORABUDPAR duduk dalam satu agenda dengan lintas sector untuk memfokuskan dalam pengembangan pariwisata, dimana dalam agenda tersebut melahirkan kesepakatan dalam pengelolaan pariwisata. Salah Satu contoh dalam pengelolaan wisata budaya, wisata religi maupun wisata alam. Masyarakat sekitar diberikan kepercayaan dan diikutsertakan dalam pengelolaan Pariwisata, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pemberdayaan kelompok masyarakat (pemuda) dalam mengelola destinasi wisata, agar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- 2) Menggandeng Influencer lokal yang pengikutnya tertentu untuk menarik minat wisatawan, dan promosi melalui berbagai platform media sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan;
- 3) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa dilakukan dengan salah satunya bekerjasama dengan EO lokal maupun luar daerah untuk bisa membuat event di lokasi wisata.

3. URUSAN PERTANIAN

Catatan :

- 1) Rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian;
- 2) Banyaknya Sistem Irigasi terkendala;
- 3) Ketersedian pupuk yang masih dilematis;

- 4) Pemenuhan terhadap Alsintan masih belum merata, dan beberapa tempat yang mendapatkan Alinstan belum dapat dioptimalkan penggunaannya karena keterbatasan SDM dan pengetahuan dari petani;
- 5) Petani masih sulit untuk mendapatkan benih tanaman dengan harga yang terjangkau;
- 6) Rendahnya harga jual komoditas pertanian pada saat panen raya.

Rekomendasi :

- 1) Pengembangan program pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda, dan pelatihan kewirausahaan pertanian serta akses permodalan bagi pemuda desa;
- 2) Pembangunan saluran irigasi tersier sesuai kebutuhan petani, dan penanganan sedimentasi pada saluran irigasi secara berkala;
- 3) Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan penyalurannya sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke tingkat petani tepat sasaran;
- 4) Pemberian bantuan Alsintan sesuai dengan kebutuhan dan merata di semua kecamatan agar petani dapat menggunakan Alsintan sesuai kebutuhan dan sosialisasi penggunaan Alsintan yang tepat;
- 5) Perlunya pengoperasian gudang – gudang pangan yang ada di Kabupaten Grobogan sehingga dapat membantu menstabilkan harga pada saat panen raya.

4. URUSAN PERINDUSTRIAN

Catatan :

- 1) Kurangnya ketersediaan bahan baku lokal untuk keperluan industri dalam daerah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia yang cekatan dan terampil untuk pemenuhan kebutuhan karyawan di bidang industri;
- 3) Membanjirnya produk – produk impor dengan harga yang lebih murah dengan kualitas sama.

Rekomendasi :

- 1) Perlunya pendampingan dan pelatihan serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar dapat menghasilkan bahan baku sesuai dengan standar industri di Kabupaten Grobogan;
- 2) Perlu adanya pelatihan untuk mendukung kualitas SDM yang ada di Kabupaten Grobogan dan informasi lapangan pekerjaan sehingga pelaku kerja di Kabupaten Grobogan tidak perlu mencari pekerjaan di tempat lain;

- 3) Peningkatan produksi dalam negeri yang bisa bersaing dan sesuai dengan pangsa pasar di Kabupaten Grobogan.

5. URUSAN PERDAGANGAN

Catatan :

- 1) Pasar tradisional banyak yang sepi karena pembeli lebih beralih ke pembelian dengan sistem online;
- 2) Beberapa komoditas perdagangan menjadi langka dan mengalami kenaikan harga di saat event – event tertentu;
- 3) Minat beli masyarakat cenderung turun karena beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, sehingga konsumen mengurangi jumlah pembelian.

Rekomendasi :

- 1) Memberikan pelatihan kepada pedagang tradisional tentang jual beli online agar dapat bersaing dengan toko online;
- 2) Penambahan kegiatan pasar murah dan operasi pasar agar dapat menekan harga jual yang tinggi pada saat tertentu;
- 3) Memberikan edukasi tentang bahan makanan pengganti yang dapat dikonsumsi agar dapat mengurangi pengeluaran belanja yang cukup besar.

4. URUSAN TRANSMIGRASI

Catatan :

- 1) Permasalahan urusan transmigrasi adalah pentingnya masyarakat Grobogan yang sudah melakukan transmigrasi di wilayah lain dipastikan hidup layak.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disnakertrans meningkatkan pembekalan ketrampilan kepada Masyarakat Grobogan yang akan transmigrasi;

D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

1. PERENCANAAN

Catatan :

- 1) Masih banyaknya program dan kegiatan yang bersifat rutinitas, dan kurang berorientasi ke outcome;

- 2) Investor sering mengalami hambatan dalam pengadaan lahan karena ketidaksesuaian lahan yang diinginkan dengan peruntukannya. Permasalahan terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang kurang sesuai lagi dengan kondisi, terutama berkaitan dengan kebutuhan lahan hijau dengan kawasan peruntukan industri menjadi hambatan.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus lebih cermat dalam mengevaluasi perencanaan program dan kegiatan, agar tujuan dalam RPJMD dapat terwujud secara lebih efektif dan efisien;
- 2) Pencapaian rencana perubahan detail tata ruang Kab. Grobogan perlu dimaksimalkan.

2. KEUANGAN

Catatan :

- 1) PAD perlu terus ditingkatkan;
- 2) Pengelolaan asset perlu terus dimaksimalkan.

Rekomendasi :

- 1) Melakukan penguatan tata kelola keuangan dan asset daerah;
- 2) Meningkatkan Intensifikasi terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah.

3. KEPEGAWAIAN

Catatan :

1. Masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan riil pegawai dengan formasi yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis spesifik dan tenaga pendidik/kesehatan. Selain itu, proses transisi tenaga non-ASN (honorer) menjadi PPPK masih memerlukan pengawalan regulasi yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari;
2. Penerapan sistem merit dalam manajemen karier ASN sudah berjalan, namun instrumen penilaian kinerja individu (E-Kinerja) perlu terus disempurnakan agar lebih objektif dan selaras dengan capaian kinerja organisasi (Cascading Kinerja);
3. Masih ditemukannya kasus pelanggaran disiplin pegawai yang dapat mempengaruhi citra birokrasi, serta perlunya peninjauan terhadap skema kesejahteraan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan beban kerja.

Rekomendasi :

1. BKPSDM perlu melakukan pemutakhiran Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara komprehensif. Pemerintah daerah disarankan untuk terus aktif melakukan koordinasi dan lobi ke Pemerintah Pusat guna mendapatkan kuota formasi CASN/PPPK yang sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah;
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi manajemen kinerja dan memastikan pemberian reward serta punishment dilakukan secara transparan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang terukur. BKPP harus memastikan setiap pejabat penilai memahami tata cara pengisian dan validasi target kinerja bawahan secara akurat;
3. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan mental aparatur secara preventif melalui sosialisasi kode etik secara rutin. Dalam hal penegakan disiplin, Tim Penegak Disiplin harus bertindak tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS guna memberikan efek jera dan menjaga integritas pelayanan public.

4. PENGAWASAN

Catatan :

1. Masih adanya temuan berulang terkait administrasi keuangan dan aset di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemerintah Desa. Selain itu, kecepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal (BPK) di beberapa unit kerja masih perlu ditingkatkan agar tidak menjadi beban temuan di tahun berikutnya;
2. Kuantitas dan kualitas auditor serta Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya cakupan pengawasan yang meliputi seluruh OPD, sekolah, hingga 273 desa di Kabupaten Grobogan;
3. Capaian indikator MCP KPK pada beberapa intervensi (seperti manajemen aset daerah dan pengadaan barang/jasa) masih perlu penguatan dokumen pendukung dan sinkronisasi data antar-instansi agar mencapai nilai yang maksimal;
4. Fluktuasi jumlah pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih menyentuh level akar rumput dan preventif.

Rekomendasi :

1. Inspektorat Daerah harus meningkatkan intensitas pendampingan dan asistensi (*probity audit*) sejak tahap perencanaan anggaran untuk meminimalisir risiko penyimpangan. Perlu adanya ketegasan dalam

- pemantauan TLHP dengan memberikan peringatan tertulis kepada kepala OPD yang lambat dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
2. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan penambahan personil fungsional pengawasan guna mencapai tingkat kapabilitas APIP level yang lebih tinggi sesuai standar nasional;
 3. Memperkuat peran Inspektorat sebagai koordinator pemenuhan data MCP KPK dengan melakukan rapat koordinasi rutin setiap triwulan bersama OPD terkait. Fokus pada pengamanan aset daerah berupa sertifikasi tanah milik pemda harus menjadi prioritas pengawasan tahun mendatang;
 4. Mengoptimalkan fungsi Inspektorat Pembantu (Irban) Wilayah untuk melakukan audit kinerja dan audit ketaatan secara berkala ke desa-desa. Selain itu, sistem penanganan pengaduan masyarakat (Whistleblowing System) harus lebih disosialisasikan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan pembangunan dengan jaminan kerahasiaan identitas.

5. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Catatan :

1. Peran koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis masih perlu diperkuat untuk memastikan program lintas sektoral (seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem) berjalan sinkron. Selain itu, kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat melalui kanal digital perlu ditingkatkan;
2. Masih perlunya optimalisasi fasilitasi terhadap fungsi-fungsi DPRD (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) agar produk hukum daerah yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat Grobogan;
3. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik di beberapa kantor kecamatan yang menghambat kenyamanan pelayanan warga;
4. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam administrasi perkantoran belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh di semua lini administrasi pemerintahan daerah.

Rekomendasi :

1. Sekretariat Daerah selaku instansi pembina harus meningkatkan fungsi pengendalian dan sinkronisasi kebijakan di tingkat asisten dan bagian. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur

- (SOP) pelayanan administrasi agar lebih cepat, transparan, dan berbasis digital;
2. Meningkatkan kualitas pendampingan teknis dan penyediaan data/informasi yang akurat bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Sekretariat DPRD juga disarankan memperkuat fungsi humas dan protokol untuk menjembatani komunikasi aspirasi masyarakat kepada dewan secara lebih efektif;
 3. Pemerintah daerah perlu memberikan alokasi anggaran yang proporsional untuk rehabilitasi fasilitas pelayanan di kecamatan guna mendukung terwujudnya pelayanan administrasi yang prima;
 4. Perlu dilakukan pemutakhiran peta proses bisnis di setiap unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan mempermudah evaluasi kinerja organisasi.

Demikian catatan-catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025, untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun mendatang. Perbaikan, peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, serta penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati Grobogan di tahun yang akan datang. Untuk itu kami berharap kepada Bupati Grobogan untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.

PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026
DPRD KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

TTD

TRIANA HANDAYANI, ST



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan beserta lampirannya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 Maret 2026, dan telah dibahas oleh Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara aklamasi telah menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 09 / PANSUS III – 2026 / IV / 2026 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Persetujuan Atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 (1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 4);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 09 / PANSUS III – 2026 / IV / 2026 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan;.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana Lampiran dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Rekomendasi ini kepada Bupati Grobogan untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 22 April 2026

KETUA DPRD KABUPATEN GROBOGAN,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

LUSIA INDAH ARTANI

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otda Kemendagri RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
4. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Wakil Bupati Grobogan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
8. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
9. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI GROBOGAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan hal tersebut, maka Bupati telah menyampaikan nota pengantar perihal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 tanggal 26 Maret 2026, dan sekaligus dilaksanakan pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2025, yang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Maret sampai dengan 15 April 2026.

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025, tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis (progress report) yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran 2025, yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah dilaksanakan khususnya di tahun 2025. Banyaknya penghargaan dan penilaian nasional yang diterima Pemerintah Kabupaten Grobogan mencerminkan prestasi kinerja Bupati beserta jajaran, meskipun dalam realita di masyarakat masih ada beberapa permasalahan yang belum tuntas pada beberapa program kegiatan pembangunan, optimalisasi penanganan berbagai masalah pendidikan, kesehatan, sosial, dan perekonomian rakyat. Semua itu harus menjadi perhatian dalam penuntasan program kegiatan selajutnya.

DPRD sebagai mitra kerja Kepala Daerah wajib memberikan saran, evaluasi, serta pengarahan/rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kinerja pemerintah dalam membangun Kabupaten Grobogan dapat meningkat lebih baik dari tahun tahun sebelumnya, hingga terwujud Visi Pembangunan Kabupaten Grobogan, yaitu **“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan pencermatan atas informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025, dan disandingkan dengan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, maka DPRD Kabupaten Grobogan menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BELANJA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar 101,75%, sudah melebihi target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan, jika dibandingkan realisasi Tahun 2024 (100,36%) terjadi kenaikan sebesar 1,39%. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 hanya 21,97% dari keseluruhan Pendapatan Daerah, hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Grobogan terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat terus meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan terus menggali potensi – potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Perlu adanya evaluasi tentang hal – hal yang mempengaruhi peningkatan keberhasilan serta hal – hal yang menghambat tercapainya target pendapatan daerah.
3. Dalam menentukan pendapatan daerah BPPKAD dan SKPD pengelola pendapatan daerah Kabupaten Grobogan harus semakin cermat dan melakukan pronogsis target pendapatan secara akurat sesuai sumber-sumber potensi pendapatan yang ada.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar 95,50%, turun sebesar 1,08% jika dibandingkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar 96,58%.
2. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Daerah Tahun 2025 masih diatas 30%, yaitu sebesar 42,73%. Pemerintah Daerah agar terus melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu mengimbangi komposisi belanja Pegawai, sehingga dapat memenuhi ketentuan maksimal belanja pegawai sebesar 30%.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Realisasi penerimaan pembiayaan APBD TA 2025 mencapai Rp. 115.619.287.899,- atau sebesar 99,94 % dari target penerimaan pembiayaan, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 4.950.000.000,- atau sebesar 100% dari target pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga ada pembiayaan netto sebesar Rp. 110.669.287.899,-;
2. Berdasarkan realisasi anggaran APBD 2025 terdapat surplus Rp. 82.131.797.547,- dan pembiayaan netto sebesar Rp. 110.669.287.899,-. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 192.801.085.446,-;
3. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus selalu melakukan penghitungan pembiayaan daerah secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada tahun anggaran berikutnya akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
4. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyertaan modal untuk mengevaluasi terhadap BUMD yang tidak memberi deviden secara maksimal.

II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Catatan :

- 1) Masih banyak adanya Anak tidak Sekolah (ATS), terdapat 10.831 anak putus sekolah di Kabupaten Grobogan, yang disebabkan oleh pernikahan dini, keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak ke sekolah dan masalah biaya pendidikan;
- 2) Sarana Prasarana sekolah yang tidak memenuhi standar, yaitu kondisi ruang kelas SD maupun SMP masih banyak yang rusak;
- 3) Masih kurangnya partisipasi PAUD yang disebabkan mungkin karena sarana dan prasarananya, atau kurangnya partisipasi Masyarakat menyekolahkan anak pada jenjang PAUD dan kompetensi pendidikan formal guru PAUD belum optimal;
- 4) Khusus terhadap Pendidik, penataan dan distribusi guru belum optimal, ditandai dengan adanya kekurangan guru mapel dan guru kelas serta belum semua pendidik memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/D4.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus memperhatikan Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Menggalakkan program pendidikan alternatif, seperti pendidikan kesetaraan (PKBM) untuk anak putus sekolah, terutama di kantung-kantung ATS;
- 3) Memperluas akses beasiswa melalui kerjasama dengan lembaga swasta dan pemerintah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan hingga jenjang menengah, bahkan Perguruan Tinggi;
- 5) Mempercepat proses distribusi tenaga pendidik berdasarkan hasil pemetaan yang akurat;
- 6) Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang dibawah naungan Pemkab maupun Kemenag agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu tinggi, dengan memberikan bantuan sosial kepada guru-guru dibawah naungan Kemenag (RA, MI, MTs) di Kabupaten Grobogan.

2. URUSAN KESEHATAN

Catatan :

- 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, antara lain :
 1. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, dimulai dari pendaftaran dan layanan tindakan pasien di ruang rawat.
 2. Rumah sakit rujukan dan faskes 1 (puskesmas) dalam pelayanan terhadap kesehatan masyarakat masih belum memenuhi standar pelayanan masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat yang di adukan kepada Bapak / Ibu Dewan.
 3. Belum maksimalnya peran Posyandu di Daerah.
 4. Belum maksimalnya Pengelolaan Layanan Bagi Lansia.
 5. Untuk Rumah Sakit rujukan dan Puskesmas maupun faskes 1 dalam layanan kenyamanan pasien memerlukan perhatian khusus.
- 2) Masih banyak adanya kasus kematian ibu dan bayi; kasus gizi buruk dan stunting; tingginya prevalensi hipertensi; Peningkatan kasus DBD; rendahnya success rate TB, dan penyakit menular lainnya.

Rekomendasi :

- 1) Untuk Rumah Sakit rujukan dan Puskesmas maupun faskes 1 dalam layanan kenyamanan pasien memerlukan perhatian khusus. Dinas Kesehatan bisa memberlakukan tindak tegas bagi oknum pegawai maupun Tenaga Kesehatan yang melanggar kode etik dan juga melanggar standar pelayanan kesehatan;
- 2) Untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan memenuhi standar, juga bisa diadakan rekrutmen pegawai sesuai anjab/abk atau pelatihan maupun BinteK kepada petugas yang sudah ada, agar pelayanan prima sesuai standar segera terpenuhi, dan semakin meningkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan;
- 3) Memaksimalkan kembali peran Posyandu sebagai tonggak utama untuk pemenuhan kesehatan Balita, dan diadakannya evaluasi Triwulan agar kesehatan ibu dan anak dapat terpenuhi. Dan pendekteksi penyakit Kronis bagi Balita segera tertangani;
- 4) Peran Kader Lansia yang belum sepenuhnya terlihat, harus segera di berdayakan. Peran kader Lansia sangat strategis dalam mendukung Kesejahteraan lansia di masyarakat. Dalam Bidang Kesehatan, Peran Kader Lansia sangat penting, dalam Pemantauan dan Deteksi Dini gejala penyakit kronis. Edukasi dan Penyuluhan juga sangat penting mengingat Lansia pada umumnya kurang memperhatikan aktifitas fisik dan pemenuhan gizi yang tepat. Kader Lansia Juga berperan penting dalam Pendampingan dan rujukan;
- 5) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus terus melakukan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABA dan peningkatan Kesehatan Keluarga, Penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, DBD, Paru dan yang lain, serta memperhatikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Catatan :

- a. Banyaknya infrastruktur jaringan trotoar, jalan, jembatan, drainase dan irigasi yang memerlukan peningkatan fungsi/rehab;
- b. Kurangnya kepedulian kesadaran Masyarakat terhadap infrastruktur di perkotaan seperti pembuangan sampah, grill saluran drainase banyak yang hilang, pemanfaatan saluran trotoar dengan tidak semestinya;

- c. Meningkatnya intensitas bencana banjir, mengakibatkan infrastruktur rusak;
- d. Kurangnya sumber daya air bersih di masyarakat sehingga masih selalu terjadi bencana kekeringan di Kabupaten Grobogan.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan harus memperhatikan program PUPR berjalan maksimal, karena permasalahan jalan, Sungai dan yang lain butuh perhatian serius;
2. Tingkatkan kualitas dan kapasitas saluran drainase perkotaan dan perdesaan;
3. Atasi banjir segera, karena Kabupaten Grobogan sudah masuk darurat banjir. Tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk perawatan saluran-saluran air dan sungai-sungai di Kabupaten Grobogan guna mengantisipasi bencana banjir;
4. Meningkatkan pencarian sumber-sumber air bersih baru untuk mengatasi bencana kekeringan di kabupaten Grobogan.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Catatan :

- 1) Permasalahan untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Grobogan tahun 2025 antara lain :
 - a. Kondisi Tingkat keswadayaan penerima bantuan yang kurang mencukupi, dokumen teknisnya tidak tercantum dalam proposal dan sering berubah- ubah;
 - b. Masih banyaknya asset PSU Perumahan belum atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan sehingga dinas belum bisa apa-apa.
- 2) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni;
- 3) Tingginya angka backlog atau ketidakmilikan rumah;
- 4) Banyaknya masalah pengembang perumahan / developer di Kabupaten Grobogan.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan segera meningkatkan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh secara cermat dan terukur;
- 2) Memperluas cakupan program rumah subsidi ke kecamatan-kecamatan lain yang belum tersentuh program;

- 3) Meningkatkan sosialisasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk mendorong lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam program kepemilikan rumah;
- 4) Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta melalui program CSR yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mempercepat perbaikan RTLH, dengan target minimal mencapai 80% sesuai target;
- 5) Meningkatkan pengawasan / monitoring kepada aktivitas para pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Grobogan guna mengantisipasi pengembang bermasalah, dan tingkatan sosialisasi / edukasi kepada masyarakat sebelum membeli property.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Catatan :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perda (seperti penertiban PGOT dan usaha ilegal).

Rekomendasi :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi Perda ke tingkat desa;
2. Meningkatkan penertiban bangunan-bangunan liar dan penanganan gangguan Trantibmas di wilayah.

6. URUSAN SOSIAL

Catatan :

- 1) Sarana Fasilitas Publik penyandang Disabilitas perlu terus ditingkatkan;
- 2) Dibutuhkan lebih banyak dukungan pemasaran produk yang dihasilkan bagi penyandang Disabilitas;
- 3) Penertiban dan pelatihan bagi gelandang, pengemis, pengamen dan anak terlantar (anak Punk);
- 4) Belum akuratnya data kemiskinan untuk penentuan penerima bantuan sosial yang tepat;
- 5) Transparansi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin;
- 6) Pendampingan pengaktifan BPJS dan evaluasi penentuan penerima bantuan social yang tepat sasaran.

Rekomendasi :

- 1) Memperbaiki sarana dan prasarana penyandang Disabilitas;
- 2) Meningkatkan komunikasi lintas sector untuk lebih meluasnya pemasaran produk para Disabilitas, dan menambah pelatihan untuk meningkatkan mutu Komoditi produk yang dihasilkan Disabilitas;

- 3) Tindak tegas bagi gelandang, pengemis, pengamen dan anak punk yang tidak mau bekerja sama dan tidak mau ditertibkan dan diberi pelatihan;
- 4) Memperbaiki akurasi data kemiskinan untuk penentuan target penerima bantuan sosial yang lebih tepat;
- 5) Komunikasi dengan lintas sector jika diperlukan, demi memperbaiki akurasi data masyarakat miskin agar pemberian bantuan tepat sasaran;
- 6) Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan yang sempat nonaktif agar kembali aktif dan dapat digunakan.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. URUSAN TENAGA KERJA

Catatan :

- a. Perlu terus ditingkatkan pemantauan dan validasi data TKA khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan serta pembinaan ke perusahaan mengenai pelaporan keberadaan TKA di Kabupaten Grobogan;
- b. Kurang maksimalnya pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Kurangnya kesesuaian Pelatihan dengan Kebutuhan Pasar Kerja;
- d. Perlu ditingkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari Grobogan.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selalu melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala terhadap TKA dan perusahaan yang mempekerjakannya;
2. Peningkatan kapasitas BLK tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas pelatihan, lakukan pemantauan / monitoring terhadap para alumninya sebagai bahan evaluasi;
3. Penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri melalui kemitraan aktif dengan sektor swasta;
4. Pengembangan program magang terstruktur dengan perusahaan-perusahaan di Grobogan dan sekitarnya;
5. Peningkatan kualitas pelatihan pra-keberangkatan yang lebih komprehensif;

6. Tingkatkan koordinasi lintas sektor, seperti dengan DPMPTSP agar para investor / penanam modal di Kabupaten Grobogan dapat lebih menyerap tenaga kerja lokal, terutama yang telah dibekali oleh Disnakertrans.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Catatan :

- 1) Masih banyaknya korban kekerasan rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap anak;
- 2) Masih banyaknya kenakalan anak-anak pelajar;
- 3) Masih banyaknya perkawinan dibawah umur, anak hamil diluar nikah;

Rekomendasi :

- 1) Memperkuat dan memperluas cakupan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ke seluruh desa di Kabupaten Grobogan;
- 2) Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping korban kekerasan di unit Swatantra (P2TP2A) Grobogan untuk memberikan penanganan yang lebih komprehensif;
- 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi DP3AKB dengan lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk penanganan kasus secara terpadu;
- 4) Mengadopsi strategi nasional pencegahan perkawinan anak dengan lima pilar: optimalisasi kapasitas anak remaja, lingkungan yang mendukung, akses pengembangan dan layanan, regulasi hingga tingkat desa, dan koordinasi efektif.

3. URUSAN PANGAN

Catatan :

- 1) Belum maksimalnya penanganan keamanan pangan segar yang dapat menekan kenaikan harga yang signifikan setelah selesai masa panen pangan segar;
- 2) Kurangnya penguatan kelembagaan tani, seperti gapoktan dan koperasi tani untuk menjaga stabilitas harga pangan;
- 3) Belum maksimalnya gerakan pangan murah untuk mengatasi fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen yang dapat dijangkau oleh masyarakat terutama kalangan menengah kebawah.

Rekomendasi :

- 1) Memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha dan petani penghasil pangan segar untuk dapat memaksimalkan teknologi agar pangan segar dapat tersedia setiap saat dan dengan kualitas yang bagus sehingga harga dapat relatif lebih stabil;
- 2) Perlunya dukungan dari OPD untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada Gapoktan dan koperai tani serta bantuan baik permodalan maupun sarana dan prasarananya;
- 3) Perlunya perhatian dari OPD untuk melakukan operasi pasar dan kegiatan pasar murah untuk kalangan menengah ke bawah agar dapat membantu kestabilan harga pangan.

4. URUSAN PERTANAHAN

Catatan :

- 1) Urusan Pertanahan tidak dianggarkan tahun 2025;
- 2) Urusan Pertanahan berkaitan dengan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan atau asset yang dikelola oleh BPPKAD yang berhubungan dengan dinas yang lain seperti Dinas Perakim serta instansi vertikal ATR BPN;
- 3) Kasus Mafia Tanah yang Signifikan;

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menginventarisasi barang milik yang masuk asset Pemkab;
- 2) Segera menindaklanjuti permasalahan yang muncul keterkaitan asset yang menjadi sengketa;
- 3) Meningkatkan kapasitas dan intensitas operasi Satuan Tugas Anti Mafia Tanah di Kabupaten Grobogan dengan pendekatan yang lebih proaktif;
- 4) Membuat portal transparansi biaya PTSL yang dapat diakses public.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Catatan :

- 1) Permasalahan yang muncul urusan lingkungan hidup Kawasan hutan dengan tanaman keras menjadi hutan jagung, sehingga sering disalahkan setiap hujan mengakibatkan banjir;
- 2) Permasalahan muncul juga terhadap pengelolaan retribusi persampahan dan TPA.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan kedepan harus menyelesaikan Kawasan hutan yang sudah alih fungsi dengan arah kebijakan yang tidak saling bertentangan;
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menginovasi retribusi persampahan menjadikan PAD yang maksimal dan Pengelolaan sampah TPA segera ada penanganan khusus meski melibatkan pihak ketiga;
- 3) Menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan ekonomis;
- 4) Menggalakkan program penghijauan di daerah tangkapan air dengan menanam pohon-pohon yang bersifat menyerap air (sponge tree), berakar dalam dan luas, serta mampu bertahan di tanah lembap atau tergenang, contohnya : Pohon Beringin, Terembesi, Pule, Gayam, dll.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Catatan :

- 1) Masih rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan masyarakat pedesaan;
- 2) Masih ditemukannya selisih data atau keterlambatan pemutakhiran data peristiwa penting (seperti kematian atau pindah datang) yang berdampak pada akurasi data terpadu untuk keperluan bantuan sosial (DTKS) maupun data pemilih;
- 3) Masih adanya penduduk rentan administrasi (seperti penyandang disabilitas, penduduk usia lanjut, atau ODGJ) yang belum memiliki dokumen kependudukan dasar karena kendala mobilitas.

Rekomendasi :

1. Memperluas layanan jemput bola hingga ke tingkat desa untuk perekaman e-KTP dan aktivasi IKD;
2. Meningkatkan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan e-KTP baik di tingkat Desa maupun Kecamatan;
3. Dispendukcapil perlu mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan mandiri yang mudah diakses oleh masyarakat guna memastikan data kependudukan selalu mutakhir dan valid;
4. Meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan jemput bola khusus bagi penduduk rentan. Program ini harus dilakukan secara terpadu dengan Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan untuk memastikan setiap

warga negara di Kabupaten Grobogan mendapatkan hak akses layanan publik melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Catatan :

1. Masih adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes di beberapa desa serta perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa agar lebih selaras dengan prioritas daerah (penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem);
2. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah terbentuk namun belum beroperasi secara maksimal atau belum memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa. Kurangnya inovasi dalam pemilihan unit usaha menjadi kendala utama;
3. Peran lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, dan Karang Taruna dalam perencanaan partisipatif (Musrenbangdes) masih perlu dioptimalkan agar aspirasi masyarakat bawah lebih terakomodasi;
4. Masih terdapat beberapa kantor desa yang kondisi fisiknya kurang representatif untuk memberikan pelayanan publik yang prima bagi Masyarakat.

Rekomendasi :

1. Meningkatkan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif bagi perangkat desa mengenai tata kelola keuangan desa. Perlu dipastikan bahwa alokasi Dana Desa benar-benar difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar-dusun;
2. Mendorong revitalisasi BUMDes dengan memberikan pelatihan manajemen usaha dan pemetaan potensi pasar. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kemitraan antara BUMDes dengan sektor swasta atau pasar modern untuk memperluas jaringan pemasaran produk unggulan desa;
3. Memberikan penguatan kapasitas bagi pengurus LKD melalui pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasian masyarakat. Selain itu, perlu adanya apresiasi atau stimulan bagi LKD yang aktif dalam menggerakkan gotong royong dan swadaya Masyarakat;
4. Melanjutkan program bantuan keuangan untuk rehabilitasi kantor desa secara bertahap dengan tetap mengedepankan skala prioritas pada desa dengan kondisi kerusakan yang mendesak.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Catatan :

1. Program Pengendalian Penduduk

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Pencatatan dan Pengumpulan Data belum fixed
- b. Pengolahan Data dan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB / Petugas Lapangan KB
- b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan

Rekomendasi :

1. Program Pengendalian Penduduk

- a. Dalam lingkungan masyarakat terutama di daerah, untuk penyuluh lapangan diberikan fasilitas dan juga ditingkatkan kemampuan komunikasinya agar program yang dibawa sampai kepada masyarakat secara maksimal.
- b. Pencatatan dan pengumpulan data harus fixed, dan dibutuhkan metode baru, jika diperlukan dengan sistem digitalisasi agar data cepat terdistribusi.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Penyuluh lapangan dipilih yang berintegritas yang melaksanakan tugasnya dengan maksimal
- b. Pengendalian dan juga Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan diberikan kepada pihak- pihak terkait. Dan juga juga diberikan sosialisasi terkait vasektomi, agar yang melaksanakan KB tidak hanya pihak wanita. Sehingga program KB ini bisa berjalan lancar dan target tercapai.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

Catatan :

- 1) Penerangan jalan banyak yang padam, kurang perawatannya;
- 2) Pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan belum termanagement baik.

Rekomendasi :

- 1) Memprioritaskan pemasangan lampu jalan di ruas-ruas strategis yang sering dilalui masyarakat (terutama di jantung kota dan sekitar pabrik / industri di pinggir jalan Raya), dan meningkatkan

monitoring terhadap penerangan jalan yang ada. Hal ini untuk menekan potensi tindak-tindak kriminal dan laka lantas yang sering terjadi;

- 2) Kebijakan penataan parkir perlu dibuat, karena berkaitan dengan PAD yang diperoleh dari Dishub. meliputi penerapan parkir non-tunai (e-parking) atau QRIS pada tempat-tempat strategis seperti di lingkungan Rumah Sakit dan Pasar Swalayan.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Catatan :

- 1) Server untuk komunikasi public dan aplikasinya pengelolaannya belum maksimal, sehingga Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet sering terkendala;
- 2) Banyak penyedia jasa internet kurang pengawasan, khususnya dalam memasang jaringan kabel, sehingga banyak keluhan masyarakat;
- 3) Sistem Komunikasi Bencana perlu dibangun untuk sistem peringatan dini seluruh masyarakat.

Rekomendasi :

- 1) Meningkatkan kapasitas server guna kelancaran akses aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah;
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan memerintahkan Dinas Kominfo berkordinasi dengan instansi terkait (Dinas PUPR atau yang lain) dalam hal penataan usaha internet oleh pihak ketiga (swasta);
- 3) Membangun dan mengembangkan sistem komunikasi bencana yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Catatan :

- 1) Kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari dinas untuk usaha kecil dan menengah terutama dalam penerbitan NIB dan sertifikasi (halal dan PIRT);
- 2) Pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam masih rendah sehingga beberapa masyarakat masih terjebak dalam hutang dengan bunga yang tinggi dan kredit macet;
- 3) Kurangnya support dinas ke UMKM terkait pemodalan, pelatihan, dan perlengkapan usaha.

Rekomendasi :

- 1) Perlunya penambahan kegiatan untuk kemudahan pelaku usaha dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal dan pendampingan dari OPD terkait;
- 2) Perlunya pengawasan yang ketat terkait koperasi simpan pinjam, dan adanya kesamaan penerapan suku bunga sehingga memudahkan dan tidak memberatkan konsumen;
- 3) Perlunya penambahan kegiatan untuk sosialisasi dan pelatihan ke pelaku UMKM dan bantuan permodalan serta pembinaan dan bimbingan agar pelaku UMKM dapat berjalan di atas kakinya sendiri.
- 4) Sinkronisasi tentang rencana kegiatan KDKMP yg telah menyerap dana desa lebih dari 60 % agar program tsb bisa berjalan

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Catatan :

- 1) Meskipun realisasi investasi menunjukkan tren positif, persebaran investasi masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki akses infrastruktur lebih matang. Potensi investasi di wilayah pinggiran belum tergarap secara maksimal;
- 2) Masih ditemukan kendala teknis bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengoperasikan sistem *Online Single Submission* (OSS) Risk Based Approach, serta adanya keterlambatan dalam proses verifikasi persyaratan dasar (seperti persetujuan bangunan gedung dan lingkungan) di tingkat OPD teknis;
- 3) Perlunya penyesuaian beberapa regulasi daerah terkait insentif dan kemudahan penanaman modal agar selaras dengan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat (UU Cipta Kerja).

Rekomendasi :

- 1) Perlu menyusun *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang memetakan potensi spesifik di setiap kecamatan. Perlu adanya promosi investasi yang lebih agresif untuk menarik minat investor ke sektor non-manufaktur, seperti pariwisata dan pengolahan hasil pertanian;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bantuan pengisian OSS bagi pelaku UMKM hingga ke tingkat desa. Selain itu, perlu penguatan koordinasi tim teknis antar-OPD agar proses verifikasi pemenuhan komitmen perizinan dapat diselesaikan lebih cepat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);

- 3) Segera melakukan tinjauan atau revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal untuk menyisipkan klausul pemberian insentif pajak daerah atau kemudahan non-fiskal bagi investor yang berkomitmen memberdayakan potensi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 4) Meningkatkan upaya promosi dan branding daerah sebagai daya tarik kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Grobogan.

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Catatan :

- 1) Kurangnya partisipasi dan motivasi pemuda dalam meningkatkan prestasi dalam olah raga;
- 2) Perlu meningkatkan Penyelenggaraan Turnamen Olah Raga Tingkat Daerah;
- 3) Perlu meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kepada Organisasi Olah Raga.

Rekomendasi :

- 1) Peningkatan prestasi sangat penting, dan juga harus diberikan peluang yang luas. Kerja sama Disporabudpar dan juga dengan Dinas Pendidikan, harus erat. Dan koordinasi harus intens untuk meningkatkan prestasi;
- 2) Penyelenggaraan turnamen olah raga ditingkat Daerah diperbanyak;
- 3) Pemerintah harus semakin yakin dengan anak didik dan atlit yang di hasilkan daerah, sehingga tidak ada / diperkecil untuk ambil atlit dari luar daerah. Kompetensi pelatih yang bagus, dan juga diadakannya pelatihan pelatih profesional;
- 4) KONI harus berperan aktif dalam penjangkaran atlit yang berkualitas.

14. URUSAN STATISTIK

Catatan :

- 1) Update data Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan daerah belum optimal;
- 2) Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam evaluasi Pembangunan daerah tidak segera menyesuaikan data yang sebenarnya (kurang update).

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Kominfo melakukan update data sesuai kebutuhan kedepan;

- 2) Update data agar rutin dilakukan guna memudahkan dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan Pembangunan Daerah.

15. URUSAN PERSANDIAN

Catatan :

- 1) Salah satu permasalahan utama dalam urusan persandian di Kabupaten Grobogan adalah kerentanan keamanan data pada sistem layanan pemerintah daerah;
- 2) Belum Meratanya Penerapan Sistem Enkripsi pada seluruh aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sehingga berpotensi mengalami kebocoran informasi;
- 3) Permasalahan persandian juga terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang persandian.

Rekomendasi :

- 1) Perlu memprioritaskan implementasi sistem enkripsi secara menyeluruh pada semua aplikasi layanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 2) Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Persandian;
- 3) Pembentukan Tim Respons Insiden Keamanan Siber: Kabupaten Grobogan perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk merespons insiden keamanan siber. Tim ini bertugas untuk memantau, mendeteksi, dan menanggapi ancaman keamanan informasi secara real-time. Dengan adanya tim khusus ini, respons terhadap potensi kebocoran data atau serangan siber dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Catatan :

- 1) Perlu terus meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional, sekaligus pembinaan Lembaga Adat yang ada;
- 2) Meningkatkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 3) Tingkatkan pengelolaan museum agar menarik minat masyarakat.

Rekomendasi :

- 1) Pelestarian kesenian tradisional ini harus sangat diperhatikan, dimulai dari anak-anak SD dalam muatan lokal diberikan materi yang ringan tapi memenuhi standar pemahaman dasar, Kesenian tradisional semakin tidak diperhatikan jika generasi muda tidak ada

yang peduli, sehingga bisa punah. Lembaga adat diberikan apresiasi khusus dari pemerintah sebagai bentuk perhatian dan juga sebagai sarana pemerintah dalam melestarikan budaya daerah;

- 2) Cagar budaya yang sudah ditetapkan, diinventarisir ulang untuk menghindari kerusakan dan juga kehilangan. Yang mana cagar budaya bisa dijadikan ikon Kabupaten Grobogan, yang bisa menjadi wajah Kabupaten Grobogan;
- 3) Sosialisasi dan edukasi serta Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap permuseuman harus ditambah, karena masyarakat Kabupaten Grobogan belum familier terhadap museum yang ada di Kabupaten Grobogan. Permuseuman bisa dijadikan salah satu andalan untuk sector pariwisata.

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Catatan :

- 1) Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
- 2) Meningkatkan Pembudayaan Gemar membaca.

Rekomendasi :

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Daerah perlu ditingkatkan dengan menambah dan melengkapi bacaan serta meningkatkan fasilitas dan kenyamanan ruang perpustakaan;
- 2) Pemkab Grobogan perlu mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi perpustakaan sekolah. Perlu juga dibuat roadmap jangka panjang untuk memastikan seluruh sekolah memiliki perpustakaan yang sesuai standar, selain itu, perlu juga adanya pendampingan untuk pengelola perpustakaan desa;
- 3) Pembudayaan Gemar membaca, lokasi – lokasi strategis dibuatkan pojok baca bagi masyarakat umum, Event – event di Kabupaten Grobogan juga ada stand baca (pojok baca) tempat dibuat senyaman mungkin dan orang yang masuk harus yang berniat membaca.

18. URUSAN KEARSIPAN

Catatan :

1. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
2. Program Perizinan dan Penggunaan Arsip.

Rekomendasi :

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menyediakan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, untuk keamanan dan akses terhadap arsip harus ditingkatkan. Karena Arsip Kabupaten

mencangkup segala hal yang ada di Kabupaten Grobogan. Penyimpanan Arsip Konvensional yang dilakukan, harus dibuatkan program khusus untuk bisa di arsipkan secara digital;

2. Perizinan akses penggunaan arsip, harus melalui system otoritas khusus yang independent, sehingga tidak dapat dintervensi pihak manapun. Pertanggungjawaban perizinan dan penggunaan arsip bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sehingga apa bila ada penyalahgunaan arsip, bisa lebih mudah dalam penanganannya.

C. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Catatan :

- 1) Permasalahan yang harus dihadapi kedepan adalah tentang total produksi perikanan (tangkap dan budidaya);
- 2) Kurangnya pemantauan OPD terhadap penyakit yang menyerang ternak;
- 3) Kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap petani ternak.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan meningkatkan pembinaan dan pemberian bantuan kepada petani ternak ikan serta membantu permodalannya;
- 2) Pemberian vaksin untuk mencegah KLB terhadap penyakit tertentu yang dapat menyerang ternak;
- 3) Pemberian sarana dan prasarana yang dapat mendukung kesejahteraan petani ternak.

2. URUSAN PARIWISATA

Catatan :

- 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata;
- 2) Peningkatan Pemasaran Wisata Baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- 3) Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rekomendasi :

- 1) DISPORABUDPAR duduk dalam satu agenda dengan lintas sector untuk memfokuskan dalam pengembangan pariwisata, dimana dalam agenda tersebut melahirkan kesepakatan dalam pengelolaan pariwisata. Salah Satu contoh dalam pengelolaan wisata budaya,

wisata religi maupun wisata alam. Masyarakat sekitar diberikan kepercayaan dan diikutsertakan dalam pengelolaan Pariwisata, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pemberdayaan kelompok masyarakat (pemuda) dalam mengelola destinasi wisata, agar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar;

- 2) Menggandeng Influencer lokal yang pengikutnya tertentu untuk menarik minat wisatawan, dan promosi melalui berbagai platform media sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan;
- 3) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa dilakukan dengan salah satunya bekerjasama dengan EO lokal maupun luar daerah untuk bisa membuat event di lokasi wisata.

3. URUSAN PERTANIAN

Catatan :

- 1) Rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian;
- 2) Banyaknya Sistem Irigasi terkendala;
- 3) Ketersediaan pupuk yang masih dilematis;
- 4) Pemenuhan terhadap Alsintan masih belum merata, dan beberapa tempat yang mendapatkan Alinstan belum dapat dioptimalkan penggunaannya karena keterbatasan SDM dan pengetahuan dari petani;
- 5) Petani masih sulit untuk mendapatkan benih tanaman dengan harga yang terjangkau;
- 6) Rendahnya harga jual komoditas pertanian pada saat panen raya.

Rekomendasi :

- 1) Pengembangan program pertanian modern berbasis teknologi untuk menarik minat generasi muda, dan pelatihan kewirausahaan pertanian serta akses permodalan bagi pemuda desa;
- 2) Pembangunan saluran irigasi tersier sesuai kebutuhan petani, dan penanganan sedimentasi pada saluran irigasi secara berkala;
- 3) Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan penyalurannya sehingga pupuk bersubsidi dapat sampai ke tingkat petani tepat sasaran;
- 4) Pemberian bantuan Alsintan sesuai dengan kebutuhan dan merata di semua kecamatan agar petani dapat menggunakan Alsintan sesuai kebutuhan dan sosialisasi penggunaan Alsintan yang tepat;

- 5) Perlunya pengoperasian gudang – gudang pangan yang ada di Kabupaten Grobogan sehingga dapat membantu menstabilkan harga pada saat panen raya.

4. URUSAN PERINDUSTRIAN

Catatan :

- 1) Kurangnya ketersediaan bahan baku lokal untuk keperluan industri dalam daerah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industry;
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia yang cekatan dan terampil untuk pemenuhan kebutuhan karyawan di bidang industri;
- 3) Membanjirnya produk – produk impor dengan harga yang lebih murah dengan kualitas sama.

Rekomendasi :

- 1) Perlunya pendampingan dan pelatihan serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar dapat menghasilkan bahan baku sesuai dengan standar industry di Kabupaten Grobogan;
- 2) Perlu adanya pelatihan untuk mendukung kualitas SDM yang ada di Kabupaten Grobogan dan informasi lapangan pekerjaan sehingga pelaku kerja di Kabupaten Grobogan tidak perlu mencari pekerjaan di tempat lain;
- 3) Peningkatan produksi dalam negeri yang bisa bersaing dan sesuai dengan pangsa pasar di Kabupaten Grobogan.

5. URUSAN PERDAGANGAN

Catatan :

- 1) Pasar tradisional banyak yang sepi karena pembeli lebih beralih ke pembelian dengan sistem online;
- 2) Beberapa komoditas perdagangan menjadi langka dan mengalami kenaikan harga di saat event – event tertentu;
- 3) Minat beli masyarakat cenderung turun karena beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, sehingga konsumen mengurangi jumlah pembelian.

Rekomendasi :

- 1) Memberikan pelatihan kepada pedagang tradisional tentang jual beli online agar dapat bersaing dengan toko online;
- 2) Penambahan kegiatan pasar murah dan operasi pasar agar dapat menekan harga jual yang tinggi pada saat tertentu;

- 3) Memberikan edukasi tentang bahan makanan pengganti yang dapat dikonsumsi agar dapat mengurangi pengeluaran belanja yang cukup besar.

4. URUSAN TRANSMIGRASI

Catatan :

- 1) Permasalahan urusan transmigrasi adalah pentingnya masyarakat Grobogan yang sudah melakukan transmigrasi di wilayah lain dipastikan hidup layak.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disnakertrans meningkatkan pembekalan ketrampilan kepada Masyarakat Grobogan yang akan transmigrasi;

D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

1. PERENCANAAN

Catatan :

- 1) Masih banyaknya program dan kegiatan yang bersifat rutinitas, dan kurang berorientasi ke outcome;
- 2) Investor sering mengalami hambatan dalam pengadaan lahan karena ketidaksesuaian lahan yang diinginkan dengan peruntukannya. Permasalahan terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang kurang sesuai lagi dengan kondisi, terutama berkaitan dengan kebutuhan lahan hijau dengan kawasan peruntukan industri menjadi hambatan.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus lebih cermat dalam mengevaluasi perencanaan program dan kegiatan, agar tujuan dalam RPJMD dapat terwujud secara lebih efektif dan efisien;
- 2) Pencapaian rencana perubahan detail tata ruang Kab. Grobogan perlu dimaksimalkan.

2. KEUANGAN

Catatan :

- 1) PAD perlu terus ditingkatkan;
- 2) Pengelolaan asset perlu terus dimaksimalkan.

Rekomendasi :

- 1) Melakukan penguatan tata kelola keuangan dan asset daerah;

- 2) Meningkatkan Intensifikasi terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah.

3. KEPEGAWAIAN

Catatan :

1. Masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan riil pegawai dengan formasi yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis spesifik dan tenaga pendidik/kesehatan. Selain itu, proses transisi tenaga non-ASN (honorer) menjadi PPPK masih memerlukan pengawalan regulasi yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari;
2. Penerapan sistem merit dalam manajemen karier ASN sudah berjalan, namun instrumen penilaian kinerja individu (E-Kinerja) perlu terus disempurnakan agar lebih objektif dan selaras dengan capaian kinerja organisasi (Cascading Kinerja);
3. Masih ditemukannya kasus pelanggaran disiplin pegawai yang dapat mempengaruhi citra birokrasi, serta perlunya peninjauan terhadap skema kesejahteraan pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan beban kerja.

Rekomendasi :

1. BKPSDM perlu melakukan pemutakhiran Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara komprehensif. Pemerintah daerah disarankan untuk terus aktif melakukan koordinasi dan lobi ke Pemerintah Pusat guna mendapatkan kuota formasi CASN/PPPK yang sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah;
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi manajemen kinerja dan memastikan pemberian reward serta punishment dilakukan secara transparan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang terukur. BKPP harus memastikan setiap pejabat penilai memahami tata cara pengisian dan validasi target kinerja bawahan secara akurat;
3. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan mental aparatur secara preventif melalui sosialisasi kode etik secara rutin. Dalam hal penegakan disiplin, Tim Penegak Disiplin harus bertindak tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS guna memberikan efek jera dan menjaga integritas pelayanan public.

4. PENGAWASAN

Catatan :

1. Masih adanya temuan berulang terkait administrasi keuangan dan aset di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemerintah Desa. Selain itu, kecepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal (BPK) di beberapa unit kerja masih perlu ditingkatkan agar tidak menjadi beban temuan di tahun berikutnya;
2. Kuantitas dan kualitas auditor serta Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya cakupan pengawasan yang meliputi seluruh OPD, sekolah, hingga 273 desa di Kabupaten Grobogan;
3. Capaian indikator MCP KPK pada beberapa intervensi (seperti manajemen aset daerah dan pengadaan barang/jasa) masih perlu penguatan dokumen pendukung dan sinkronisasi data antar-instansi agar mencapai nilai yang maksimal;
4. Fluktuasi jumlah pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih menyentuh level akar rumput dan preventif.

Rekomendasi :

1. Inspektorat Daerah harus meningkatkan intensitas pendampingan dan asistensi (*probit audit*) sejak tahap perencanaan anggaran untuk meminimalisir risiko penyimpangan. Perlu adanya ketegasan dalam pemantauan TLHP dengan memberikan peringatan tertulis kepada kepala OPD yang lambat dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
2. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan penambahan personil fungsional pengawasan guna mencapai tingkat kapabilitas APIP level yang lebih tinggi sesuai standar nasional;
3. Memperkuat peran Inspektorat sebagai koordinator pemenuhan data MCP KPK dengan melakukan rapat koordinasi rutin setiap triwulan bersama OPD terkait. Fokus pada pengamanan aset daerah berupa sertifikasi tanah milik pemda harus menjadi prioritas pengawasan tahun mendatang;
4. Mengoptimalkan fungsi Inspektorat Pembantu (Irban) Wilayah untuk melakukan audit kinerja dan audit ketaatan secara berkala ke desa-desa. Selain itu, sistem penanganan pengaduan masyarakat (Whistleblowing System) harus lebih disosialisasikan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan pembangunan dengan jaminan kerahasiaan identitas.

5. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Catatan :

1. Peran koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis masih perlu diperkuat untuk memastikan program lintas sektoral (seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem) berjalan sinkron. Selain itu, kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat melalui kanal digital perlu ditingkatkan;
2. Masih perlunya optimalisasi fasilitasi terhadap fungsi-fungsi DPRD (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) agar produk hukum daerah yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat Grobogan;
3. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan publik di beberapa kantor kecamatan yang menghambat kenyamanan pelayanan warga;
4. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam administrasi perkantoran belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh di semua lini administrasi pemerintahan daerah.

Rekomendasi :

1. Sekretariat Daerah selaku instansi pembina harus meningkatkan fungsi pengendalian dan sinkronisasi kebijakan di tingkat asisten dan bagian. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi agar lebih cepat, transparan, dan berbasis digital;
2. Meningkatkan kualitas pendampingan teknis dan penyediaan data/informasi yang akurat bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Sekretariat DPRD juga disarankan memperkuat fungsi humas dan protokol untuk menjembatani komunikasi aspirasi masyarakat kepada dewan secara lebih efektif;
3. Pemerintah daerah perlu memberikan alokasi anggaran yang proporsional untuk rehabilitasi fasilitas pelayanan di kecamatan guna mendukung terwujudnya pelayanan administrasi yang prima;
4. Perlu dilakukan pemutakhiran peta proses bisnis di setiap unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan mempermudah evaluasi kinerja organisasi.

Demikian catatan–catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2025, untuk perbaikan dan

penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun mendatang. Perbaikan, peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, serta penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati Grobogan di tahun yang akan datang. Untuk itu kami berharap kepada Bupati Grobogan untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.



KETUA DPRD KABUPATEN GROBOGAN,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

LUSIA INDAH ARTANI



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS III TAHUN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 9 / PANSUS III - 2026 / IV / 2026 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 telah diterima dan disetujui, sehingga Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan perlu dibubarkan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membubarkan Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18 / 12 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam membahas dan menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Grobogan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,



LUSIA INDAH ARTANI

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.